

PEREMPUAN DALAM GERAKAN KEBANGSAAN

SEJARAH gerakan kebangsaan di Indonesia tidak hanya menjadi domain kaum laki-laki, tapi kaum perempuan juga memberikan warna yang indah dan narasi yang kuat.

Sebagai Ibu Bangsa, kaum perempuan telah mengambil posisi strategis, dan buku ini berusaha mengurai benang-merah gerakan kebangsaan di Tanah Air melalui peran kaum perempuan.

Cita-cita kaum perempuan Indonesia untuk menjadi cerdas dan modern juga selalu dihadapkan oleh banyak kendala, tapi sosok Kartini, Dewi Sartika, dan nama-nama besar kaum perempuan lain yang telah menjadi pengharum perjuangan kaum perempuan di Indonesia akan senantiasa menjadi acuan sejarah yang akan membangun karakter mandiri di dalam diri perempuan Indonesia.

Konsep Kartini tentang perempuan sebagai sumber peradaban dan pendidik pertama manusia perlu ditetapkan sebagai kesepakatan nasional agar arus budaya globalisasi yang mendikotomikan laki-laki dan perempuan tidak didukung untuk tegak di bumi Nusantara. Sebaliknya, para perempuan pengemban peradaban bangsa perlu dicerdaskan agar kekuatiran dan keprihatinan Kartini yang mewakili semua perempuan di bumi Nusantara tentang degradasi moral bangsa ini tidak terwujud di persada bumi Pertiwi.

Diskursus mengenai perempuan dalam penulisan sejarah selama ini sering terabaikan. Hal ini tampak, misalnya, dari tidak banyaknya karya sejarah yang membicarakan perempuan, baik sebagai karya sendiri maupun sebagian dari karya sejarah keseluruhan.

Akibatnya, hingga saat ini hanya terdapat gambaran yang serba sedikit mengenai rekam jejak perempuan pada masa lalu. Padahal, kajian dan penulisan sejarah perempuan di Indonesia dapat masuk ke dalam hampir semua tema sejarah, baik sejarah sosial, politik, ekonomi maupun budaya, tergantung pada bagaimana permasalahan perempuan dilihat dan dengan permasalahan apa perempuan dibicarakan.

Buku bertajuk Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan ini menjadi buku penting dan layak menjadi referensi utama baik para pengamat, akademisi, mahasiswa serta para pengambil keputusan di pemerintahan.

GKR. Hemas
Anggota DPD RI



Triana Wulandari

Triana Wulandari

PEREMPUAN DALAM GERAKAN KEBANGSAAN

PEREMPUAN DALAM GERAKAN KEBANGSAAN

Pengantar: Sri Margana
Sekapur Sirih: Hillmar Farid

PEREMPUAN DALAM GERAKAN KEBANGSAAN

Triana Wulandari

PEREMPUAN
DALAM
GERAKAN KEBANGSAAN

Sekapur Sirih:
Hilmar Farid

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan
Triana Wulandari

Pengantar : Sri Margana
Prakata Penulis : Triana Wulandari
Sekapur Sirih : Hilmar Farid
Desain Sampul : Ruhtata
Tata-Letak : Tim Redaksi Penerbit

Cetakan I: November 2017

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wulandari, Triana.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan.

xxxii + 312 hlm.:15,5 x 23 cm
ISBN :978-602-72017-7-4

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Sekapur Sirih

Oleh: Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

BERBICARA tentang gerakan kaum perempuan, di ujung dunia mana pun, selalu menjadi tema perbincangan yang menarik dan hangat. Bukan saja karena sisi “perempuan”-nya, melainkan lebih karena isu-isu yang diusungnya senantiasa menjadi titik perbincangan menarik di tengah dunia yang didominasi kuasa lelaki ini.

Di Indonesia sendiri gerakan kaum perempuan sudah dimulai sejak awal, sejak jaman kolonialisme, bahkan jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Nama-nama seperti Ken Dedes, Tribuana Tungadewi, Roro Jonggrang, dan lain-lain sudah cukup populer sebagai perempuan legendaris yang menurut beberapa tafsir sejarah—meski perlu dikaji lebih serius—sedikit banyak dapat terhitung sebagai pergerakan perempuan kala itu. Di jaman modern, gerakan kaum perempuan menjadi semakin terorganisir, terstruktur, dan massif, mulai dari era Kartini hingga era reformasi terkini.

Sudah banyak hasil yang terlihat dan bisa dinikmati dari gerakan perempuan berabad-abad lamanya itu. Namun demikian, dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, peran kaum perempuan kerap diabaikan, bahkan dipandang sebelah mata. Umumnya sejarah memandang kaum lelaki lebih berperan dan bernilai ketimbang perempuan. Inilah sejarah yang bias, yang banyak kita jumpai dalam

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

catatan-catatan historiografi nasional. Padahal peran mereka sangatlah besar, baik sebagai penunjang di balik layar bagi para pejuang yang didominasi laki-laki maupun sebagai *avant garde* langsung berhadapan dengan penjajah.

Memang, gerakan perempuan yang tersisihkan itu tidak murni sebagai kesalahan sejarah. Ia juga dipengaruhi oleh kaum perempuan sendiri yang tidak atau belum menyempatkan diri untuk menulis sejarah mereka. Hadirnya buku ini dapat dipandang sebagai ikhtiar menghadirkan peran perempuan dalam sejarah kebangsaan dari perspektif penulis perempuan. Buku ini memotret hampir seluruh gerakan perempuan, baik dari sisi politik, sosial, keagamaan, rumah tangga maupun sisi yang lainnya, khususnya pasca reformasi.

Atas terbitnya buku penting ini, saya perlu mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis, mudah-mudahan usahanya mendapatkan apresiasi yang sepantasnya baik dari masyarakat umum maupun dari para pemangku kebijakan di pemerintahan.

Jakarta, Februari 2017

Pengantar

Oleh: Sri Margana

Universitas Gadjah Mada

Buku ini merupakan karya Triana Wulandari, Direktur Sejarah di Direktorat jendral Kebudayaan Kementerian pendidikan kebudayaan Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2017. Ilustrasi perempuan bersanggul dan berkebaya yang terpampang dalam sampul merupakan gambaran yang berusaha ditampilkan oleh penulis dalam bukunya, sosok perempuan Indonesia yang menjadi bagian dari pergerakan demi kemajuan bangsa, baik dalam bidang ekonomi, social, politik, agama dan moral. Ilustrasi tersebut bahkan menjadi satu-satunya gambar yang terdapat dalam buku dengan tebal 320 halaman ini.

Menurut Ruth Indiah Rahayu, Sejarah Perempuan sejatinya menghadirkan *tutur perempuan* yang menyuarakan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi, baik dalam ranah domestic maupun public.¹ Dalam hal ini, pengetahuan dan ide yang lahir dari rahim perempuan dapat dilihat sebagai hal yang perlu dan

¹Ruth Indiah Rahayu, “Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutur Perempuan”, makalah dalam Workshop *Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif*, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Hotel Yogya Plaza, Yogyakarta, 2-4 Juli 2007, hlm. 13.

penting untuk ditulis dan diketahui. Untuk membedah pengalaman tersebut, perspektif gender harus digunakan. Hal ini bertujuan untuk membongkar akar diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan perlakuan yang mengobjektifikasi mereka, misalnya tentang bagaimana ilmu pengetahuan dimonopoli oleh laki-laki bangsawan, kemunculan dan perkembangan pembagian peran gender terbentuk di Indonesia, hingga keberagaman ide dari perempuan-perempuan Indonesia dalam gerakan kebangsaan.

Apa yang dimulai oleh penulis dalam buku ini adalah salah satu langkah untuk menuju Historiografi Indonesia yang tidak lagi androsentris. Meskipun tidak terlalu memberikan gambaran yang mendetail, ia telah berusaha untuk memetakan pengalaman perempuan Indonesia secara kronologis dalam empat bagian. Pada Bagian I, ia memulainya dengan mendefinisikan asal kata “perempuan”, diikuti peran-peran yang melekat di dalamnya. Pada Bagian II hingga IV, ia membagi pengalaman perempuan ke dalam periodisasi yang mengikuti perkembangan politik, mulai dari perempuan pada masa kolonial hingga kemerdekaan. Hal yang kemudian tidak luput dari penulis ialah bagaimana ia kemudian menghadirkan peran perempuan dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Terminologi “perempuan” lebih dipilih oleh penulis daripada “wanita”. Pilihan tersebut menjadi hal yang cukup menarik, mengingat dua terminologi tersebut seringkali diperdebatkan dalam tulisan yang menghadirkan pengalaman perempuan, terutama di kalangan feminis. Kata “wanita” mendapat stigma, sebuah akronim dari “wani ditata” atau “berani ditata” yang bermakna pasif.² Selain itu, terminologi “wanita”

² Ayu Utami, seorang penulis dan feminis Indonesia tidak menyetujui hal tersebut. Menurutnya, akronim “wanita” menjadi “wani ditata” tidak jelas

dianggap sebagai salah satu terinologi yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam mendomestifikasi perempuan dalam program-programnya, seperti Dharma Wanita. Hal ini lah yang kemudian mendorong beberapa penulis lebih condong menggunakan terminologi “perempuan” sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan budaya yang patriarki.³

Penulis sendiri melihat asal kata “perempuan” dari *empu* atau induk, diikuti oleh fungsi biologisnya: sebagai penghasil keturunan. Menurutnya, peran fungsi yang dimiliki oleh perempuan memang berbeda dengan peran fungsi laki-laki. Fungsi tersebut membuat masing-masing unggul di bidangnya. Hal itulah yang kemudian membuat mereka harus saling bekerja sama untuk dapat saling melengkapi. Dalam hal ini, penulis sedang berbicara tentang konstruksi yang diciptakan masyarakat: membagi peran gender antara perempuan dan laki-laki, sebagai ibu dan ayah, dalam ranah domestik dan publik. Sayangnya, pembagian tersebut terkesan muncul tiba-tiba tanpa adanya penjelasan mengapa dan bagaimana pembagian tersebut mengakar di Indonesia.

Jika ditelusuri, pembagian peran gender di Indonesia melewati masa yang sangat panjang dan berbeda di setiap

asal usulnya. Menurutnya, bahasa merupakan permainan yang bersifat sangat politis dan memilih “perempuan” ketimbang “wanita” dalam upaya melawan patriarki merupakan cara yang kurang tepat, karena menjebak penulis ke dalam konstruksi yang dibuat oleh pemerintah atau masyarakat patriarki itu sendiri. Menurut Ayu, penggunaan kata “wanita” maupun “perempuan” tidak ada bedanya, yang harus dilakukan ialah dengan mengatasi stigma; bukan menghilangkan dia yang diberi stigma itu. Ayu Utami, “Herstory dan Perjuangan Emansipasi”, dalam *Majalah Tempo*, 15 Desember 2014. <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2014/12/15/herstory-dan-perjuangan-emansipasi/>, diakses pada 12 Desember, 2016, pukul 19.20 WIB.

³ Mariana Amirudin, “Revolusi Bahasa dalam Politik Gender”, dalam *Majalah Tempo*, 12 Januari 2015. <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2015/01/12/revolusi-bahasa-dalam->

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

tempatnnya. Di Jawa misalnya, Peter Carey dan Vincent Houben mencoba menganalisis tentang perubahan peran perempuan ningrat Jawa dari abad ke XVIII hingga abad XIX. Menurut mereka, sebelum masyarakat Eropa dan pengaruhnya datang ke Hindia Belanda, peran perempuan ningrat sangat bergaam, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, kemiliteran hingga supranatural. Peran-peran yang dimiliki oleh perempuan ningrat kemudian direduksi pasca perang Jawa, sebagai penjaga budaya dan pencetak keturunan (Ranah domestik), sedangkan hal lainnya menjadi tanggung jawab dari laki-laki ningrat.⁴ Pembagian peran tersebut semakin menguat pada abad ke 19, didorong oleh pemikiran para orang Eropa kelas menengah yang datang ke Hindia Belanda.⁵ Konstruksi peran gender tersebut kemudian direproduksi pada abad ke XX oleh kaum pergerakan. Dalam perguruan Tamasiswa misalnya, Ki dan Nyi Hadjar Dewantara menerapkan konsep keselarasan melalui pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan sebagai *Lajer Keturunan* atau tiang keturunan, dicitrakan sebagai sosok yang kuat dalam segala-galannya. Perempuan berperan sebagai *pemangku keturunan*, tempat tumbuhnya manusia. Hal tersebut diikuti oleh citra yang dilekatkan, yaitu sebagai sosok yang lembut dan memiliki kesucian dalam dirinya.⁶

[politik-gender/#more-3192](#), diakses pada 12 Desember, 2016, pukul 19.18 WIB.

⁴ Peter Carey & Vincent Houben, "Spirited Srikandhis and Sly Sumbaras: The Sosial, political and economic role of women at the Central Javanese courts in the 18th and early 19th Century", dalam Elisabeth Locher-ScholtendanAnkeNiehof, *Indonesian Women in Focus*, (Leiden: KITLV, 1987), hlm. 32-33.

⁵ Elsbeth Locher Scholten, " Colonial Ambivalencies: European Attitudes Towards the Javanese Household (1900-1942)", dalam Juliette Koning, etc., *Women and Household in Indonesiam Cultural Notions and Social Practices*, (Surrey: Curzon Press, 2000), hlm. 39.

⁶Pidato Nyi Hadjar Dewantara dalam Kongres Perempuan Indonesia I, 1928 dengan judul "Adab Perempuan", dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia &

Melompatnya penjelasan tentang proses pembagian peran gender di Indonesia membuat penulis kemudian kebingungan dalam menarasikan pengalaman perempuan pada masa pergerakan. Di satu sisi, penulis melihat ketidakadilan yang dialami oleh para perempuan sebagai korban kolonialisme dan patriarki, namun di sisi lain, ia masih terjebak pada pergulatan batinnya tentang peran perempuan dalam ranah domestik yang selama ini ia pahami sebagai sebuah kodrat yang harus dijalankan oleh perempuan. Hal yang lebih disayangkan ialah saat ia kemudian merefleksikannya pada pengalaman perempuan di abad ke XXI. Ia masih memandang perjuangan perempuan dalam bidang politik dan ekonomi bukan untuk mencapai kesetaraan, namun semata-mata cara untuk mendominasi laki-laki. Ia pun terkesan Jawasentris, di mana dalam tulisannya ia lebih banyak menarasikan bagaimana perempuan harus mampu memenuhi kodratnya dengan menyertakan ajaran-ajaran Jawa, padahal tidak semua perempuan yang tergabung dalam pergerakan kebangsaan berasal dari Jawa.

“Perempuan dalam abad XXI, bukanlah saatnya lagi menjadi dominasi pria di semua lini kehidupan, namun sudah selayaknya menjadi *partner* mitra dalam mengarungi bahtera kehidupan dengan saling pengertian, membantu, dan *sharing* dalam menyelesaikan tugas bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, maupun kehidupan global”.⁷

Selain perspektif gender yang masih kurang dimunculkan, tulisan ini pun masih belum banyak mengeksplor realitas yang

KITLV Jakarta, 2007), hlm. 244.; Ki Hadjar Dewantara, “Perempuan di dalam Pertumbuhan Adab”, *Wasita*, Juli 1935, tahun I No. 6, dalam Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, *op.cit.*, hlm. 259.

dialami oleh perempuan. Jika hal ini mampu dihadirkan, maka pembaca tentu akan lebih memahami bagaimana kondisi yang dialami oleh perempuan dari masa ke masa, terutama dalam ranah domestik, ranah paling prihatin.

Di bagian selanjutnya, penulis menghadirkan tokoh-tokoh yang berasal dari kerajaan di nusantara sebagai titik awal perempuan dalam sejarah, baik yang berjuang dalam bidang politik, pendidikan, maupun ekonomi. Mereka antara lain Dewi Sima, Calon Arang, Ratu Kalinyamat, R.A.Kartini, H.R.Rasuna Said, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh tersebut hanya dideskripsikan secara singkat dengan sumber yang kurang komprehensif. Misalnya sosok Calon Arang, penulis bisa saja menggunakan sumber tradisi dari Bali atau karya-karya roman yang telah banyak merekonstruksi dan mendekonstruksi sosok Calon Arang, seperti Pramodya Ananta Toer dan Toety Herati.

Bagian II dalam buku ini dapat terbilang sedikit mengulang dari Bagian I, menghadirkan sosok-sosok perempuan dalam sejarah Indonesia. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang sedikit lebih lengkap. Ia membagi pergerakan perempuan pada masa kebangkitan nasional dalam menjadi 5 gelombang. Gelombang pertama dimulai oleh pergerakan perempuan yang dilakukan secara perorangan. Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, dan lainnya masuk dalam bagian ini. Sosok-sosok tersebut dapat dikatakan melakukan perjuangan secara langsung dalam medan perang. Pada bagian selanjutnya, ia menampilkan sosok R.A.Kartini dan Raden Dewi Sartika sebagai organisasi perempuan sebelum Boedi Oetomo dan ditengarai sebagai pendorong munculnya kekerabatan dan kesadaran nasionalisme hingga terbentuk gelombang pergerakan perempuan dalam wadah yang lebih besar atau yang disebut dengan organisasi perempuan.

⁷ lihat halaman 24.

Organisasi-organisasi perempuan merupakan bagian ke tiga dan selanjutnya, di mana organisasi tersebut dibagi menjadi tiga tahapan; muncul sebelum dan setelah Boedi Oetomo didirikan serta organisasi yang muncul pasca Kongres Perempuan Indonesia.

Konflik dan keberagaman pemikiran serta pengalaman perempuan pada masa tersebut kurang disuarakan. Keresahan yang ia ungkapkan di awal tulisan tentang beban ganda perempuan pada masa pergerakan Indonesia bisa saja dieksplor lebih jauh pada bagian ini, misalnya tentang relasi yang tidak setara dalam rumah tangga. Jika hal tersebut mampu dieksplor lebih mendalam, maka tulisan ini tidak hanya mampu menarasikan pengalaman perempuan, namun juga memberikan sebuah pijakan untuk menghasilkan kebijakan yang mendorong kemajuan bagi perempuan dan bangsa Indonesia. Pasalnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih terjadi hingga kini. Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan di ranah keluarga masih menempati angka paling tinggi, yaitu sebanyak 245.548 merupakan kekerasan yang dialami oleh istri yang berujung pada pereraian.⁸

Pengalaman perempuan pergerakan tentang diri, relasi dan perannya yang lebih personal sebagian besar dimuat dalam autobiografi, biografi, buku kumpulan pengalaman dan novel yang berlatar belakang masa pergerakan. Inggit Ganarsih, misalnya, dalam autobiografinya, *Ku Antar Ke Gerbang*, menggambarkan bagaimana ia harus mampu menemani Kusno (Soekarno). Ia menjalani peran ganda, menjadi istri dan mencari nafkah

⁸ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, Labirin Kekerasan terhadap Perempuan:

sekaligus. Ia menyadari peran tersebut harus dilakukan mengingat Kusno masih kuliah dan lebih berorientasi pada kegiatan politik daripada meniti katir untuk meraup keuntungan ekonominya. Pengabdian tersebut berhenti saat Kusno ingin menikahi Fatmawati. Inggit lebih memilih untuk bercerai daripada hidup dalam hubungan poligami.

Masih maraknya pologami dalam rumah tangga kaum pergerakan pun digambarkan dalam novel *Manusia Bebas*. Novel tersebut ditulis pada tahun 1930an oleh salah satu perempuan pergerakan, Soewarsih Djojopoespito. Novel tersebut menceritakan kisah perjalanna Sulastri dan suaminya, Soedarmo pada masa pergerakan, yang tak lain ialah kisah hidup dirinya sendiri dan suaminya, Soegondo Djojopoespito. Kritiknya terhadap poligami digambarkan saat Sulastri mengkritik bapaknya yang memiliki banyak istri. Selain itu, ia juga mengkritik para laki-laki pergerakan yang masih melihat poligami sebagai bahan lelucon.⁹

Masalah poligami pun sempat menjadi perdebatan dalam Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928. Organisasi perempuan yang bersifat agamis menolak adanya usaha untuk melawan poligami, sedangkan organisasi perempuan sekuler mengungkapkan kritik pada hal tersesebut, juga pada undang-undang perkawinan dan tafsir-tafsir agama yang mengobjektifikasi perempuan.¹⁰ Sayangnya, lagi-lagi hal tersebut luput dari pembahasan dalam buku ini dan lebih terfokus pada sejarah institusional dari PPII maupun organisasi perempuan lainnya. Perdebatan dan keberagaman pemikiran para perempuan yang

Dari *Gang Rape hingga Femicide*, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat”, Jakarta, 7 Maret 2017, hlm. 1.

⁹ Suwarsih Djojopoespito, *Manusia Bebas*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000), hlm. 91-92.

¹⁰Susan Blackburn, *op.cit.*, hlm. xxxvii.

seharusnya ditampilkan secara gamblang sebagai pembuktian majunya perempuan Indonesia dalam menganggapi realitas sosial, baik secara personal maupun dalam organisasi tak terdengar dalam tulisan ini.

Setelah Pemerintah Hindia Belanda mundur dari Negara jajahannya, Jepang mengambil alih kekuasaan di Hindia Belanda. Pada saat itulah muncul gelombang pergerakan perempuan selanjutnya. Di kondisi politik yang telah merdeka, pergerakan perempuan terus berlanjut. Pada gelombang ini gerakan tersebut dibahas dalam bagian ke III dan ke IV. Bagian ke III lebih fokus membahas gerakan perempuan yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Soekarno, yaitu masa revolusi, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pada masa ini, gerakan perempuan Indonesia sangat masif di segala bidang. Mereka hadir dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Majalah sejaman merupakan saksi bagaimana perempuan pada masa itu semakin vokal menyuarakan pendapatnya, baik secara langsung maupun melalui tulisan.

Organisasi-organisasi perempuan pun berkembang sangat progresif. Mereka menciptakan kader-kader muda yang berjuang untuk kemajuan bangsa. Jika boleh disebut, masa ini adalah masa keemasan pergerakan perempuan, sayangnya pada masa ini pula pergerakan perempuan dilumpuhkan. Hal itu sempat disinggung dalam tulisan ini, di mana Gerwani harus dibubarkan karena dianggap berafiliasi dengan PKI dan perjuangan perempuannya melanggar kodrat. Hal tersebut sangat disayangkan, karena tulisan ini ternyata belum mampu juga merubah mitos yang diciptakan tentang pemerintah Orde Baru tentang Gerwani. Penulis hanya berlalu dan masuk pada Bagian ke IV, membahas pergerakan perempuan pada masa pemerintahan presiden Soeharto dalam bingkai pembangunan. Latar belakang Indonesia sebagai negara

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

dengan jumlah muslim terbanyak di dunia membawa penulis menghadirkan pembahasan di bagian terakir tentang bagaimana perempuan pergerakan terintegrasi dalam gerakan social keagamaan, baik di nasional maupun internasional.

Ide tentang kesetaraan gender, keberagaman pemikiran dan pergerakan perempuan Indonesia, penghancuran Gerwani dan upaya pemerintah mengontrol pergerakan perempuan pada masa Orde Baru tidak ditemui dalam buku ini. Namun, buku ini sangat cocok untuk memahami kronologi pergerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Selain itu, buku ini pun sangat tepat menarasikan pergerakan perempuan yang ideal versi Negara, perempuan yang maju namun tidak melupakan “kodrat” mereka. Secara keseluruhan, tulisan ini perlu dibaca oleh seluruh kalangan untuk memahami bagaimana perempuan Indonesia hadir dalam perjalanan bangsanya. Hal itu sedikit banyak akan mendobrak pemikiran bahwa perempuan hanya pelengkap dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Ayu Utami, “Herstory dan Perjuangan Emansipasi”, dalam ***Majalah Tempo, 15 Desember 2014***. <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2014/12/15/herstory-dan-perjuangan-emansipasi/>, diakses pada 12 Desember, 2016, pukul 19.20 WIB.

Carey, Peter & Vincent Houben, “Spirited Srikandhis and Sly Sumbaras: The Sosial, political and economic role of women at the Central Javanese courts in the 18th and early 19th Century”, dalam Elisabeth Locher-ScholtendanAnkeNiehof, *Indonesian Women in Focus*. Leiden: KITLV, 1987.

Ki Hadjar Dewantara, “Perempuan di dalam Pertumbuhan Adab”, *Wasita*, Juli 1935, tahun I No. 6.

Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari *Gang Rape* hingga *Femicide*, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat”, Jakarta, 7 Maret 2017, hlm. 1.

Locher Scholten, Elsbeth “ Colonial Ambivalencies: European Attitudes Towards the Javanese Household (1900-1942)”, dalam Juliette Koning, etc., *Women and Household in Indonesiam Cultural Notions and Social Practices*, Surrey: Curzon Press, 2000.

Mariana Amirudin, “Revolusi Bahasa dalam Politik Gender”, dalam *Majalah Tempo*, 12 Januari 2015. <https://rubrikbahasa.wordpress.com/2015/01/12/revolusi-bahasa-dalam-politik-gender/#more-3192>, diakses pada 12 Desember, 2016, pukul 19.18 WIB.

Nyi Hadjar Dewantara, “Adab Perempuan”, Kongres Perempuan Indonesia, 1928, dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV Jakarta, 2007.

Ruth Indiah Rahayu, “Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari T tutur Perempuan”, *makalah* dalam Workshop *Historiografi Indonesia: di antara Historiografi Nasional dan Alternatif*, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Australia Research Council, Hotel Yogya Plaza, Yogyakarta, 2-4 Juli 2007.

Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Suwarsih Djojopoespito, *Manusia Bebas*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2000.

Prakata Penulis

Oleh: Triana Wulandari

Direktur Sejarah

GERAK juang kaum perempuan di Indonesia telah lama kemunculannya. Ia muncul di berbagai bidang kehidupan seiring kebutuhan mereka untuk berjuang. Mulai dari kehidupan rumah-tangga yang terancam berantakan akibat sesuatu atau berbagai hal sampai medan perang yang ganas, penuh tantangan, dan ancaman kematian.

Tersebutlah kemudian nama-nama tokoh pejuang dari kaum perempuan yang bersifat lokal hingga nasional. Nama-nama mereka selalu menjadi bagian dari ingatan sebagian orang, keluarga, kelompok, hingga orang-orang yang masih membutuhkan peranan mereka. Maka maklum saja jika nama-nama itu masih sering muncul dalam berbagai peringatan, wacana, hingga suatu duka.

Adalah bangsa Indonesia yang kemudian menjadi bagian dari mereka yang mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan itu. Hingga pada tahapan berikutnya, ingatan dan kenangan itu dijadikan sebagai bagian dari semangat perjuangan berikutnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari korban-korban penjajahan yang berupa-rupa potensi bentuknya. Lebih spesifiknya lagi adalah bagi kaum perempuan yang semasa Indonesia berjuang melawan penjajah Belanda hingga Jepang itu terbukti peranannya.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Sebut saja, misalnya, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Cristina Martha Tiahahu, dan pejuang-pejuang perempuan lainnya. Mereka telah berjuang dengan segenap jiwa dan raga yang mengantarkan mereka untuk turut angkat senjata.

Tak ketinggalan pula Kartini. Dengan senjata pena, beliau menulis keprihatinannya pada kondisi perempuan di bawah pemerintahan Hindia-Belanda. Dari tulisan-tulisan yang dikirim dan diterima Kartini melalui surat-menyurat itulah yang kemudian semakin membawa Kartini dalam gerakan perjuangan yang lebih dekat dengan mereka yang diperjuangkan. Bersama saudari-darinya, sosok yang bertitel Raden Ajeng ini mendirikan semacam sekolah untuk para gadis di pendopo kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kelak, dari kelompok kecil inilah yang kemudian menarik kemunculan sekolah-sekolah Kartini di berbagai daerah atas bantuan teman-temannya dan yang peduli dengan gerakan Kartini.

Pada tahapan berikutnya, muncul pula gerakan perempuan yang serupa. Dewi Sartika, orangnya. Sosok yang satu ini berjuang sebagaimana Kartini di Jepara. Namun bagi Dewi Sartika yang berada di Bandung, tentu lebih mendahulukan kaum perempuan yang ada di Bandung dan sekitarnya. Gerakan pendidikan yang dimotori Dewi Sartika ini akhirnya juga menarik kemunculan sekolah-sekolah lainnya.

Seiring kemunculan dan perkembangan sekolah-sekolah yang dimotori RA. Kartini dan Dew Sartika, tidak sedikit yang kemudian merespon gerakan pendidikan ini dengan membentuk berbagai perkumpulan. Mulai yang anggotanya terdiri dari ibu-ibu rumah-tangga hingga para gadis-gadis cantik yang suatu waktu harus siap dijodohkan oleh orang tuanya.

Maka mulai-lah pada masa ini gerakan perempuan berada pada masa Kebangkitan Nasional, yaitu suatu masa yang diistilahkan orang-orang atau pihak-pihak yang menyejarahkan pergerakan para

pejuang di Indonesia. Dalam masa yang dapat ditandai sejak berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) pada tahun 1908 itu gerakan perjuangan perempuan nyaris selalu berdampingan dengan manfaat perkumpulan atau organisasi. Mereka tidak hanya berjuang melalui pengangkatan senjata saja, namun mulai mengutamakan perjuangan dengan pengangkatan suara dalam organisasi.

Puncak awal dari gerakan berjuang melalui organisasi itu sampai pada tahun 1928 yang berpusat di forum Kongres Perempuan Indonesia. Kongres yang berlangsung di Mataram, Yogyakarta, ini memang belum sepenuhnya menggalang persatuan seluruh organisasi-organisasi perempuan yang bermunculan sejak tahun 1908. Namun demikian, dari kongres yang digelar pada musim hujan itulah gerakan perjuangan dari kaum perempuan semakin memunculkan kekuatan dan kelincahan berlebih. Lebih-lebih, setelah kongres demi kongres berhasil digelar pada tahun-tahun berikutnya.

Pada masa tentara-tentara Jepang pengambil alih penjajahan yang dilakukan Belanda atas bangsa Indonesia, gerakan kaum perempuan yang sudah akrab dengan keorganisasian itu kembali “berkobar”. Walau pada awalnya pemerintah Jepang melarang dan membubarkan semua jenis perkumpulan dan partai sebelum Jepang datang, namun gerakan mereka akhirnya dapat terkumpul dalam berbagai organisasi perempuan bentukan Jepang atau organisasi yang diresmikan pemerintah.

Memang, secara umum, gerakan mereka tampak jelas-jelas membantu pemerintahan militer Jepang. Namun lain dari itu, mereka tetap berjuang dengan cara-cara yang berbeda dari sebelumnya, yaitu mensinergikan gerak juang mereka dengan kaum laki-laki. Tak pelak, gerakan perjuangan untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah pun tampak lambat dan dan sembunyi-sembunyi.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Sampai pecahnya kekuatan Jepang dalam mencengkeram nasib bangsa Indonesia, gerakan kaum perempuan masih tetap menguat. Kekuatan itu semakin memuncak setelah Indonesia berhasil dinyatakan merdeka oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Buktinya, semangat juang kaum perempuan bukan hanya dalam bentuk perjuangan secara perorangan dan berkelompok dalam organisasi lokal saja. Semangat mereka sudah sampai pada tahapan membentuk organisasi-organisasi bertaraf nasional dan menyentuh bidang politik.

Sampai saat yang berbeda, terbentuk pula forum Kongres Wanita Indonesia yang pertama sejak kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 15-17 Desember di Klaten, Jawa Tengah.

Berangkat dari kongres inilah yang kemudian terselenggara juga kongres-kongres perempuan berikutnya yang berada dalam koordinasi KOWANI dan Badan Kontak. Kongres perempuan itu pun sempat menggunakan nama-nama dalam urutan: Kongres Wanita Indonesia, Kongres KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, lalu Kongres KOWANI hingga kini.

Selain kongres KOWANI yang menjadi media persatuan gerakan kaum perempuan Indonesia di kancah keorganisasian itu, terdapat juga organisasi-organisasi lain yang digunakan mereka. Mulai dari organisasi-organisasi yang masih bersifat kedaerah, berbasis ajaran suatu agama, kesamaan profesi, hingga kesamaan status-status lainnya.

Semua gerakan baik secara perseorang ataupun kelompok itu akhirnya mengingatkan kita kembali bahwa gerakan perjuangan kaum perempuan Indonesia hingga kini tidak lepas dari gerakan perjuangan pada masa lalu. Mulai dari gerakan perempuan-perempuan yang tidak begitu terkenal di kancah nasional hingga gerakan perempuan-perempuan yang hingga kini masih banyak mencuri perhatian dunia.

Awal mula perjuangan Kartini, misalnya, menjadi salah satu bukti perjuangan kaum perempuan di Indonesia yang terkabar hingga lintas negara dan benua. Kartini prihatin terhadap sikap dan perilaku para bangsawan Jawa yang terkesan mementingkan diri sendiri, yang senantiasa ingin mendapatkan yang terbaik bagi dirinya, sedang yang buruk bagi yang lainnya. (Surat Kartini kepada E.H. Zeehandelaar, 1899).

Feodal Jawa berdampak buruk pada sikap kalangan atas Jawa, yaitu arogansi berlebihan. (Pramoedy 2003:126). Padahal, tatakrama tradisi Jawa memiliki istilah *tepa sarira* atau tanggap rasa, yang artinya mampu merasakan yang dirasakan orang lain.

Perenungan reflektif etis Kartini yang didasari oleh kepedulian dan keprihatinan terhadap ketidakadilan yang berlangsung di depan matanya, menyebabkan ia memahami pengertian istilah *adel* (bangsawan) dan *edel* (budi luhur). (Surat kepada E.B. Zeehandelaar, 1900) “Dua hal yang berbeda,” serunya. Maksudnya adalah, tidak selalu seorang *adel* itu *edel*.

Perilaku Belanda yang memaksakan diri agar diberi penghormatan berlebihan oleh pegawai Bumiputra (Jawa) dengan menggunakan adat tradisi leluhur nenek moyang mereka seperti yang terjadi di Cilegon dan Tegal (Pramoedy 2003: 108), membuktikan ucapan Kartini. Hal lain yang menunjukkan kerendahan budi kalangan Pemerintah Hindia Belanda, ialah ketika ada larangan bagi orang Jawa menggunakan bahasa Belanda dalam berkomunikasi dengan mereka. Bangsawan Bumiputra acapkali menggunakan bahasa Kromo Hinggil dan dijawab oleh Belanda cukup dengan bahasa Melayu Pasar (Pramoedy 2003: 110).

Karena terpasung oleh budaya Feodal Jawa yang “menyesakkan nafas” itu, lamunan Kartini menerawang jauh ke masa lampau. Ia bertanya, *di manakah ajaran tradisi Jawa yang bermuatan nilai keluhuran itu?* Ia lalu paham, mengapa rakyat Jawa senang

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

melakukan tembang syahdu yang berisi kenangan tentang keagungan Jawa masa lampau, kearifannya, ketinggian budaya serta kelembutan dan kehalusan seninya.

Terhadap alam Feodal Jawa yang sungguh-sungguh *patriarkis* itu, Kartini menyatakan ‘perang’, karena di dalamnya terdapat unsur poligami yang sangat ditentangnya. Ia menginginkan ‘dunia baru’ yang lebih menjanjikan bagi kedamaian Jiwa. Jiwa yang tidak mengenal warna kulit, jenis kelamin dan status dalam masyarakat, sebagaimana kutipan Kartini pada istilah Dilthey: *idealisme objektif* dan *keharmonisan universal*. *Vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan* (Peter Kunzmann et al., *Sesam Atlas Van De Filosofie*, Amsterdam, 1996, hal. 180-81 1979:337).

Ini menandakan bahwa Kartini juga memahami bahwa pengabdian kepada rakyat identik dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tanggungjawab pemimpin bersifat dualistik, yakni dari ‘atas’ dan ke ‘bawah’ berada di atas bahunya, yaitu *mengemban Amanat Penderitaan Rakyat*. (Pramoedya 2003:141).

Kecintaan Kartini bersaudara kepada rakyatnya menggugah serta membangkitkan kesadaran ‘berbangsa’ pada diri mereka (Sitismandari 1986:108; Pramoedya 2003:113) Sebagai *Ksatria*, Kartini bersaudara memperjuangkan serta membela hak-hak azasi rakyat (Pramudya 2003:113) mengayomi dan menjaga kehormatan serta harkat martabat mereka.

Sebagai *Brahmana*, Kartini bersaudara berkontribusi dalam menebarkan nilai-nilai kemuliaan dan keluhuran manusia. Kartini prihatin melihat timbulnya gejala pembaratan artifisial yang tidak disertai kemajuan dalam pola pikir, berilmu pengetahuan serta penguasaan berbahasa Belanda. Satu di antara lima priyayi yang telah berasimilasi dengan budaya Eropa mengalami perubahan perilaku. (Pramoedya 2003: 131).

Hal ini, menurut Kartini, merupakan indikasi kurangnya pendidikan akhlak di kalangan atas masyarakat Jawa. Dalam suratnya tertanggal 12 Januari 1900 yang ditujukan kepada Stella Zeehandelaar, Kartini menceritakan tentang nota yang dikirim oleh ayahnya, Bupati Sosroningrat kepada Pemerintah Hindia Belanda tentang perlunya pengajaran diberikan kepada rakyat Jawa: Kata Ayah dalam notanya: Pemerintah tidak mungkin dapat menyediakan nasi di piring bagi setiap orang Jawa untuk dimakannya, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah ialah memberikan kepadanya daya upaya agar ia mencapai tempat di mana makanan itu terdapat. Daya upaya ini ialah: Pengajaran... ..(Kartini dalam Sulastin 1979:31).

Perempuan merupakan sosok yang selalu menarik untuk dikaji baik eksistensi, karakteristik maupun problematikanya yang senantiasa timbul seiring dengan laju perkembangan masyarakat. Makna yang terbayang apabila menyebut kata perempuan adalah satu makhluk yang halus, lembut, lemah gemulai dengan wajah cantik bak bulan purnama, suatu jenis makhluk yang sedemikian indahnya. Karena keindahannya itu, maka para laki-laki menganggap bahwa perempuan cukup berdiam di rumah saja, mengurus dapur dan mengasuh anak, sehingga tidak perlu turut campur urusan di luar rumah.

Perempuan dalam budaya tradisional masyarakat tanpa disadari memiliki harkat dan martabat yang setingkat lebih tinggi di atas laki-laki dalam meneruskan garis keturunan, dan istrilah yang memegang peranan penting. Penghormatan kepada perempuan ini pun tampak dalam ungkapan *surga berada di bawah telapak kaki ibu*. Perempuan sebagai warga masyarakat mempunyai hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk memantapkan kehidupan bangsa dan bernegara serta kehidupan beragama.

Peranan perempuan dalam pembangunan berkembang selaras dan serasi dengan perkembangan tanggung jawab dan peranannya

dalam mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia. Termasuk pengembangan generasi muda, terutama anak-anak dan remaja dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perempuan mempunyai kelebihan menyambung 'tali rasa' dalam proses mendidik sang anak untuk memperkokoh jati diri bangsa.

Pada zaman Kartini, apa yang dirisaukan oleh Multatuli dalam *Max Havelaar* sudah tidak lagi terjadi, sebagai tanda keberhasilan perjuangan Haluan Etis, kecuali kesepakatan yang dijanjikan pada tahun 1901 yang pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena kaum [pemilik] modal tidak dapat mengerti mengapa dari keuntungan yang dapat mereka angkut dari Hindia harus diberikan bagian yang lebih besar kepada bangsa pribumi daripada upah rendah yang biasanya diberikan kepada mereka! Memang, mentalitas "eksploitasi sebesar-besarnya" yang sudah berakar sekian lamanya sukar untuk dirobah! (Sitisoemandari 1986: 201-2)

Dasar serta latar belakang gerakan "Haluan Etis" pada akhirnya tidak lain daripada *uang* dan *Neerlandia Raya*, yang berarti: *kolonialisme*. (Sitisoemandari 1986 :204) Situasi yang berabad-abad dikondisikan oleh ekonomi dan politik kekuasaan kolonial sangat menyengsarakan rakyat Jawa. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila Bung Kamo menyebut masa Tanam Paksa khususnya yang diselenggarakan oleh Van Den Bosch dengan segala implikasinya sebagai masa *feodalisme sakit*. (Soekarno, *Indonesia Menggugat*, 1920).

Di dalam suratnya kepada Tuan H.H. van Kol, Kartini pun menyampaikan keprihatinannya terhadap mentalitas para bangsawan Bumiputera zamannya yang tidak berpihak kepada rakyat, karena terkena imbas 'penyakit' tersebut di atas. Kartini berangan-angan agar para Bangsawan bersemboyan: "*Berbuatlah agar bangsawan patut disembah rakyat*, (Surat Kartini kepada Tuan

H.B. van Kol, 10 Agustus 1902). Hal itu berlaku juga bagi para pembesar Belanda yang menguasai dan mengelola Hindia Belanda dan yang menyebabkan orang Jawa menjadi begitu miskin (Sulastin Sutrisno, *Kartini, Surat-surat kepada Ny. RM. Abendanon-Mandri dan Suaminya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989; 1992; 2000, hal 89).

Jakarta, Februari 2017

Daftar Isi

SEKAPUR SIRIH -- v

PENGANTAR -- vii

PRAKATA PENULIS -- xix

DAFTAR ISI -- xxix

PENDAHULUAN -- 1

BAGIAN I

MASALAH GERAKAN PEREMPUAN -- 15

- A. Definisi Perempuan -- 15
- B. Problematika Aktual -- 20
- C. Perempuan dan Peradaban -- 27
- D. Kodrat Perempuan -- 29

GERAKAN PEREMPUAN DALAM PANGGUNG SEJARAH --

35

- A. Para Pejuang Perempuan -- 35
- B. Perjuangan Perempuan di Pentas Pekerti Putri Sejati -- 45
- C. Perjuangan Perempuan antara Tradisi dan Modernisasi -- 47
- D. Perempuan dan Modal Budaya -- 49

BAGIAN II

PERGERAKAN PEREMPUAN PADA MASA KEBANGKITAN NASIONAL -- 51

- A. Gerakan Perempuan secara Perorangan -- 53
- B. Organisasi Perempuan sebelum Boedi Oetomo (BO) -- 56
- C. Organisasi Perempuan setelah Boedi Oetomo (BO) -- 59
- D. Organisasi Perempuan Pasca Kongres Perempuan -- 64
- E. Gerakan Perempuan dalam Kongres sebelum Pendudukan Jepang -- 74

PERGERAKAN PEREMPUAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG -- 113

- A. Pembubaran dan Pembentukan Perkumpulan Perempuan -- 114
- B. Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Putri Asia Raya -- 116
- C. Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA -- 117
- D. Fujinkai dan Barisan Putri -- 118
- E. Jawa Hokokai Fujinkai -- 120
- F. Dinamika Perempuan Indonesia -- 123

PERGERAKAN PEREMPUAN PADA MASA KEBANGKITAN INDONESIA -- 129

- A. Berjuang Membela Kemerdekaan -- 130
- B. Pembubaran, Pembentukan, dan Kemunculan Organisasi Perempuan -- 132
- C. Perkumpulan Perempuan Nasional -- 135
- D. Perkumpulan Perempuan Daerah -- 143
- E. Laskar Perempuan -- 145
- F. Laskar Gabungan -- 154
- G. Polisi Perempuan -- 155
- H. Wirawati Catur Panca -- 156

BAGIAN III

PERGERAKAN PEREMPUAN PADA MASA REVOLUSI INDONESIA -- 159

- A. Kemerdekaan yang Terancam -- 159
- B. Perjuangan belum Selesai -- 161
- C. Kongres, Konferensi, dan Permusyawaratan -- 170
- D. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1945 -- 176
- E. Konferensi Wanita Indonesia -- 178
- F. Kongres KOWANI Tahun 1946 -- 180
- G. Kongres KOWANI Tahun 1947 -- 183
- H. Kongres KOWANI Tahun 1948 -- 185

PERGERAKAN PEREMPUAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN TERPIMPIN -- 197

- A. Republik Indonesia Serikat -- 197
- B. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1950 -- 203
- C. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1952 -- 208
- D. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1955 -- 218
- E. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1957 -- 224
- F. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1961 -- 236

BAGIAN IV

KONSOLIDASI PEREMPUAN PEMBANGUNAN -- 253

- A. KOWANI -- 254
- B. Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen -- 260
- C. Badan Kerjasama Dharma Pertiwi -- 262
- D. Perempuan Sekber Golkar -- 266
- E. Era Orde Baru -- 268

GERAKAN PEREMPUAN SOSIAL KEAGAMAAN -- 279

- A. Badan Musyawarah Organisasi Islam Perempuan -- 279
- B. Komisi Nasional Kedudukan Perempuan -- 284

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

C. Dharma Wanita -- 292

D. Women's International Club -- 297

E. Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak -- 299

F. Badan Pembina Kegiatan Sosial -- 300

G. Asean Women Circle -- 303

KEPUSTAKAAN -- 307

Pendahuluan

MELALUI karya disertasi yang berjudul *Emansipasi Bangsa dalam Surat dan Nota Kartini*, Dr. Dri Arbaningsih memberi catatan serius seputar relevansi gagasan-gagasan RA. Kartini dalam kehidupan masa kini. Menurutnya, gagasan-gagasan itu masih relevan terhadap zaman sekarang walau sudah melalui masa satu abad lamanya. Gagasan-gagasan itu meliputi; 1) emansipasi bangsa; 2) pentingnya kesadaran 'berbangsa'; 3) pentingnya pendidikan budi pekerti dalam pembentukan watak manusia; 4) dan Keningratan tidak identik dengan Feodalisme Jawa itu, memang masih relevan.

Inti dari empat pokok gagasan tersebut, menurut Dri Arbaningsih yang juga cucu Soeleiman, tokoh pergerakan dan kebangkitan nasional ini, bernaung di bawah satu gagasan besar, yaitu *kemerdekaan kehidupan bangsa sebagai "nasion" yang memiliki bahasa, seni, budaya dan wilayah*. Dalam konteks sekarang, kehidupan 'bangsa' sebagai 'nasion' terwujud dalam kehidupan 'bangsa-bangsa' sebagai Bangsa Indonesia.

Namun ironisnya, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu pada kenyataan masih belum memerdekakan rakyat Indonesia dari pengaruh *Patriarki-Feodalistik*. Bahkan dalam kurun waktu tiga dasawarsa terakhir, budaya semacam itu hampir menjadi budaya monolit yang mempengaruhi hampir seluruh

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

perilaku kehidupan Bangsa di sebagian besar wilayah Nusantara. *Patriarki-Feodalistik* tidak saja memusnahkan *dharma Ksatria* semenjak zaman Kartini, ia bahkan menjadikan para pemimpin Republik menjadi *adharna* yang kian lama kian ‘membinasakan’ cita-cita Proklamasi.

Semenjak empat dasawarsa terakhir, kepemimpinan republik didasari oleh kekuasaan, bukan oleh *pengayoman*. Sikap kurang peduli para pemimpin Republik terhadap ‘bangsa-bangsa’ yang pada zaman pra-kolonial merupakan ‘nasion’, merupakan suatu ‘cacat’ yang diemban oleh Pemerintah NKRI. Kecacatan inilah yang pada akhirnya menghambat terwujudnya cita-cita Proklamasi: *kemerdekaan dalam teritorial Indonesia*.

Keempat gagasan Kartini merupakan cita-cita yang perwujudannya diangankan dalam sebuah masyarakat *Dunia Baru* yang dalam konteks sekarang serupa dengan *masyarakat Pancasila*, yaitu *sebuah masyarakat cerdas yang berkeadilan, berperikemanusiaan, serta berketuhanan Yang Maha Esa*.

Meski proses berkebangsaan Indonesia ditandai oleh beberapa titik sejarah sebagai monumen dan momen yang menentukan—umpamanya Hari Kebangkitan Nasional 1908, Hari Sumpah Pemuda 1928, Hari Proklamasi 1945, Hari Nusantara 1957, namun tampaknya peringatan hari-hari bersejarah tersebut lebih bersifat ritual dan formalitas dari pada pemahaman terhadap substansinya. Itulah sebabnya antara tahun 1945 hingga kini Bangsa Indonesia mengalami pelbagai kendala yang mengusik proses berkebangsaan satu: Bangsa Indonesia yang sejati.

Kesadaran berbangsa dan keberadaan bangsa yang terdiri dari beratus bangsa-bangsa tersebar di seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke rentan untuk disintegrasi, apabila eksistensinya tidak dihormati dan diperlakukan dengan layak. Meskipun, dengan berjalannya waktu, proses berbangsa rakyat

Indonesia sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan hingga masa sekarang (2004) sudah mendekati sempurna, namun demikian, Bangsa Indonesia yang umurnya relatif muda dan belum memiliki jam terbang yang memadai untuk mengelola sebuah Negara Kesatuan mengalami pelbagai kendala, misalnya konflik etnis yang akan menjurus kepada disintegrasi Bangsa.

Seandainya titik berat strategi bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berangkat dari *kesatuan* wilayah saja (kondisi material), tetapi juga kepada *kesatuan* pelbagai adat/daerah 'bangsa' (kondisi imaterial), barangkali persoalan yang dihadapi Bangsa ini menjadi berkurang, karena persoalan pengelolaan negeri ini merupakan beban bersama, bukan beban Pemerintah yang notabene dipilih dan dititipi oleh rakyat.

Dikuatirkan, bahwa selama ini telah terjadi kekeliruan persepsi antara *kesatuan wilayah* (kondisi material) dengan *kesatuan 'bangsa'* - '*bangsa*' (kondisi., imaterial) yang dapat diartikan *peleburan bangsa-bangsa* menjadi satu Bangsa. Kalau ini terjadi, maka Republik telah melakukan kekeliruan fundamental, karena menempatkan dua kategori berbeda pada satu tataran pengertian : kesatuan wilayah dan kesatuan adat. Apakah hal tersebut sudah berlangsung dengan kenyataan tidak dilaksanakannya pasal 18 UUD 1945 tentang hak ulayat masyarakat adat?

Seandainya proses berbangsa Indonesia diawali dengan pengembalian kedaulatan 'bangsa' leluhur (adat/daerah) sebagai 'nasion' misalnya 'bangsa' *Jawa*, 'bangsa' *Sunda*, 'bangsa' *Aceh*, 'bangsa' *Bugis* dengan pelbagai sukunya tetap berpeluang melanggengkan Jati dirinya di daerah masing-masing seperti pada zaman pra-kolonial, maka proses berkebangsaan Indonesia melalui *kesatuan* 'bangsa'- 'bangsa' sebagai bangsa besar, Bangsa Indonesia, barangkali akan berlangsung lebih wajar. Lain halnya dengan '*kesatuan (peleburan)* berbagai 'bangsa' menjadi satu Bangsa.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Ikrar Sumpah Pemuda 1928 telah berhasil mempersatukan 'bangsa'-'bangsa' menjadi satu kesatuan Bangsa Indonesia. Sangat disayangkan, bahwa pernyataan kesepakatan itu tidak dikembangkan dan mekanisme pelaksanaannya tidak dirundingkan, bahwa "apakah *berbangsa satu dan berbahasa satu* harus diselesaikan dengan cara *peleburan diri* 'bangsa'-'bangsa' menjadi satu Bangsa atau *kesatuan dari* 'bangsa'-'bangsa' menjadi satu Bangsa besar dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang disemboyanakan oleh *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*" (Mpu Tantular, abad 14) yang artinya kurang lebih *beraneka tetap satu dalam dharma?*

Proses *penyatuan* dalam arti *peleburan* 'bangsa'-'bangsa' mengingatkan pada proses *asosiasi* Snouck Hurgronye yang bermaksud membuat orang Jawa menjadi Belanda. Meski pun makna berbangsa Indonesia tidak sarna dengan berbangsa Belanda, namun keduanya sarna asingnya bagi 'bangsa' Jawa, 'bangsa' Batak, 'bangsa' Bugis, dan 'bangsa-bangsa' Nusantara kainnya, karena Bangsa dalam bentuk baru ini sebelumnya belum dikenal wajah dan sosoknya. Pengenalan ini butuh kepercayaan masyarakat dan proses, sementara 'bangsa' leluhur sempat di lumpuhkan oleh Belanda.

Bukankah lebih baik, bila kedaulatan 'bangsa' leluhur dikembalikan terlebih dahulu sesudah Proklamasi Kemerdekaan, sebelum menginjak pada tahapan kedua, membangun bangsa baru yang utuh, Bangsa Indonesia yang berakar pada 'bangsa'-'bangsa' leluhur? Bukankah *sebuah ikatan lidi akan menjadi sapu yang kuat apabila setiap lidinya tidak rapuh?* Karena proses berkebangsaan Indonesia dilalui dengan cara kesatuan dalam arti *peleburan* 'bangsa'-'bangsa' sebagai satu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikuatirkan proses ini tidak berjalan di atas landasan kokoh, karena titik berat penekanan penyelenggaraan Negara lebih kepada penyelesaian administratif kenegaraan, yaitu *penyatuan wi/*

ayah Republik Indonesia daripada penyelesaian kultural. Dengan menafikan *adat 'bangsa'-'bangsa'* berarti Pemerintah NKRI tidak mendahulukan Sam Ratulangi, dan lainnya.

Ketika itu, mereka mengakui berbangsa Indonesia, ketika bersama-sama melawan penjajahan dan ketika bersama-sama memproklamkan kemerdekaan Indonesia, namun apakah Bangsa Indonesia masih ada ketika penjajahan sudah lenyap? Apakah Bangsa itu masih ada ketika cita-cita Proklamasi dikhianati? Apakah Bangsa itu masih ada, ketika sebagian kecil rakyat sejahtera, sementara sebagian besar masih miskin, bodoh, dan menderita? Karena itu, dalam skala Indonesia, *emansipasi 'pimpinan' Bangsa* yang mampu *menyatukan* 'bangsa' - 'bangsa' dalam arti persatuan bukan peleburan hingga kini masih relevan untuk diperjuangkan. Hanya pemimpin yang demikianlah yang akan membawa rakyat kepada kehidupan politik yang terikat pada Sumpah Pemuda 1928, tapi tetap *merdeka secara lahir-batin*, dan *merdeka secara sosial-politik dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia*.

Hakikat sebuah 'nasion' menurut Kartini harus dipahami oleh para pemimpin (Ningrat) sebagai sebuah itikad baik yang mewujudkan harkat martabat rakyat, masih relevan dibicarakan, mengingat belum dilaksanakannya dengan baik dan benar pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945.

Selama berabad-abad rakyat Nusantara menderita *amnesia sosial* dibelenggu oleh budaya opresif kolonialisme VOC dan Neo-kolonialisme Hindia Belanda. Oleh karena itu, *Surat dan Nota Kartini*; masih relevan untuk berfungsi sebagai memori kontra afektif untuk membangkitkan kembali memori afektif perjuangan kebangkitan bangsa 1928 tatkala memori tersebut sudah mulai mmudar dan keutuhan bangsa Indonesia mulai rapuh.

Kemerdekaan 1945 sebagai Jembatan Emas, juga harus diposisikan sebagai memori kontra afektif bagi 'bangsa' Jawa dan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

'bangsa' lainnya sebagai bangsa besar Indonesia. Oleh karena itu, peringatan Proklamasi yang kita lakukan pada tanggal 17 Agustus itu penting sebagai pengulangan memori afektif, agar rakyat selalu ingat kepada cita-cita proklamasi 1945 yang harus dilaksanakan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses pendidikan praktis yang memerdekakan dan sekaligus menanamkan semangat emansipatori subyektifitas atas penduduk di daerah otonom masing-masing.

Meskipun cita-citanya tentang perempuan modern yang mandiri dan mampu mencari nafkah sendiri telah menjadi kenyataan, namun kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk yang berdaulat, memiliki hak untuk hidup layak belum sepenuhnya disadari oleh perempuan pada umumnya, terbukti dari fakta banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan terhadap mereka dan oleh mereka; pelecehan seksual baik di wilayah domestik maupun publik (di tempat kerja); pelaksanaan hukum yang tidak adil; diskriminasi di lapangan pekerjaan utamanya bagi buruh wan ita yang dipekerjakan di pabrik, dan sebagainya. Dari segi hakikat sebagai makhluk alam, posisi, peran dan fungsinya sebagai *pendidik pertama manusia*, dan sebagai *sumber peradaban* masih kurang mendapat perhatian dari pihak perempuan sendiri, terbukti dari banyaknya kenakalan remaja dan korban narkotik. Secara lahiriah, tampak perempuan sudah mencapai kemerdekaannya dengan banyaknya jumlah perempuan karir hampir di segala bidang pekerjaan, namun secara batiniah, masih diragukan, terbukti dari kualitas perempuan di masyarakat yang belum mampu mengatasi kerapuhan lingkungannya.

Arus gelombang gagasan tersebut juga melanda Indonesia dan telah menjadi kesepakatan dunia abad 21, bahwa di segala bidang kehidupan harus berwawasan jender. Gerakan "berwawasan jender" merupakan arus yang diutamakan dunia dewasa ini, termasuk Indonesia, dan tampaknya telah diterima secara apnon tanpa

kecurigaan dan kekuatiran sedikitpun akan dampaknya di belakang hari, apabila harus berhadapan dengan tradisi dan budaya lokal 'bangsa'-'bangsa' Nusantara. Hal ini perlu dicermati oleh para pemimpin bangsa kalau tidak ingin kehilangan Jati Diri bangsa. Bukankah perempuan sumber peradaban? Perempuan Nusantara perlu mendapat perlindungan dari penetrasi pernikiran feminisme Barat yang cenderung melakukan konfrontasi frontal terhadap budaya tradisi.

Konsep Kartini tentang perempuan sebagai sumber peradaban dan pendidik pertama manusia perlu ditetapkan sebagai kesepakatan Nasional agar arus budaya globalisasi yang mendikotomikan laki-laki dan perempuan tidak didukung untuk tegak di bumi Nusantara. Sebaliknya, para perempuan pengemban peradaban bangsa perlu dicerdaskan agar kekuatiran dan keprihatinan Kartini yang mewakili semua perempuan di bumi Nusantara tentang degradasi moral bangsa ini tidak terwujud di persada bumi Pertiwi.

Sejarah membuktikan, bahwa proyek kemanusiaan yang diprakarsai oleh kelompok Haluan Etis dan direstui oleh Sri Ratu Wilhelmina (1901) agar Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik kolonial etis tidak berhasil, hingga berakhirnya Pemerintahan itu pada tahun 1942. Situasi politik akibat Perang Dunia I mengakibatkan Hindia Belanda diserahkan tanpa syarat kepada penjajah baru, yaitu Bangsa Jepang. Rakyat Jawa secara politis belum sempat menjadi sebuah "nasion", sampai Proklamasi Kemerdekaan 1945, meskipun secara semangat sudah terjadi sebuah kebangkitan nasional pada tahun 1928, ketika para pemuda menyatakan ikrarnya dalam *Soempah Pemoeda*.

Sebelum berkecamuknya perang dunia, Hindia Belanda merupakan sorga bagi warga Belanda bersama dengan para Petinggi dan para Bangsawan menikmati kehidupan sejahtera di Tanah Jawa. Kartini prihatin terhadap sikap dan perilaku para bangsawan Jawa

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

yang terkesan mementingkan diri sendiri, yang senantiasa ingin mendapatkan yang terbaik bagi dirinya, sedang yang buruk bagi yang lainnya. (Surat Kartini kepada E.H. Zeehandelaar, 1899). Feodal Jawa berdampak buruk pada sikap kalangan atas Jawa, yaitu arogansi berlebihan. (Pramoedya 2003:126) Padahal, tatakrama tradisi Jawa memiliki istilah *tepa sarira* atau tanggap rasa, yang artinya mampu merasakan yang dirasakan orang lain.

Perenungan reflektif etis Kartini yang didasari oleh kepedulian dan keprihatinan terhadap ketidakadilan yang berlangsung di depan matanya, menyebabkan ia memahami pengertian istilah *adel* (bangsawan) dan *edel* (budi luhur). (Surat kepada E.B. Zeehandelaar, 1900) “Dua hal yang berbeda,” serunya. Maksudnya adalah, tidak selalu seorang *adel* itu *edel*.

Perilaku Belanda yang memaksakan diri agar diberi penghormatan berlebihan oleh pegawai Bumiputra (Jawa) dengan menggunakan adat tradisi leluhur nenek moyang mereka seperti yang terjadi di Cilegon dan Tegal (Pramoedya 2003: 108), membuktikan ucapan Kartini. Hal lain yang menunjukkan kerendahan budi kalangan Pemerintah Hindia Belanda, ialah ketika ada larangan bagi orang Jawa menggunakan bahasa Belanda dalam berkomunikasi dengan mereka. Bangsawan Bumiputra acapkali menggunakan bahasa Kromo Hinggil dan dijawab oleh Belanda cukup dengan bahasa Melayu Pasar (Pramoedya 2003: 110).

Karena terpasung oleh budaya Feodal Jawa yang “menyesakkan nafas” itu, lamunan Kartini menerawang jauh ke masa lampau. Ia bertanya, *di manakah ajaran tradisi Jawa yang bermuatan nilai keluhuran itu?* Ia lalu paham, mengapa rakyat Jawa senang melagukan tembang syahdu yang berisi kenangan tentang keagungan Jawa masa lampau, kearifannya, ketinggian budaya serta kelembutan dan kehalusan seninya. Terhadap alam Feodal Jawa yang sungguh-sungguh *patriarkis* itu, Kartini menyatakan ‘perang’, karena di

dalamnya terdapat unsur poligami yang sangat ditentangnya. (Istilah *patriarki* adalah istilah yang dipakai para feminis untuk menunjukkan dunia yang penuh persaingan, kekuasaan dan penindasan).

Ia menginginkan 'dunia baru' yang lebih menjanjikan bagi kedamaian Jiwa. Jiwa yang tidak mengenal warna kulit, jenis kelamin dan status dalam masyarakat, meminjam istilah Dilthey: *idealisme objektif* dan *keharmonisan universal*. *Vox populi vox dei* atau *suara rakyat adalah suara Tuhan* dikutip juga oleh Kartini di dalam salah satu suratnya. (Peter Kunzmann et al., *Sesam Atlas Van De Filosofie*, Amsterdam, 1996, hal. 180-81 1979:337) Ini menandakan, bahwa Kartini juga memahami bahwa pengabdian kepada rakyat identik dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian tanggungjawab pemimpin bersifat dualistik, yakni dari 'atas' dan ke 'bawah' berada di atas bahunya, yaitu *mengemban Amanat Penderitaan Rakyat*. (Pramoedya 2003:141).

Kecintaan Kartini bersaudara kepada rakyatnya menggugah serta membangkitkan kesadaran 'berbangsa' pada diri mereka. (Sitisemandari 1986:108; Pramoedya 2003:113) Sebagai *Ksatria*, Kartini bersaudara memperjuangkan serta membela hak-hak azasi rakyat (Pramoedya 2003:113) mengayomi dan menjaga kehormatan serta harkat martabat mereka. Sebagai *Brahmiana*, Kartini bersaudara berkontribusi dalam menebarkan nilai-nilai kemuliaan dan keluhuran manusia. Kartini prihatin melihat timbulnya gejala pembaratan artifisial yang tidak disertai kemajuan dalam pola pikir, berilmu pengetahuan serta penguasaan berbahasa Belanda. Satu diantara lima priyayi yang telah berasimilasi dengan budaya Eropa mengalami perubahan perilaku. (Pramoedya 2003: 131) Hal ini, menurut Kartini, merupakan indikasi kurangnya pendidikan akhlak di kalangan atas masyarakat Jawa. Dalam suratnya tertanggal 12 Januari 1900 yang ditujukan kepada Stella Zeehandelaar, Kartini menceritakan tentang nota yang dikirim oleh ayahnya, Bupati Sosroningrat kepada

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pemerintah Hindia Belanda tentang perlunya pengajaran diberikan kepada rakyat Jawa: Kata Ayah dalam notanya: Pemerintah tidak mungkin dapat menyediakan nasi di piring bagi setiap orang Jawa untuk dimakannya, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah ialah memberikan kepadanya daya upaya agar ia mencapai tempat di mana makanan itu terdapat. Daya upaya ini ialah: Pengajaran. (Kartini dalam Sulastin 1979:31).

Dengan pengajaran, rakyat diberi sarana hidup ibarat *diberi kail, bukan ikan*. Rakyat Jawa yang miskin dan bodoh tidak bisa dibiarkan sendiri, sementara para kalangan atas memikirkan dirinya sendiri. Demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, pada ujungnya hanyalah untuk kepentingan penguasa, baik penguasa Belanda atau penguasa Bumiputera.

Sampai sekarang boleh dikatakan hanyalah untuk menjamin ketenangan Negara, dan agar penghasilan masuk dengan teratur! (surat Kartini untuk Stella Z, 12 januari 1900). Oleh karena itu, masyarakat kalangan atas atau para bangsawan perlu memikirkan cara yang tepat untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah sebabnya, Kartini berpendapat bahwa perbaikan nasib rakyat dan perubahan peradaban berawal dari pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu sebagai pendidik pertama manusia dan sumber peradaban di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat.

Perenungan reflektif Kartini berawal dari tentang pentingnya *keadilan* dan *persamaan hak* dalam suatu kehidupan kebersamaan manusia dengan sesama, yang kemudian berkembang ke kehidupan rakyat Jawa yang telah berlangsung tanpa keadilan selama ratusan tahun, lalu meningkat ke sikap diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap pegawai dan siswa didik Bumiputera. Misalnya, jumlah pegawai Bumiputera dikurangi demi penghematan, namun gajinya lebih rendah dari gaji pegawai Belanda; anak-anak rakyat Bumiputera (6-7 tahun) tidak diijinkan masuk

sekolah yang diperuntukkan bagi bangsa Eropa kalau belum dapat berbahasa Belanda. Hanya mereka yang mendapat izin dari Gubernur Jenderal, termasuk anak-anak Bupati yang dapat memasuki sekolah tersebut. (Surat Kartini kepada Stella Z., 12 Januari 1900) Meskipun secara *de jure* Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda tidak langsung memerintah rakyat Jawa, namun secara *de facto* mereka sangat mencampuri urusan internal Kabupaten, misalnya pengangkatan para Bupati harus dengan persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dampak politis negatifnya adalah para penguasa Bumiputera tidak pernah dituntut untuk *bertanggungjawab* terhadap kesejahteraan daerahnya sendiri, sementara Pemerintah Gubernuremen “cuci tangan” atas kondisi buruk yang terjadi.

Dengan demikian, peradaban kolonial menyuburkan mentalitas *tak bertanggungjawab* para Bangsawan Bumiputra. Kartini juga akhirnya menyadari, bahwa masyarakat Jawa yang tenaga dan harta bendanya terkuras pada saat Perang Jawa berlangsung (1825- 30), masih harus dimobilisasi oleh *Cultuurstelsel* (1830-70) tanpa pembelaan oleh pihak ‘para Ksatria’ “pembela dan pelindung” ‘bangsa’. Sebaliknya, malahan rakyat dimiskinkan dan dibodohkan. Drama dan tragedi Jawa menjadi sempurna, ketika ‘arogansi’ para Bangsawan (pemimpin) yang sesungguhnya “diberi” kekuasaan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur rakyatnya sendiri justru turut ‘menindas’ pula. Itu harus berubah, bangsawan *harus berhak* akan sanjung puji rakyat harus *patut* dijunjung tinggi. Budi luhur ini tak terhingga gunanya bagi rakyat.

Ke arah itulah bangsawan harus dibawa oleh Pemerintah. Dan ini hanya dapat dicapai apabila bangsawan diberi *pendidikan yang baik*, pendidikan yang bukan semata-mata didasarkan atas kecerdasan otak, melainkan yang sungguh-sungguh memperhatikan pembentukan akhlak pula. Soal inilah yang harus diperhatikan pada semua pengajaran yang akan diberikan kepada orang Jawa! (surat Kartini kepada Stella Z, 12 Januari 1900).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dalam suratnya kepada nyonya M.C.E.Ovink-Soer bertanggal awal tahun 1900 itu Kartini menulis:

Tetapi apakah kecerdasan pikiran itu “sudah berarti segala-galanya? Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan... Salah satu sifat orang Jawa yang tidak baik, yang kalau perlu dibasmi ialah sifat *gila sanjungan*... dan kami hanya dapat mencapainya melalui *pendidikan akhlak*.

Kartini menilai perilaku para bangsawan tidak patut. Demikian pula dengan sistem pendidikan Eropa yang dititik beratkan kepada pengembangan *akal* semata, padahal manusia adalah makhluk yang *berakal budi*. Sudah sepatutnya apabila penyempurnaan manusia harus mencakup kedua unsur manusiawi tersebut, yaitu penyempurnaan *cipta* dan *rasa*. Menurut Kartini, Jawa perlu pendidikan akal yang mampu merasionalisasikan tatakrama tradisinya (*cipta*), tetapi sebaliknya ia juga membutuhkan pendidikan budipekerti (*rasa*) yang mampu memoralisasikan akhlak dari cengkeraman feodal Jawa yang menindas dan membelenggu hak azasi manusia. Dalam suratnya kepada nyonya R.M. Abendanon-Mandri bertanggal Agustus 1900, Kartini menyampaikan betapa besar perhatiannya kepada nasib perempuan yang “tertindas” oleh tatasusila Jawa yang dianggapnya terlalu kaku dan berlebihan. Tidak terbilang perempuan yang *ditindas*, suatu perlakuan yang masih terdapat di berbagai-bagai negeri dalam abad *terang* ini, saya bela dia dengan senang dan setia (surat Kartini untuk Abendanon-Mandri, Agustus 1900).

Saudara yang berkulit putih dengan hatimu yang penyayang dan penuh rasa kasih, dengan pikiranmu yang kaya, ulurkan tanganmu. Angkatlah kami dari kubangan derita dan sengsara, tempat di mana kami didorong dan dicelupkan untuk selamanya oleh kepentingan diri orang laki-laki. Tolonglah kami memberantas sifat mementingkan diri kaum laki-laki yang tak mengenal segan itu; iblis, yang ratusan tahun mendera, menginjak-injak perempuan sedemikian sedemikian rupa. Sehingga [karena biasa akan aniaya itu, perempuan tidak memandangnya lagi

sebagai ketidak adilan, melainkan dengan rasa menyerah dan tawakal menerimanya sebagai sesuatu yang wajar (1)] ... [Tapi adakah manusia ini mempunyai keinginan?] (surat Kartini kepada Abendanon-Mandri, Agustus 1900)

Dari isi surat tersebut, dapat dipahami mengapa dalam notanya Kartini mengharapkan agar para Bangsawan *dididik* kembali akhlaknya, mengingat pelaksanaan tatasusila di kalangan masyarakat Jawa merupakan hegemoni para lelaki bangsawan, sementara para perempuan, anak-anak serta *kawulo cilik* (rakyat keeil) menerima dan menganggapnya sebagai suatu kewajaran. “Silahkan, saya orang Jawa” Demikian jawaban kakak perempuan Kartini, ketika ia menyampaikan niatnya membebaskan diri dari tradisi yang katanya “menyesakkan nafasnya.”

Pada zaman kolonialisme Hindia Belanda, banyak kalangan atas Bumiputera yang *dibenum* (diangkat sebagai pegawai) oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi pegawai Pemerintah (*Binnenlands Bestuur*) yang apabila dinyatakan berprestasi akan dikukuhkan sebagai bangsawan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat oknum ‘bangsawan’ yang berperilaku arogan, yang menggunakan bahasa *kekuasaan* daripada menggunakan bahasa *tanggungjawab*, *integritas* serta *akuntabilitas*. Pertanyaan Kartini mengenai “*adakah manusia ini mempunyai keinginan?*” merupakan isu yang menjadi keprihatinan Albert Memmi (1965), bahwa kolonialisme serta sistem sosial lainnya yang sengaja atau tidak menindas sebagian masyarakat akan menimbulkan pengulangan budaya represif di kalangan masyarakat itu sendiri.

Untuk bangsa Jawa yang berabad-abad *tidak punya keinginan*, situasi *tidur berkepanjangan* memang merupakan saat *kegelapan* sebuah bangsa, bukan saja secara hasan, tetapi juga dalam arti harafiah. Judul buku kumpulan surat Kartini *Door Duisternis Tot Licht* (DDTL) (1911) seakan-akan menyampaikan, bahwa sejarah bangsa Jawa pada zaman kolonial berada dalam kegelapan. Analogi

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

tersebut berakru pada kondisi mental orang Jawa yang terlihat pada: 1) sikap para Ksatria (*ningrat*) yang tersekat oleh feodal Jawa yang menyesatkan. *Ningrat* yang seyogyanya berarti manusia berkualitas tinggi yang menguasai *jiwa-raga* (makro-mikrokosmos), menjadi manusia berkualitas rendah yang tersekat oleh kegelapan karena dikuasai oleh *raga* (mikrokosmos) saja. 2) Perempuan yang tersekat kemerdekaannya oleh feodal Jawa yang membelenggu. 3) Rakyat yang tersekat oleh feodal Jawa yang memiskinkan dan membodohkan. Dengan pendidikan yang ditawarkan untuk orang Jawa Kartini mengupayakan sarana meniadakan sekat itu.

BAGIAN I

Masalah Gerakan Perempuan

A. Definisi Perempuan

KATA perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti *induk* (A. Nunuk P. Murniati, 2004:236). Kata *empu* atau *induk* ini merujuk status fungsional perempuan dalam lingkaran sistem kehidupan dan pertumbuhan manusia secara fisik, biologis, dan hal-hal lain yang sejenis.

Konsekuensi logis akibat perujukan fungsionalitas ini akan selalu menyalakan kesadaran bahwa perempuan memiliki status dan peranan yang lebih unggul jika dibandingkan dengan laki-laki. Tentu saja dengan pemahaman, bahwa keunggulan itu hanya berada dalam bidang-bidang kehidupan yang menjadi ruang lingkup keperempuanan berikut pemeranannya. Adapun bidang-bidang kehidupan dalam kawasan laki-laki, keunggulan status dan peranannya akan selalu berpihak pada laki-laki.

Perbedaan keunggulan masing-masing perempuan dan laki-laki ini pun bertemu dalam pancaran sinyal kearifan bahwa kedua kaum ini sama-sama unggul dalam beberapa bidang kehidupan dan sama-sama lemah dalam suatu bidang kehidupan. Keduanya berpotensi sama-sama lemah dalam suatu perkara, namun berpotensi juga untuk saling melengkapi dalam meramu solusi. Keduanya juga berpotensi sama-sama kuat dalam suatu perkara, namun berpotensi juga untuk

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

mencerdasi kekuatan keduanya; dalam menuju kemajuan, kemerdekaan, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan bersama.

Sampai taraf kelengkapan dan kebersamaan semacam inilah status perempuan dan laki-laki tiada perbedaan. Keduanya sama dalam statusnya dan setara dalam derajatnya. Sehingga definisi perempuan tidak lagi merujuk nilai-nilai fungsional yang mengharuskan adanya perbedaan dan pembedaan. Sebab definisi perempuan sudah mengait kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagai pengertian yang mengarah kebersamaan. Artinya, perbedaan dan persamaan itu merupakan suatu keniscayaan dalam universalitas kehidupan.

Perbedaan akan selalu muncul sejak dari konsep managerial yang mengharuskan adanya pembedaan-pembedaan dalam realitas batas-batas kestatusan atau kedudukan masing-masing. Persamaan juga akan selalu ada sejak sebelum adanya pembagian tugas-tugas managerial hingga berakhirnya ruang dan waktu perealisasiannya.

Adapun pemahaman yang dapat digunakan adalah; perbedaan perempuan dan laki-laki yang menyoroti keunggulan dalam lingkup masing-masing itu berasal dari alam nilai fungsional. Sedangkan dari alam nilai kemanusiaan, perempuan dan laki-laki sama-sama setara (egaliter) dalam kesederajatannya.

Jika dua hal ini dipertukarkan atau mendapat gangguan, maka idealitas kebersamaan dan keharmonisan akan selalu terancam dalam bayang-bayang kegagalan. Konfrontasi akan selalu menanti dan jalan buntu akan selalu menunggu ketika konsep kemanusiaan dibedakan dan praktik fungsionalitas disamakan. Sebagai contohnya, kaum perempuan tidak boleh merdeka dan kaum laki-laki harus selalu merdeka (pembedaan kemanusiaan/hak dasar manusia); kaum perempuan dan laki-laki harus melahirkan anak (penyamaan atau penyetaraan fungsional).

Status sama dalam konteks kemanusiaan dan status beda dalam konteks fungsional ini merupakan bagian dari kenyataan adanya persatuan dan kesatuan yang harmonis. Namun sayangnya, menurut Abdurrahman Wahid (dalam M. Mansyur Amin (ed), 1992:6), pembedaan fungsional itu sering kali tidak dilihat dan dianggap pembedaan derajat. Padahal, derajat manusia itu setara dan akan selalu setara dalam konteks kemanusiaannya.

Kenyataan adanya kesetaraan derajat dan perbedaan fungsi antara perempuan dan laki-laki inilah yang sempat ditekankan Soekarno dalam artikelnya yang berjudul “Kongres Kaum Ibu”. Artikel yang pertama kali diterbitkan *Soeloeh Indonesia Moeda* itu berisi pendapat Soekarno mengenai rencana untuk mengadakan kongres perempuan. Dalam pendapat itu terdapat analogi seekor burung untuk mewakili pergerakan nasional. Satu sayapnya adalah laki-laki, dan satunya lagi adalah perempuan, burung tersebut tidak akan bisa terbang apabila salah satu sayapnya lemah atau patah (Brown, 2004:9).

Analogi yang digunakan Soekarno itu menyatakan bahwa dalam kesamaannya sebagai sayap, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama walau posisinya berbeda dalam memerankan fungsinya masing-masing. Jika laki-laki dan perempuan tetap harmonis dan mampu bersinergi dalam memaksimalkan potensi masing-masing, maka harapan atau tujuan mereka akan berpotensi menjadi kenyataan.

Adapun tujuan paling urgen waktu itu adalah mengusir penjajah. Sebab penjajalah yang menjadi sumber malapetaka faktual yang akan selalu menjadi pangkal segala permasalahan, termasuk permasalahan yang membelit perempuan dan laki-laki.

B. Problematika Aktual

Bicara masalah penjajah, tidak lepas dari pembicaraan tentang sifat-sifat dasar yang telah membiasa dan dibiasakan ulang oleh penjajah melalui sikap dan tindakan secara jelas maupun samar. Sifat-sifat itu sendiri tidak lepas dari kesewenang-wenangan, keserakahan, dan ambisi untuk menguasai atau mendominasi.

Pada tataran inilah yang dimaksud penjajah bukan identik dengan seseorang atau pihak dari suatu bangsa, suku, ras, agama, dan lainnya. Melainkan sesuatu atau seseorang dan ia atau mereka yang mengingkari adanya kesamaan derajat manusia dan/atau merekaya perbedaan fungsional masing-masing orang sekaligus mempertentangkannya dengan kodrat kesamaan derajat yang dimiliki tiap-tiap orang.

Batas-batas konsep dasar antara derajat dan fungsi tiap-tiap manusia pun menjadi rancu dan secara potensial mengalami pertukaran, perselisihan, sekaligus kesemprawutan. Sehingga sistem kehidupan yang semula harmonis itu mengalami beragam problematika yang menghambat berlangsungnya suatu keharmonisan menuju tahap-tahap keharmonisan yang lain.

Problem atau masalah semacam inilah yang sempat berulang kali menimpa bangsa Indonesia. Hingga saking banyaknya pengulangan dan intensnya permasalahan-permasalahan itu, tidak sedikit dari bangsa Indonesia yang terlena dan *enggan* menyadarinya.

Permasalahan lantas menjadi seolah kewajaran yang tidak patut untuk dipertanyakan dan dipersoalkan. Jika ada yang berani mempertanyakan dan mempersoalkan, maka orang atau pihak itulah yang akan lebih dahulu mendapat serangan balik rekayasa pertanyaan dan persoalan yang berbau ancaman dan cemoohan. Dalih, dalil, dan senjata yang digunakannya pun, ditempa dan dibentuk dengan beragam unsur-unsur permasalahan yang semestinya dihilangkan.

Akibat tantangan yang mengancam dan rintangan yang malang-melintang itulah akhirnya permasalahan semakin akut dan meresap ke dalam berbagai sistem kehidupan. Mulai dari kehidupan rumah-tangga hingga kehidupan sosial kemasyarakatan, permasalahan dapat ditemukan dalam berbagai rupa dan polanya. Tak pelak, suatu permasalahan yang awalnya sederhana dapat meledak dan menggoncang segalanya, seketika permasalahan itu bertemu dengan permasalahan lain dan terakumulasi dalam tegangan tinggi.

Dalam konteks rumah-tangga, permasalahan dapat memicu fenomena pertengkaran, acuh, pisah ranjang, poligami, hingga perceraian suami-istri yang menyisakan *broken-home* dan keterlantaran anak-anaknya. Adapun dampak permasalahan yang lebih kompleks, berada dalam konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, hingga pendidikan dan keyakinan.

Semua ragam dampak negatif permasalahan ini berasal dari induk permasalahan di aras kesadaran seputar kesamaan derajat dan perbedaan fungsional. Andai saja kesadaran adanya kesamaan derajat dan perbedaan fungsional itu dapat dinyatakan kembali pada tiap-tiap orang, maka rantai permasalahan akan mudah diurai dan dilepaskan. Hanya saja, untuk menapaki lorong-lorong kesadaran hingga melepas belenggu permasalahan itu tidak semudah membalik telapak tangan dalam kondisi *sehat wal afiyat*. Perlu adanya besarnya nyali keberanian, keyakinan, modal, dan tindakan yang nyata untuk merealisasikannya. Maka maklum saja jika hanya sedikit dari bangsa ini yang mau dan mampu menyatakan kesadaran mereka untuk membuang jauh-jauh permasalahan itu.

Permasalahan yang sudah sekian lama mendera, membelenggu, dan memasung itu pun semakin lama semakin suram dan runyam. Walau banyak dari bangsa Indonesia yang menyadari adanya permasalahan yang harus dihilangkan, namun kesadaran saja tidak mampu membuang permasalahan. Mereka lantas memperdalam

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

kesadaran masing-masing hingga didapatkannya keputusan untuk melawan.

Perlawanan pun benar-benar terjadi dengan beragam bentuk dan strategi. Di mana-mana terjadi perlawanan, bentrokan, dan pembantaian. Namun sayang, hasil dari realisasi kesadaran dalam bentuk perlawanan itu masih jauh dari kata memuaskan. Hingga akhir abad ke-19, mereka masih melawan realitas “sumber” permasalahan secara perorangan dengan beragam bekal dan keahlian yang serba pas-pasan atau—malah—kekurangan.

Menjelang abad ke-20, bangsa Indonesia baru tercatat menampakkan sisi-sisi kesadaran mereka untuk melenyapkan permasalahan seiring penggunaan strategi yang lebih luas dan jitu dalam melakukan perlawanan. Para cerdik-pandai dari beragam bidang kehidupan mulai memproses realisasi kesadaran mereka yang lebih mendalam seputar permasalahan dan jawaban.

Adapun jawaban awal untuk permasalahan itu adalah mengidentifikasi permasalahan dari yang penting untuk dilenyapkan hingga yang urgen untuk disirnakkan. Hasil pengidentifikasian itu pula yang kemudian menerangi jalan mereka untuk melangkah dan mencari bantuan dari orang-orang atau pihak-pihak yang sama-sama dirugikan oleh adanya permasalahan. Adapun permasalahan yang secara umum dianggap paling merugikan dan urgen untuk dibasmi itu adalah keberadaan dan keserakahan kaum penjajah yang berasal dari bangsa Belanda.

Penjajah dari Belanda itu telah terbukti berulah dengan menyulut beragam masalah di berbagai daerah yang kelak bersatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Penjajah Belanda harus segera ditendang ke luar dari negeri ini. Mereka telah terbukti tidak punya perikemanusiaan dan tidak mengerti adanya kesetaraan manusia berikut perbedaan fungsionalnya.

Orang-orang di berbagai daerah yang sama-sama ingin mengusir Penjajah Belanda pun mulai melakukan penggalangan persatuan melalui lorong-lorong pertemuan hingga membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka saling membagi tugas penjagaan dan perawatan persatuan alami itu dengan berupaya mengembangkan kualitas dan kuantitas keanggotannya. Walau demikian, mereka tetap menjaga beragam bentuk dan strategi perlawanan yang sudah ada, terhadap Penjajah Belanda.

Gerakan mengelola strategi perlawanan secara “diam-diam” dan diorganisir oleh beberapa orang itu memang masih sederhana dan didominasi oleh kaum laki-laki saja. Adapun kaum perempuan seolah diharuskan untuk diam, tenang, dan menuruti perintah kaum laki-laki atau suami agar tetap di rumah, menjaga keluarga, dan melayani suami. Hal ini hampir dialami oleh tiap-tiap kaum perempuan atau ibu yang ditinggal suaminya untuk mengusir penjajah, dipaksa menjadi budak penjajah, atau pergi mencari nafkah yang hasilnya tidak dapat mensejahterakan keluarganya di rumah.

Realitas kehidupan semacam ini sudah sekian lama terjadi dan terpaksa dijalani kaum perempuan seolah tanpa masalah. Ketika kaum ibu ingin meronta dan komplain kepada suaminya, saat itu juga mendapat jawaban atau terbentur kesadaran bahwa hubungan antara harapan dan kenyataan suaminya untuk mensejahterakan keluarga nyaris tiada. Maka bagi ibu-ibu yang masih mampu setia dan mau menerima kenyataan yang ada, mereka tetap mempertahankan keutuhan berkeluarga dan membantu kewajiban suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Mereka mulai bergerak atas inisiatif sendiri-sendiri untuk turut menutup kebutuhan rumah tangga keluarga, namun tetap berusaha menjaga, mendampingi, dan memberikan pendidikan *ala* kadarnya kepada semua anak-anaknya. Lain dari itu semua, mereka juga

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

menjalankan kewajibannya untuk mendampingi dan melindungi semangat suaminya dalam menjaga keutuhan rumah-tangga.

Bagi ibu-ibu dari kalangan bangsawan lokal, mungkin tidak sampai harus jungkir balik dalam menjalankan perannya sebagai perempuan atau ibu rumah-tangganya. Peran mereka masih lumayan utuh dan stabil jika dibandingkan para perempuan dan ibu-ibu rumah-tangga dari kalangan rakyat jelata yang miskin dan harus berkubang dalam ketidak-stabilan ekonomi dan emosi. Perempuan dan ibu-ibu semacam inilah yang terpaksa menjalankan peran ganda; menjalankan kewajibannya sendiri dan membantu kewajiban laki-laki atau suami.

Meski telah menjalankan peran ganda, tidak jarang bagi mereka yang mendapat perlakuan kurang baik dari suaminya. Mulai dari objek pelampiasan amarah akibat suatu masalah hingga dimadu ataupun dicerai oleh suaminya secara sepihak. Sungguh miris, tragis, dan ironis nasib kaum ibu dan perempuan pada masa itu.

Mereka telah menjadi korban ketidak-adilan dan gangguan kesetaraan dari kompleksitas sumber-sumber permasalahan. Mulai dari penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda hingga penjajahan status dasarnya sebagai ibu atau perempuan yang berhak merdeka dan nyaman dalam menjalankan peran-peran fungsionalnya.

Realitas faktual semacam inilah yang akhirnya menggerakkan kesadaran seorang perempuan dari kalangan bangsawan di Jepara, Jawa Tengah. Sosok perempuan yang bernama Kartini dengan gelar Raden Ajeng (RA) di depan namanya itulah yang akhirnya semakin intens dalam merenungi keprihatinannya pada nasib Ibu-Ibu rumah-tangga.

Di antara tumpukan keprihatian-keprihatinannya itu, Kartini semakin terdesak pada pemahaman bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk mencari dan menawarkan solusi secara langsung. Walau putri bangsawan dan sama-sama perempuan, beliau terbatas

pada ruang-ruang kebangsawanannya sekaligus cegatan dana yang dibutuhkan dan ancaman kolonial Belanda yang siap menyekap.

Pemahaman seputar kuatnya rintangan dan tantangan itulah yang menyebabkan Kartini hanya mampu menyalurkan keprihatinannya dalam lembaran-lembaran surat. Melalui surat-surat yang dibuat untuk teman-temannya di Eropa itulah, sosok yang satu ini bergerak secara diam-diam untuk mencari solusi permulaan hingga lanjutan dari hasil korespondensi yang diinginkan. Sebab Kartini masih memahami bahwa kaum ibu dan perempuan di negeri ini perlu mendapat bantuan agar mampu melepaskan diri dari nasib buruk selama ini dan yang masih mengintai.

Kaum Ibu atau perempuan adalah manusia yang sama-sama punya derajat setara dengan manusia-manusia lainnya. Mereka berhak mendapat keadilan, ketenangan, kenyamanan, dan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Mereka dapat menjalankan peran dasarnya sebagai perempuan karena sudah menjadi kodrat bawaan sejak dilahirkan. Oleh sebab itu, keseluruhan kemampuan kaum perempuan harus diarahkan menjadi ibu yang ideal agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga akan mendapatkan sebutan sebagai perempuan utama (Amina Wadud Muhsin, 1994: 84).

Jalan yang harus ditempuh dalam mencapai tataran perempuan utama, yaitu mampu mencapai *moring kawula Gusti* artinya bersatunya hamba dengan Tuhan. Sarananya yaitu melalui latihan-latihan batin, seperti senantiasa bersikap titi, teteg, tata, dan *ngati-ati* serta menghilangkan sifat-sifat tercela yang disebut dengan panca driya, yakni *cengil sengitan, panasten, kemeren, dahwen, kumingsun, ewan cekak, dan rupak*.

Berbakti kepada ayah ibu dengan cara mensucikan diri melalui sikap *eneng-ening, awas eling* dalam hati dan patuh kepada guru dengan cara menghilangkan prasangka yang tidak baik juga merupakan sarana dalam mendapatkan kepercayaan manusia dan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

kasih Tuhan. Latihan-latihan batin lainnya yang harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah melakukan *tapa brata puja mantra* yang terdiri dari *angingirangi ing bukti* artinya mengurangi makan, *nyunyuda guling* artinya mengurangi tidur, *anyuda sanggama* artinya mengurangi bersenggama, *angampeta pangandika kang tanpa kardi* artinya menahan diri dari bicara yang tidak berguna, *ngilangna duka cipta* artinya menghilangkan duka nestapa.

Tapa brata puja mantra tersebut hendaknya dilakukan dengan mengetahui dan memahami makna *empan papan*, yaitu dalam kesunyian malam seorang perempuan diperintahkan untuk banyak memanjatkan doa karena pada malam hari terbukalah segala kehendak hati. Manusia dalam mencapai tingkat kehidupan yang tinggi tersebut harus menempuh jalan dengan cara memandang diri sedalam-dalamnya. Dengan jalan itu pikiran manusia dapat ditingkatkan ke arah buddhi yang akhirnya menemui Tuhan.

Perempuan diarahkan untuk menjalankan agama dengan kesucian, baik, pantas, teliti dan mempertimbangkan isinya, jangan sampai manusia seperti sampah yang hanya mengikuti arus laut. Hal ini karena agama berisi ajaran-ajaran mengenai kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat, yaitu manusia yang taqwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi yang berbeda dari cara hidup hewan.

Keutamaan perempuan juga dilihat dari keutamaan hatinya yaitu seperti dipaparkan pada pupuh Kinanthi bait 14, *di adining perempuan prabu utamaning tyas kang pinesthi tegese utama sabar*, artinya keutamaan perempuan raja adalah utama hatinya, yakni bersikap sabar. Sabar terhadap *pancabayaning ati* maksudnya sabar terhadap cobaan. Segala cobaan harus diterima dengan syukur dan rela.

Sikap sabar merupakan perbuatan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang yang sabar bisa diumpamakan sebagai

samudera lautan karena dengan sabar ini manusia mampu menghadapi segala cobaan, tidak mudah berputus asa, memiliki kekuatan iman, dan memiliki pengetahuan yang luas. Perempuan juga dituntut memiliki sikap *budi temen, tarima, legawa, lila, kandel-kumandel ing suksma, awas eling, betah ngangkah* dan *lembah manah*. Sikap-sikap di atas merupakan sikap hidup yang banyak dihayati dan diamalkan oleh masyarakat Jawa.

Perempuan tidak hanya dipandang secara sempit terbatas pada sikap-sikap kereligiusannya. Sebagai makhluk sosial, perempuan dituntut pula untuk mengabdikan dirinya sebagai anggota masyarakat melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Hal ini tampak pada penghormatan terhadap perempuan mengenai empat keberuntungan manusia, yaitu apabila memiliki ilmu pengetahuan, keluhuran budi, kekayaan, dan anak.

C. Perempuan dan Peradaban

Peran perempuan dalam perkembangan peradaban sangat besar, sehingga perempuan tidak perlu melepaskan fungsi-fungsi keperempuanannya (Alexis Carrel, 1987: 84). Dengan fungsi-fungsi itu perempuan dapat memperbaiki, melengkapi, dan menumbuhkan-kembangkan peradaban suatu bangsa ke arah yang lebih baik dan lebih beradab.

Perempuan dalam abad XXI, bukanlah saatnya lagi menjadi dominasi pria di semua lini kehidupan, namun sudah selayaknya menjadi *partner* mitra dalam mengarungi bahtera kehidupan dengan saling pengertian, membantu dan *sharing* dalam menyelesaikan tugas bersama, baik dalam keluarga, masyarakat, dunia kerja, maupun kehidupan global. Perempuan dewasa ini memang tidak hanya menjadi partner kerja pada pria untuk meraih keberhasilan institusi atau lembaga bekerja, melainkan juga menjadi *supporter* yang aktif dan bermakna di balik keberhasilan suami.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Loekman Soetrisno dalam menanggapi peran perempuan pada abad XXI ini menyatakan bahwa dirinya masih meragukan akan kesiapan perempuan menghadapi abad XXI. Untuk mampu berperan dan menggunakan seoptimal mungkin kesempatan yang tersedia pada abad XXI, perempuan dituntut memiliki sikap mandiri, di samping dibutuhkan kebebasan mengembangkan diri sebagai manusia sesuai dengan bakatnya.

Profil perempuan Indonesia saat ini dapat dilukiskan sebagai manusia yang harus hidup dalam situasi delimitatis. Kedilematisan ini karena di satu sisi perempuan dituntut untuk berperan dalam semua sektor, sedang di pihak lain muncul tuntutan agar tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

Contohnya, perempuan karir di satu sisi merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya kepada bangsa tetapi di pihak lain perempuan dihantui oleh opini masyarakat yang melihat bahwa perempuan atau ibu karier adalah salah satu sumber kegagalan pendidikan anak.

Kekhawatiran masyarakat terhadap peran ganda perempuan ini tentu bukannya tidak beralasan, karena apabila melihat kenyataan bahwa dunia modern yang mengukir kisah secara materi dan kaya ilmu pengetahuan serta teknologi, agaknya tidak cukup memberikan bekal yang kokoh bagi manusia sehingga banyak manusia modern tersesat dalam kemajuan dan kemodernannya.

Masyarakat Indonesia saat ini memang belumlah sampai pada taraf kehidupan modern sebagaimana dialami bangsa-bangsa maju yang berada dalam proses rasionalisasi dan sekularisasi yang semakin nyata. Namun, berkaitan dengan makin mekarnya peristiwa-peristiwa sadisme dan berbagai bentuk kekerasan serta kecongkakan dalam penyelesaian masalah sosial yang aktual dalam berbagai segi kehidupan di tanah air.

Kecongkakan yang mengandalkan rasio dan keunggulan diri itulah yang menyebabkan manusia modern menjadi tidak memahami makna dan konsep hidup yang sesungguhnya sebagai manusia sejati di tengah kemajuan yang luar biasa ini. Manusia tidak tahu lagi dari mana asal mula kehidupan, untuk apa manusia hidup dan ke mana akhir hidup ini. Manusia tidak memahami *sangkan paraning dumadi*, kata orang Jawa.

Memperhatikan kenyataan tersebut, maka perlunya adanya pendidikan, etika, dan agama dalam kehidupan sehari-hari sebagai imbalan pendidikan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan (Jacob, 1991: 177). Pendidikan inilah yang tentunya pertama kali harus diperoleh dari keluarga.

D. Kodrat Perempuan

Dengan memperhatikan pengertian di atas sudah selayaknyalah kalau perempuan dihargai, dijunjung tinggi derajatnya karena perempuan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kaum pria yaitu melahirkan anak yang akan menyambung cita-cita hidupnya. Namun kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat memandang tinggi keberadaan perempuan, sebagaimana terjadi pada peradaban masyarakat lampau.

Pada era modern ini perempuan menghadapi dua tantangan. *Pertama*, berasal dari dirinya sendiri, yaitu berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam keluarga khususnya. *Kedua*, ilmu dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berperan ganda. Perempuan dituntut untuk meningkatkan peranan dan potensinya dengan melakukan berbagai cara salah satunya, melalui pendidikan formal maupun non formal, dalam negeri maupun luar negeri.

Perempuan sebagai pendidik dituntut memberikan pendidikan kepada anak-anaknya atau bahkan kepada generasi muda dengan pendidikan yang lebih terarah terutama dalam mempersiapkan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

kepribadian anak sehubungan dengan gencarnya pendidikan yang hanya mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan inilah, diperintakkannya seorang perempuan untuk menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Hal ini karena orang tua sebagai penyebab kehadiran manusia di dunia dan yang telah memberikan bekal kepada anak-anaknya. Guru merupakan orang yang telah memberi petunjuk tentang kebaikan. Apabila darma tersebut ditunaikan dengan sebaik-baiknya tanpa pamrih maka akan menjadi sarana mencapai ketentraman batin (Magnis Suseno, 1996: 147). Dengan ilmu yang telah diperoleh itu manusia bisa mengembangkan potensinya dan dengan ilmu pula akan menambah produktivitas kerja.

Kepemilikan kekayaan bagi seorang perempuan kini juga merupakan suatu keharusan yang mana seorang perempuan dituntut untuk ikut menunjang kehidupan perekonomian keluarga dengan cara bekerja (Tatty S.B. Amran, 1991: 81). Perempuan yang ikut mencari nafkah tambahan juga merupakan salah satu pengembangan sumber daya manusia, karena suatu saat tidak jarang perempuan akhirnya menjadi pemimpin yang selalu siap terlibat dalam persaingan hidup yang semakin keras dan penuh tantangan.

Perempuan tidak cukup hanya memiliki kekayaan, anak dan kepandaian, tetapi juga harus memiliki keluhuran budi. Keluhuran budi itu di antaranya keimanan perempuan terhadap Tuhannya, maksudnya: perempuan harus percaya penuh bahwa Tuhan itu Nyata Maha Ada, dan perempuan harus percaya penuh dengan kebulatan tekad bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan harus meresapi dan meliputi pikirannya, perasaannya, perkataannya dan perbuatannya (Damardjati Supadjar, 1985: 14).

Keimanan itu akan menumbuhkan rasa taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti perempuan harus selalu ingat pada sifat-sifat Tuhan. Ketaatan itu yang dapat mewujudkan sikap perempuan yang

sabar dan tawakal terhadap segala yang diberikan Tuhan baik senang maupun susah. Orang yang hidupnya ditopang dengan sikap sabar dan akan mempunyai arah hidup yang jelas yang pada akhirnya akan menemukan kebahagiaan.

Kepasrahan kepada Tuhan merupakan salah satu sikap hidup orang Jawa yang sering dikenal dengan ungkapan *nrima ing pandum* (menerima apa yang telah diberikan) karena segala sesuatu sudah diatur. Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa *narima* itu bermakna *refers to the state of being content or accepting something with fullness* (1988 : 2). Bagi masyarakat Jawa ungkapan *narima* merupakan ungkapan terima kasih atas segala pemberian yang diperoleh dari Tuhan yang Maha Pemurah. Dengan prinsip hidup *nrima ing pandum*, seseorang tidak mempunyai sifat serakah atau iri hati.

Ungkapan *nrima ing pandum* pada dasarnya merupakan adanya pengendalian diri dari seseorang agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Apabila manusia Jawa patuh terhadap ungkapan ini, tentu akan selalu *eling* (ingat) dan *waspada* (waspada) agar apa yang diperoleh sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri, yang penting harus menerima apa adanya yang telah diberikan Tuhan.

Sikap pasrah yang dimaksudkan adalah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan setelah melakukan upaya sehingga keputusan terakhir terletak di tangan Tuhan. Dalam masyarakat Jawa terdapat konsepsi bahwa *manungsa winenang ngupaya, purba wasesa ing astane Kang Maha Kuwase* atau *manungsa winenang angudi, purba wasesa ing astane Gusti*. Artinya; manusia berhak berusaha, (namun) kepastian terletak di tangan Tuhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian terakhir, segalanya diserahkan kepada Tuhan.

Sikap *narima* ini menjadikan orang yang paling miskinpun dapat merasa bahagia. Karena kebahagiaannya tidak timbul karena benda materiil, melainkan dari kepuasan hati terhadap apa yang telah

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

dicapai. *Narima* ini berarti ketenangan afektif dalam menerima segala sesuatu dari dunia luar, harta benda, kedudukan sosial, nasib malang maupun untung.

Kecenderungan umum masyarakat modern, tidak begitu hirau lagi terhadap persoalan-persoalan metafisis: tentang eksistensi manusia, asal mula kehidupan, makna dan tujuan hidup di jagad raya. Manusia modern telah kehilangan aspek moral sebagai fungsi kontrol dan terpasung dalam sangkar *the tyranny of purely material sains*. Modernisme telah gagal karena telah mengabaikan nilai-nilai spiritual transendental sebagai potensi kehidupan, sehingga manusia modern termasuk juga perempuan harus membetengi diri dengan latihan-latihan batin.

Sarana untuk latihan-latihan batin itu dengan *melakukan tapa brata puja mantra*. Hakikat tindakan itu manusia digiring untuk mengetahui *sangkan paraning dumadi* agar manusia tidak terseret pada pertarungan dunia yang serba materialistis. Karena pada masa kini, kebenaran dalam hidup merupakan kebenaran yang dibingkai standar kegunaan, terutama secara ekonomi dan materi.

Ajaran lain yang berhubungan dengan latihan-latihan batin bagi seorang perempuan ialah sikap *eneng, ening, awas, eling, tata, titi, teteg, ngati-ati*. Artinya; diam, jernih, waspada, ingat, teratur, teliti, teguh, dan hati-hati. Sikap ini diperlukan sebagai sarana untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin keras. Hal ini lebih disebabkan oleh kemanusiaan seseorang itu akan selalu membawa godaan dan cobaan yang diwujudkan dalam segala macam dan tahap keinginannya sampai yang paling halus yang tidak terinsyafi (Soemarsaid Moertono, 1984: 163).

Seorang perempuan yang hanya memiliki kepandaian, kekayaan, dan anak, namun tidak diimbangi dengan kepemilikan keluhuran budi itu merupakan satu tanda akan timbulnya krisis moral. Hal ini dikarenakan tujuan manusia hidup bukan hanya

memiliki kepandaian, kekayaan dan anak akan tetapi tujuan hidup manusia yang utama adalah mencapai kebahagiaan yang tertinggi yakni *moring kawula Gusti* (bersatunya hamba dengan Tuhan). Keluhuran budi sendiri merupakan percikan dari ajaran-ajaran Tuhan yang harus ditaati oleh umat manusia.

Namun sayangnya, ajaran-ajaran Tuhan itu sering-kali disalah pahami oleh masyarakat. Misalnya, adanya pernyataan seseorang bahwa perempuan telah ditakdirkan memiliki kemampuan yang hanya seperdelapannya laki-laki. Hal ini tampak pada kalimat semacam ini: *nadyan wus kanthi pinasthi marang Hyang Kang Murbeng Titah, grahitaning para perempuan, saprahastaning pra putra, arantaraning pamikir, marmeng ngger away sireku, pasang sumeh jroning ati*. Artinya; walau sudah ditentukan oleh Tuhan Pencipta Alam bahwa akal perempuan seperdelapannya laki-laki, hendaklah engkau tetap menerima dalam hati.

Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang perempuan sebagai manusia yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keinferioritasan (perempuan sebagai perempuan bawahan, rendah dan kurang baik), sedangkan pria adalah superioritas (manusia atasan, pimpinan) merupakan salah satu dari sekian banyak isu mengenai perempuan. Pandangan ini merupakan akibat dari pemahaman dan interpretasi masa lalu yang sulit diterima pada masa sekarang. Kesalahfahaman tersebut merupakan akar dari berbagai masalah yang timbul tentang perempuan, khususnya dalam kehidupan berkeluarga juga kehidupan publik.

Untuk mengetahui sejauh mana batas kemampuan perempuan tentu terlebih dahulu diadakan pembahasan lebih mendalam. Sehingga dapat diketahui letak kekurangannya serta ketidak-mampuannya dan sejauh mana batas kekurangan tersebut.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pernah diadakan suatu pembahasan komprehensif tentang perbedaan karakter pria dan perempuan oleh Turman dan Melis; pada saat yang bersamaan ditemukan bahwa faktor kepriaan dan keperempuanan itu berkaitan dengan faktor-faktor pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dan pengajaran, baik di rumah maupun di luar rumah.

Lalu pertanyaannya, jika perempuan dikatakan kurang akalnya, mengapa para pria sejak dulu hingga sekarang mempercayakan kaum perempuan untuk mengasuh anak, mengatur keluarga dan lain-lain? Tentunya, bila perempuan benar-benar kurang akal, kaum pria tidak perlu mempercayakan kepada kaum perempuan seputar mengasuh, merawat, dan mengatur belanja. Apalagi, tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang berat dan sudah semestinya dipikul berdua.

Pernyataan mengenai akal perempuan yang seperdelapan tersebut tentu sangat berlawanan bila melihat kenyataan masa kini tentang banyaknya peranan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan –seperti dalam sains, kesusasteraan, politik kenegaraan, pendidikan, dan lapangan-lapangan lain– yang sebelumnya dianggap berada di luar jangkauan kapasitas perempuan.

Walaupun hingga kini masih banyak dari masyarakat yang memandang rendah perempuan, tapi dalam kenyataannya banyak juga yang memberikan penghargaan kepada perempuan, yakni diberinya kesempatan untuk memiliki ilmu pengetahuan, keluhuran, kekayaan dan juga anak. Dengan keempat hal tersebut diharapkan perempuan mampu mengembangkan potensinya demi masa depan keluarga maupun bangsa.

Gerakan Perempuan dalam Panggung Sejarah

A. Para Pejuang Perempuan

PERANAN perempuan sangat penting kedudukannya dalam masyarakat. Sejarah telah membuktikan arti penting kedudukan perempuan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Kaum perempuan tidak dianggap sebagai seorang manusia yang berasal dari sesuatu yang lain dan harus disikapi dengan cara-cara selain berperikemanusiaan. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki hak-hak yang setara dengan kaum laki-laki dan sudah sepatutnya untuk disikapi sebagaimana manusia pada umumnya.

Dalam bahasan berikut ini akan dibahas secara singkat dari beberapa tokoh-tokoh perempuan yang mendukung eksistensi dan legitimasi pemerintahan. Mereka bukanlah orang-orang yang hanya diam dalam berbagai kebijakan yang berpotensi menyisakan korban, khususnya pada diri kaum perempuan.

1. Dewi Sima

Dewi Sima merupakan satu di antara raja yang memerintah Kerajaan Kalingga dengan adil. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan di dalam teritorial Kalingga mengalami kemakmuran dan kebesaran. Bahkan, pada masa kepemimpinan Dewi Sima itulah banyak disebut-sebut sebagai zaman keemasan Kerajaan Kalingga.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Oknum pencuri, misalnya, akan dijatuhi hukuman mati atau hukum berat bentuk lainnya jika memang terbukti melakukan atau merekayasa aksi pencurian. Hukuman semacam ini tidak hanya berhenti pada hukuman saja, namun juga diiringi penumbuhan dan pengembangan kualitas rakyat dalam memperoleh rejeki. Dengan demikian, potensi merebaknya kasus-kasus semacam pencurian dapat diminimalisir mulai dari minat mencuri hingga aksi pencurian.

Dalam kebijakan hukum yang tidak tebang-pilih itulah rakyat Kalingga dapat leluasa dalam keamanan dan kenyamanan selama menjalani kehidupan. Mereka tidak takut lagi meninggalkan harta benda di rumah yang sedang ditinggal kerja, berkumpul di luar rumah, hingga kegiatan-kegiatan lainnya yang mengharuskan untuk pergi dari rumah.

2. Lara Jonggrang

Di dalam pemerintahan raja Baka di Mataram Kuna ada peristiwa yang kemudian lalu bernama ceritera Lara Jonggrang. Ia adalah puteri raja yang dipinang oleh seorang satria yaitu Bandung Bandawasa. Meskipun raja mempunyai kekuasaan yang sangat besar namun Lara Jonggrang tidak dipaksa menerima lamaran tersebut, akan tetapi diberi kebebasan untuk menjawab dan menentukan sikap sendiri.

3. Dewi Kilisuci

Setelah raja Erlangga mengundurkan diri sebagai raja, sebenarnya yang berhak menggantikannya sebagai raja adalah Dewi Kilisuci. Akan tetapi ia tidak bersedia menjadi raja dan lebih suka menjadi pertapa di gunung Penanggungan. Ia dapat menentukan sikap dan menjalankan perbuatan sesuai dengan kehendak hati nuraninya sendiri. Ini berarti bahwa ia juga memberi kesempatan kepada kedua saudaranya untuk menggantikan ayahnya sebagai raja Daha dan Jenggala.

4. Calon Arang

Meskipun Calon Arang melakukan perbuatan melawan negara, namun ia saya kemukakan sebagai contoh karena dengan segala ketekunannya ia menjadi orang yang sakti. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu perempuan juga mendapat kesempatan mengembangkan kepandaianya sesuai dengan kemampuannya. Kecakapan dan kepandaian bukan menjadi monopoli kaum pria saja.

5. Dewi Sekartaji

Sejarah Jenggala dan Daha penuh dibiaskan dengan ceritera romantik antara Panji dengan Dewi Sekartaji. Dalam hal ini nampak sekali bahwa perempuan dalam hal ini Dewi Sekartaji mempunyai hak untuk menentukan pilihannya sendiri demi kebahagiaannya. Ceritera-ceritera roman tersebut misalnya berbentuk ceritera Dewi Kleting Kuning dan ceritera tentang Cinde Laras. Dari ceritera ini nampak bahwa ketenteraman negara sebagian juga tergantung kepada ketenteraman keluarga raja.

6. Tribuwana Tungga Dewi Jayawisnuwardhani

Di dalam pemerintahan Majapahit tercatat adanya beberapa perempuan yang menduduki jabatan tertinggi yaitu raja Tribuwana Tungga Dewi Jayawisnuwardhani sebagai raja puteri yang sangat terkenal karena memerintah dengan baik dan merintis kebesaran kerajaan Majapahit. Di samping itu ada lagi raja puteri yaitu Dewi Suhita yang semasa tampuk pemerintahannya diwarnai oleh terjadinya Perang saudara yaitu perang Paregreg. Setelah perang ini dapat diatasi oleh ayahnya yang bertahta kembali, akhirnya Dewi Suhita menjadi raja lagi untuk kedua kalinya menggantikan ayahnya.

7. Ratu Kalinyamat

Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi pembunuhan terhadap Sunan Kalinyamat dan Sunan Prawata. Pembunuhan ini dilakukan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

oleh Ariya Penangsang yang menjadi Adipati Jipang. Ia adalah putera Pangeran Sekar Seda Lepen. Pangeran Sekar Seda Lepen adalah putera Sultan Demak dan kakak Sultan Trenggana. Pangeran Sekar Seda Lepen wafat dibunuh oleh seseorang di sungai karena itu namanya terkenal dengan Pangeran Sekar Seda Lepen artinya yang meninggal di sungai. Karena ia wafat maka yang menggantikan menjadi raja ialah Sultan Trenggana. Karena itu sewafat Sultan Trenggana, Ariya Penangsang merasa bahwa sebenarnya yang berhak menjadi raja adalah dia. Untuk mencapai maksudnya itu karena merasa bahwa ayahnya dahulu dibunuh oleh Sunan Prawata, maka ia lalu membalas tidak hanya membunuh Sunan Prawata tetapi juga Sunan Kalinyamat. Iapun mencoba membunuh Adipati Pengging akan tetapi tidak berhasil. Untuk membalas pembunuh suaminya, maka Nyai Kalinyamat pergi bertapa tanpa berpakaian, sampai merasa mendapat petunjuk bahwa pembunuh tersebut akan mendapat balasan setimpal. Dalam hal ini sedikit banyak ia ikut serta menentukan arah dan nasib kerajaan selanjutnya. Walaupun perbuatannya hanyalah suatu protes terhadap ketidakadilan dan perbuatan sewenang-wenang terhadap suaminya, tetapi hal ini mengundang simpati dan rasa kasihan masyarakat untuk membantu menghancurkan sumber kejahatan itu.

8. Putri Pembayun

Pada waktu Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senapati menghadapi Utan melawan Ki Ageng Mangir, salah satu cara untuk mengalahkan musuh tersebut adalah menjadikan putera puterinya sendiri sebagai istri Ki Ageng Mangir. Diceriterakan bahwa Ki Ageng Mangir orang yang sakti dan mempunyai senjata tombak bernama Kyai Baruklinting. Dengan kekuatan senjata Mataram tidak berhasil mengalahkan musuhnya. Karena itu lalu dicari jalan yang sebaik-baiknya untuk mengalahkan Ki Ageng Mangir. Puteri raja Dewi Sekar Pembayun dijadikan pemain teledak bersama-sama dengan

rombongan penabuh gamelan yang telah diatur. Ki Ageng Mangir berkenan menanggapi dan setelah melihat kecantikan pemain puteri tersebut ia jatuh cinta. Kemudian teledak tersebut dijadikan istrinya. Setelah selang beberapa lama tahulah Ki Ageng Mangir bahwa istrinya adalah putera musuhnya yaitu raja Mataram. Nasi telah menjadi bubur. Ia bersama istrinya menghadap raja dengan maksud menunjukkan kesetiannya kepada raja. Sesampainya di istana, ia menghadap dan menyembah raja. Pada waktu itulah raja menghantamkan kepala Ki Ageng Mangir ke lantai dan wafatlah ia (Sunoto, 1983).

9. Prabu Putri Dewi Suhita

Setelah Wikramawardhana meninggal dunia, maka dia digantikan oleh seorang putri, Dewi Suhita. Seperti dikatakan di awal bahwa putra mahkota meninggal dunia pada tahun 1409. Wikramawardhana memang memiliki saudara laki-laki, yakni Bre Tumapel. Akan tetapi, Suhita dianggap lebih pantas daripada Bre Tumapel. Ibu Dewi Suhita adalah Bre Mataram, keturunan Wirabumi dengan Negarawardhani. Dengan demikian, golongan Wirabumi sangat bersenang hati. Mereka merasa mendapat kesempatan untuk berkuasa di keraton. Dewi Suhita banyak mengambil punggawa dari pengikut Wirabumi. Dendam politik ini muncul kembali sehingga akhirnya, Raden Gadjah yang dahulu membunuh Wirabumi, pada tahun 1433 mendapat balasannya hingga tewas. Balas-membalas dendam ini rupanya membuat suasana Majapahit semakin kacau. Dalam suasana demikian, bentangan tangan Majapahit tidak luas lagi. Kekuasaan Majapahit semakin kecil dan angkatan laut Majapahit juga mengecil jumlahnya.

Yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah anak perempuannya yaitu Suhita (1429-1447), dimana ibunya adalah anak dari Wirabumi. Masa pemerintahannya ditandai berkuasanya kembali anasir-anasir Indonesia, antara lain didirikannya berbagai

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

tempat pemujaan dengan bangunan-bangunan yang disusun sebagai punden berundak-undak di lereng-lereng gunung (misalnya *Candi Sukuh* dan *Candi Ceta* di lereng gunung Lawu). Selain itu terdapat pula batu-batu untuk persajian, tugu-tugu batu seperti menhir, gambar-gambar binatang ajaib yang memiliki arti sebagai lambang tenaga gaib, dan lain-lain. Di Daha ia digantikan anaknya, Ranawijaya yang bergelar Bhatara Prabu Girindrawardhana, yang berhasil menundukkan Kertabhumi dan merebut Majapahit di tahun 1474. Menurut prasastinya di tahun 1486 ia menamakan dirinya raja Wilwatika Daha Janggala Kadiri, namun kapan berakhirnya memerintah tidak diketahui. Demikian tentang riwayat Majapahit semakin gelap, kecuali berita-berita dari Portugis bahwa Majapahit di tahun 1522 masih berdiri dan beberapa tahun kemudian kekuasaannya berpindah ke kerajaan Islam di Demak.

Akan tetapi, masih ada juga kerajaan-kerajaan yang meneruskan corak kehinduan Majapahit misalnya, Pajajaran yang akhirnya lenyap setelah ditundukkan oleh Sultan Yusuf dari Banten di tahun 1579, juga Balambangan yang di tahun 1639 baru bisa ditundukkan oleh Sultan Agung dari Mataram, disamping masyarakat di Pegunungan Tengger yang sampai saat ini masih mempertahankan corak Hindunya dengan memuja Brahma, dan Bali yang masih tetap dapat mempertahankan kebudayaan lamanya. Penerus Majapahit yang tetap di Majapahit (selain Purbawisesa yang berkeraton di Kahuripan adalah Kertabumi/Brawijaya, yang memerintah di tahun 1453-1478. Tidak diketahui mengenai perjalanan kerajaannya. Namun ia mempunyai salah satu putra yang bernama raden Patah atau Jin Bun, yang diberi kedudukan sebagai Bupati Demak. Hanya saja yang menarik, ia mengundurkan diri dan pindah ke gunung Lawu, lalu masuk agama Islam. Pada tahun 1437 terjadi peristiwa unik Bre Daha diangkat menjadi ratu Majapahit. Keadaan ini menunjukkan adanya ketegangan yang memuncak, sementara Dewi Suhita tidak berdaya mengatasi kekacauan tersebut.

10. Ratu Mas Balitar

Kanjeng Ratu Mas Balitar adalah garwa dalem sinuwun Paku Buwana I. Gelar Ratu Balitar lainnya adalah Kanjeng Ratu Ibu atau Sang Aprabu Nini. Berhubung kepribadiannya yang luhur dan agung, Ratu Balitar dihormati sebagai *Putri amardika jimate wong nusa Jawa* (Alexander Sudewa, 1995: 245). Sikap Ratu Balitar yang bijak bestari ini mampu meredakan krisis politik yang selalu bergolak pada masa awal kerajaan Kartasura dan Surakarta. Hal ini bukan suatu kebetulan, karena beliau adalah seorang tokoh putri yang gemar akan ilmu pengetahuan.

Ratu Balitar terlibat dalam pembuatan karya sastra yang berjudul *Serat Iskandar*, *Serat Menak*, dan *Serat Yusuf*. *Serat Iskandar* masih berkaitan dengan Hikayat Iskandar Zulkarnain berbahasa Melayu yang pernah dianalisis oleh Siti Chamamah Soeratno (1991) dalam bentuk disertasi. *Serat Menak* dan *Serat Jusuf* ini dibuat oleh Ratu Balitar di samping untuk syiar Islam juga demi kemajuan pendidikan masyarakat saat itu yang selalu menghadapi pergolakan politik. Bagi kebanyakan para putri sekarang, kiranya patut apabila mau meniru kebijaksanaan dan kepandaian Kanjeng Ratu Mas Balitar dalam menyikapi perubahan dan pergolakan di pentas kenegaraan.

11. Raden Ajeng Kartini

Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Untuk mengetahui kehidupan Raden Ajeng Kartini, bisa ditelusuri lewat museum Kartini. Museum R.A. Kartini berada dilingkungan rumah dinas Bupati Rembang (Jl. Gatot Subroto 8 Rembang), merupakan bangunan asli yang dulu dihuni R.A. Kartini beserta suaminya Djajodingrat, Bupati Rembang (1889-1912). Sampai sekarang bangunan tersebut masih dipergunakan sebagai rumah dinas Bupati Rembang. Museum R.A Kartini menempati salah satu kamar yang dulu di tempati R.A Kartini untuk melakukan aktivitas, menulis

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

buah pikiran dan ide-ide beliau, juga sebagai tempat beliau melahirkan putera satu-satunya yang bernama R.M. Susalit, dan sebagai kamar pribadi sampai beliau wafat. Disini pengunjung dapat melihat beberapa perabot yang dulu dipergunakan R.A Kartini; seperti bak mandi, bothekan tempat jamu, kotak jahitan, meja makan, meja merawat bayi, lukisan karya R.A Kartini berupa tiga ekor angsa, naskah tulisan tangan, sepasang rono penyekat ruangan dari kayu berukir hadiah dari ayahandanya, foto-foto kenangan semasa hidupnya di sekitar museum, disebelah timur gapura kompleks Rumah Dinas Bupati, masih berdiri dengan kokoh, bangunan kuno yang dahulu digunakan R.A Kartini untuk mengajar anak-anak bumi putera.

Beliau dimakamkan di desa Bulu, 17,5 Km dari kota Rembang ke arah selatan jurusan Blora. Di tempat ini pada tanggal 17 September 1904 dimakamkan pahlawan Pergerakan Perempuan Indonesia. Areal makam tersebut merupakan makam keluarga Bupati Rembang R.M.A.A. Djodjoningrat dan putera R.A. Kartini, R.M Soesalit. Pada bulan April tepatnya tanggal 21 April untuk memperingati hari kelahiran RA Kartini, puluhan ribu pengunjung berziarah ke makam tersebut.

12. Dewi Sartika

Raden Dewi Sartika di lahirkan di Cicalengka, Jawa Barat, pada tanggal 4 Desember 1884. Meskipun beliau tidak berpendidikan tinggi, cita-citanya sangat tinggi, terutama untuk menjunjung drajat kaum perempuan. Di Bandung beliau mendirikan sekolah istri pada tahun 1904, untuk memberi kesempatan kepada anak-anak perempuan menuntut ilmu pengetahuan. Murid-muridnya diberi pelajaran berhitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam dan agama. Pada tahun 1910, sekolah ini bertambah maju dan memiliki gedung sendiri, kemudian namanya diganti menjadi “sekolah Keutamaan Istri”. Selain itu, mata pelajarannya pun ditambah dengan

pelajaran yang ada hubungannya dengan pembinaan rumah tangga yang trampil dan baik.

Untuk membiayai sekolah itu, beliau bekerja keras dengan berbagai kegiatan di Bandung kegiatan beliau itu banyak menarik pula perhatian kaum perempuan di daerah lainnya, sehingga di Tasikmalaya, Garut, Purwakarta dan kota-kota lainnya, berdiri “Sekolah Keutamaan Istri”. Oleh karena itu, suaminya ikut membantu, baik pikiran maupun tenaga. Para pejabat pemerintah sering mengunjunginya, bahkan pemerintah pun menghadiakan sebuah “bintang Perak” sebagai penghargaan atas jasa-jasanya.

Kendati selama perang Dunia 1 sulit mencari uang, pada tahun 1929 “Sekolah Keutamaan Istri” mampu memiliki gedung sendiri dan mengubah namanya menjadi “Sekolah Dewi Sartika”. Karena semasa perang kemerdekaan kota Bandung diduduki Belanda, maka Dewi Sartika menghentikan kegiatannya. Beliau mengungsi ke Cinean dan wafat di sana pada tanggal 11 September 1947. Jenazanya semula dimakamkan disana, tapi kemudian di pindahkan ke Bandung.

13. Cut Nyak Dien

Dalam sejarah nasional Cut Nyak Dien dikenal sebagai pejuang perempuan yang tangguh dalam memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Baik kawan maupun lawan sangat segan dan menaruh hormat terhadap kegigihan pejuang perempuan dari Aceh ini. Beliau mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi dalam hal kepemimpinan. Bujuk rayu dan iming-iming yang bersifat material duniawi tidak pernah menggoyahkan semangat perjuangannya. Demi kepentingan bangsa dan negaranya, Cut Nyak Dien rela berkorban.

Nama harum Cut Nyak Dien menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri bangsa. Kepentingan umum harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan keluarga atau golongan. Semangat dan tekad Cut Nyak

Dien yang membara itu tetap dijadikan teladan oleh bangsa kita, baik untuk cermin masa lalu, perjuangan masa kini dan proyeksi ke masa depan. Semangat yang tiada lelah ini sangat relevan untuk dijadikan refleksi dan introspeksi bagi kita semua.

14. Maria Martha Tiahahu

Pahlawan perempuan yang lahir dari kawasan Indonesia Timur, khususnya dari daerah Maluku adalah Maria Martha Tiahahu. Beliau sangat peduli pada nasib bangsa dan negaranya. Akibat sikap penjajah yang sewenang-wenang, telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang panjang. Mereka adalah kaum lemah yang perlu dibela nasibnya.

Penghisapan, penghinaan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial menyebabkan Maria Martha Tiahahu untuk tampil memimpin perjuangan demi mengentaskan penderitaan rakyat. Dengan segala daya upaya dan pikiran, perjuangannya dilakukan di tengah-tengah rakyat. Ketulusan dan keteladanan Maria Martha Tiahahu patut dikenang sampai sekarang.

15. HR. Rasuna Said

Bangsa Indonesia pantas mengenang perjuangan yang dilakukan oleh HR. Rasuna Said. Jasa-jasanya terutama dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keilmuan. Beliau percaya bahwa kemajuan dapat dicapai hanya dengan melalui lapangan pendidikan. Rakyat yang cerdas tentu bisa menolong dirinya sendiri dan memperoleh kemandirian. Oleh karena itu perlu didirikan lembaga pengajaran yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada masa pergerakan nasional, HR. Rasuna Said selalu tampil di berbagai organisasi dan forum. Tak jemu-jemu beliau menyampaikan aspirasi agar hak-hak rakyat sebaiknya dipenuhi oleh pemerintah kolonial. Sungguh tidak etis rakyat pribumi sebagai pemilik sah negerinya justru hidupnya penuh dengan penderitaan. Rupa-rupanya idealisme beliau mendapat dukungan dari sesama

rekan perjuangan. Kini nama beliau diabadikan untuk nama jalan utama di ibu kota negara.

B. Perjuangan Perempuan di Pentas Pekerti Putri Sejati

Pekerti putri sejati sebagaimana yang dicontohkan dalam uraian di atas sesungguhnya tampak pada jasa-jasanya dalam keluarga, masyarakat dan negara. Hidupnya selalu penuh dengan pengabdian dan keiklasan. Dia lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dalam kehidupan keluarga Jawa tidak terdapat kesamaan kedudukan antara suami dan istri. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan penting serta mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Kita berpendapat bahwa istri juga mempunyai peranan yang penting bahkan dalam hal-hal tertentu lebih besar dari peranan suami. *Mangun bale wisma* merupakan harapan bagi orang Jawa mengenai masa depan yang berhubungan dengan rumah tangga. Masa kini adalah masa yang dipenuhi oleh berbagai gelombang permasalahan, satu sama lain saling berkait, yang jalinan kaitannya cenderung menyeluruh, meluas secara mondial, berkat jaringan komunikasi modern, sebagai salah satu hasil Ilmu Pengetahuan Modern.

Konsep-konsep besar oleh pemikir-pemikir kaliber dunia A. Tofler, khususnya mengenai: Gelombang Ketiga. Dialog-dialog internasional juga makin berkembang, bukan saja dialog Timur-Barat, melainkan juga Utara-Selatan, bahkan Selatan-Selatan. Kita perhatikan sekali lagi ucapan Dwight D. Eisenhower:

...Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a shaft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed ...

The cost of one modern heavy bomber is this: a brick school in more than 30 cities. It is two electric power plants, each serving a town of 60.000 population. It is two fine, fully equipped hospitals. It is some 50

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

miles of concrete highway. We pay for a single fighter plane with a half million bushels of wheat. We pay for a single destroyer with a new homes that could have housed more than 8.000 people.

This is not a way of life at all, in any true sense. Under the cloud of threatening war, it is humanity hanging from a cross of iron. Is there no other way the world may live?

Sungguh tepatlah apabila para ahli memikirkan tentang Etika Profesional. Ketika Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan suatu diskusi panel mengenai hal itu, dalam salah satu dialognya terdapat pertanyaan, “Kita ini makin *ethis* atau tidak?” E. Yohannes menjawab: Dari gelombang I ke gelombang II, kita makin tidak *ethis*; mudah-mudahan saat-saat sekarang ini, kita makin *ethis*” (Damardjati Supadjar, 1993). Dialog semacam itu tentu saja masih dapat dilanjutkan, misalnya: Pembangunan yang terlalu memusat di Jawa itu *ethis* atau tidak? Dilihat dari pelimbahan populasi: *ethis*; dilihat dari Etika Lingkungan Hidup: masih dapat ditinjau kembali; dan lain-lainnya; dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengingatkan kita kepada pesan lama pada buku lama, karya Pujangga Jawa:

Jagra angkara winangun,

Sudira marjayeng westhi,

Puwara kasub kuwasa,

Sastraning jre Weddha muni:

Sura dira jayaningrat,

Lebur dening Pangastuti.

Tiga baris pertama dari syair tersebut, yang juga mengacu pada baris ke-5, benar-benar senada dengan keluhan Eisenhower: *This is not a way of life at all, in any true sense*. Sementara itu baris penutupnya menyebutkan *way of life* yang dipujikan, yaitu “Pangastuti”. Bahwa kata-kata, “*Sura dira jayaningrat, lebur dening Pangastuti*” membuktikan bobot kualitatif kandungan isinya,

sekaligus membuktikan pula kesinambungan nilainya dahulu dan masa kini (Damardjati Supadjar, 1993). Kalau “Pangastuti” atau *abon-aboning panembah*, tersebut dapat dipandang sebagai salah satu Etika Jawa, yang berkesinambungan dahulu dan untuk masa kini, maka dalam arti apa/bagaimana: Etika, dari dan untuk orang Jawa?

Sinuhun P.B. IX ketika menguraikan “Filsafat” Hanacaraka, mengatakan bahwa caraka (cipta – rasa – karsa) sebagai utusan Tuhan menyatu di dalam napas, *ambegan*; jadi bukan sekedar pengetahuan/ilmu melainkan juga laku; maka nilai kemanusiaan Jawa diukur dari: Ambeg-nya: ambeg satria-inandhita, ambeg jatmika *ambeg candhaling budi* dan lain sebagainya. Kata-kata Jawa memang mempunyai konotasi *gandha* (lahir – batin). *Ambegan* = napas; tapi lebih dari itu, *ambegan* mengacu kepada kriteria etis: *ambeg ...*, *ambeg... Wungon* tidak saja berarti: *bangun* (berjaga), tapi juga menambah kadar sinar: *wungu* (*ultra-violet*), suatu unsur terpenting bagi daya *ke-washitha-an* (*clairvoyance; helderziend*).

Apakah ini hanya suatu: *othak-athik-mathuk*? mengapa tidak? Sebagai suatu metode bahkan memasukkan cara-cara Frobel dan Montessori: namun masalahnya, seharusnya tidak hanya berhenti pada rekonstruksi atau konstruksi teoritis, melainkan memverifikasikannya kepada realitas; dalam hal ini laku – perbuatan (*way of life*: cara hidup); dengan demikian kita akan menghargai sepenuhnya pesan Magnis Suseno, agar tidak berpantang memulai dengan suatu konstruksi teoritis.

C. Perjuangan Perempuan antara Tradisi dan Modernisasi

Kaum perempuan, khususnya perempuan yang berasal dari kraton Jawa, senantiasa berjuang pada wilayah etiket. Etiket berhubungan erat dengan Tradisi. Pada masa kini, karena modernisasi, lalu menampakkan sifat kelenturan. Dengan berpegang pada azas Tri-Kon, mengamati Etika, dalam rangka: Tradisi dan Modernisasi.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pergeseran ajaran kosmologi (*ning-rat*) menjadi perwatakan *socio-kultural-ekonomis* (feodal), sungguh merupakan obyek telaah yang amat menarik. Peringatan para pendiri bangsa agar, “Pemuda jangan terbelenggu oleh sejarah masa-lampau”, memberi isyarat agar kita selalu korektif (Damardjati Supadjar, 1993). Sifat korektif demikian bahkan juga disadari oleh fihak kolonial dahulu, yaitu ketika mereka melanjutkan kolonisasi secara “etis”: irigasi (etika lingkungan); edukasi (etika individual), dan transmigrasi (etika sosial), masih relevan untuk diperhatikan.

Dibicarakan Etika dan Tata-Krama Jawa (seiring dengan Sunda dan Bali) dahulu dan masa kini dalam rangka Seminar (Festival) Bahasa/Sastra, Etika dan Seni Tradisional), tidak dapat dilepaskan dari momentum Alih Generasi dan Alih Teknologi khususnya dan momentum pembangunan pada umumnya. Bangsa Indonesia sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pendidikan dan lain-lain. Pembangunan dan perkembangan masyarakat berjalan kait-mengait, karena pembangunan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat, sebaliknya perkembangan masyarakat menuntut pembangunan di segala bidang. Sudah tidak asing lagi bahwa dalam rangka pembangunan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi memegang peranan penting. Bahkan sementara orang berpendapat bahwa masyarakat sekarang dan mendatang akan dipimpin oleh pengetahuan termasuk teknologi dan e-konomi.

Kaum positivist misalnya menolak nilai-nilai teologik dan kosmologik dan mengagungkan nilai positif yaitu yang berlaku kini dan disini. Kaum positivist juga dihadapkan pada kenyataan, bahwa masyarakat dalam fase positif pun menghadapi berbagai masalah yang cukup rumit. Dalam fase ini ternyata masyarakat juga belum hidup aman-tenteram dan sejahtera, tetapi dihadapkan pada berbagai peperangan, bentrokan, pembajakan dan teror serta penindasan baru

(Sunoto, 1989). Bangsa Indonesia sudah bertekad bulat bahwa pembangunan di segala bidang ini diarahkan untuk merealisasi tujuannya berupa masyarakat adil-makmur, material-spiritual berdasarkan nilai luhur budaya bangsa. Meskipun demikian kita sadar bahwa dalam rangka pembangunan nasional, kita dihadapkan pula pada berbagai masalah antara lain berupa pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam dan dari luar negeri.

Masalah yang berasal dari dalam antara lain berupa sikap hidup dan perbuatan hidup manusianya sendiri, misalnya sikap pasrah yang pasif, terserah pada nasib, menutup diri, dan secara apriori menolak segala bentuk yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Pengaruh dari luarjuga menyangkut berbagai bidang, misalnya politik, ekonomi, so-sial, budaya.

D. Perempuan dan Modal Budaya

Dalam rangka pembangunan nasional, bangsa Indonesia telah mempunyai modal dasar yang cukup lengkap dan tangguh. Salah satu diantaranya adalah modal budaya yakni bu-daya bangsa Indonesia yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa. Dengan modal ini mestinya bangsa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan bahkan dapat memberikan jawaban yang tepat. Kenyataan menunjukkan bahwa nilai bu daya bangsa agaknya berada dalam kedudukan yang rawan, yang perlu mendapat perhatian kita. Nilai-nilai yang berlaku didalam tata kehidupan keluarga dan masyarakat pada umumnya telah mendapat gempuran berat dari berbagai penjuru. Berbagai norma yang berlaku di dalam keluarga dan masyarakat mengalmi kepudaran, dan bila tidak mendapat perhatian, dikhawatirkan akan runtuh dalam beberapa generasi mendatang.

Perhatikan adat-sopan-santun yang berlaku dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara anak dengan anak, hubungan antara keluarga yang

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

satu dengan keluarga yang lain hubungan antara pimpinan dengan anggota, hubungan antara anggota dengan anggota dalam suatu organisasi. Nilai--nilai yang semula dianggap sakral telah kehilangan maknanya, karena tidak lagi mendapat dukungan dan pengakuan serta tiada lagi ditaati sebagaimana mestinya.

Timbul pertanyaan di dalam diri kita sendiri, mengapa demikian, apa gerangan sebabnya. Apakah memang sudah zamannya, yaitu zaman tidak dipatuhinya norma-norma yang secara tradisional berlaku dalam keluarga dan masyarakat. Apakah struktur keluarga dan masyarakat telah mengalami pergeseran? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita dapat mengemukakan berbagai penjelasan mengenai hal tersebut misalnya disebabkan oleh pengaruh luar yang cukup kuat, pergaulan yang kompleks, tidak dilaksanakan norma itu oleh anggota keluarga dan masyarakat, telah mendapat nilai baru yang dianggapnya lebih sesuai tradisi yang berlaku sudah dianggap ketinggalan zaman atau generasi sekarang sudah tidak banyak yang memahami ajaran atau norma tradisional itu.

BAGIAN II

Pergerakan Perempuan pada Masa Kebangkitan Nasional

SEBELUM memasuki masa Kebangkitan Nasional, perempuan-perempuan Indonesia telah bergerak secara perorangan maupun kelompok dalam melawan dan mendukung perlawanan terhadap penjajah dari Belanda. Bagi perempuan-perempuan yang bergerak dalam perlawanan secara langsung, mereka terlibat langsung dengan senjata, pemberontakan, dan peperangan. Adapun bagi perempuan-perempuan yang mendukung perlawanan, mereka membantu para suami atau keluarganya dalam menjaga kestabilan rumah-tangga, semisal menyokong perekonomian keluarga dengan cara menjadi buruh atau lainnya.

Sebelum organisasi Boedi Oetomo (BO) berhasil terbentuk pada tahun 1908, beberapa dari kaum perempuan Indonesia telah berhasil membentuk perkumpulan-perkumpulan yang berorientasi pada pemberdayaan rakyat kecil. Walau masih dalam ruang-lingkup terbatas, gerakan Kartini, Kardinah, Sunatri, Sartika, dan lainnya itu terbukti memunculkan dampak yang serius terhadap kemunculan berbagai perkumpulan atau organisasi pada tahun-tahun selanjutnya.

Merujuk adanya fakta-fakta gerakan kebangkitan kaum perempuan itulah dalam bahasan ini akan diikutsertakan pembahasannya sebagai semacam latar-belakang kemunculan gerakan-gerakan perempuan berikutnya, yakni pada masa Pergerakan Nasional. Pergerakan nasional ini merupakan suatu masa

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

di mana bangsa Indonesia tidak lagi mengandalkan kekuatan senjata dalam berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Mereka telah menggunakan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang teratur.

Awal dari periode yang juga dikenal dengan Kebangkitan Nasional ini ditandai dengan terbentuknya organisasi Boedi Oetomo/BO (Budi Utomo/BU) pada tanggal 8 Mei 1908 yang kemudian diikuti oleh kemunculan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain. Khusus untuk kebangkitan perempuan dalam konteks ini ditandai dengan lahirnya organisasi Putri Mardikha di Jakarta pada tahun 1912. Kebangkitan itu pun semakin meluas dan berorientasi nasional setelah terselenggaranya Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada tahun 1928.

Kongres yang diberi arisan *Congres Perempoean Indonesia* itu berlangsung selama empat hari dari tanggal 22 hingga 25 bulan Desember di Suryodipuran, Mataram, Yogyakarta. Di antara beberapa keputusan kongres di musim hujan itu terdapat kesepakatan untuk mendirikan lembaga Perikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang kelak berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Bahasan seputar gerakan perempuan dalam kongres-kongres Perempuan Indonesia dan Perikatan Perempuan Indonesia ini akan dibahas pada bagian akhir di bab ini.

A. Gerakan Perempuan secara Perorangan

Hingga akhir abad ke-19, peranan para perempuan Indonesia dalam menegakkan kehidupan berbangsa sudah menunjukkan kejelasannya. Tidak sedikit dari kaum perempuan yang turut serta membela tanah air ini dengan keputusan dan caranya sendiri-sendiri. Misalnya, Nyi Ageng Serang, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Cristina Martha Tiahahu, dan lainnya. Mereka telah terbukti turut

ambil bagian untuk berperang secara langsung maupun tidak langsung.

Bagi mereka yang tidak ikut berperang secara fisik, pada umumnya, turut membantu para laki-laki atau suaminya sendiri-sendiri dalam menjaga dan mengelola kesetabilan rumah-tangga. Di antara peran-peran itu, tidak sedikit dari mereka yang turut bekerja di luar rumah. Adapun upah dari kerja-kerja itu digunakan mereka untuk menyokong perekonomian keluarga yang turut bergolak akibat adanya situasi peperangan yang mencekam.

Perempuan atau ibu-ibu itupun menjalankan dua peran secara bersamaan ataupun bergantian. Satu sisi mereka memerankan perannya sebagai perempuan atau ibu rumah-tangga, sedangkan pada sisi yang berbeda mereka memerankan perannya laki-laki atau suami yang berkewajiban memberi nafkah ekonomi pada keluarganya. Dua peranan inilah yang kemudian membuktikan bahwa mereka turut berperan dalam menegakkan kehidupan berbangsa yang diawali dari kehidupan rumah-tangga.

Sebagaimana pada umumnya manusia biasa, memerankan dua peran secara bersamaan maupun bergantian itu tidaklah mudah bagi mereka. Banyak hal-hal yang harus dipertahankan dan dipertaruhkan. Maka maklum jika dalam kondisi-kondisi tertentu, mereka tidak mampu memberikan perimbangan kebutuhan suaminya yang menginginkan kesiapannya setiap saat. Hal itu diperparah dengan adanya fakta bahwa tidak semua perempuan memperoleh pendidikan seputar kerumah-tanggaaan ataupun sosial kemasyarakatan.

Dampak buruk yang menimpa kaum perempuan itupun beragam. Mulai dari keterlibatannya dalam pertengkaran dengan suami hingga dimadu ataupun dicerai suaminya secara sepihak. Saking beragamnya permasalahan yang menimpa kaum perempuan di berbagai daerah pada masa itupun tidak sedikit yang akhirnya tampak seragam dalam bentuknya sebagai korban suatu permasalahan.

B. Organisasi Perempuan sebelum Boedi Oetomo (BO)

Nasib buruk yang menimpa kaum perempuan itupun semakin lama semakin menjadi-jadi. Hingga pada akhirnya, permasalahan kaum perempuan tersebut diamati oleh kalangan bangsawan yang menaruh perhatian pada mereka. Adalah RA. Kartini misalnya, merupakan satu di antara perempuan yang menaruh perhatian pada nasib buruk kaum perempuan di negeri ini. Sosok perempuan yang berasal dari keluarga bangsawan di Jepara, Jawa Tengah, ini mulai melakukan gerakan bantuan untuk kaum perempuan dengan membuat suatu perkumpulan.

Melalui perkumpulan yang telah lama digagas dan didiskusikan dengan teman-temannya di Eropa via surat-menyurat itu, Kartini membentuk semacam kursus atau kelompok belajar (*study-club*). Dalam perkumpulan yang dimulai pada bulan Juli tahun 1903 di pendopo Kabupaten Jepara itulah Kartini mengajak tujuh orang gadis atau perempuan sebagai anggota pertama.

Selain menjadi pemimpin perkumpulan, Kartini juga berperan sebagai guru bersama dua saudarinya yang bernama Kardinah dan Sunatri. Ketiganya mengajari ketujuh anggota perkumpulan itu selama empat kali pertemuan dalam seminggu. Mereka memberikan pelajaran seputar membaca, menulis, menggambar, pekerjaan tangan perempuan, dan memasak. Adapun tujuan utama dari perkumpulan itu agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan; mempunyai jiwa bebas tanpa melupakan tata cara [adat istiadat]; menjadi calon ibu rumah-tangga yang terampil; serta memiliki watak yang baik (Ohorella, dkk., 1992:15).

Selang satu semester, gerakan perempuan dalam bidang pendidikan di Jawa Tengah ini disusul oleh gerakan perempuan dalam bidang yang sama di Jawa Barat. Gerakan pendidikan yang lebih melibatkan banyak perempuan itu berpusat di Bandung dan dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Raden Dewi (RD) Sartika.

Pada tanggal 16 Januari 1904, Sartika membentuk perkumpulan perempuan dalam lingkup terbatas sebagaimana yang telah dilakukan Kartini di Jepara. Tak lama setelah itu, Sartika mengembangkan perkumpulannya menjadi sebuah sekolah pada tahun 1905. Sayangnya, pada masa-masa awal, sekolah yang terkenal dengan nama Sekolah Istri atau Sekolah Gadis itupun tidak lepas dari beragam tantangan dan rintangan, khususnya dari kalangan bangsawan setempat. Tidak sedikit pula kaum perempuan dari keluarga bangsawan itu yang menyerang murid-murid Sartika sekaligus sekolahannya dengan beragam cemoohan.

Walau demikian, sekolah yang kemudian terkenal dengan nama Sekolah Kautaman Istri itu mampu bertahan dan berkembang. Jumlah muridnya pun semakin lama semakin bertambah. Sehingga halaman kabupaten Bandung yang awalnya digunakan untuk menampung tambahan jumlah murid itupun semakin sesak.

Dampak dari pertumbuhan jumlah murid itulah yang kemudian menjadikan keefektifan kegiatan belajar dan mengajar mengalami penurunan. Solusi yang kemudian terealisasi adalah pemindahan sekolah ke jalan Cigurang yang kini masih digunakan oleh sekolah-sekolah Yayasan Dewi Sartika.

Setelah proses belajar-mengajar kembali efektif, Dewi Sartika melakukan gerakan tambahan berupa penambahan pelajaran baru yang menitik-tekankan pelajaran ketrampilan perempuan. Misalnya; menjahit, menambal, menyulam, merenda, memasak, menyajikan makanan, P3K, memelihara bayi, dan pelajaran agama (Ohorella, dkk., 1992:16-17).

Dua gerakan perempuan yang dimotori oleh RA. Kartini dan RD. Sartika ini berlangsung secara terorganisir dalam kurun waktu yang beiringan. Ruang lingkup gerakan keduanya pun sama-sama berada pada dataran urgensitas fundamental yang bertolak pada realitas masa lalu dan faktualitas keinginan masa depan.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Diambilnya bidang kerumah-tangga dan pendidikan oleh RA. Kartini dan RD. Sartika itu bukanlah suatu “kepicikan pandang” dalam menggerakkan bidak-bidak strategi perjuangan yang terorganisir dan berjejaring. Rumusan masalah yang dijawab keduanya pun berasal dari kedalaman bawah sadar suatu realitas awal permasalahan hingga puncak julang-julang permasalahan yang bertengger di aras keilmuan.

Maka bukan suatu kebetulan jika keduanya mengambil gerak-langkah yang tidak berkuat pada ledakan-ledakan konfrontasi terhadap kolonial Belanda. Melainkan gerakan-gerakan cerdas yang berkilauan dari titik kisar rumusan permasalahan; mulai dari komunitas kekerabatan terkecil suatu masyarakat berupa keluarga hingga komunitas kekerabatan global dan imajiner bertaut pendidikan juga keyakinan.

Bentang lingkup kekerabatan yang menjadi laga perjuangan RA. Kartini dan RD. Sartika itu memang tampak sebagai medan gerak yang berkiprah sempit dan sektoral. Namun jika dipandang dari sisi dasar-dasar eksistensi dan pertahanan diri, sektor rumah-tangga, pendidikan, dan keyakinan itu merupakan gerbang ekspres menuju komunitas kekerabatan dalam bentuk yang lain. Yaitu, suatu komunitas kekerabatan yang membentang dari ranah keturunan, teritorial, hingga sudut pandang kebersamaan yang menjanjikan munculnya kebangsaan dan nasionalitas baru (Steven Grosby, 2011:19-24).

Kebangsaan dan nasionalisme yang baru, lebih luas, dan global ini tidak terbatas pada sempitnya egoisitas diri, keturunan, dan kelompok atau perkumpulan. Sebab “batas-batas” dalam hal ini akan selalu dinamis, bertumbuh, dan berkembang seiring kemajuan dan perkembangan dalam memahami sekaligus menyikapi kesetaraan manusia dan perbedaan fungsionalitasnya. Tahap-tahap batasannya pun tidak akan dipandang sebagai suatu *kemampuan*. Melainkan

suatu ritual *pencapaian* yang membuka lebar gerbang-gerbang kebebasan atau kemerdekaan dalam konsep-konsep yang telah ditentukan dan diamankan.

Walaupun sedemikian prestisiusnya gerakan awal yang dilakukan RA. Kartini dan RD. Sartika, bukan berarti bahwa gerakan perempuan harus meniru dan *mandeg* pada apa yang telah dilakukan keduanya. Perlu adanya pengembangan dan perluasan gerakan perempuan hingga merambah pada bidang-bidang kehidupan yang lain.

Hal ini terdapat pada sinyal-sinyal ajaran dari gerakan keduanya yang didasari strategi rancangan kualitas percepatan dalam bergerak menuju pencapaian. RA. Kartini menyulam jaring-jaring dukungannya melalui surat-surat yang dikirim dan diterimanya. Sedangkan RD. Sartika menjaring dukungannya melalui relasi dan kuantitas eksplorasi. Pada akhirnya, jaring-jaring dukungan keduanya sama-sama terbentuk dan tersambung pada bentuk dukungan yang diberikan J.H Abendanon.

Dukungan terhadap gerakan RA. Kartini dan RD. Sartika itupun semakin lama semakin menguat, bertumbuh, dan berkembang pesat. Sampai organisasi Boedi Oetomo (BO) resmi didirikan pada tanggal 8 Mei 1908 yang kelak menjadi tanda awal Kebangkitan Nasional ini, dukungan kepada dua gerakan perempuan ini masih bermunculan. Dukungan semakin tampak meluas dengan adanya berbagai perkumpulan perempuan yang bermunculan dan sama-sama bergerak dalam lingkup-luas pemberdayaan perempuan.

C. Organisasi Perempuan setelah Boedi Oetomo (BO)

Berdirinya organisasi Boedi Oetomo (BO) atau Budi Utomo (BU) pada tahun 1908 telah ditandai penyejarahan Indonesia sebagai awal Kebangkitan Nasional. Organisasi yang didirikan oleh Raden Sutomo bersama Gunarwan dan Surojo ini mengalami perkembangan yang luar biasa pada masanya.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dalam jangka setahun setelah diresmikan saja, organisasi yang belum mengenal internet dan *social media* ini sudah berhasil mendapatkan lebih dari 10.000 anggota (Vlekke, 2008:391). Hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa sekaligus menjanjikan adanya dukungan massa.

Banyaknya dukungan massa yang mengarah pada BU ini tidak mengurangi laju pertumbuhan dukungan yang mengarah pada gerakan-gerakan perempuan. Hingga pada tahun 1912, organisasi Putri Mardikha berhasil berdiri di Jakarta bersama berbagai dukungannya, yang di antaranya berasal dari bantuan BU.

Organisasi kaum putri ini bergerak dengan cara memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut pelajaran serta menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain hal yang belum diketahuinya. Kelak, kaum putri dalam organisasi ini juga melakukan gerakan berbasis informasi dan komunikasi yang dimediasi mereka melalui penerbitan surat kabar atau tabloid bulanan *Putri Mardikha* dan *Penoentoen Istri* (G.A. Ohorella, dkk., 1992:14).

Pada tahun 1912 ini juga tercatat adanya gerakan perempuan secara terorganisir yang menindak-lanjuti gerakan RA. Kartini di Jepara. Gerakan yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dari golongan atas ini mendirikan semacam lembaga atau yayasan penggalang dan penyandang dana yang diberi nama Kartini Fonds. Pendirian lembaga yang diprakarsai oleh Tuan dan Nyonya C. Th. Van Deventer ini dimaksudkan untuk membantu pengadaan atau pendirian sekolah-sekolah bagi kaum pribumi sebagaimana yang rindukan Kartini.

Sejak didirikan di Semarang kemudian Jakarta, lembaga ini berhasil mengais dukungan dari berbagai pihak. Hingga pada 1913, lembaga ini berusaha membuktikan keberadaannya untuk yang pertama kalinya dengan mendirikan Sekolah Kartini di Semarang.

Pada tahun yang sama, kesungguhan gerakan perempuan yang diorganisir Kartini Fonds ini berhasil mendirikan Sekolah Kartini lagi yang berada di atas tanah Batavia (Jakarta).

Gerakan perempuan yang berasosiasi dengan gerakan RA. Kartini ini pun semakin meluas dan berlanjut hingga tahapan-tahapan berikutnya. Begitu pula dengan gerakan perempuan yang berkaitan dengan RD. Sartika melalui sekolah Kautamaan Istri. Pada tahun 1913 ini pula, tercatat adanya sekolah Kautamaan Istri di Tasikmalaya yang didirikan oleh seorang lulusan sekolah Kautamaan Istri. Walau peminatnya belum sebanyak sekolah Kautamaan Istri di Bandung, namun sekolah ini telah berhasil memperluas gerakan positif kaum perempuan.

Bersambung pada gerakan Kartini Fonds, Sekolah Kartini berhasil didirikan lagi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini Sekolah Kartini didirikan pada tahun 1914 di Madiun. Menyusul adanya gerakan-gerakan perempuan ini, sebuah organisasi perempuan juga muncul pada tahun ini dengan nama Sopo Tresno di Yogyakarta. Walau organisasi ini menitik-tekankan gerakannya di seputaran perempuan-perempuan beragama Islam, namun kemunculannya membuka gerbang gerakan perempuan di ranah yang berbeda dari sebelumnya.

Perbedaan lingkup gerakan juga muncul di Sumatera. Sebuah organisasi perempuan berdiri di Kota Gedang, Sumatera Barat, dengan nama Kerajinan Amai Setia (KAS). Organisasi yang terbentuk pada tanggal 11 Februari 1914 ini dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Rohana Kudus. Bersama anggotanya, Rohana Kudus menjadikan KAS sebagai media penyaluran tujuan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan dengan mengajarkan baca-tulis huruf Arab dan Latin, mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan, bahkan mengatur pemasarannya (Ohorella, dkk., 1992:7).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Bersama KAS itu pula, gerakan Rohana Kudus bersama anggotanya semakin memperlebar peranan kaum perempuan. Sekolah Amai Setia pun berdiri yang disusul dengan adanya lembaga kursus Amai Setia yang juga dipimpin Rohana Kudus. Selain memberikan pengetahuan umum dan ketrampilan kepada perempuan yang sudah bersuami, *study-club* ini juga mengajak kaum perempuan untuk dapat segera menyesuaikan cara hidup dan penghidupannya dengan perubahan zaman. Sebagai bagian dari konsekuensi strategi pergerakannya, kelak akan ada penerbitan surat kabar *Sunting Melayu* dan *Tjahaya Sumatera*.

Kabar lanjutan dari gerakan RD. Sartika tersiar tentang berdirinya sekolah Kautamaan Istri lagi pada tahun 1915. Pada tahun ini sekolah Kautamaan Istri bertambah lagi di Bandung dan Padang Panjang. Sedang dari kabar di Magelang, sebuah organisasi ibu telah berhasil diibentuk oleh sekelompok ibu-ibu dengan nama Pawiyatan Wanito. Adapun dari Jepara, terdapat kabar pendirian Wanito Hadi.

Sekolah Kautamaan Istri muncul lagi pada tahun 1916 di Sumedang dan Cianjur. Demikian pula dengan Sekolah Kartini yang muncul lagi di Malang dan Cirebon. Adapun Sekolah Kartini di Pekalongan dan Kautamaan Istri di Ciamis itu baru berdiri pada tahun 1917.

Pada tahun 1917 ini mulai tampak lebih banyak gerakan perempuan yang menggunakan media organisasi. Purborini dan Wanito Rukun Santoso muncul di Malang, Putri Budi Sejati di Surabaya, Budi Wanito di Solo, dan Wanito Mulyo serta Wanita Aisyiah di Yogyakarta (Ohorella, dkk., 1992:18). Khusus di Manado, Sulawesi Utara, perempuan bernama Maria Walanda Maramis membentuk Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) pada tanggal 8 Juli 1917. Dari PIKAT inilah kemudian bermunculan sekolah-sekolah yang bernama *Huishoud School* atau *Meisjes Vakschool*.

Sekolah Kartini muncul lagi pada tahun 1918 di tiga kawasan: Indramayu, Surabaya, dan Rembang. Adapun Cicurug, Kuningan, dan Sukabumi memunculkan sekolah Kautamaan Istri. Keenam kawasan itulah yang memunculkan kabar berdirinya sekolah baru, sementara kawasan Pemalang memunculkan sebuah organisasi baru. Wanito Susilo, namanya.

Nama Sarikat Siti Fatimah muncul di Garut pada tahun 1920 dengan basis keanggotaan perempuan bergama Islam. Basis syariat Islam juga digunakan oleh Wanodyo Utomo di Yogya dan De Gorontalosche Mohammedansche Vrouwen Vereniging di Gorontalo, Sulawesi Utara.

Tahun 1921, organisasi perempuan muncul lagi di Yogyakarta. Organisasi yang disebut Wanito Utomo ini mayoritas beranggotakan istri-istri dari anggota dan pengurus organisasi Budi Utomo. Adapun program yang menjadi titik tekan pencapaian adalah seputar perbaikan kedudukan atau status perempuan pada masa itu.

Rahman El Yunusiah yang juga menaruh perhatian pada putri-putri Sumatera Barat itupun tertarik untuk mendirikan sekolah Dinnyah Putri School pada tahun 1922. Bersama Amai Setia yang dipimpin Rohana Kudus, sekolah ini berhasil menginspirasi kemunculan organisasi perempuan Vrowenbon di Payakumbuh dan kelompok gadis Meisyeskring di Padang. Adapun kabar kemunculan Sarikat Kaum Ibu Sumatera (SKIS) berasal dari Bukittinggi.

Organisasi Wanita Katholik baru muncul di Yogyakarta pada tanggal 26-6-1924. Organisasi yang dipimpin RA. Sujadi Darmosaputro Sosroningrat (saudarinya Nyi Hadjar Dewantara) mengarahkan anggotanya pada tujuan: mempertinggi martabat perempuan Katholik berdasarkan agama, sehingga menjadi anggota gereja dan warga negara yang wajar.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Di Solo, Jong Java melahirkan organisasi Jong Java Dames Afdeeling pada tahun ini. Organisasi yang diketuai oleh Nona Badiah (Ny. Badiah Sularso) ini tergolong unik. Semua anggotanya terdiri dari kaum putri yang akhirnya menjadi pembeda paling kentara di antara cabang-cabang Jong Java yang lainnya.

Jong Islameiten Bond juga melahirkan organisasi perempuan yang diberi nama Jong Islameiten Bond Dames Afdeeling (JIBDA) pada tahun 1925. Dalih dan dalil untuk membidani lahirnya organisasi ini diambil dari pemahaman bahwa Islam menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi dan terhormat, sama dalam kedudukan dan dalam ikatan perkawinan, masing-masing tetap mempunyai hak sepenuhnya. Organisasi ini ditujukan untuk melatih para anggotanya menjadi perempuan Islam sejati dan untuk membela serta melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan ajaran Islam (Ohorella, dkk., 1992:10)

Menjelang akan diadanyakannya Kongres Perempuan, semakin tampak organisasi-organisasi perempuan yang bermunculan dalam pendataan maupun pembentukan. Wanita Taman Siswa di Yogyakarta, Kemadjoean Istri di Bogor, Ina Tuni di Ambon, Putri Indonesia di Bandung, Putri Setia di Manado, Wanita PERTI di Sulawesi Utara hingga Wanita Sahati di Jakarta. Menurut hasil pendataan G.A. Ohorella, Sri Surjiatiningsih, dan Muchtaruddin Ibrahim, perkembangan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi perempuan di seluruh Indonesia sampai tahun 1928, berjumlah sekitar 50 hingga 100 perkumpulan (Ohorella, dkk., 1992:11).

D. Organisasi Perempuan Pasca Kongres Perempuan

Sejak Putri Mardikha atau Putri Mardika didirikan pada tahun 1912, berbagai organisasi perempuan Indonesia semakin bermunculan. Secara umum, bentuk dan ruang gerak organisasi-organisasi itu nyaris serupa dan masih bersifat non-politis. Menurut

Colin Brown, perhatian organisasi-organisasi itu hanya ditujukan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan keagamaan. Orientasi organisasi lebih bersifat kedaerahan ketimbang nasional, dan didominasi oleh perempuan aristokrat (bangsawan), menengah ke atas (Brown, 2004:5).

Berkait kenyataan semacam itu telah muncul adanya gagasan-gagasan yang berujung pada keinginan untuk menyelenggarakan kongres perempuan. Namun demikian, terkait sosok atau pihak yang pertama kali mencetuskan gagasan penyelenggaraan kongres ini terdapat beberapa perbedaan.

Colin Brown beranggapan bahwa Kongres Perempuan Pertama yang berlangsung di Yogyakarta itu merupakan respon dari inisiatif yang diungkapkan oleh Ny. Soekanto, Ny. Suwandi, dan Nn. Sujatin (Brown, 2004:5). Nama Soekanto yang disebutkan Brown ini, kemungkinannya, dimaksudkan untuk menyebut nama Soekonto yang dalam penulisan nama lengkapnya adalah Raden Adjeng (RA) Soekonto. Sosok yang pada masa kecilnya menggunakan nama Siti Aminah inilah yang membuka acara dan jalannya Kongres Perempuan (Congres Perempoean Indonesia/C.P.I) untuk yang pertama kalinya di Yogyakarta. Adapun perbedaan nama ini berada pada aksara “A” dan “O” di antara Soekanto dan Soekonto.

Mungkin juga, nama Ny. Suwandi yang disebutkan Brown itu dimaksudkan untuk menyebut RA. Soetartinah Sastraningrat atau Ny. Soewardi Soerjaningrat (Blackburn, 2004:50, 2007:xxix). Yaitu, istrinya Ki Hadjar Dewantoro yang dalam proses berlangsungnya kongres itu dapat dipanggil dengan Nyonya atau Nyai Hadjar Dewantoro. Adapun perbedaan nama ini berada pada model penulisan yang digunakan sekaligus aksara “N” dan “R” di antara Suwandi dan Suwardi/Soewardi.

Sangat mungkin juga nama Nn. Sujatin itu dimaksudkan untuk menyebut nama seorang gadis –yang dalam model penulisan lama

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

ditulis– Soejatien (Blackburn, 2007:xxix) atau Soejatin. Jika merujuk ejaan baru, nama ini dapat ditulis Sujatin atau Suyatin. Sosok guru muda yang setelah menikah juga dikenal dengan nama Soejatien Kartowiejono, Sujatin Kartowijono, atau Suyatin Kartowiyono (Blackburn, 2004:23) inilah yang turut mencari meja dan mengitari Jogja sebelum berlangsungnya kongres.

Jika tiga kemungkinan ini benar, maka pendapat Brown berkait penggagas atau inisator Kongres Perempuan itu tidak jauh berbeda dengan pendapat umum yang lainnya. Yaitu, gagasan perlunya diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia itu berasal dari tiga perempuan yang bernama Soejatien, Ny. Soekonto, dan Ny. Hadjar Dewantara (Ny. Soewardi / Ny. Suwardi).

Dalam sambutannya sebagai Ketua Kongres Perempuan I pada tahapan *pemboeka'an* acara, Ny. Soekonto bercerita secara singkat tentang telah adanya usulan untuk *bekerdja bersama-sama* (bekerjasama antar perkumpulan), yang datang di perkumpulan Wanito-Oetomo, Yogyakarta. Usulan yang, katanya, datang dari perkumpulan putri dari kanan kiri itu menyadarkan Soejatien, Nji Adjar Dewantoro (Ny. Hadjar Dewantoro), dan dirinya sendiri seputar status kepintaran dan kemajuan kaum perempuan pada masa itu (Blackburn, 2007: 11)..

Namun, menurut Soejatien, gagasan diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pada masa itu berasal dari sekelompok guru muda –yang sebelumnya adalah anggota Jong Java, yang telah mendirikan cabang Poetri Indonesia di bawah kepemimpinan Soejatien. Setelah adanya Sumpah Pemuda, Soejatien bersama anggota organisasi itu berkeinginan untuk membentuk Panitia Kongres Perempoean Indonesia di Yogyakarta. Mereka lantas mendekati R.A. Soekonto untuk menjadi ketua dan Ny. Hadjar Dewantoro menjadi wakilnya. Sedangkan Soejatien menjadi sekretarisnya (Blackburn, 2007: xxix).

Sampai di sini tampak adanya tiga pendapat utama berkait penggagas Kongres Perempuan Indonesia. *Pertama*, gagasan berasal dari anggota organisasi Poetri Indonesia cabang Yogyakarta yang dipimpin oleh Soejatien. *Kedua*, gagasan berasal dari orang-orang yang mengajak bekerjasama di organisasi Wanito-Oetomo, Yogyakarta. *Ketiga*, gagasan berasal dari Soejatien, Ny. Hadjar Dewantara, dan Ny. Soekonto. Berkait perkumpulan atau organisasi penggagasnya, terdapat Poetri Indonesia cabang Yogyakarta; Wanito-Oetomo Yogyakarta, dan Wanita Taman Siswa Yogyakarta. Semua pendapat ini mengarah pada Soejatien yang saat itu berumur 21 tahun, belum bersuami, masih menjadi guru swasta, dan ketua Poetri Indonesia cabang Yogyakarta.

Kongres Perempuan pertama yang tidak lepas dari nama Soejatien ini berlangsung di sebuah pendopo milik seorang bangsawan R.T. Joyodipoero, di Mataram, Yogyakarta. Kongres perempuan atau Congres Perempoenan Indonesia/CPI ini berlangsung sejak hari Sabtu hingga Selasa atau tanggal 22 hingga 25, Desember 1928. Pada kongres inilah, liga perempuan Indonesia yang pertama telah dibentuk (Brown, 2004:6).

Kongres perempuan ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan perempuan Indonesia, di mana organisasi perempuan mewujudkan kerja sama untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ciri utama kesatuan pergerakan perempuan Indonesia dalam masa ini ialah berazaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Kesatuan pergerakan perempuan Indonesia tidak bersifat feminis dalam arti konfrontatif terhadap kaum pria, tetapi pergerakan perempuan mengutamakan kerja sama, karena menyadari bahwa untuk menghadapi penjajah dan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diperlukan persatuan.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Kongres Perempuan Indonesia tidak menjalankan politik aktif sebagai suatu partai, namun setiap kegiatan senantiasa sejalan dengan pergerakan kebangsaan Indonesia. Hal ini nampak antara lain ketika Kongres Perempuan Indonesia mendukung aksi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) menuntut “Indonesia Berparlemen” dan penolakan GAPI terhadap “Ordonansi wajib militer terbatas” (*militie plicht* terbatas) (Ohorella, dkk., 1992:29).

Pasca berlangsungnya Kongres Perempuan I, organisasi-organisasi perempuan di Indonesia semakin bermunculan, baik organisasi baru maupun organisasi cabang dari suatu organisasi yang sudah ada sebelumnya. Namun demikian, tidak sedikit pula organisasi-organisasi yang telah ada sebelum dan sesudah adanya kongres itu menghilang dari peredaran kabar. Sekitar tahun 1939 terdapat ratusan organisasi kecil (*hundreds of small organisations*) di berbagai kawasan Indonesia yang rata-rata memiliki sekitar 500 anggota (Blackburn, 2004:20).

Pasang-surut kemunculan dan kegiatan organisasi-organisasi itu mengalami dinamikanya sendiri hingga datang masa penjajahan Jepang. Pada masa pemerintahan kolonial Jepang ini organisasi-organisasi perempuan yang terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda itu benar-benar surut hingga menghilang. Adapun gantinya, muncullah organisasi-organisasi baru yang direstui sekaligus diintai terus-menerus oleh penjajah Jepang yang mengaku-ngaku sebagai Saudara Tua-nya bangsa Indonesia.

Kesatuan pergerakan perempuan dalam masa penjajahan memang banyak mengalami rintangan karena berada dalam situasi masyarakat yang dualistik. Di satu pihak penjajah berusaha menekan rasa kebangsaan dan di lain pihak pergerakan Indonesia membangkitkan dan memupuk rasa kebangsaan. Dengan demikian perjuangan pergerakan perempuan Indonesia pada masa itu meliputi 2 (dua) hal:

1. Berjuang bersama-sama kaum pria menuju cita-cita kemerdekaan.

2. Meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang-bidang pendidikan, sosial dan kebudayaan.

Pada masa tentara Jepang, semua organisasi pergerakan dibubarkan. Kemudian oleh Jepang membentuk perkumpulan-perkumpulan yang diorientasikan pada pergerakan dalam mendukung pemerintah, yaitu Gerakan Istri Tiga A, Barisan Puteri Asia Raya, dan Barisan Pekerjaan Perempuan Putera. Selanjutnya, dibentuk pula organisasi-organisasi yang menjalankan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan Jepang, Di antaranya adalah organisasi perempuan yang bernama *Fujinkai* berikut organisasi-organisasi yang dibawahinya. Anggota organisasi ini ambil dari anak-anak gadis yang sudah berusia 15 tahun ke atas, dari kawasan kota hingga kecamatan, dan dari warga pribumi maupun asing (Ohorella, dkk., 1992:35).

Pada 3 November 1943, Jepang menambah perkumpulan perempuan dengan pembentukan *Tokobetsu si Fujinkai* di Jakarta yang diketuai Ny. RA. Abdurrachman. Dalam perkembangannya, organisasi ini didukung adanya pembentukan perkumpulan Barisan Putri yang dipimpin Siti Dahlia dan Nursyamsu serta dibantu oleh Setiati, Malidar, dan Paramita Abdurrachman.

Walaupun organisasi-organisasi perempuan pada masa Jepang dibentuk ulang sebagai konsekuensi dari pelarangan dan pembubaran organisasi-organisasi pada zaman Hindia-Belanda, namun semuanya jelas berbeda. Jika organisasi-organisasi perempuan pada zaman Hindia-Belanda sedikit banyak memperoleh kelonggaran ruang gerak, tidak demikian pada zaman Jepang. Sebab hingga akhir dari penjajahan Jepang, organisasi-organisasi itu lebih bersifat sebagai barisan gerakan yang terorganisir dan siap setiap saat untuk membantu pemerintahan dan peperangan.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Menyadari kelicikan pemerintah Jepang pada masa itu pun para pemimpin pergerakan perempuan mengorganisir gerakannya secara berbeda jika dibandingkan pada masa Hindia-Belanda. Mereka lebih banyak mengorganisir gerakan-gerakannya dengan cara menjalin koordinasi dengan gerakan-gerakan para lelaki. Sehingga gerakan kaum lelaki dan perempuan pada masa itu menciptakan gerakan nasional yang tampak berbeda dari gerakan nasional sebelumnya.

Satu sisi Pergerakan Nasional menjaga dan mengarahkan gerakan yang terjadi di tengah perkumpulan kaum lelaki dan perempuan. Pada sisi lain Pergerakan Nasional bekerja sama dengan tentara pendudukan Jepang bermaksud mempergunakan kesempatan itu untuk mempercepat persiapan kemerdekaan. Hal ini didasarkan atas semboyan Jepang “Asia untuk bangsa Asia, Burma untuk bangsa Burma, dan Indonesia untuk bangsa Indonesia”.

Dengan demikian pergerakan perempuan Indonesia selalu bahu-membahu dengan kaum pria, sambil memanfaatkan semua sarana-sarana dan kesempatan yang ada untuk meningkatkan kecakapan dan ketrampilan dalam bidang kemiliteran dan kemasyarakatan.

Dari realitas pasang-surut pergerakan perempuan dalam masa penjajahan, gerakan perempuan dapat dibagi dalam 2 periode yaitu, masa pemerintahan Hindia Belanda dan masa pendudukan Tentara Jepang.

Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, kaum perempuan Indonesia mengusahakan persatuan dan kerja sama antara organisasi-organisasi perempuan untuk mencapai cita-citanya. Dijivai oleh Sumpah Pemuda tahun 1928 dan atas inisiatif tujuh organisasi perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta, Salah satu keputusannya ialah mendirikan badan permufakatan dengan nama *Perikatan Perempoean Indonesia* (PPI) (Blackburn, 2007: 22-31). Nama perikatan ini kemudian berubah menjadi

Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) dan berubah lagi menjadi *Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia* (PPII) (Ohorella, dkk., 1992:13).

Antara Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia II tahun 1935, diadakan 4 kali Kongres PPI/PPII. Hal yang selalu mendapat perhatian pada setiap Kongres, ialah:

1. Kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam).
2. Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan.
3. Mencegah perkawinan anak-anak.
4. Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Khususnya bagi anak-anak gadis didirikan Yayasan “Seri Derma” untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya.

Hal yang terpenting dalam perkembangan PPI/PPII ialah keputusan bahwa kesatuan pergerakan perempuan Indonesia berasaskan kebangsaan dan menyatakan diri sebagai bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia.

Kemudian ternyata ada organisasi-organisasi perempuan baru yang belum menggabungkan diri dalam PPII. Oleh karena itu timbullah inisiatif untuk kembali mengadakan Kongres Perempuan Indonesia seperti Kongres tahun 1928, untuk menampung dan menyatukan tenaga dan kiran kaum perempuan Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan di Jakarta bulan Juli tahun 1935 lebih menekankan pada persatuan dan kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Pada Kongres ini dibentuk badan “Kongres Perempuan Indonesia” (KPI). Karena sudah terbentuk badan tersebut, PPII kemudian dibubarkan pada bulan September 1935. Dalam Kongres Perempuan Indonesia ke II soal buruh perempuan mendapat perhatian dari Kongres tersebut, antara lain karena kejadian di perusahaan batik di Lasem di mana buruh perempuan diperlakukan tidak wajar.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Kongres Perempuan Indonesia memegang teguh cita-cita kesatuan dan persatuan, antara lain terlihat ketika pemerintah Hindia Belanda menawarkan rancangan ordonansi perkawinan tercatat tahun 1937. Menurut rancangan ordonansi tersebut, bagi mereka yang mencatatkan perkawinan mereka secara sukarela, setelah dilangsungkan perkawinan, berlaku asas monogami. Meskipun sebagian besar organisasi perempuan yang tergabung dalam Kongres Perempuan Indonesia dapat menerima rancangan ordonansi tersebut, namun karena ada sebagian yang tidak menerimanya dan karena ditolaknya juga oleh golongan Islam, maka Kongres tidak mengeluarkan pendapatnya, demi persatuan dan kesatuan dalam pergerakan perempuan Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah Hindia Belanda menarik kembali rancangan ordonansi tersebut.

Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan perempuan didirikan “Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia” (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perkawinan dan mendirikan biro konsultasi. KPKPAI yang semula berdiri sendiri, pada Kongres Perempuan Indonesia ke III di Bandung bulan Juli 1938, dijadikan suatu badan dan Kongres dengan nama “Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan” (BPPIP).

Kaum perempuan Indonesia juga ikut serta dalam *Perkumpulan Pemberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak/P4A* (Blankburn, 2004:174). Kongres P4A yang diadakan dalam bulan April 1940, mengusulkan supaya perempuan Indonesia juga menjadi anggota polisi kesusilaan.

Untuk memajukan kaum perempuan Indonesia, didirikan “Badan Pemberantasan Buta Huruf” (BPBH) di kalangan perempuan dewasa untuk mendidik perempuan Indonesia menjadi Ibu Bangsa. Dengan demikian diharapkan akan tumbuh generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.

Sebagai hasil dari pembicaraan dalam Kongres Wanita Indonesia ke III tahun 1938 yang tidak menjadi keputusan Kongres, Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan “hak untuk dipilih” (*passief kiesrecht*) kepada kaum perempuan. Sehubungan dengan itu telah dipilih 4 orang perempuan sebagai anggota Dewan Kota (*Gemeente Raad*):

1. Ny. Emma Puradiredja di Bandung
2. Nn. Sri Oemiyati di Cirebon.
3. Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang.
4. Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya.

Ketika Komisi Visman dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada permulaan tahun 1941 untuk menyelidiki keinginan-keinginan Bangsa Indonesia akan perubahan tatanegara, maka telah diminta pendapat 2 orang perempuan Indonesia, yaitu: Ny. Sunarjo Mangunpuspito yang mengajukan tuntutan “Indonesia Berparlemen” dan Ny. Sri Mangunsarkoro menuntut “Indonesia Merdeka”.

Kongres Perempuan Indonesia ke IV di Semarang bulan Juli 1941, mengusulkan kepada anggota-anggota bangsa Indonesia dalam Dewan Rakyat (*Volksraad*), supaya bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada semua sekolah Menengah. Tuntutan “Indonesia Berparlemen” merupakan salah satu putusan Kongres. Di samping itu Kongres menuntut supaya perempuan Indonesia diberi hak untuk memilih (*actief kiesrecht*). Kongres juga mendukung penolakan GAPI terhadap “rancangan ordonansi wajib militer terbatas” yang ditawarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Alasan penolakan tersebut ialah karena Perang Dunia II sudah diambang pintu dan jika wajib militer diadakan, maka berarti bahwa putra-putra Indonesia yang baru atau sedang dilatih sudah harus berhadapan dengan tentara Jepang yang jauh lebih tangguh.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa kegiatan pergerakan perempuan Indonesia di masa pemerintahan Hindia Belanda meliputi bidang--bidang: pendidikan, sosial, budaya, hukum dan politik. Kerja sama bahu membahu dengan kaum pria dan meningkatnya ruang lingkup perjuangan pergerakan perempuan lebih tampak lagi dalam perkembangan kongres-kongres berikutnya.

E. Gerakan Perempuan dalam Kongres sebelum Pendudukan Jepang

Sebelum Jepang menjajah Indonesia, gerakan perempuan melalui perkumpulan atau forum kongres dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu, Kongres Perempuan Indonesia (KPI) dan Kongres Perikatan Perempuan Indonesia (KPPI) atau Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (KPPII).

1. Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada bulan Desember 1928 menandai awal berlangsungnya kongres perempuan Indonesia dan tercatat sebagai kongres perempuan yang pertama. Kongres ini disusul adanya kongres-kongres perempuan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjelang tentara-tentara Jepang melakukan pendudukan.

Sejak pertama kali diselenggarakan hingga pendudukan Jepang, Kongres Perempuan Indonesia hanya mampu berlangsung empat kali pertemuan. Kongres ke-V yang telah direncanakan berlangsung di Surabaya pada tahun 1942 itu gagal terselenggara lantaran situasi dan kondisi yang tidak mendukung.

a. Kongres Perempuan Indonesia I

Kongres Perempuan Indonesia ke-I diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 di Pendopo Joyodipuran, Mataram, Yogyakarta. Kongres yang dipimpin oleh Ny. RA. Sukonto

(Soekonto) ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 30 organisasi di pulau Jawa dan Sumatera.

Organisasi-organisasi itu terdiri dari organisasi pusat dan cabang, semisal *Hoofdbestuur Aisijiah* dari Mataram dan *Aisijiah* dari Solo. Jika dihitung berdasarkan kesatuan masing-masing organisasi, maka kongres yang berlangsung pada musim hujan itu hanya dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 23 organisasi.

Selain dihadiri oleh para perempuan dari berbagai perkumpulan perempuan, kongres ini juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari berbagai kalangan, mulai dari awak media (pers) hingga organisasi-organisasi lelaki dan partai politik. Khusus untuk perwakilan-perwakilan dari organisasi lelaki dan partai, hadir pada tahap pembukaan (resepsi) kongres yang berlangsung pada hari sabtu malam atau malam minggu tanggal 22.

Berikut ini merupakan organisasi atau partai yang mengirimkan perwakilannya pada Kongres Perempuan Pertama (Blackburn, 2007:15):

- * Boedi Oetomo
- * P.N.I (Hoofdb.)
- * C.P.P.P.B.D
- * P.I. (Hoofdb.)
- * P.I. (Afd.)
- * P.S.I. (Mat.)
- * M.K.D
- * J.J. (Mat.)
- * Walfadjri (Hoofdb.)
- * P.A.P.I. Bat

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- * P.J.A
- * P.T.I
- * Jong Madoera
- * Mohammadijah (Hoofdb.)
- * J.J. Bat
- * J.I.B (Hoofdb.)
- * P.A.P.I.M
- * P.S.D.
- * Sangkara Moeda
- * I.N.P.O

m S.I.A.P

Adapun berikut ini merupakan poin-poin penting seputar Kongres Perempuan Pertama yang berlangsung di Yogyakarta.

a) Maksud dan Tujuan:

1) Supaya menjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan Perempuan Indonesia.

2) Supaya dapat bersama-sama membicarakan soal-soal kewajiban, keperluan, dan kemajuan perempuan.

b) Keputusan-Keputusan Kongres:

1) Mendirikan badan permufakatan, bernama ***Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)***.

2) Menerbitkan Surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPI. Adapun anggota-anggota redaksi terdiri dari: Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjojo, Nn. Ismudiyati, Nn. Badiyah, dan Sunaryati.

3) Mendirikan **studiefonds** yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.

4) Memperkuat pendidikan kepanduan putri

5) Mencegah perkawinan anak-anak

6) Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar:

a) Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak

b) Tunjangan bersifat pensiun (onderstand) jangan dicabut.

c) Sekolah-sekolah putri diperbanyak.

7) Mengirimkan mosi kepada Raad Agama agar tiap talak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

c) Susunan Pengurus Kongres Perempuan I

Ketua : Ny. R.A. Sukonto (Wanita Utomo)

Wakil Ketua : Nn. St. Mundjiah (Aisyiah)

Penulis I : Nn. St. Sukaptinah (Ny. Suaryo
Mangunpuspito) (JIBDA)

Penulis II : Nn. Sunarjati (Ny. Sukemi) (Putri Indonesia)

Bendahari I : Ny. Hardjodiningrat (WanitaKatholik)

Bendahari II : Nn. R.A. Sujatin (Ny. Kartowijono) (Putri
Indonesia)

Anggota : Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa)

Anggota : Ny. Drijowongso (Wanita PSII)

Anggota : Ny. Muridan Noto (Wanita PSII)

Anggota : Ny. Umi Salamah (Wanita PSII)

Anggota : Ny. Djohanah (Aisyiah)

Anggota : Nn. Badiah Murjati (Jong Java Dames Afdeeling)

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Anggota : Nn. Hajinah (Ny. Mawardi) (Aisyiyah)

Anggota : Nn. Ismudijati (Ny. A. Saleh) (Wanita Utomo)

Anggota : Ny. R.A. Mursandi (Wanita Katholik)

d) Hal-Hal Lain

1) Kongres Perempuan Indonesia ke I dihadiri oleh wakil-wakil dari 30 organisasi perempuan yang terdiri dari organisasi pusat dan cabang:

- * Putri Budi Sejati, Surabaya
- * Putri Indonesia, Surabaya
- * Wanita Katholik, Sala
- * Rukun Wanodiyo, Jakarta
- * Wanita Sejati, Bandung
- * Putri Indonesia, Mataram
- * Darmo Laksmi, Salatiga
- * Budi Rini, Malang
- * Margining Kautaman, Kemayoran (Jakarta)
- * Karti Woro, Sala
- * Budi Wanita, Sala
- * Wanita Katholik, Mataram (Yogyakarta)
- * Jong Java, Mataram
- * Jong Java, Salatiga
- * Jong Islamieten Bond, Jakarta
- * Wanita Kencono, Banjarnegara
- * Sarekat Isteri Buruh Indonesia, Surabaya

- * Hoofdbestuur Aisyiyah
- * Sancoyo Rini, Sala
- * Aisyiyah, Sala
- * Wanita Utama, Mataram
- * Wanita Mulyo, Mataram
- * Wanita Taman Siswa, Mataram
- * Panti-Krido-Wanito, Pekalongan
- * Jong Islamieten Bond, Mataram
- * Jong Java, Jakarta
- * Jong Islamieten Bond, Tegal
- * Natdatul Fataat, Kudus
- * Isteri Sumatera.

2) PPI yang didirikan pada 25 Desember 1928 yang kelak menjadi PPII itu mempunyai usaha-usaha, sebagai berikut:

a) Mengadakan Kongres pada setiap tahun untuk memperbincangkan kedudukan perempuan Indonesia.

b) Menerbitkan surat kabar yang merupakan sarana untuk memperbincangkan soal-soal perempuan.

c) Menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggota yang berselisih.

d) Tempat kedudukan pengurus PPI ditetapkan menurut jumlah banyaknya anggota; untuk pertama kalinya Mataram (Jogya-karta) menjadi tempat kedudukan pengurus.

e) Susunan pengurus PPI tahun 1928 sampai dengan Kongres PPI tahun 1929 ialah:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Ketua	: Ny. R.A. Sukonto
Wakil Ketua	: Nn. R.A. Sujatin (Ny. Kartowijono)
Penulis I	: Nn. St. Sukaptinah (Ny. Mangunpuspito)
Penulis II	: Nn. Mugarumah
Bendahari	: Ny. R.A. Hardjodiningrat
Komisaris	: Nyi Hadjar Dewantara
Komisaris	: Nn. St. Mundjijah.

f) Keanggotaan belum sepenuhnya di ataur, sehingga ada kemungkinan beberapa cabang dari satu organisasi menjadi anggota PPI, antara lain:

- * Wanita Katholik, Mataram
- * Taman Siswa, Mataram
- * Aisyiyah, Mataram
- * Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Mataram
- * Putri Indonesia (Pemuda Indonesia Bagian Wanita), Mataram.
- * Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Jakarta
- * Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Tegal
- * Wanita Katholik, Sala
- * Karto Woro, Sala
- * Aisyiyah, Sala
- * Panti Krido Wanito, Pekalongan
- * Budi Wanito, Sala
- * Kesumo Rini, Kudus

- * Darmo Laksmi, Salatiga
- * Putri Indonesia, Surabaya
- * Wanita Sejati, Bandung
- * Margining Kautaman, Kemayoran
- * Putri Budi Sejati, Surabaya

e) Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan I

Antara Kongres Perempuan Indonesia ke I tahun 1928 dan Kongres Perempuan Indonesia ke II tahun 1935, telah berlangsung kongres-kongres PPI/PPII sebanyak 4 kali kongres. Yaitu, Kongres PPI tahun 1929, Kongres PPII tahun 1930, Kongres PPII tahun 1932 dan PPII tahun 1933.

b. Kongres Perempuan Indonesia II

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 20 hingga 24 Juli 1935. Kongres yang dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro dan Ny. Sh. Suparto ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi-organisasi perempuan.

a) Maksud dan Dasar:

Maksud Kongres Perempuan Indonesia ke II adalah merapat-kan persaudaraan antara organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia dan rakyat Indonesia umumnya. Sedangkan dasar Kongres Perempuan Indonesia ke-II adalah kenasionalan, kesosialan, kenetralan, dan keperempuanan.

b) Keputusan-keputusan

1) Mengenai Organisasi

(a) Dibentuk badan perikatan dengan nama Kongres Perempuan Indonesia”.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

(b) Tiap-tiap tiga tahun sekali diadakan Kongres Perempuan Indonesia.

(c) Kongres yang akan datang diadakan di Bandung. Susunan badan persiapan kongres itu diserahkan kepada Ny. Emma Puradiredja.

(d) Dasar-dasar dan rancangan organisasi Kongres Perempuan Indonesia ke-II dengan beberapa perubahan diterima baik dan akan dipakai sebagai pangkal pekerjaan kongres untuk seterusnya.

(e) Kekurangan ongkos untuk kongresnummer harus dipikul oleh segenap anggota kongres.

(f) Perkumpulan-perkumpulan yang mencari uang untuk kongres harus diberi kongresnummer dengan cuma-cuma.

(g) Kongres mendirikan suatu komisi yang diberi hak untuk memberikan keterangan resmi tentang segala hal yang mengenai Kongres.

Komisi ini antara lain terdiri dari:

- * Ny. Sri Mangunsarkoro
- * Ny. Sh. Suparto
- * Ny. Suhara
- * Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso

(h) Tiap-tiap kongres dipimpin oleh Pengurus Kongres yang baru.

2) Usaha perbaikan nasib perempuan Indonesia

Kongres mengadakan suatu “Badan Penyelidikan Perbu-ruhan Perempuan Indonesia” (BPPPI), yang berkewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan di seluruh Indonesia. Susunan badan itu diserahkan kepada Ny. Sri Mangunsarkoro.

(a)Badan tersebut agar dalam penyelidikannya menyebarkan angket masal (*massale enquete*) yang terutama menyelidiki keadaan buruh yang gajinya kurang dari f 15, sebulan.

(b) Biaya untuk Badan Penyelidikan tersebut berasal dari iuran anggota Kongres yang ditetapkan berdasar banyaknya hak suara.

(c)Kongres menganjurkan kepada anggota-anggotanya supaya menyelidiki “Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam” dan menyokong “Badan Penyelidikan Talak dan Nikah” yang sudah diadakan oleh Pasundan Isteri di Bandung.

(d) Kongres menerima mosi yang mewajibkan semua anggota Kongres untuk memberikan bantuan yang semestinya kepada orang yang mengalami ketidakadilan dalam per-kawinan sehubungan dengan penerapan hukum Islam yang salah.

3) Dalam usaha meningkatkan Pergerakan Perempuan Indonesia, Kongres menetapkan:

(a)Bahwa kewajiban utama perempuan Indonesia ialah menjadi “bu Bangsa” yang berarti berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya.

(b) Agar anggota kongres mengadakan hubungan yang baik dengan generasi muda, sehingga tercipta saling pengertian dalam rangka keseimbangan antar generasi, oleh karena itu perlu sikap saling menghargai dan tidak menonjolkan diri.

4) Usaha Pemberantasan Buta Huruf

(a)Tiap-tiap anggota Kongres diwajibkan mengadakan usaha pemberantasan buta huruf. Untuk kelancaran usaha tersebut Kongres membentuk “Biro Pendaftaran” (Registrasi Bureau) yang bertugas menetapkan target yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Diharapkan pada Kongres yang akan datang yaitu 3 tahun lagi telah berhasil membebaskan 5000 perempuan dewasa dari buta huruf.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Badan tersebut terdiri dari:

- * Ny. S. Sumadi (Ny. S. Aruji Kartawinata)
- * Ny. Husni Thamrin
- * Ny. Sh. Suparto

(b) Biaya Biro Pendaftaran dibebankan kepada iuran anggota--anggota Kongres.

(c) Badan tersebut ditugaskan untuk menyusun peraturan pelaksanaan pemberantasan buta huruf.

5) *Saran-saran kepada Kongres:*

(a) Karena Kongres belum dapat mengusahakan surat kabar untuk perempuan, maka dianjurkan supaya anggota mengirim-kan pandangannya mengenai berbagai soal kepada surat-surat kabar lain.

(b) Supaya hanya ada 3 hal yang dibahas pada Kongres yang akan datang.

(c) Supaya memperhatikan kesehatan perempuan Indonesia.

(d) Supaya orang yang hidupnya berkecukupan melaksanakan hidup sederhana, sehingga kelebihan uang dapat diperguna-tan untuk keperluan kebangsaan.

c) Hal-hal lain:

Organisasi dan Badan/Lembaga yang menjadi anggota Kongres Perempuan Indonesia ke-II, antara lain:

- 1) Kaum Ibu Tuban, Tuban
- 2) Mardi Putri, Pematang
- 3) Pasundan Isteri, Bandung
- 4) Sarekat Rukun Isteri, Makasar
- 5) Perkumpulan Rukun Isteri, Tanggerang

- 6) PARMI (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Isteri, Padang
 - 7) Persatuan Isteri Andalas, Bandung
 - 8) Isteri Sedar, Mataram
 - 9) Wanita Taman Siswa, Bandung
 - 10) Persaudaraan Isteri, Bandung
 - 11) Kemajuan Isteri, Jakarta
 - 12) Isteri Indonesia, Jakarta
 - 13) Wanito Utomo, Mataram
 - 14) Putri Budi Sejati, Surabaya
 - 15) Sancoyo Rini, Sala
 - 16) Persatuan Isteri Indonesia, Surabaya
 - 17) Aisyiyah, Mataram
 - 18) Darmo Laksmi, Salatiga
 - 19) Kautamaan Isteri, Medan
 - 20) Wanito Iencono, Banjarmasin
 - 21) Seri Derma, Sala
 - 22) Partai Sarekat Islam Indonesia Bagian Isteri, Garut
 - 23) Wanito Sejati, Bandung
 - 24) PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya), Manado Jumlah ini ditambah lagi dengan komite gabungait Guru-guru sekolah Islam Perempuan dan Sekolah Diniyah Padang Panjang.
- d) Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indonesia ke-II tahun 1935
- 1) Konferensi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PM)

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pada tanggal 14-15 September 1935 di Mataram (Yogya-karta) diadakan konferensi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII). Dalam Konferensi ini telah diambil keputus-keputusan sebagai berikut:

(a) Mengingat telah terbentuknya badan Kongres Perempuan Indonesia yang maksudnya sama dengan PPII bahkan lebih luas daerah pekerjaannya, diputuskan membubarkan PPII.

(b) Semua harta benda PPII diserahkan kepada badan Kongres Perempuan Indonesia tersebut.

(c) Keuangan “Seri Derma” sebesar F 1751,28 yang dulu disediakan untuk beasiswa gadis-gadis Indonesia, diserahkan kepada badan “Kongres Perempuan Indonesia” untuk biaya pemberantasan Buta Huruf di kalangan kaum ibu Indonesia.

2) Isteri Sedar keluar dari Kongres

Organisasi “Istri Sedar” terbentuk pada tahun 1930. Pada tahun 1935, organisasi ini diketuai oleh Ny. Suwarni Pringgodigdo dan turut-serta dalam Kongres Perempuan Indonesia ke II tahun 1935.

Dalam kongres ini perwakilan dari Istri Sedar sempat berselisih paham dengan pihak perwakilan dari sayap perempuan PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dari Sumatra Barat. Perselisihan seputar *kedudukan wanita dalam Hukum Perkawinan Islam* itulah yang kemudian memantik sikap perwakilan dari Istri Sedar menyatakan bahwa Istri Sedar keluar dari Kongres Perempuan Indonesia ke-II.

Pada kongres-kongres perempuan Indonesia berikutnya, Istri Sedar masih tetap pada pendirian dan tidak mengirimkan perwakilannya ke dalam kongres. Organisasi lebih konsen pada persamaan hak dan kedudukan pria dan perempuan untuk mempercepat proses perburuan kemerdekaan.

3) Menyikapi Tawaran Rancangan Ordonansi Perkawinan

Sebagai suatu perkumpulan nasional yang menaungi perkumpulan-perkumpulan di daerah, PPI yang telah berganti nama PPII itu menjadi satu di antara berbagai organisasi nasional yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah Hindia-Belanda.

Perhatian itu, sebenarnya, telah tampak dari sikap pemerintah yang secara diam-diam mengamati dan merumuskan arah pergerakan perempuan yang terjadi sejak berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia ke-I di Yogyakarta. Melalui utusan-utusan khususnya, pemerintah melakukan penyelidikan dan pembacaan situasi-kondisi yang terjadi dalam forum selama kongres berlangsung hingga diumumkannya keputusan-keputusan yang ada.

Perhatian yang lebih tepatnya dapat disebut sebagai pengintaian itu mulai merangsang pemerintah untuk turut campur dalam dinamika internal PPI/PPII. Bentuk dari upaya melakukan penyusupan itu tampak jelas dari keinginan pemerintah untuk memecah-belah persatuan anggota PPI/PPII dengan menawarkan rancangan ordonansi perkawinan pada tahun 1937.

Dalam rancangan itu terdapat rencana pemerintah yang hendak membuat program pencatatan perkawinan. Adapun di antara detail rencananya terdapat informasi bahwa; bagi mereka yang mencatatkan perkawinan mereka secara sukarela setelah dilangsungkan perkawinan, maka berlaku asas monogami. Yaitu, larangan bagi suami untuk melakukan pernikahan lagi sebelum menceraikan istrinya.

Tawaran kerjasama program itu membuktikan adanya penyelidikan-penyelidikan khusus yang dilakukan pihak pemerintah terhadap PPI/PPII berikut pendapat-pendapat para anggotanya. Pihak pemerintah telah mengendus adanya pro-kontra seputar status perkawinan yang sempat memanas dalam forum Kongres Perempuan Indonesia ke-I.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pada momentum Kongres Perempuan Indonesia ke-II inilah, pemerintah kolonial Hindia-Belanda mulai bergerak untuk memecah persatuan anggota PPI/PPII dengan berkedok penawaran program kerjasama pencatatan perkawinan. Tentu saja dengan harapan agar tawaran itu diterima oleh PPI/PPII sekaligus diputuskan dan diumumkan melalui hasil keputusan Kongres Perempuan Indonesia ke-II.

Walaupun sebagian besar organisasi perempuan yang tergabung dalam Kong-res Perempuan Indonesia dapat menerima rancangan ordonansi tersebut, namun kesepakatan anggota PPI/PPII atau keputusan kongres tidak menerima tawaran kerjasama tersebut. Hal ini membuktikan bahwa PPI/PPII dan Kongres Perempuan Indonesia masih tetap bertahan untuk menjaga persatuan dan kesatuan anggota-anggotanya. Walhasil, tawaran rancangan ordonansi itu ditarik kembali oleh pemerintah.

4) Pembentukan KPKPAI

Pada tahun 1937 atas usaha beberapa perkumpulan didirikan Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI). Komite tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, merencanakan suatu peraturan perka-winan dan mendirikan biro konsultasi.

KPKPAI itu dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro, sedangkan Biro Konsultasi oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH. Sejak dibentuk, KPKPAI ini berdiri di luar Kongres Perempuan Indonesia. Setelah Kongres Perempuan Indonesia ke-III berlangsung di Bandung, KPKPAI ini dijadikan suatu badan dengan badan kepengurusan PPI/PPII dan Kongres Perempuan Indonesia. Adapun nama KPKPAI diganti ***Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Per-kawinan*** (BPPIP).

c. Kongres Perempuan Indonesia III

Kongres diadakan di Bandung pada tanggal 23-27 Juli 1938 dengan pimpinan Ny. Emma Puradireja.

a) Maksud, Asas, dan Usaha-usaha:

1) Maksud Kongres Perempuan Indonesia:

Merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk menguatkan usaha memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

2) Asas-asas Kongres Perempuan Indonesia:

(a) Kebangsaan

(b) Kesosialan

(c) Sikap harga menghargai

(d) Keperempuanan.

3) Usaha-usaha Kongres Perempuan Indonesia:

Untuk mencapai maksud itu maka Kongres akan:

(a) Menyelidiki keadaan masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan kehidupan perempuan.

(b) Mempelajari kehidupan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan lainnya, agar dapat memperbaiki kedudukan perempuan Indonesia.

(c) Jika perlu mengadakan aksi bersama atau per kelompok ke arah perbaikan nasib.

(d) Mendirikan badan-badan penyelidikan.

(e) Mengumpulkan semua catatan-catatan kegiatan dari anggotanya biasa dan Badan-badan Penyelidikan tersebut.

(f) Menerbitkan majalah dan risalah, jika dianggap perlu.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

(g) Mengadakan komunikasi dengan organisasi perempuan luar Indonesia.

(h) Mengadakan segala usaha yang dapat meningkatkan kedudukan perempuan Indonesia, menurut asas-asas Kongres.

b) Keputusan-keputusan:

1) Keputusan Umum

(a) Menetapkan banyaknya suara anggota.

(b) Merencanakan anggaran Rumah Tangga Kongres.

Perencanaan ini diserahkan pada komisi khusus yang dibentuk dari wakil-wakil PSII Wanita, Istri Indonesia, PIPB (Perkumpulan Istri Pegawai Bumiputra). Adapun Ny. Maria Ulfah Santoso SH. Bertindak sebagai penasehat hukumnya.

(c) Kongres Perempuan Indonesia tidak menjadi Badan yang tetap.

(d) Menetapkan anggaran dasar yang baru.

2) Mengenai Pemberantasan Buta Huruf

(a) Pekerjaan BPBH dijadikan Badan Kongres di bawah pimpinan Ny. Sh. Suparto dan berkedudukan di Jakarta.

(b) Pimpinan diberi kuasa untuk menambah pengurus bila diperlukan.

(c) Mendirikan Komisi Verifikasi (Verificatie-Commissie) untuk memeriksa Kas BPBH.

Komisi ini terdiri dari Ibu-ibu Sarekat Istri Jakarta, PIPB dan PASI (Pasundan Istri), Jakarta.

3) Mengenai kedudukan perempuan Indonesia dalam perkawinan:

(a) Kongres Perempuan Indonesia ke III menyetujui usul Ny. Maria Ulfah Santoso SH dan usulan dari perwakilan PASI, Istri In-

donesia dan Majelis Pergerakan Perempuan PSII (Partai Sarekat Islam Indo-nesia).

(b) Mendirikan Komisi untuk membuat rancangan peraturan perkawinan yang berdasarkan usul-usul tersebut di atas.

Komisi ini terdiri dari: Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Ny. Datuk Tumenggung (PIPB), Ny. S. Sumadi (Ny. S. Arujikarta-winata) (PSII Wanita), Ny. Zahara Gunawan (Sarekat Isteri Jakarta), Ny. M. Wiria Atmaja (PASI), Ny. Kasman (JIBDA) dan seorang lagi dari Isteri Indonesia Jakarta.

(c) Pekerjaan Komisi ini harus selesai dalam satu tahun dan akan dirapatkan dalam konferensi Kongres Perempuan Indonesia.

(d) Kongres Perempuan Indonesia akan mengirimkan wakilnya dalam persidangan "**All Islam Congress**" yang akan datang.

(e) Mengirimkan mosi kepada *All Islam Congress*.

Mosi itu berisi; permintaan dengan sangat agar ayat-ayat Al-Qur'an yang bersangkutan dengan perkawinan hendaknya ditafsirkan dengan keterangan-keterangan yang sebenarnya seperti maksud perintah Tuhan dan kehendak Nabi kita yang suci dan adil itu.

4) Mengenai Hak Pilih bagi perempuan:

Kongres menyerahkan kepada anggota-anggota untuk mene-ruskan tugas dan penyelidikan tentang hak untuk memilih.

5) Perubahan KPKPAI

Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) yang terbentuk pada Kongres Perempuan Indonesia ke-II, dijadikan Badan Kongres Perempuan Indonesia. Adapun namanya: **Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan** (BPPIP).

6) Mengenai kaum buruh perempuan Indonesia:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

(a) Didirikan Badan tetap untuk menyelidiki keadaan kaum buruh perempuan yang berkedudukan di Yogyakarta dipimpin oleh Ny. Sukemi, yang diberi wewenang untuk berhubungan dengan organisasi-organisasi lain di Mataram (Yogyakarta).

(b) Anggota-anggota Kongres harus memberikan data-data kepada Badan ini.

(c) Iuran ditetapkan f 1,— tiap anggota dalam setahun, kecuali JIBDA dan Persatuan Isteri Jakarta f 0,50.

7) Mengenai Hari Ibu:

(a) Hari Ibu diadakan tiap tanggal 22 Desember

(b) Menjual bunga putih pada hari tersebut

(c) Hasil-hasilnya diserahkan kepada Pengurus Kongres untuk dana “Hari Ibu” yang akan dipergunakan untuk badan--badan amal Kongres Perempuan Indonesia.

(d) Kegiatan lainnya diserahkan kepada anggota Kongres.

8) Mengenai Pendidikan Pemuda kita:

(a) Agar Kongres mengadakan komunikasi dengan organisasi-organisasi pemuda.

(b) Anggota-anggota diharuskan meneruskan penelitian di bidang pendidikan.

9) Mengenai Tuna Susila:

Anggota-anggota Kongres diharuskan berusaha dengan sekuat tenaga memberantas pelacuran dan mendukung P4A (Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak).

10) Mengenai Kongres:

(a) Menetapkan bahwa Kongres Perempuan Indonesia ke-IV akan diselenggarakan di Semarang.

(b) Yang dipilih sebagai Ketua: Ny. Suparjo dan Wakil Ketua: Ny. Sunaryo Mangunpuspito.

11) Mengenai Pengurus Kongres:

Pengurus Kongres perempuan Indonesia ke-III tetap bekerja sampai Kongres yang akan datang.

12) Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia ke III:

Ketua : Ny. Emma Puradireja Wakil

Ketua I : Ny. A.1Rahim

Wakil Ketua II : Ny. Ratnawinadi

Penyurat I : Ny. S. Tirtowiryo

Penyurat II : Ny. Suwarni Miharja

Bendahari I : Ny. Martakusumah

Bendahara II : Ny. A. Joyopuspito

Pembantu :

* Ny. Rumsari

* Ny. Leimena

* Ny. Satari

* Ny. H. Purwana

* Ny. Aisah Prikasih

* Ny. Sunodo

* Ny. Mariam Abdirlrachman

* Ny. Sumarjo Ny. Heerjan.

c) Hal-hal Lain:

1) Anggota-anggota Kongres Perempuan Indonesia ke-III:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- * Sarekat Islam Jakarta, Jakarta
- * Wanita Sedjati, Bandung
- * Penulung Wanodiyo, Bandung Pasundan Isteri H.B., Bandung
- * Isteri Kutaraja, Kutaraja
- * H.B. JIBDA, Semarang
- * PB Isteri Indonesia, Semarang
- * PB Wanita Taman Siswa, Yogyakarta
- * HB Putri Budi Sedjati, Surabaya
- * PIPB (Persatuan Isteri Pegawai Bumiputra), Jakarta
Perukunan Istri Den Pasar, Denpasar
- * Persaudaraan Isteri, Bandung Rukun Setia Isteri, Bandung
PSII Bagian Isteri, Jakarta
- * Perserikatan Putri Setia Manado, Manado

2) Panitia Penyelenggara Kongres terdiri dari:

Ketua : Ny. Rumsari

Wakil Ketua : Ny. Leimena

Penulis I : Ny. Komoh

3) KPKPAI menjadi BPPIP

Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak (KPK-PAI) yang semula berdiri sendiri, dijadikan suatu badan dari Kongres dengan nama “Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan” (BPPIP).

Badan ini mempunyai biro konsultasi yang dipimpin oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH dengan tujuan memberi nasihat kepada kaum perempuan mengenai perkawinan, perceraian, kedudukan

anak-anak, jika perlu mem-bawa perkara-perkara itu ke depan Raad Agama (Pengadilan Agama).

4) Bergabung dalam organisasi P4A

Kaum perempuan Indonesia ikut serta dalam organisasi ***Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak--anak*** (P4A). Keanggotaan organisasi ini terdiri dari para lelaki dan perempuan yang dibentuk pada bulan April 1930.

Melalui Kongres Perempuan Indonesia ke-III, para anggota kongres menyarankan agar proses pengimpor film dilaksanakan lebih teliti. Selain itu, dalam badan pemeriksa (sensor) film, hendaknya melibatkan peran perempuan Indonesia.

Menindaklanjuti gabungannya kaum perempuan itu, keputusan Kongres P4A pada bulan April 1940, mengusulkan kepada pemerintah: agar anggota Polisi Kesusilaan ditambah dan agar perempuan Indonesia juga ikut duduk dalam keanggotaan Polisi Kesusilaan.

d) Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indonesia ke-III tahun 1938

1) Perempuan mendapat Hak untuk Dipilih.

Pada tahun 1938, Pemerintah Hindia-Belanda memberi Hak untuk Dipilih (*Passiefkiesrecht*) kepada kaum perempuan Indonesia terkait keanggotaan Dewan Kota (*Gemeente Raad*).

Ada 4 perempuan yang kemudian terpilih sebagai anggota, yaitu Ny. Emma Puradireja di Bandung; Nn. Sri Umiyati di Cirebon; Ny. Sunaryo Mangunpuspito di Semarang; dan Ny. Siti Sundari Sudirman di Surabaya.

2) Komisi Visman menyimak keinginan Perempuan

Pada permulaan tahun 1941, Komisi Visman (*Commissie Visman*) mengundang Ny. Sunaryo Mangun-puspito dan Ny. Sri Mangunsarkoro.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Komisi yang bertugas menyelidiki keinginan-keinginan bangsa Indo-nesia seputar perubahan-perubahan tatanegara itu menyimak tuntutan Ny. Sunaryo Mangunpuspito seputar “Indonesia Berparlemen” dan tuntutan Ny. Sri Mangunsarkoro seputar “Indonesia Merdeka”.

d. Kongres Perempuan Indonesia IV

Kongres diadakan di Semarang pada tanggal 25-28 Juli 1941 dengan pimpinan Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi perempuan.

a) Maksud dan Tujuan:

Maksud dan tujuannya sama dengan Kongres Perempuan Indonesia ke III.

b) Keputusan-keputusan:

1) Pilihan Ketua Kongres Perempuan Indonesia ke V jatuh pada Ny. Sudirman dari Putri Budi Sedjati, Surabaya.

2) Kongres Perempuan Indonesia ke V direncanakan diadakan di Surabaya.

3) Kongres menganjurkan kepada anggota-anggota Dewan Rakyat (*Volksraad*), supaya mengusulkan agar bahasa Indonesia dimasukkan sebagai mata pelajaran tetap pada sekolah menengah (HBS dan AMS).

4) Kongres setuju dan akan membantu aksi GAPI “Indonesia Berparlemen”, pelaksanaannya diserahkan kepada anggota-anggota Kongres.

5) Kongres setuju dengan penolakan GAPI dan organisasi lainnya terhadap ordonansi wajib militer (*militieplicht*) terbatas buat bangsa Indonesia.

6) Kongres tidak menyetujui putusan Minangkabauraad yang tidak menerima prinsip hak untuk dipilih bagi kaum Ibu Indonesia.

7) Mengirimkan mosi kepada pemerintah: Kongres Perempuan Indonesia ke IV berpendapat bahwa hak untuk memilih (actief kiesrecht) anggota Dewan Kota dari golongan Indonesia juga diberikan kepada Perempuan Indonesia.

8) Mengirim telegram kepada Dewan Rakyat, Fraksi Nasional Indonesia (Tn. Suroso) dan Gubernur Jendral di Jakarta, sebagai berikut:

“Mengingat bahwa asas dan tujuan maupun keputusan-keputusan Kongres Perempuan Indonesia ke I, II, III dan IV, semua bermaksud menjunjung tinggi dan mempersamakan derajat dan kedudukan kaum perempuan dan setelah mendengar pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Rakyat, di mana sebagian besar anggotanya telah menyetujui hak untuk memilih bagi perempuan, Kongres Perempuan Indonesia ke IV mohon agar hak untuk memilih bagi kaum perempuan dikabulkan.

9) *Susunan Pengurus Kongres Perempuan Indonesia ke IV:*

Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

Wakil Ketua : Ny. Darmowinoto

Penulis I : Ny. Pujotomo

Penulis II : Ny. Retnomaendro

Bendahari : Ny. Munandar

Pembantu :

* Ngamdani,

* Ny. Sujono S. Pusponegoro

* Ny. Suyatno

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

* Ny. Kridoharsoyo

c) Hal-hal lain:

1) Anggota-anggota Kongres Perempuan Indonesia ke IV

* Pasundan Isteri

* Puspo Rinonce

* Sarekat Isteri Indonesia

* Budi Rini

* Putri Budi Sejati

* Wanito Taman Siswa

* Sancoyo Rini

* Persatuan Putri

* Pengurus Besar Aisyiyah Hoofdbestuur Jong Islamieten
Bond Dames Afd. (JIBDA)

* Majelis Dept. Pergerakan Isteri Partai Sarekat Islam
Indo-nesia

* Susilo Retno

* PB Isteri Indonesia.

2) Panitia Penyelenggara Kongres Perempuan Indonesia ke IV

Ketua : Ny. Suyadi

Wakil Ketua : Ny. Mustajab

Penulis I : Nn. Siti Mulyati

Bendahari I : Ny. Moh. Rasid

Bendahari II : Ny. Sumarjo

Pembantu :

- * Ny. Juhana
- * Ny. Suryatin
- * Ny. Moh. Husin
- * Ny. Sindusuwarno
- * Ny. Slamet Ny. Munadi
- * Nn. Wahyujatmiko
- * Nn. Alimah

d) Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres Perempuan Indoensia ke IV tahun 1941:

Kongres Perempuan Indonesia ke-V, yang telah diputuskan untuk diselenggarakan pada tahun 1942 di Surabaya, gagal terlaksana. Hal ini lebih diakibatkan oleh situasi dan kondisi Indonesia yang sulit untuk digunakan dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia ke-V.

Adapun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan itu dipicu oleh kedatangan tentara-tentara Jepang yang mengambil-alih penjajahan yang dilakukan Belanda atas Indonesia pada tahun 1942.

2. Kongres PPI / PPII

Perikatan Perempoean Indonesia (PPI) merupakan nama suatu badan permufakatan yang didirikan atas dasar keputusan rapat dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama (Blackburn, 2004:19). Sejak didirikan badan permufakatan ini menggelar kongres sebanyak empat kali. Dalam kongres yang pertama, badan ini masih menggunakan nama PPI. Namun sejak putusan kongresnya yang pertama di Jakarta itu diumumkan, nama badan ini secara resmi diganti dengan nama *Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia* (PPII).

Badan permufakatan yang semula bernama PPI lalu berganti PPII ini akhirnya resmi dibubarkan setelah hasil kongres PPI/PPII

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

IV diumumkan. Dari hasil kongres ke-IV ini terdapat keputusan untuk mendirikan *Badan Kongres Perempuan Indonesia* (BKPI). Badan inilah yang kemudian bertugas untuk mempersiapkan dan mengelola kongres-kongres perempuan pada tahun-tahun berikutnya.

a. Kongres Perikatan Perempuan Indonesia I

Kongres ini diadakan di Jakarta dari tanggal 28 — 31 Desember 1929, dengan pimpinan Ny. R.A. Sukonto dan dihadiri oleh Wakil-wakil organisasi, anggota PPI.

a) Maksud dan Tujuan:

“Perikatan Perempuan Indonesia” (PPI) maksud dan tujuannya sama dengan Kongres Perempuan Indonesia ke I.

b) Keputusan-keputusan:

1) Perubahan Anggaran Dasar (Statuten) dan Anggaran

Rumah Tangga (Huishoudelijk Reglement), antara lain:

— Nama “Perikatan Perempuan Indonesia” (PPI) diganti menjadi “Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia” (PPII).

— Keanggotaan (Pasal 3), yang menjadi anggota PPII adalah Pusat Organisasi bukan cabang-cabang.

2) Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar ada undang-undang yang melarang pergundikan.

3) Pengurus PPII yang baru tetap berkedudukan di Mataram (Yogyakarta) dan diketuai oleh Ny. R.A. Sukonto.

4) Studiefonds PPII dinamakan “Seri Derma”.

5) Surat Kabar “Isteri” diterbitkan di Jakarta.

c) Susunan Pengurus Kongres PPI

Ketua : Ny. R.A. Sukonto

Wakil Ketua : Nn. Sujatin (Ny. Kartowijono)
Penulis I : Sunaryati (Ny. Sukemi)
Penulis II : Nn. Salmiyati
Bendahari : Ny. R.A. Hardjodiningrat
Pembantu : Nyi Hadjar Dewantara
Pembantu : Ny. Mundjiah

d) Hal-hal lain:

1) Anggota-anggota:

Organisasi yang menjadi anggota PPII sama dengan organisasi yang menjadi anggota PPI (20 organisasi) dan bertambah dengan 5 anggota.

2) Panitia Penyelenggara Kongres PPI

Ketua pelaksana dalam penyelenggaraan Kongres PPI I ini adalah Ny. Mustadjab. Adapun Ny. RA. Sukonto sebagai Ketua Umumnya.

b. Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia II

2) *Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya*

Sesuai putusan sidang Kongres PPI I di Jakarta, nama badan permufakatan PPI diganti dengan nama PPII. Sehingga dalam kongres kali ini dinamakan Kongres PPII. Namun demikian, urutan kongres masih dimulai dari kongres pertama PPI. Sehingga kongres ini disebut sebagai Kongres PPII kedua.

Kongres PPII II ini diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 1930 di Surabaya.

a) Maksud dan Azas:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

PPII bermaksud menjadi gabungan organisasi perempuan Indo-nesia. Di dalam pergerakan itu kaum perempuan memperbaiki ke-dudukan serta menjunjung tinggi derajat perempuan umumnya, berazaskan kebangsaan, tidak berazas sesuatu agama dan politik.

Kongres berazaskan kebangsaan, menjadi bagian dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia, menjunjung tinggi keperempuanan, meneguhkan imannya.

b) Keputusan-keputusan:

1) Struktur Organisasi

Untuk mempererat hubungan antara pengurus PPII dan Organisasi anggota, dibentuk “Badan Perantaraan” di tempat di mana sedikitnya ada 2 organisasi anggota. Tugas “Badan Perantaraan” adalah:

Ø Menjadi perantara antara Pengurus Pusat PPII dan anggota-anggotanya.

Ø Mempelajari hak pilih kaum perempuan.

Ø Menyelidiki dan memberi laporan tentang Hygiene dalam kampung-kampung dan jumlah kematian bayi.

Ø Mengadakan “Kantor penyuluhan perburuhan”.

Ø Memajukan P4A (Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak).

2) Tempat Kedudukan Pengurus

Pengurus PPII ditetapkan berkedudukan di Jakarta dengan Ketua Ny. Mustadjab.

3) Mengenai Surat Kabar “Isteri”

Berkedudukan tetap di Jakarta dan harus memakai Bahasa Indonesia. Susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Sidang Pengarang terdiri dari anggota PPII dan seorang Redaktur Perempuan yang dipilih oleh Sidang Pengarang di antara anggota-anggotanya. Redaktur tersebut bertanggung jawab kepada Sidang Pengarang dan Sidang Pengarang kepada Pengurus PPII.

4) Mengenai “Seri Derma”

Mengadakan referendum dalam jangka 3 bulan kepada semua anggota PPII untuk menetapkan apakah “Seri Derma” akan menjadi badan hukum/yayasan (*Stichting*).

5) Mengenai pensiun janda-janda Indonesia

Mengenai pensiun janda-janda (*landsdienaren*) Indonesia, pengurus akan berhubungan *Vereniging Voor Landsdienaren* (VVL).

6) Anjuran kepada anggota PPII

* Agar anggota PPII berusaha sekuat tenaga mencegah perkawinan anak-anak dan menyadarkan kaum perempuan akan hak kewajibannya dalam perkawinan.

* Agar anggota-anggota PPII menyokong Surat Kabar “Isteri” baik dengan uang maupun dengan mencarikan iklan dan langganan.

* Agar anggota-anggota PPII setiap bulan dapat mengirim karangan kepada redaksi surat kabar “Isteri”.

7) Agar PPII berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk mempertahankan watak kebangsaan Indonesia dan mencari hubungan baik di dalam dan di luar negeri.

8) Tentang warisan almarhumah Mugarumah

Kongres menetapkan agar Ny. Sukonto dengan bantuan Mr. Ali Sastroamidjojo mengurus warisan Almarhumah Nn. Mugarumah.

9) Memutuskan untuk mengirimkan perutusan ke All Asian Women Conference yang diadakan di Lahore, pada bulan Januari 1931 terdiri dari:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

a. Nn. Sunaryati (Ny. Sukemi)

b. Ny. R.A. Rukmini Santoso (adik R.A. Kartini)

10) Menetapkan Kongres yang akan datang diadakan di Sala.

11) Pengurus Kongres PPII tahun 1930 — 1932

Ketua : Ny. Mustadjab

Wakil Ketua : Ny. Suwandi

Penulis I : Ny. Sri Mangunsarkoro

Penulis II : Ny. Badingudzaman

Bendahari : Ny. Hardjono

Pembantu : Ny. Sh. Suparto

Pembantu : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

c) Hal-Hal Lain

Panitia penyelenggara Kongres PPII dipimpin oleh Ny. Sudirman.

c. Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia III

Kongres ini diadakan di Surakarta (Sala) pada tanggal 25 — 29 Maret 1932 dengan pimpinan Ny. Mustadjab dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi anggota PPII.

a) Keputusan-keputusan:

1) Struktur Organisasi:

“Badan perantaraan” dihapuskan. Sedapat mungkin diusahakan agar tiap 3 bulan organisasi anggota PPII yang berkedudukan di suatu tempat mengadakan pertemuan untuk menyusun aksi bersama.

2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga (Pasal 2), mengenai hal berhenti sebagai anggota:

Ø Karena permintaan sendiri

Ø Karena dalam 3 bulan berturut-turut tidak membayar iuran tetap, walaupun sudah diperingatkan oleh pengurus.

Ø Karena putusan pengurus dengan alasan tindakan anggota yang mengecewakan atau bertentangan dengan alas PPII atau tak mengindahkan kewajiban sebagai anggota.

Ø Atas keputusan pengurus itu, anggota yang dikeluarkan boleh minta keadilan pada persidangan anggota.

3) Mengenai Pengurus:

Ø Pengurus berkedudukan di Jakarta dengan Ketuanya Ny. Suwandi, untuk masa jabatan 3 tahun lamanya.

Ø Tempat kedudukan pengurus dipilih, untuk setiap tiga tahun lamanya.

Ø Kongres memberi kuasa kepada Ny. Suwandi untuk mengajukan calon-calon anggota pengurus barn.

Ø Anggota PPII yang berkedudukan di Jakarta, memilih anggota pengurus PPII berdasarkan daftar calon yang diajukan.

Ø Pengurus diwajibkan memberi sokongan uang untuk menggiatkan pekerjaan Komisi Fusi.

Ø Pengurus harus menanggung 50% dari biaya lang-ganan surat kabar “Isteri” yang diberikan cuma-cuma kepada anggota-anggota PPII.

Ø Pengurus agar mengusahakan berdirinya “Badan Usaha Kongres” (Kongresfonds).

Ø Kongres memberikan kuasa kepada Pengurus untuk mengurus warisan almarhumah Nn. Mugarumah de-ngan bantuan Mr. Ali Sastroamidjojo.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

4) Mengenai Surat Kabar “Isteri”

Ø Tempat kedudukan sidang Pengarang pindah ke Surabaya.

Ø Anggota PPII yang tidak mempunyai media sendiri, menjual 5 Exp majalah “Isteri” atau mencarikan 5 lang-ganan dalam setahun.

Ø Anggota PPII yang sudah mempunyai media sendiri sedapat mungkin memenuhi kewajiban tersebut juga atau membantu kemajuan surat kabar “Isteri” dengan memasang iklan dalam majalah organisasi tersebut.

Ø Agar harga langganan surat kabar “Isteri” diturunkan.

5) Mengenai Seri Derma:

Menetapkan “Seri Derma” menjadi yayasan (*Stichting*).

* Tempat kedudukan “Seri Derma” pindah ke Sala.

* Supaya didirikan cabang-cabang Seri Derma di tempat-tempat yang ada anggotanya PPII.

* Menetapkan komisi Redaksi untuk Anggaran Dasar “Seri Derma” yakni: Ny. Sh. Suparto dan Nn. Nuraini.

6) Mengenai Komisi Fusi:

— Komisi diharapkan menyelesaikan pekerjaannya dan pada Kongres yang akan datang diharapkan sudah terbentuk fusi di antara anggota-anggota PPII yang lama haluannya.

7) Mengenai Para Pemimpin dalam kalangan PPII:

— Agar para pemimpin sebagai Ibu mengamati pergaulan muda mudi Indonesia dan agar pergaulan sesuai dengan kesusilaan Timur.

— Agar memberikan contoh hidup sederhana kepada rakyat.

8) Mengenai PPII secara umum:

* Menyerukan kepada semua organisasi kebangsaan baik yang bergerak di bidang politik maupun sosial, agar memperhatikan soal-soal perawatan orang miskin.

* Mendirikan biro informasi untuk kaum perempuan dan anak-anak.

* Menanamkan pengertian kesucian perkawinan kepada pemuda-pemudi.

* Memajukan pertentangan untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

* Memberikan penerangan tentang maksud dan tujuan perkawinan di tempat-tempat yang terjadi banyak perceraian.

* Memberikan Kuasa kepada Nn. Suyatin untuk mempelajari dan membuat risalah perburuhan perempuan.

* Menetapkan agar kongres yang akan datang diadakan pada liburan paskah dan bertempat di Bandung atau di Mataram.

g) Pengurus Kongres PPII tahun 1932-1933

Ketua : Ny. Suwandi

Wakil Ketua : Ny. Sri Mangunsarkoro

Penulis : Ny. Badingudzaman

Bendahari : Ny. Hardjono

Pembantu : Ny. Sh. Suparto

Pembantu : Ny. Sunarjo Mangunpuspito.

b) Hal-hal lain:

Panitia penyelenggara kongres PPII tahun 1932 di Sala dipimpin oleh Ny. N. Singgih.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

c) Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres PPII tahun 1932 di Sala

(1) Pada tanggal 25-26 Juni 1932 di Mataram (Yogyakarta) diadakan konferensi antar anggota PPII yang berhaluan sama dan dipimpin oleh Nn. Suyatin (Ny. Kartowiyono). Kongres tersebut menghasilkan suatu Badan Fusi bernama “Isteri Indonesia”. Organisasi ini berazaskan kebangsaan, kerakyatan, kenetralan terhadap agama dan tujuannya ialah: “Indonesia Raya”. Isteri Indonesia pada masa tahun 1932-1933 dipimpin oleh Ny. Sh. Suparto, pada tahun 1933-1940 oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dan pada tahun 1940-1942 oleh Ny. Maria Ulfah Santoso SH (sampai masuk Jepang).

(2) Disamping “Isteri Indonesia”, ada organisasi yang besar, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian dari suatu partai ialah “Puteri Budi Sejati” yang berpusat di Surabaya dan berazaskan kebangsaan. Puteri Budi Sejati bercita-cita menaikkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pimpinannya yang terkenal ialah Ny. Siti Sundari Sudirman yang kemu-dian menjadi anggota Dewan Kota Surabaya.

d. Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia IV

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Mei 1933 dengan pimpinan Ny. Suwandi dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi anggota PPII.

a) Keputusan-keputusan:

(1) Keputusan yang terpenting dalam Kongres ini ialah, memilih pengurus PPII yang baru ialah sebagai berikut:

Ketua : Ny. Sri Mangunsarkoro

Wakil Ketua : Ny. Suwandi

Penulis I : Ny. Badinguzaman

Penulis II : Ny. Malkan
Bendahari : Ny. Hardjono
Pembantu : Ny. Sh. Suparto
Pembantu : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

(2) Memutuskan tidak mengadakan Kongres PPII lagi tetapi akan mengambil inisiatif untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia ke-II.

b) Hal-hal lain:

1) Persiapan-persiapan Kongres Perempuan Indonesia ke-II

Pengurus PPII di Jakarta pada bulan Juni 1934 telah mengajak kaum Ibu untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia (KPI), sebagai lanjutan KPI tahun 1928 yang lalu. Hal ini mengingat bahwa telah terbentuk banyak organisasi baru yang belum menggabungkan diri dalam PPII. Pada waktu itu terdapat kurang lebih 160 buah organisasi yang tersebar di seluruh Tanah Air dan menarik perhatian Pengurus PPII untuk menyatukan tenaga dan pikiran mereka. Ajakan Pengurus PPII tersebut mendapat sambutan dari organisasi-organisasi perempuan di seluruh Indonesia.

2) Pada bulan Maret 1935 dimulai dengan membentuk:

(a) Pengurus Kongres:

Ketua : Ny. Sri Mangunsarkoro
Wakil Ketua : Ny. Suwarni Pringgodigdo
Panitera I : Ny. M.D. Moh. Roem
Panitera II : Ny. Stthariah Bendahari : Ny. Sh. Suparto
Anggota : Ny. Wiria Atmadja
Anggota : Ny. Harjono

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Anggota	: Ny. Badariah
Anggota	: Nn. Jenawar
Anggota	: Ny. Kasman
Anggota	: Ny. Mahadi Arif
Anggota	: Ny. Winoto
Anggota	: Ny. Suryati
Anggota	: Ny. Suhara

(b) Komite Pusat Kongres:

Ketua I	: Ny. Abdulrachman
Ketua II	: Ny. Sidhito
Wakil Ketua	: Ny. Parma Iskandar
Panitera I	: Ny. Sukamto
Panitera II	: Ny. Mutinah
Bendahari I	: Ny. Kusno
Bendahari II	: Ny. Wiria Atmadja

Anggota : Ny. Sarjono, Ny. Dachlan Abdullah, Ny. Kayadu, Ny. Rahman Tamin, Ny. S. Su-wandi, Ny. Alim, Ny. Z. Gunawan, Ny. Sri Mangunsarkoro, Ny. Badinguzaman, Ny. Mar gono, Ny. Sarpan, dan Ny. Suhara.

Badan Pengawas Keuangan:

- * Ny. R.A.A. Kusumo Utoyo
- * Ny. Moh. Husni Thamrin
- * Ny. Muchtar Prabu Mangkunegoro.

Anggota-anggota pengurus Kongres tersebut di atas terdiri dari anggota berbagai perkumpulan perempuan yang menjadi anggota

Kongres. Sehingga KPI ke-II ini bersifat umum dan didukung oleh organisasi-organisasi perempuan dari berbagai aliran dan daerah. Dengan demikian lenyaplah kekuatiran bahwa seolah-olah KPI itu menjadi kongresnya satu golongan raja.

Pergerakan Perempuan pada Masa Pendudukan Jepang

HARI Kamis 12 Februari 1942, Jepang datang lewat Palembang. Para *Dai Nippon* yang mendarat dari kapal-kapal itu langsung bergerak cepat. Merangsek ke dalam kawasan untuk mengambil-alih penjajahan, dari Belanda terhadap Hindia-Belanda.

Setelah Palembang berhasil direbut dari pemerintah Hindia-Belanda, Jepang mulai menambah semangatnya untuk merebut berbagai daerah di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Adapun Pemerintah Hindia-Belanda yang sebenarnya sudah tahu akan datangnya Jepang itu malah memilih untuk lari terbirit-birit dan secara sembunyi-sembunyi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkannya. Pemerintah pada masa itu, secara diam-diam, mengambil keputusan untuk melakukan gerakan penyelamatan terhadap orang-orang yang dianggapnya patut untuk diselamatkan. Pengungsian ditujukan ke Australia. Adapun operasi penyelamatannya dilakukan melalui jalur laut dan udara.

Sesampainya tentara-tentara Jepang di dekat Bengkulu, pemerintah mengutus dua orang polisi untuk segera menemui Sukarno (Soekarno) yang sedang menjalani hukuman pembuangan di Bengkulu. Dua polisi itu langsung menyampaikan kabar agar Sukarno dan keluarganya bersiap-siap untuk dipindahkan ke Padang. Untuk selanjutnya, Sukarno, Inggit (istrinya), Sukarti (anak

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

angkatnya, sedang berumur 8 tahun), dan Riwu (pembantunya dari Flores, sedang berumur 23 tahun) akan diungsikan ke Australia.

Sesampai di Padang, rencana penyembunyian Sukarno dari Jepang itu gagal total. Kapal yang hendak digunakan untuk mengirim Sukarno dan keluarganya ke Australia sudah terlanjur dibombardir tentara-tentara Jepang di dekat pulau Enggano, sebelah barat Bengkulu. Adapun upaya untuk mengalihkan penyembunyian melalui jalur udara tidak bisa terlaksana akibat tidak adanya pesawat lagi yang bisa digunakan untuk terbang ke Australia.

Dari sinilah babak baru kawasan Nusantara mulai terancam dalam cengkraman Jepang secara serius. Adapun keberadaan Sukarno yang sudah diketahui oleh pihak Jepang itu akhirnya didatangkan Kolonel Fujiyama di Bukittinggi. Dari pertemuan itulah yang kelak menjadikan sebagian gerakan nasional berkolaborasi dengan Jepang, termasuk gerakan perempuan. Adapun puncak awal dari itu semua terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1942. Yaitu, setelah Belanda tak lagi berkuasa atas Indonesia secara *de facto*, sebab penjajahan atas Indonesia telah beralih pada Jepang (Hendri F. Isnaeni, 2008:39).

A. Pembubaran dan Pembentukan Perkumpulan Perempuan

Resminya pemerintahan Jepang atas Indonesia itu bukan hanya bencana bagi pemerintahan Hindia-Belanda, namun juga seluruh perkumpulan atau organisasi yang ada di dalam pengawasannya.

Jika pemerintahan Hindia-Belanda bubar sejak tanggal 9 Maret 1942, tidak demikian dengan berbagai perkumpulan dan organisasi politik di Indonesia. Baru pada tanggal 20 Maret 1942 itulah semua bentuk organisasi politik dan perkumpulan yang ada di Indonesia diharuskan pemerintah untuk bubar. Tak terkecuali dengan *Perikatan Perkoempoelan Istri Indonesia* (PPII) yang secara historis baru terbentuk sejak diumumkannya hasil *Congres Perempoean*

Indonesia I untuk membentuk *Perikatan Perempoean Indonesia* (PPI).

Sebagai ganti dibubarkannya organisasi politik dan segala bentuk perkumpulan itu, pemerintah membentuk organisasi Gerakan Tiga A pada bulan April untuk mengimbangi berdirinya PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada bulan sebelumnya (Hendri F. Isnaeni, 2008:48-49). Organisasi Gerakan Tiga A ini lebih diperhatikan pemerintah daripada PUTERA yang dicurigai pemerintah sebagai gerakan yang bakal mendahului kepentingan Indonesia. Akibat dari kecurigaan itulah yang menjadikan Gerakan Tiga A tampak lebih populer pada masa-masa awal berdirinya.

Gerakan yang akhirnya kurang mendapat dukungan dari para cerdas-pandai ini didirikan di Jakarta yang kepemimpinannya diserahkan kepada Mr. Rd. Samsudin. Adapun upaya untuk melengkapi gerakan yang menggunakan semboyan "*Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia*" itu, pemerintah Jepang membentuk sub-organisasi yang diperuntukkan bagi kaum perempuan, istri, ibu, atau janda dengan nama Gerakan Istri Tiga A. Sedang bagi kaum pemuda dibentuk organisasi Barisan Puteri Asia Raya.

Pada pertengahan tahun 1943, posisi Jepang dalam perang Pasifik makin lemah. Indonesia dijadikan *front* depan dalam menghadapi serangan Sekutu. Karena itu Jepang yang menyadari kelemahannya menjadi makin kejam terhadap rakyat Indonesia.

Dalam rangka ini pula Jepang membutuhkan tenaga-tenaga pemuda Indonesia untuk keperluan perang. Maka dibentuklah organisasi para militer, antara lain: *Keibodan* (Barisan Bantu Polisi) dan *Seinendan* (Barisan Pemuda) serta organisasi yang bersifat militer, antara lain: Heiho (Pembantu Prajurit) dan PETA (Tentara Sukarela Pembela Tanah Air). Pada tanggal 1 Maret 1944 organisasi

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Putera yang dicurigai Jepang dilebur ke dalam organisasi gerakan baru yaitu: “Jawa Hokokai” atau Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa.

Organisasi perempuan pada waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari organisasi-organisasi umum tadi. Pergerakan perempuan masa pendudukan Jepang tidak mendapat kemajuan, karena kegiatan dibatasi oleh pemerintah Jepang. Kedudukan perempuan, baik dalam hukum perkawinan maupun mengenai hak, tidak dibicarakan lagi. Pergerakan perempuan sangat prihatin terhadap gadis-gadis korban tentara Jepang, tetapi mereka tidak berani menentang terus terang tindakan-tindakan tersebut.

Namun demikian pada masa tersebut sebagian besar kaum perempuan -karena dalam keadaan terpaksa- ikut dalam pergerakan, sehingga gerakan perempuan merata sampai di pelosok-pelosok daerah. Berbagai-macam kegiatan seperti latihan kemiliteran, PPPK, memasak untuk dapur umum, dan lain-lain, telah menambah dan memperluas pengalaman perempuan sebagai pimpinan organisasi dan masyarakat.

Organisasi perempuan yang merupakan bagian dari organisasi-organisasi umum tadi, akan dibahas dalam sub-sub bab berikutnya.

B. Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Puteri Asia Raya

Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Puteri Asia Raya merupakan gerakan berbasis perempuan yang bertugas melengkapi Gerakan Tiga A dalam bidang-bidang keperempuanan. Namun dalam perkembangannya, kedua gerakan ini juga turut memikul tugas-tugas yang awalnya hanya diproyeksikan untuk Gerakan Tiga A.

Semua gerakan itu akhirnya memikul tugas secara bersama-sama dalam melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia untuk mendukung pemerintahan Jepang. Mulai dari bidang-bidang yang lebih cekatan jika ditangani oleh kaum putri hingga bidang-bidang yang hanya mampu dilakukan secara baik oleh kaum lelaki.

Tiga gerakan ini kemudian terjebak dalam situasi keharusan untuk memberikan dukungan berlebih hingga melampaui batas-batas yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Sebab gerakan ketiganya yang bersamaan dengan adanya kampanye propaganda seputar pro-Jepang dan anti-Barat itu lama-lama menjadi gerakan yang mirip dengan tindakan men-Jepang-kan segala sesuatu yang ada di Indonesia.

Walau ketiga organisasi ini menyumbangkan gerakan positif bagi awal pemerintahan Jepang, namun peranan ketiganya dianggap kurang memuaskan. Satu di antara penyebab itu akibat tidak adanya dukungan secara besar-besaran oleh kaum cerdik-pandai di Indonesia. Akibat inilah yang kemudian mengendorkan semangat pemerintah Jepang untuk melanjutkan peranan organisasi Gerakan Tiga A sekaligus Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Puteri Asia Raya yang ada di dalamnya.

Memasuki bulan November 1943, Gerakan Tiga A akhirnya benar-benar dibekukan oleh pemerintah Jepang (Hendri F. Isnaeni, 2008:43). Dampak dari pembekuan itupun mengakibatkan Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Puteri Asia Raya turut membeku. Sehingga konsentrasi gerakan perempuan pada masa itu langsung tertuju pada gerakan *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA*.

C. Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA

Pada hari Minggu, 1 Maret 1943, sebuah organisasi baru telah dibentuk dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Organisasi ini baru diresmikan atas persetujuan pemerintah Jepang pada hari Senin, 9 Maret 1943. Organisasi yang berpusat di Jakarta ini diketuai oleh Sukarno. Sedangkan Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan Mas Mansur serta sejumlah orang Jepang menjadi anggota dari Dewan Pertimbangannya (Hendri F. Isnaeni, 2008:47).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Tidak lama setelah diresmikan, organisasi PUTERA ini memunculkan organisasi *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA*. Organisasi ini mendapat tugas untuk mengorganisir anggota PUTERA dari kaum perempuan Indonesia (Ohorella, dkk., 1992:34)

Pada level pusat, organisasi *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* ini dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangun-puspito dan dibantu oleh Ny. Sunaryati Sukemi, Ny. Sukanti Suryochondro, Ny. Burdah Yusupadi dan Ny. S.K. Trimurti. Hampir di semua kota di pulau Jawa didirikan *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA*. Para anggotanya menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, memintal benang dan macam-macam kerajinan tangan lainnya. Selain itu, organisasi ini juga berperan sebagai juru penerang atau penyambung berbagai informasi dari pusat untuk kaum perempuan di desa-desa.

D. Fujinkai dan Barisan Putri

Di samping *Barisan Pekerja Perempuan PUTERA*, pemerintah daerah mendirikan organisasi perempuan setempat dengan nama *Fujinkai* (Organisasi Perempuan). *Fujinkai* ini diketuai oleh Isteri Kepala daerah di tiap-tiap daerah dan bertugas menggerakkan tenaga-tenaga perempuan di tempatnya masing-masing. Misalnya, di Jakarta pada tanggal 3 Nopember 1943, telah didirikan *Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai* yang diketuai oleh Ny. R.A. Abdurachman (Ohorella, dkk., 1992:36). Kat *Si*, *Syi*, atau *Syu* di depan kata *Fujinkai*, dalam istilah Jepang menunjuk lingkup Kotapraja, *Ken* untuk kabupaten, *Gun* untuk kawedanan, *Son* untuk kecamatan, dan *Ku* untuk desa. Adapun *Aza* untuk rukun kampung, sedangkan *Tonari Gumi* untuk rukun tetangga (Darto harnoko, dkk, 2014:98).

Dalam *Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai* terdapat sub-organisasi bernama *Barisan Putri* yang diperuntukkan bagi para putri atau gadis. Pembentukan sub-organisasi yang secara spesifik untuk program

kaderisasi itu, pada awalnya diurus oleh Nn. Siti Dalima yang dalam peresmiannya dibantu oleh Nn. Nursyamsu sebagai wakilnya. Di antara staf-staf dan pembantu-pembantunya terdapat: Nn. Setiati, Nn. Partinah, Nn. Malidar (Ny. Hadiyowuno). Adapun anggota pengurusnya termasuk Nn. Paramita (Yo) Abdurachman.

Anggota *Barisan Putri* ini terdiri dari pemudi-pemudi yang diutus dari berbagai kecamatan di daerah Jakarta. Mereka diasramakan (disebuah rumah dekat gedung bioskop Megaria) untuk menyerap pendidikan militer dari Daan Mogot, pendidikan atau latihan Palang Merah (PPPK), dan pelatihan ragam ketrampilan. Di antara pendidikan ketrampilan itu adalah ketrampilan memasak atau mengolah makanan di dapur umum, jahit-menjahit, memintal dan menenun benang, menyanyi, hingga kerajinan umum yang dianggap perlu untuk diberikan kepada mereka.

Sebagian dari gadis-gadis itu juga mendapat latihan berdeklamasi yang diperuntukkan sebagai calon penyiar radio dan atau membantu kelancaran orasi politis dari orang-orang pilihan pemerintah Jepang. Misalnya saja; Sukarno, Syahrir, dan Hatta. Ketiganya kerap mendapat jatah siaran radio untuk menyampaikan suatu orasi yang berasal dari pesanan pemerintah Jepang. Isi orasi-orasi politis itupun tidak jauh-jauh dari ajakan agar rakyat Indonesia membantu pemerintah Jepang dalam memenangkan perang pasifik yang sedang berkobar pada masa itu. Namun demikian, dalam orasi-orasi itu juga terdapat beragam sisipan pesan-pesan nasional yang dikemas dalam gaya bahasa masing-masing dari para orator Indonesia.

Barisan Puteri atau *Barisan Putri* itupun semakin lama semakin menampakkan peran positifnya bagi pemerintah Jepang pada khususnya. Para lulusannya mulai dapat diandalkan oleh pemerintah dalam bidang-bidang yang telah ditugaskan kepada mereka. Hingga dalam perkembangannya, *Barisan Puteri* yang ada di Jakarta itu

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

menjadi semacam sekolah atau kursus yang setiap angkatan terdapat sekira 50-an pemuda yang siap untuk mengabdikan. Adapun dari jumlah itu bukan lagi berasal dari utusan-utusan di kawasan Jakarta, melainkan juga dari luar kota atau daerah.

E. Jawa Hokokai Fujinkai

Sering pertumbuhan hasil positif dari adanya *Fujinkai* sekaligus *Barisan Putri*, organisasi *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* mulai dipandang sebelah mata oleh pemerintah Jepang. Hal ini lantaran organisasi PUTERA yang menjadi induk organisasi itu mulai dicurigai pemerintah yang pada akhirnya terancam dibubarkan.

Pemerintah Jepang lebih bangga dengan organisasi *Fujinkai* sekaligus *Barisan Putri*-nya. Sementara *PUTERA* sekaligus *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* harus rela dan bersiap-siap untuk dibubarkan jika waktunya memang sudah datang.

Bulan Maret pun datang mengganti April di tahun 1944. Tepat pada tanggal 1 Maret 1944, bencana pembubaran PUTERA itu pun menimpa. *PUTERA* benar-benar dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Demikian pula sub-organisasinya yang bernama *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA*. Kedua organisasi yang menjadi salah satu persembunyian Sukarno untuk menyamarkan gerakan nasionalisme rakyat Indonesia itu dijebloskan Jepang ke dalam organisasi *Jawa Hokokai* yang telah dibentuk dan dipersiapkan sebelumnya. Akibatnya, semua mantan anggota PUTERA menjadi anggota *Jawa Hokokai*. Sedangkan mantan anggota *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* harus tunduk menjadi anggota *Jawa Hokokai Fujinkai* (Ohorella, dkk., 1992:37).

Pengurus Pusat dari Jawa Hokokai Fujinkai, yang merupakan Pusat Tata Usaha terdiri dari:

Ketua	: Ny. Sunaryo Mangunpuspito
Wakil Ketu I	: Ny. Ios Wiriaatmaja
Wakil Ketua	: Ny. Maskun
Penulis I	: Ny. Maryati Adnan
Penulis II	: Ny. Rosnah Jamin
A nggota,	: Ny. Siti Maryam
Pembantu	: Ny. Sutarman
	Ny. S.R. Tambunan
	Ny. Artinah Samsudin
	Ny. Hafni Abuhanifah.

Usaha-usaha Fujinkai pada masa ini, antara lain:

- a. Mengobarkan semangat cinta Tanah Air dan Bangsa di kalangan perempuan dan menanamkan Nasionalisme.
- b. Menganjurkan agar suka berkorban dan rela menderita untuk Tanah Air dan Bangsa.
- c. Menyiapkan tenaga untuk ikut serta di belakang garis peperangan
- d. Menganjurkan hidup dan berhemat
- e. Memperbanyak hasil bumi dengan menanam semua tanah yang terluang dengan tanaman penghasil bahan makanan dan pakaian, antara lain: ubi, ubi kayu, kapas, jarak, dan lain-lain
- f. Menghidupkan pekerjaan tangan dan industri di rumah antara lain: memintal benang, membuat kaos kaki.
- g. Mengadakan latihan-latihan yang diperlukan.
- h. Menghidupkan pekerjaan untuk memberantas pengangguran.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Untuk lebih meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam Perang Asia Timur Raya, Jepang kemudian membentuk “Barisan Srikandi” sebagai bagian dari *Fujinkai* dan bersanding dengan *Barisan Puteri*. Anggota-anggotanya adalah putri-putri yang berumur antara 15-20 tahun dan belum bersuami. Barisan Srikandi itu apabila diperlukan benar-benar disiapkan oleh peme-rintah Jepang untuk menjadi pasukan tempur.

Pada mulanya *Jawa Hokokai Fujinkai* menjadi satu bagian dari urusan pendidikan. Tetapi pada bulan Januari 1945, bagian perempuan dijadikan suatu bagian sendiri dengan nama “*Jawa Hokokai Fujinkai limukyoku*”, yang menjadi Pusat Tata Usaha Fujinkai. Jawa Hokokai Fujinkai juga membentuk bagian pemuda lainnya dengan nama “*Joshi Seinenkai*”. Bagian Pemuda ini dipimpin oleh:

1. Nn. Siti Maryono
2. Ny. Maryati Adnan
3. Ny. Rosnah Jamin

Namun Barisan Putri tetap ada dan dalam rangka persiapan ikut serta perempuan di belakang garis peperangan, mengikuti latihan-latihan, antara lain:

- a. Palang Merah, membela diri, berbaris dan memegang senjata.
- b. Latihan bahaya udara, kunjungan ke rumah sakit tentara, dapur umum dan membuat makanan tahan lama.
- c. Mengadakan dapur umum, dapur keliling, dapur tetap dan dapur pembelaan.

Peleburan paksa organisasi *PUTERA* dan *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* itu masih belum menampakkan kepuasan Jepang. *Fujinkai* dan sub-sub organisasi di dalamnya pun terdampak atas tindakan itu. Akibatnya, organisasi-organisasi itu semua dilarang

jauh-jauh dari koordinat kepentingan Jepang yang berada dalam *Jawa Hokokai* sekaligus *Jawa Hokokai Fujinkai*.

Organisasi-organisasi itulah yang masih diakui dan direstui pemerintah Jepang untuk melakukan beragam kegiatan dalam bidang masing-masing. Hingga dalam perkembangan putusan Jepang selanjutnya, organisasi-organisasi itu semua dibaurkan Jepang, sampai-sampai menjadi satu kesatuan organisasi yang berada dalam satu garis nasib instruksi.

Organisasi *Fujinkai* lantas menjadi satu-satunya organisasi induk yang diperuntukkan bagi pemanfaatan gerakan kaum perempuan Indonesia. *Fujinkai* itu pula yang menjadi organisasi perempuan resmi dan bertahan hingga hancurnya Hirosima dan Nagasaki akibat dibom atom oleh tentara-tentara sekutu sebagai bagian dari konsekuensi perang.

Jepang yang sudah mengaku kalah dan menyerah kepada negara-negara persekutuan lawannya itu tidak sempat membubarkan *Fujinkai*. Hingga jam 10 pada hari Jum'at Kliwon tanggal 17 Agustus 1945, *Fujinkai* masih ada dan akhirnya ditinggalkan para anggotanya untuk bergabung ke dalam organisasi-organisasi bawah tanah yang mulai berani bermunculan atau diaktivasi ulang atau justru baru dirancang pembentukannya. *Fujinkai* lantas tinggal nama. Lalu bubar perlahan-lahan; dan berakhir runtuh bersamaan resminya pembubaran.

F. Dinamika Perempuan Indonesia

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, organisasi *Fujinkai* yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito dibubarkan. Dalam maklumat pembubarannya dianjurkan agar di kabupaten-kabupaten dan kota-kota dibentuk lagi organisasi, yang untuk sementara diberi nama “persatuan Perempuan Indonesia” (PERWANI). Barisan Putri tetap melanjutkan tugas dalam

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, sebagian memasuki Palang Merah dan Dapur Umum sedangkan sebagian besar memasuki organisasi kelaskaran.

Tg. 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta: Kongres Perempuan Indonesia I	<p>Catatan Atas prakarsa 7 organisasi wanita: Putri Indonesia, Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Aisyiah, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Wanita Katholik, Jong Java bagian Wanita.</p> <p>Diselenggarakan kongres Perempuan Indonesia ke I. Pimpinan Kongres: RA. Sukonto — Ketua, St. Mundjiah — Wk. Ketua, St. Sukaptinah — Penulis I, Sunaryati (Ny. Sukemi) — Penulis II, RA. Hardjodiningrat — Bendahari.</p> <p>Pada Kongres ini dibentuk Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia dengan pengurus: Ketua — RA. Sukonto, Wk. Ketua — RA. Suyatin (Ny. S. Kartowijono), Penulis I — St. Sukaptinah</p>
Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI	
Tanggal 28-31 Desember 1929 di Jakarta. Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia PPII	
Tanggal 13-18 Desember 1930 di Surabaya. Kongres Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia PPII	
Tanggal 25-29 Maret 1932 di Solo. Kongres PPII	<p>(Ny. Sunaryo Mangunpuspito), Penulis II — Mugarumah, Bendahari — RA. Hardjodiningrat, Komisaris — Nyi Hadjar Dewantoro dan St. Mundjiah.</p> <p>Nama diganti menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII), dengan pengurus: Ketua — RA. Sukonto, Wk. Ketua — RA. Suyatin (Ny. S. Kartowijono), Penulis I — Nn. Sunaryati (Ny. Sukemi), Penulis II — Nn. Samiyati, Bendahari — Ny. Hardjodiningrat.</p> <p>Nama tetap PPII, dengan susunan pengurus: Ketua — Ny. Mustadjab, Wk. Ketua — Ny. Suwandi, Penulis I — Ny. Sri Mangunsarkoro, Penulis II — Ny. Budingudjaman, Bendahari — Ny. Hardjono.</p> <p>Pengurus PPII, terdiri dari: Ketua — Ny. Suwandi, Penulis I — Ny. Sri Mangunsarkoro, Penulis II — Ny. Budingudjaman, Bendahari — Ny. Hardjono.</p>

Tgl. 6 — 8 Mei 1933 di Jakarta. Kongres PPII	
Tgl. 20 — 24 Juli 1935 di Jakarta. Kongres Perempuan Indonesia ke-II	
Tgl. 14 — 15 September 1935 di Mataram Yogyakarta	
Tgl. 23 — 27 Juli 1938 di Bandung. Kongres Perempuan Indonesia ke-III (KPI)	
Tgl. 25 — 31 Juli 1941 di Semarang. Kongres Perempuan Indonesia , ke-IV	
Kongres Perempuan Indonesia ke V, tidak dapat diselenggarakan, karena pada tahun 1942, Indonesia diduduki tentara Jepang	
Maret 1942 di Jakarta	
Gerakan Isteri Tiga A	Barisan Putri Asia

Catatan:

Pengurus PPII terdiri dari:

Ketua — Ny. Sri Mangunsarkoro, Wk. Ketua — Ny. Suwandi, Panitera I — Ny. Budingudzaman, Panitera II — Ny. Malkan, Bendahari —Ny. Hardjono.

Di samping PPII, telah berdiri banyak perkumpulan-perkumpulan Perempuan. Diselenggarakan Kongres Perempuan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Indonesia ke II agar perkumpulan-perkumpulan baru tadi dapat menggabungkan diri. Nama seterusnya adalah: Kongres Perempuan Indonesia dan akan mengadakan Kongres tiga tahun sekali. Pengurus terdiri dari:

Ketua	— Ny. Sri Mangunsarkoro,
Wk. Ketua	— Ny. Suwarni Pringgodigdo,
Panitera I	— Ny. MD. Moch. Roem,
Panitera II	— Ny. Suhariah,
Bendahari	— Ny. Sh. Suparto.

PPII dibubarkan karena sudah terbentuk “Kongres Perempuan Indonesia”.

Pengurus terdiri dari:

Ketua	: Ny. Emma Puradiredja,
Wk. Ketua I	: Ny. A. Rachim,
Wk. Ketua II	: Ny. Ratna Winadi,
Penyurat I	: Ny. S. Tirtosuwirjo,
Penyurat II	: Ny. Suwarni Mihardja,
Bendahari	: Ny. Kartakusumah

Pengurus Kongres, terdiri dari:

Ketua	: Ny. Sunaryo Mangunpuspito,
Wk. Ketua	: Ny. Darmo Winoto,
Penulis I	: Ny. Pudjotomo,
Penulis II	: Ny. Retno Maendro,
Bendahari	: Ny. Munandar.

Gerakan Isteri Tiga A adalah bagian Perempuan dari Gerakan Tiga A,

Ketua : Ny. Artinah Samsudin

Keterangan : Bagian Putri disebut Barisan Putri Asia Raya.

Putera

Setelah 17 Agustus 1945 Fujinkai dibubarkan laskar-laskar perempuan l'erwani (Persuntan Wanita Indonesia).

Catatan:

Gerakan Tiga A dibukarkan menjadi Pusat Tenaga Rakyat (Putera) Gerakan Isteri Tiga A meleburkan dengan Barisan Pekerja Perempuan Putra, dengan pengu-rus: Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Sukemi, Ny. Surjotjondro, Ny. Jusupadi, Ny. Sk. Trimurti. Karena belum ada bagian Putrinya, maka Barisan Putri Asia Raya tetap bekerja.

Walaupun Putera dan Barisan Pekerja Perempuan Putera belum di-bubarkan, di Jakarta dan di daerah-daerah, Pemerintah mendirikan Fujinkai yang dinamakan Si Fujinkai untuk Kota, Ken Fujinkai untuk Kabupaten, misalnya Semarang Ken Fujinkai, Bogor Ken Fujinkai dli. Di samping Fujinkai kemudian dibentuk Barisan Putri.

Setelah Putera dilebur menjadi Jawa Hookoo Kai maka Fujinkai menjadi bagian dari Jawa Hokokai dengan pengurus Pusat:

Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpus-pito,

Wk. Ketua I : Ny. IOS. Wiriatmadja,

Wakil-Ketua II : Ny. Maskun

Penulis I : Ny. Maryati Adnan,

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Penulis II : Nn. Rosnah Yamin,

Anggota : Ny. St. Maryam.

Keterangan : Jawa Hookoo Kai Fujinkai Pusat mempunyai bagian pemudi (Joshi Seinenkai).

Setelah tanggal 17 Agustus 1945 Fujinkai dibubarkan, dibentuk Perwani (Persatuan Wanita Indonesia), dan kemudian pada bulan Oktober 1945 didirikan Wani (Wanita Negara Indonesia) di Jakarta.

Barisan Putri sebagian besar menjelma menjadi kelaskaran Perempuan.

Barisan Putri Asia Raya

Barisan pekerja perempuan putra.

Fjinkai

Barisan Putri

Maret 1943 di Jakarta dan kota-kota lain.

Nopember 1943 di Jakarta

Maret .1944 di Jakarta

Jawa Hookoo-Kai Fujinkai

Bagian Pemudi: (Joshi Seinenkai) Barisan Srikandi

Wani (Wanita Negara Indonesia)

Pergerakan Perempuan pada Masa Kebangkitan Indonesia

BEBERAPA hari sebelum tanggal 17 Agustus 1945, situasi perpolitikan dan pergerakan di Indonesia tidak hanya diributkan oleh kabar kekalahan dan penyerahan Jepang terhadap Sekutu. Keributan yang tidak kalah hebohnya adalah keberadaan Sukarno sebagai satu di antara pimpinan pergerakan “atas tanah” yang tiba-tiba menghilang seiring kekalahan Jepang.

Menghilangnya Sukarno dari peredaran informasi dan komando gerakan nasional itu mengakibatkan situasi semakin mencekam. Hal ini lebih disebabkan oleh keterlibatan Sukarno dalam berkolaborasi dengan Jepang selama menjajah Indonesia. Ada kekhawatiran yang mengarah bahwa Sukarno turut menjadi korban atas kekalahan Jepang terhadap Sekutu.

Namun pada kenyataannya, menghilangnya Sukarno itu hanya dibawa kabur oleh Sukarni dan kawan-kawannya ke Rengasdengklok. Sukarni dan pemuda lainnya yang sempat kalah debat seputar keinginan mereka agar Proklamasi Kemerdekaan segera dinyatakan pada tanggal 15 itu membawanya sejak waktu subuh tanggal 16 mulai menjelang.

Selama dalam pengamanan yang dilakukan Sukarni dan pemuda lainnya itu, Sukarno menjadi sosok yang dicari-cari oleh para pimpinan pergerakan nasional. Sebab pada pukul 10 pagi, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) akan mengadakan

sidang untuk membicarakan susunan kata-kata dari naskah proklamasi yang telah dijanjikan Sukarno untuk segera diserahkan (Hendri F. Isnaeni, 2008:127). Akibat tidak munculnya Sukarno dan tidak hadirnya Hatta, rencana sidang itupun ditunda.

Rapat PPKI baru akan dilaksanakan setelah Sukarno di minta kembali oleh Ahmad Subarjo dan segera dibawa ke Jakarta. Adapun sidang PPKI itu baru dapat digelar setelah pukul 24:00 di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Hasil dari sidang itu berupa pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian dinyatakan pada jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Dalam naskah proklamasi itu ditanda-tangani oleh Sukarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia.

A. Berjuang Membela Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 Agus-tus 1945 itu membuka gerbang baru bagi perjuangan rakyat Indonesia untuk memasuki tahapan yang berbeda. Yaitu, membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah menjadi tugas dan kewajiban seluruh rakyat.

Pada waktu itu Pemerintah Jepang secara *de facto* masih berkuasa walaupun tidak berwenang lagi untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas mereka hanya menjaga keamanan sampai Sekutu datang. Mereka telah diperintahkan mempertahankan "Status quo" pada waktu mereka menyerahkan kekuasaan pada Sekutu (Hendri F. Isnaeni, 2008:131). Ini berarti bahwa Indonesia masih dianggap sebagai jajahan.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 tentara Inggris (dengan *Ghurka-*nya) yang diboncengi tentara Belanda mendarat di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, dan tempat-tempat lain. Panglima tentara Inggris langsung mengumumkan bahwa mereka

mewakili Sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan, tidak akan mencampuri soal politik.

Dengan berkedok sebagai tentara Inggris, tentara Belanda melakukan penembakan-penembakan dan pembunuhan terhadap rakyat Indonesia. Tawanan bekas KNIL (*Koninklijke Nederlands — Indische Leger*) dipergunakan kembali oleh Belanda untuk melakukan terornya menghadapi rakyat Indonesia. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Pertempuran timbul di mana-mana. Bukan hanya melawan Belanda dengan KNIL-nya, tetapi juga melawan tentara Inggris dengan Ghurka-nya.

Pertempuran yang paling dahsyat terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, ketika seluruh rakyat terutama para pemuda di Surabaya menolak ultimatum Jenderal Mansergh dari tentara Sekutu untuk menyerahkan semua senjata. Awal pecahnya pertempuran ini sekarang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Para pemuda dan pemudi benar-benar bahu-membahu sepanjang medan perjuangan.

Pemerintah Indonesia selalu mengusahakan taktik diplomasi (jalan perundingan) dalam menyelesaikan sengketa-sengketanya dengan Sekutu. Perundingan dan pertempuran silih berganti.

Dalam persetujuan Linggarjati Belanda mengakui kekuasaan *de facto* Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pada tanggal 21 Juli 1947 terjadi *Clash* ke-I, yang oleh Belanda disebut Aksi Polisional ke-I (kemudian kita kenal sebagai Perang Kemerdekaan ke-I). Sementara itu keadaan politik dan ekonomi dalam negeri yang makin memburuk dipersulit lagi dengan meletusnya pemberontakan Madiun oleh PKI - Muso pada tanggal 18 September 1948.

Pada tanggal 19 Desember 1948, tentara Belanda menyerbu Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia dan menangkap pimpinan Negara. Agresi ini merupakan perang kemerdekaan ke-II (*Clash* ke-II), yang oleh Belanda disebut Aksi Polisional ke-II.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dalam suasana yang demikian, perempuan Indonesia merasa terpanggil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi-organisasi perempuan pada umumnya ditujukan kepada usaha-usaha perjuangan, baik di garis belakang dengan mengadakan dapur umum dan pos-pos Palang Merah, maupun di garis depan dengan nama satu badan perjuangan maupun tergabung dengan organisasi-organisasi lain. Timbul laskar-laskar perempuan dan badan-badan perjuangan, terutama di Jawa dan Sumatra. Tugas-tugas mereka sangat luas: di garis depan, di medan pertempuran, melakukan kegiatan intel, menjadi kurir, menyediakan dan mengirimkan makanan ke garis depan, membantu kaum pengungsi, memberi penerangan, dan lain-lain.

Dasar ketrampilan untuk tugas-tugas ini sebagian didapat pada masa pendudukan Jepang, di mana perempuan dalam *Fujinkai* diharuskan mengikuti latihan-latihan guna menghadapi segala kemungkinan untuk membantu Jepang di garis belakang.

Keadaan dan latihan-latihan tersebut di atas telah dimanfaatkan untuk menanamkan jiwa nasionalisme, memberikan latihan-latihan kemiliteran, PPPK atau P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), masak untuk dapur umum dan lain-lain, semua sebagai persiapan menyongsong kemerdekaan .

B. Pembubaran, Pembentukan, dan Kemunculan Organisasi Perempuan

Sejak pemerintah Jepang mengeluarkan instruksi pembubaran organisasi politik dan segala bentuk perkumpulan di Indonesia pada tanggal 20 Maret 1942 (Hendri F. Isnaeni, 2008:39), sejak itu pula berbagai perkumpulan atau organisasi perempuan menjadi bubar. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menyetujui pembentukan *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* yang disusul dengan pembentukan *Gerakan Istri Tiga A* dan *Barisan Puteri Asia Raya*.

Ketika Gerakan Tiga A yang menjadi induk *Gerakan Istri Tiga A* dan *Barisan Puteri Asia Raya* dibekukan, sejak itu pula dua gerakan perempuan di dalamnya membeku secara otomatis. Adapun gantinya, pemerintah membentuk organisasi *Fujinkai* mulai dari pusat hingga daerah. Namun sayangnya, munculnya organisasi pengganti ini disusul adanya pembubaran *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* seiring pembubaran organisasi PUTERA pada 1 Maret 1944.

Usai pembubaran *Barisan Pekerjaan Perempuan PUTERA* itu, gerakan perempuan terkonsentrasi pada organisasi *Fujinkai*. Khusus untuk wahana menimba pengalaman dan sarana latihan perempuan dalam berorganisasi, pemerintah lantas membentuk *Tokobetsu si Fujinkai* pada tanggal 3 November 1943. Organisasi yang berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Ny. RA. Abdurrachman ini disusul dengan pembentukan organisasi *Barisan Puteri*. Kepengurusan organisasi *Barisan Puteri* ini berbeda dengan organisasi induknya. Ia dipercayakan pada Siti Dahlia dan Nursyamsu yang dibantu Setiati, Malidar (Ny. Hadiwiyono), dan Paramita Abdurrachman (Ohorella, dkk., 1992:36).

Sampai tahapan ini organisasi perempuan yang masih bertahan adalah *Fujinkai*, *Tokobetsu si Fujinkai*, dan *Barisan Puteri*. Sejak adanya wacana baru bahwa PUTERA tidak dibubarkan melainkan dilebur dalam Jawa Hokokai, organisasi *Fujinkai* berikut sub-sub organisasi di dalamnya juga dibaurkan bersama *Jawa Hokokai*, tepatnya pada divisi perempuannya yang bernama *Jawa Hokokai Fujinkai* (Ohorella, dkk., 1992:37).

Dari sekian pembubaran dan pembentukan yang tambal-sulam itu, organisasi *Fujinkai* atau *Jawa Hokokai Fujinkai* inilah yang kemudian menjadi organisasi perempuan resmi terakhir pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Namun, seiring bubarnya pemerintahan Jepang atas Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia,

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

organisasi ini pun dibubarkan secara perlahan-lahan. Mulai dari pelucutan pengaruh Jepang pada organisasi ini hingga benar-benar diresmikan bubar sepenuhnya.

Pembubaran *Fujinkai* ini beriringan dengan kemunculan organisasi-organisasi perempuan baru maupun aktivasi ulang organisasi-organisasi perempuan yang pernah terbentuk pada masa Hindia-Belanda. Di antara organisasi atau perkumpulan itu: *Laskar Wanita*, *Wanita Perjuangan*, *Laskar Putri Indonesia*, *Barisan Putri* (bukan organisasi Barisan Putri bentukan Jepang), dan lainnya.

Organisasi-organisasi itu semua menjadi wadah perjuangan bagi gerakan para perempuan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bersama para lelaki yang terkoordinir dalam berbagai organisasi. Mereka berjuang bersama-sama dalam masa-masa yang kelak terkenal dengan masa Revolusi Fisik pasca penjajahan di Indonesia. Namun sayangnya, gerakan perempuan pada masa-masa awal revolusi itu masih menunjukkan adanya gerakan-gerakan yang berorientasi kedaerahan dan atau ideologi tertentu. Akibat dari realitas itulah yang menjadikan gerakan perempuan terancam simpang-siur dan rentan bertabrakan dalam merealisasikan strategi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Berdalih realitas itu pula yang kemudian muncul usulan-usulan dari anggota dan pengurus beberapa organisasi perempuan seputar dibutuhkannya suatu organisasi yang bersifat nasional dan dapat menyatukan sekaligus mensinergikan gerakan perempuan. Usulan-usulan itu akhirnya ditindak-lanjuti oleh para pengurus dari beberapa organisasi perempuan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa organisasi lain yang memiliki usulan-usulan serupa. Adapun hasil dari tindak-lanjut itu berhasil membentuk organisasi-organisasi yang menyatukan beberapa organisasi kedaerahan, sektoral, dan ideologis, semisal kelompok-kelompok politik tertentu. Di antara beberapa organisasi yang menaungi berbagai organisasi perempuan itu terdapat

Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI) dan *Wanita Negara Indonesia* (WANI). Dua organisasi inilah yang tercatat paling besar pengaruhnya terhadap dinamika perjuangan perempuan melalui organisasi pada masa-masa awal revolusi.

Selain bermunculan organisasi-organisasi perempuan berlingkup nasional, kemunculan organisasi-organisasi daerah, sektoral, ataupun ideologis pun tidak sedikit. Belum lagi ditambah munculnya organisasi-organisasi *under-ground* semasa pendudukan Jepang dan aktivasi ulang organisasi-organisasi yang sempat berhenti akibat pelarangan dari pihak pemerintah Jepang.

Organisasi-organisasi itu semua menjadi bukti bahwa kebangkitan nasional setelah Indonesia dinyatakan merdeka oleh Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia itu semakin kompleks. Rakyat Indonesia tidak hanya membentuk perkumpulan sektoral sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda. Sebab pada masa ini, sudah terdapat organisasi-organisasi yang berjejaring dengan organisasi lain dan –bahkan- suatu partai politik. Sudah ada organisasi-organisasi federasi yang menaungi organisasi lain, berlingkup nasional, gabungan, hingga jabatan.

C. Perkumpulan Perempuan Nasional

Perkumpulan-perkumpulan nasional pada masa ini berbeda dengan persatuan perkumpulan *Perikatan Perempuan Indonesia* (PPI) yang dibentuk oleh hasil *Kongres Perempuan Indonesia* (KPI) yang pertama pada tahun 1928. Jika PPI yang kemudian berganti PPII itu konsentrasi pada persatuan gerakan perempuan dari berbagai perkumpulan di Indonesia, tidak demikian dengan perkumpulan-perkumpulan nasional pada masa ini. Sebab perkumpulan-perkumpulan nasional ini lebih cenderung bersifat kedaerahan, sektoral, ataupun ideologis. Walau organisasi-organisasi ini berlingkup nasional, namun jumlah keanggotannya cenderung merata.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Betapa tidak? Sebelum Jepang merebut Indonesia dari cengkraman Belanda, organisasi-organisasi perempuan di Indonesia bergabung dalam satu naungan organisasi PPI/PPII. Sedang pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia ini, organisasi-organisasi perempuan di Indonesia bergabung dalam berbagai federasi organisasi-organisasi perempuan nasional. Sehingga jumlah organisasi di Indonesia yang menjadi anggota tiap-tiap organisasi federasi itu pun terbagi-bagi seiring banyaknya organisasi nasional yang telah ada.

Selain organisasi nasional yang berasal dari gabungan beberapa organisasi atau perkumpulan perempuan, ada pula organisasi nasional yang memang sejak terbentuknya langsung menggunakan lingkup nasional. Biasanya, organisasi-organisasi nasional ini terbentuk di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Bahasan berikut ini akan menyajikan beberapa informasi singkat dari beberapa organisasi perempuan bertaraf nasional.

1. Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)

Organisasi *Pesatuan Wanita Republik Indonesia* (PERWARI) merupakan organisasi nasional yang dibentuk dari hasil peleburan (fusi) organisasi *Persatuan Wanita Negara Indonesia* (PERWANI) dan *Wanita Indonesia* (WANI). Secara otomatis, anggota awal organisasi PERWARI berasal dari para mantan anggota PERWANI dan WANI.

Pembentukan organisasi ini terjadi setelah berlangsungnya *Kongres Wanita Indonesia* pada tahun 1945 di Klaten, Jawa Tengah (Suryochondro, 1984:98). PERWANI merupakan satu di antara beberapa organisasi yang mendukung penyelenggaraan kongres perempuan pertama sejak Indonesia merdeka. Adapun WANI, merupakan satu di antara organisasi-organisasi yang mengirim utusannya pada kongres tersebut.

Kongres yang berlangsung tanggal 15 hingga 17 Desember 1945 itu tidak berhasil mempersatukan semua organisasi yang hadir melalui utusan masing-masing. Namun demikian, kongres ini masih dapat mempersatukan organisasi PERWANI dan WANI. Kedua organisasi ini lantas bersedia bubar lalu membentuk organisasi bernama PERWARI. Organisasi ini menggunakan Pancasila sebagai dasar perjuangannya. Adapun ketua pertamanya adalah Ibu Sri Mangunsarkoro.

Sebagai organisasi yang berasal dari gabungan dua organisasi besar tingkat nasional, PERWARI mengalami perkembangan yang cukup pesat. Cabang-cabangnya berhasil ditumbuhkan di berbagai kawasan Indonesia. Hingga pada tahapan berikutnya, ranting-rantingnya pun bermunculan. Semuanya berjuang dengan satu tujuan: Negara dan Bangsa tetap Merdeka. Tujuan awal ini sangat tepat mengingat pada masa awal berdirinya PERWARI, situasi kemerdekaan Indonesia yang baru beberapa bulan diproklamirkan itu terancam oleh Belanda yang berusaha menjajah kembali setelah Jepang terpaksa pergi.

Ancaman Belanda itu pun terjadi. Dengan dibantu tentara-tentara sekutu, Belanda kembali menyusup Indonesia dan berusaha memaksa bangsa Indonesia untuk kembali tunduk kepada padanya. Bukannya mau atau terpaksa tunduk pada Belanda, bangsa Indonesia memilih angkat senjata dan rela perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa perang kemerdekaan itulah PERWARI turut berjuang melalui pengurusan dapur umum-dapur umum untuk para pahlawan Indonesia sekaligus mengulurkan bantuan kemanusiannya melalui PMI. Usai perang mereda, PERWARI mengonsentrasikan perjuangannya di beberapa bidang kehidupan.

Dalam bidang pendidikan, PERWARI mendirikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Rumah Tangga, Sekolah

Pendidikan Guru dan Asrama Pelajar Putri. Selai itu juga membuka membuka kursus Pemberantasan Buta Huruf. Dalam bidang kesehatan, turut serta mendirikan Rumah Bersalin atau BKIA. Setelah PUKESMAS mulai banyak bermunculan di berbagai daerah, BKIA-BKIA itupun mulai banyak yang ditutup. Dadalam bidang ekonomi, turut berusaha agar perempuan-perempuan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi dengan cara membentuk koperasi-koperasi dan memberi latihan-latihan agar para perempuan Indonesia bisa ber-*swakarsa* (kowani.or.id/organisasi/31).

2. Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI)

Dalam menjalankan tugas mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan, perempuan-perempuan Indonesia bergabung dan membentuk organisasi *Persatuan Wanita Negara Indonesia* (PERWANI). Organisasi ini mengorganisir perjuangan para anggotanya dalam berbagai bentuk kegiatan yang berorientasi perjuangan.

Di antara bentuk-bentuk kegiatan itu, tampak dalam kegiatan-kegiatan di berbagai bidang kehidupan sebagaimana berikut ini:

- a. Berjuang melalui badan-badan perjuangan yang telah ada.
- b. Berjuang melalui kelaskaran atau kesatuan yang keanggotannya hanya terdiri dari perempuan dan bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan lain. Seperti; *Laskar Wanita Indonesia*, *Laskar Putri*, dan sebagainya.
- c. Berjuang melalui kelaskaran yang keanggotannya terdiri dari perempuan dan lelaki. Seperti: *Tentara Pelajar Wanita*, *Corps Maha-siswa Wanita*, *Corps Polisi Militer*, dan lainnya.
- d. Berjuang secara perorangan yang masih dalam koordinasi PERWANI.
- e. Lain-lain.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 *Fujinkai* atau *Jawa Hokokai Fujinkai* yang dipimpin Ny. Siti Sukaptinah Soenaryo Mangunpuspito dibubarkan. Dalam amanat pembubaran itu dianjurkan supaya di kota--kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia didirikan lagi organisasi perempuan dengan nama Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI). Namun demikian, anjuran ini tidak banyak diwujudkan oleh sebagian besar perempuan di Indonesia. Sebab mereka sudah membentuk organisasi baru atau bergabung dalam organisasi-organisasi perempuan yang sudah ada. Mereka baru bergabung dengan PERWANI setelah adanya faktor-faktor lain yang menjadikan mereka dengan suka rela mau bergabung.

Maksud dan Tujuan PERWANI adalah menyediakan dan mengerahkan tenaga perempuan guna mempertahankan dan memelihara kemerdekaan. Adapun secara spesifik, kegiatan-kegiatan PERWANI meliputi:

- a) Mengucapkan salam dengan pekik Merdeka.
- b) Mengibarkan Bendera Merah Putih.
- c) Memakai lencana merah putih.
- d) Membantu KNI (Komite Nasional Indonesia) di daerah.

Kegiatan-kegiatan ini masih berlanjut hingga bersatu dan meleburnya organisasi PERWANI bersama *Wanita Negara Indonesia* (WANI) menjadi *Persatuan Wanita Republik Indonesia* (PERWARI).

3. Wanita Negara Indonesia (WANI)

Tugas pertama yang diberikan pada Ny. Suwarni Pringgo-digdo yang diangkat sebagai anggota *Dewan Pertimbangan Agung* (DPA) adalah menyediakan tenaga-tenaga perempuan yang sanggup bekerja di Jakarta atau tempat lain untuk menyelenggarakan dapur-dapur umum atau tugas--tugas sosial. Untuk itu pada bulan Oktober 1945,

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

di bawah kepemimpinan Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Nn. Erna Djajadiningrat (sekarang Ny. Sutoto) dibentuklah *Wanita Negara Indonesia* (WANI).

Berbeda dengan dapur umum lain, dapur-dapur umum WANI ini menyediakan juga makanan bagi Pegawai Negeri yang tidak dapat pulang oleh karena suatu pertempuran, rapat, atau lainnya. Pada waktu itu, jika ada pertempuran tidak ada orang yang berjualan, toko-toko tutup dan lalu lintas terhalang, kadang-kadang sampai beberapa hari. Dalam keadaan demikian dapur umum WANI, yang menyediakan bahan makanan untuk pejuang-pejuang, berperan pula sebagai “Pos Republik”.

Di samping membentuk dapur umum, perempuan-perempuan di Jakarta mendirikan tempat “Penjahit Umum”. Dari tempat ini terdapat sumbangan tenaga untuk menjahitkan perlengkapan pejuang-pejuang di berbagai daerah, khususnya di kawasan pedalaman. Untuk mengenang jasa-jasa WANI dalam pengadaan “Penjahit Umum” itu, pemerintah memberikan tanda penghargaan berupa Bintang Gerilya kepada Nn. Erna Djajadiningrat. Sosok inilah yang pertama kali dari kaum perempuan Indonesia yang mendapat penghargaan Bintang Gerilya.

Organisasi WANI ini pada akhirnya bersatu dan melebur bersama organisasi PERWANI untuk membentuk organisasi baru yang bernama *Persatuan Wanita Republik Indonesia* (PERWARI).

4. Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI)

Badan ini dibentuk pada konferensi organisasi-organisasi perempuan Indonesia di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1946. Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI) ini dipimpin oleh Ny. Sri Mangkunsarkoro dan berkedudukan di Yogyakarta. Keberadaan PTPWI ini hanya bersifat sementara, yaitu selama kemerdekaan Indonesia belum tercapai sepenuhnya.

Tujuan badan ini adalah membantu Pemerintah dengan memusatkan tenaga perempuan untuk menegakkan Kemerdekaan RI dengan cara:

a. Mempertinggi dan memperkuat pendidikan batin untuk memperkokoh semangat pembelaan negara.

b. Pembagian pekerjaan untuk memperkuat mobilisasi dengan mengingat kekuatan dan kecakapan masing-masing badan perjuangan.

c. Tuntutan secara hakim perang kepada yang tidak menurut komando.

d. Mengadakan badan pengawas terhadap keadilan dan kebenaran.

Anggota-anggota PTPWI ini terdiri dari :

a. Ketentaraan:

(1) Laskar Wanita Indonesia Bandung.

(2) Laskar Putri Indonesia Solo.

(3) Perjuangan Putri Rakyat Indonesia Yogyakarta.

(4) Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia bagian Putri Yogyakarta.

b. Keagamaan:

(1) Muslimat Yogyakarta.

(2) Aisyiyah.

(3) Persatuan Wanita Kristen Surakarta.

(4) Partai Katholik RI bagian Wanita Yogyakarta.

(5) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Putri Yogyakarta

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

c. Perburuhan:

Barisan Buruh Perempuan Indonesia.

d. Sosial:

(1) Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Yogyakarta.

(2) Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Yogyakarta.

(3) Pemuda Putri Indonesia (PPI).

5. Perkumpulan Pekerja Putri Surakarta (PPPS)

Organisasi ini dibentuk pada bulan Juli 1945 di bawah pimpinan Nn. Sutijah (Ny. Suryohadi) dan wakilnya Nn. Sumarni.

Di dalam perebutan kekuasaan dengan Jepang, PPPS ikut aktif membuat Bendera Merah Putih dan ikut dalam barisan yang menurunkan Bendera Jepang di Balaikota Surakarta. Latihan Kemiliteran didapat dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) atau Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang meliputi pelajaran baris-berbaris, bersembunyi, melempar granat, menggunakan senjata (senapan, revolver), mengemudi dokar, dan sebagainya.

Sewaktu Surabaya diserbu, PPPS mengirim anggota-anggotanya ke Mojokerto, PPPS kemudian berganti nama menjadi Barisan Penolong, yang juga menyiapkan tenaga untuk front (garis depan) Ambarawa dan Salatiga. Adapun tugas Barisan Penolong adalah antara lain merawat korban pertempuran, mengorganisir pengiriman makanan ke front, membentuk dan melaksanakan tugas dapur umum di daerah operasi.

Kongres Pekerja Wanita di Kediri membentuk Barisan Buruh Wanita dengan pimpinan Ny. S. K. Trimurti. Barisan

Buruh Wanita ini kemudian membentuk Laskar Buruh Wanita yang dipimpin oleh Nn. Sutiya (Ny. Suryohadi). Laskar Buruh Wanita memberi bantuan ke berbagai front.

6. Inspektorat Perempuan

Pada bulan September 1946 dalam organisasi Kementerian Pertahanan dibentuk Biro Perjuangan sebagai suatu wadah dari badan-badan kelaskaran dan badan-badan perjuangan.

Dalam Biro perjuangan ini dibentuk inspektorat-inspek-torat. Dalam hubungan ini, di Yogyakarta terbentuk *Inspek-torat Perempuan* di bawah pimpinan Nn. Supijah. Dengan dibentuknya Biro Perjuangan dengan *Inspektorat Perempuan*, maka dewan-dewan Perjuangan dan kesatuan-kesatuan yang terbentuk di daerah, dimasukkan dalam inspektorat-inspek-torat cabang.

Adapun tugas-tugas *Inspektorat Perempuan* ialah antara lain:

a) Membantu memperhatikan kesejahteraan prajurit di garis depan, mengurus makanan, obat-obatan, pakaian, bingkisan untuk garis depan dari organisasi-organisasi.

b) Membantu menginterogasi tahanan-tahanan perempuan yang dicurigai sebagai mata-mata.

D. Perkumpulan Perempuan Daerah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, di Sidikalang (Tapanuli) berdiri perkumpulan PERWANI (*Persatuan Wanita Negara Indonesia*). Pada waktu itu perempuan bekerja di dapur-dapur umum, menolong korban-korban perjuangan yang ditawan dalam penjara dan membantu palang merah.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 di Tanjungkarang dibentuk *Gerakan Putri Indonesia* (GERPI). GERPI mengusahakan dapur umum untuk para bekas romusa (tenaga kerja paksa) dari seluruh Sumatra yang akan dipulangkan ke Jawa dan singgah di Tanjungkarang. Juga penolong pemuda-pemuda yang akan pulang ke Jawa, setelah mereka dengan tipu muslihat dibawa oleh Jepang ke Singapura dan Sumatra.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pada tanggal 17 Desember 1946 di Kalimantan didirikan *Persatuan Wanita Indonesia* (PERWANI) diketuai oleh Ny. N. Djohansyah. Pembentukan ini mendapat sambutan di daerah-daerah terbukti dengan berdirinya cabang-cabang PERWANI di Banjarmasin dan Hulu Sungai.

Proklamasi Kemerdekaan disambut di Bali dengan langkah-langkah untuk menyusun tenaga dan kekuatan untuk membela dan mempertahankan Kemerdekaan. Semula langkah persiapan ini hanya dapat dilaksanakan di Sunda Kecil (sekarang Nusa Tenggara), tetapi kemudian meluas sampai Lombok dan Sumbawa. Karena daerah-daerah sebelah timur diduduki oleh Tentara Sekutu dari Australia dan Belanda, maka praktis hanya di Bali ada perjuangan menentang penjajahan. Dalam semua kegiatan, perempuan tidak ketinggalan.

Dalam perang puputan di mana di desa Margarana pada tanggal 29 Nopember 1946 Letkol I. Gusti Ngurah Rai gugur, peranan perempuan tidak dapat dikesilkan. Perjuangan bisa bertahan berkat bantuan kaum Ibu yang menyelenggarakan dapur umum di masa para pejuang menyingkir dan mengadakan perlawanan.

Tidak sedikit perempuan yang menjadi penghubung antara desa dan kota, memberi informasi tentang musuh dan membawa perbekalan yang diperlukan. Di antara mereka, seorang perempuan penghubung Mensawer tertangkap dan dibawa ke Banyuwangi untuk kemudian disiksa di luar perikemanusiaan karena tidak mau menerangkan perjuangannya.

Selain yang tersebutkan di atas, masih banyak daerah-daerah di mana perempuan ikut aktif dalam perjuangan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, perempuan atau perempuan dari bangsa ini telah membuktikan perannya dalam menegakkan kehidupan bangsa.

E. Laskar Perempuan

1. Barisan Perempuan

Didirikan pada zaman Jepang (1944) sebagai bagian dari organisasi Jakarta Tokubetsu Si Fujinkai dan berpusat di Balai Kota Jakarta. Fujinkai dipimpin oleh Ny. R.A. Abdurachman, sedatig barisan Putri dipimpin oleh Nn. Siti Delima sebagai ketua dan wakil ketua Nn. Nursyamsu (Nn. Nursyamsu Nasution).

Setelah Proklamasi, dibentuk pula Barisan Putri di Jawa Barat dan Jawa Timur. Staf pimpinan di Pusat antara lain Nn. Setiati, Nn. R. Paramita Abdurachman, Nn. Malidar (Ny. Malidar Hadiyuwono). Pimpinan di Bandung adalah Nn. Mies (Ny. Imron Rosyadi), di Garut Nn. Kartini Maulani (Ny. Kartini Tambunan), dan di Jawa Timur Nn. Lukitaningsih (Ny. Irsan Radjamin).

Setelah Proklamasi, Jepang de facto masih berkuasa dan berke-wajiban menjaga keamanan, sampai Sekutu datang. Tugas Barisan Putri pada waktu itu antara lain mencuri senjata di kantor-kantor dan rumah-rumah orang Jepang, bersama-sama dengan pemuda-pemuda Menteng 31 mengadakan siaran-siaran radio untuk seluruh Indonesia dan Luar Negeri tentang telah merdekanya Indonesia, membantu dapur umum di mana-mana, membantu perawatan korban pertempuran di runiah sakit dan Palang Merah Indonesia.

Sebagai kejadian yang penting dapat dikemukakan antara lain: Pada saat menjelang Proklamasi di mana sandang dan pangan semakin sukar didapat karena gudang-gudang selalu dijaga ketat oleh tentara Jepang, timbul inisiatif dari seorang anggota Barisan Putri untuk mencuri hanco atau cap/stempel yang biasa digunakan pada surat-surat untuk mengeluarkan barang dan gudang. Dengan menggunakan hanco tersebut keluarlah dan gudang barang-barang yang sangat diperlukan dewasa itu yaitu beras, gula, garam, tepung, teh, dan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

sebagainya. Demikian pula dapat dikeluarkan puluhan blok kain putih dan kain merah yang kemudian dibuat menjadi bendera merah putih.

Pada tanggal 19 September 1945 Barisan Putri ikut serta dalam Rapat Raksasa di lapangan Ikada.

Di Surabaya Barisan Putri di bawah pimpinan Nn. Lukitaningsih (Ny. Irsan Radjamin) telah membuat dasar pembentukan satuan Corps Pemuda Putri Indonesia Pejuang 45. Dengan kelompoknya dia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa menghadapi Belanda.

2. Laskar Wanita Indonesia (LASWI)

LASWI dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1945 di Bandung (Jawa Barat) dipimpin oleh Ny. S.Y. Arudji Kartawinata dan bermarkas di Gedung Mardihardja Jalan Pangeran Sumedang 91 Bandung.

Tujuan pembentukan LASWI adalah membantu pejuang-pejuang pria baik di garis depan maupun di garis balakang karena merasa terpanggil oleh Revolusi. Anggota-anggotanya terutama adalah Pemudi Pelajar. Sebelum terjun di medan tugas mereka mendapat latihan-latihan yang meliputi pembinaan fisik dan mental, kemiliteran (baris-berbaris, penggunaan berbagai senjata, taktik gerilya), palang merah, intel, dan lain-lain. Persenjataan yang dimiliki pada waktu itu ialah bambu runcing, pistol mauser dan keris serta ditambah beberapa gerobak dan beberapa ekor kuda sebagai alat angkutan.

Kegiatan-kegiatan LASWI meliputi bidang sosial, intel dan pertempuran. Dalam bidang sosial antara lain pada waktu terjadi banjir besar akibat meluapnya kali Cikapundung (1946) anggota LASWI diperbantukan dan ditugaskan untuk menyediakan makanan pada Palang Merah. Dalam bidang intel antara lain menugaskan Nani

Sumarni dan Siti Sabariah yang melakukan penyelidikan di Bandung Utara, di mana mereka pernah tertangkap pada bulan Januari 1946. Dalam pertempuran-pertempuran di Bandung LASWI dipencar dalam delapan regu.

Dalam peristiwa Bandung Lautan Api, LASWI ikut aktif dalam pembumihangusan. Penyelenggaraan dapur perjuangan untuk Sektor Bandung, mencari bahan makanan dan mengirimkannya ke garis depan ditugaskan pula pada LASWI. Markas LASWI pada waktu itu berpindah-pindah, mula-mula di Ciparay, kemudian ke Majalaya.

Markas di Majalaya mendapat serangan dari udara yang mengakibatkan 5 anggota LASWI gugur ialah Siti Murwati (dari Madiun), Siti Fatimah (dari Garut), Ida Mursida (dari Bandung), Sutiyawati (dari Yogyakarta) dan Lela (dari PPI Garut).

Pada bulan Desember 1946 LASWI pindah ke Tasikmalaya. Berhubung dengan seruan Pemerintah supaya para pelajar kembali ke bangku sekolah, sebagian dari anggota dikembalikan pada orang tua masing-masing. Yang masih ingin berjuang digabungkan pada Inspektorat Perempuan Biro Perjuangan di Garut. LASWI di sini tugasnya antara lain melatih kader-kader perempuan dalam kemiliteran, menjahit pakaian seragam untuk tentara kita, membuat makanan tahan lama untuk garis depan dan membantu rumah sakit darurat.

Sewaktu tentara kita hijrah ke Yogya, sebagian dari LASWI ikut bersama pasukan hijrah ke Yogya sebagian lagi bersama Ny. A.H. Nasution, membantu keluarga tentara yang mau ikut hijrah ke Yogya. Pimpinan LASWI cabang Yogya adalah Ny. Awibowo (dengan putrinya), Ny. Hadinegoro (Istri Pangeran Hadinegoro), Ny. Tabrani dan Ny. Siti Achiriyah Maskun. Di Yogya LASWI ikut dalam Panitia Sosial dengan Ny. Utami Suryadarma sebagai Ketua dan Ny. S.Y. Arujickartawinata sebagai Wakil Ketua. Panitia sosial ini membantu para gerilyawan serta keluarganya dengan menyelenggarakan dapur umum.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dapat dicatat bahwa ada anggota LASWI sengaja disiapkan untuk diterjunkan sebagai tenaga-tenaga di garis depan antara lain:

a) Ny. Gusti Johan (Ny. Lilik Kusmiyati Sadikin) dari Markas Besar Pertempuran Divisi penggempuran di bawah Mayjen Drg. Mustopo dan Letkol Z. Lubis.

b) Nn. Susilowati (Ny. Jamil) dari Polisi Tentara Front.

c) Nn. Wiwik Atikah dari Pasukan Aksi Illegal.

3. Laskar Petri Indonesia (LPI) Surakarta

Ada dua pihak yang menjadi pemrakarsa LPI ialah Nn. Sudijem, Nn. Siti Hartinah, dan Nn. Sayem pada satu pihak dan Nn. Sрни (terkenal sebagai Ibu Sрни, karena dapat menolong orang sakit dengan kekuatan batin), Nn. Prasasti, Nn. Sarwenten, Nn. Mastuti dari pihak kedua. Mereka ini kemudian bergabung dan dengan izin PMC (Plaatselijk Militair Commandant = Komandan Militer Setempat) mendirikan LPI pada tanggal 31 Desember 1945.

Tujuan LPI adalah membentuk pasukan tempur perempuan yang akan berjuang bersama pasukan pria dan pasukan bantuan untuk garis depan dan garis belakang. Anggota LPI berjumlah lebih kurang 200 orang terdiri terutama dari pelajar putri yang kesemuanya diasrama-kan. Markas LPI berada di Kompleks Balai Prajurit Batangan, Kelurahan Kedunglumbu Surakarta.

LPI disusun dalam susunan seperti Kompi dengan Staf dan pasukan. Pimpinan pertama adalah Komandan Nn. Sudijem (Ny. Mardowo). Wakil Komandan: Nn. Siti Hartinah (Ny. Tien Suharto istri Presiden Suharto), Komandan Kompi: Nn. Ontosinah Mangku-bumi. Komandan-komandan seksi adalah Nn. Dartiyah, Nn. Prasasti dan Nn. Suripni. Pembina LPI adalah Mayor Suharto (sekarang Mayjen Suharto) dan Mayor Mardowo (sekarang Purnawirawan).

Pada 1946 diadakan penggantian pimpinan, menjadi sebagai berikut:

- Komandan : Nn. Dartiyah (Ny. D. Suropto)
- Wakil Komandan : Nn. Prasasti (Ny. Suwarno)
- Sekretaris : Nn. Sri Suwarni (Ny. Rugito)
- Staf : Nn. Pramani, Nn. Sri Wulan (Ny. Sri Suyitno), Nn. Mastuti dan Nn. Sarwenten, sesepuh Ny. S. Kumpul. Ny. Sukartono dan Ny. Suparjo.

Kegiatan-kegiatan LPI meliputi antara lain:

1) Mengirimkan regu-regunya ke berbagai front seperti di Jawa Tengah di Mranggen, Salatiga, Bandaredjo, Demak, dan di Jawa Timur di Surabaya dan Ngampel. Pengiriman diatur secara bergantian sedang tugas yang dijalankan disesuaikan dengan situasi, antara lain membantu menyelenggarakan dapur umum, penerangan, membantu Staf Komando Teritorial, kesehatan.

2) Ikut menjaga tempat persediaan air minum (waterreservoir) di Jebres Sala, membantu sebagai pengawas ekonomi, menjaga percetakan uang negara, membantu membuat kubu-kubu pertahanan.

3) Dalam kegiatannya bekerja sama dengan LASWI yang berkedudukan di Yogyakarta. Membantu membuat senjata di Persenjataan Negara di Gedung Gunung Kidul.

4) Ikut bergerilya di pedalaman setelah Solo diduduki Belanda; Menyusup ke Semarang dan Salatiga untuk gerakan di bawah tanah.

Dengan adanya seruan Pemerintah pada Desember 1946 agar semua pelajar kembali ke bangku sekolah, sebenarnya LPI harus bubar, tetapi secara resmi LPI baru membubarkan diri pada tanggal 27 Oktober 1948.

4. Wanita Pembantu Perjuangan (WPP)

WPP dibentuk di Bintaran Tengah No. 3 Yogyakarta pada tahun 1946 sebagai organisasi Laskar Wanita.

Tujuan pembentukan adalah menyiapkan tenaga perempuan muda, untuk membantu perjuangan kemerdekaan baik di garis depan maupun di garis belakang. Anggota-anggotanya terdiri dari siswa-siswa SD dan SMP serta SMA, yang setelah ada seruan pada para pemuda, untuk ikut berjuang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota WPP.

Pimpinan WPP adalah:

Ketua : Dr. Sulianti (Prof. Dr. Sulianti Saroso)

Sekretaris 1 : Ny. Pudji Armyn Pane

Sekretaris 2 : Ny. Gusti Mayor,

Bendahara : Ny. Ali Sastroamidjojo

Usaha : Ny. Djoko Asmo

Komandan Latihan : Ny. Jo Chairul Saleh (Komandan Latihan)

Wakil Komandan : Ny. Pudji Armyn Pane

Latihan diadakan secara teratur, tiap rombongan selama 3 bulan. Latihan meliputi ilmu kemiliteran (di Akademi Militer Nasional Yogya) PPPK dengan praktek di rumah sakit Petronella, memasak untuk dapur umum, pemberantasan buta huruf, sejarah Indonesia, tata negara dan kesadaran nasional, budi pekerti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tenaga pengajar adalah Ny. Siti Sundari Yamin, Ny. Supeni, Nn. Yetty Zain (drg. Ny. Yetty Rizali Noor), Ny. Sri Unun (Ny. Soebekti), Ny. Selo Soemardjan dan Ny. Sari Soelistiardjo.

Pengajar dari Akademi Militer antara lain Bapak Djatikusumo, Bapak Sutopo Juwono, Bapak Soeparman, Bapak Ismail.

Tenaga-tenaga perempuan yang telah dilatih ditugaskan di garis depan, untuk Palang Merah dan Dapur Umum; mereka ditugaskan juga untuk memberantas buta huruf di desa-desa sekitar Mranggen, Mojokerto, Bekasi, Karawang, dan lain-lain. Dalam tugas, mereka ditampung dan diawasi oleh Biro Perjuangan (Bagian dari Departemen Pertahanan).

Setelah Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, anggota WPP menggabungkan diri dengan Biro Perjuangan di luar Yogyakarta.

5. Laskar Muslimat

Partai PERTI Islam di samping mendirikan LASMI (Laskar Muslimin Indonesia) juga membangun laskar perempuannya ialah Laskar Musli-mat, berpusat di Bukittinggi. Laskar Muslimin dididik/dilatih seperti LASMI ialah: baris-berbaris, hidup berdisiplin tentara dan menggunakan senjata (senjata api dan bambu runcing).

Pelantikan-pelantikan Laskar Muslimat ini diadakan di berbagai kota di Sumatra Tengah, umpamanya di Bukittinggi, Padang, Solok, Sawahlunto, Bangkinang, Kampar, dan Kerinci. Dalam pelantikan-pelantikan ini mereka memakai pakaian seragam sarung batik, baju dan kerudung putih.

Tugas Laskar Muslimat ini antara lain ikut serta berjuang di garis depan, masuk hutan ke luar hutan, masuk kampung ke luar kampung dan ikut "Longmarch" dari bukit ke bukit dan dari gunung ke gunung.

Medan pertempuran Padang luar kota mengenal benar perjuangan Laskar Muslimat di Sumatra Tengah.

Beberapa nama pemuka-pemuka Laskar Muslimat adalah antara lain Sdr. Rosni Zainal, Norma Alamsudin (sekarang Norma Aminuddin). Haji Sariani, Maljani Manan, Rohana Thaib, Nurjani

Tanjung Barulak, Sulijah Batipuh, Jaura Muara Labuh, Nurijah Ahmad, Lawijah Batusangkar, Ramani Nurisan, Latifah Bonjol, dan sebagai penasehat umumnya adalah Umi H. Salima.

6. Sabil Muslimat

Laskar Sabil Muslimat dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1945 di Sumatra Tengah dan berpusat di Padang Panjang. Anggota-anggotanya Laskar tersebut terdiri dari gadis-gadis antara lain pelajar-pelajar sekolah menengah seperti: Kuliyatul Mubalighaat, Normal School Padang Panjang, Dinijah Putri, Ma'ahad Paya-kumbuh, Sekolah Menengah Putri Muhammadiyah, Normal Islam Padang, Kweekschool Bukittinggi. Juga pemuda-pemudi putus sekolah ada yang menjadi anggota Sabil Muslimat. Mereka menjadi anggota Sabil Muslimat karena merasa terpanggil oleh cinta tanah air untuk membela kemerdekaan.

Dari tiap kabupaten di Sumatra Tengah dipanggil lima orang yang fisik dan mentalnya baik, untuk mengikuti latihan sebagai persiapan tugas mereka nanti. Mereka ini menjadi Komandan/Staf di daerahnya masing-masing. Latihan diadakan selama tiga bulan dan dalam latihan mereka diberi latihan perang, latihan intel, dapur umum, latihan Palang Merah (termasuk PPPK), Sholat di Medan Perang, semuanya dengan disiplin ketentaraan.

Setelah mengikuti latihan, mereka disebar ke daerah untuk membentuk Laskar Sabil Muslimat di daerahnya masing-masing. Pimpinan Sabil Muslimat berpusat di Padang Panjang dengan Komandannya Nn. Syamsiyah. Syam (Dra. H. Syamsiyah Syam). Di samping itu yang duduk dalam pimpinan adalah antara lain Asniah Asir, Nuraini, Nudiai, Zawiyah, Rohani, Istom, Ibu Chodijah, Syamsidar, Maiipunah, Rosna Rais, Norma Karim, Yuniar, Zainar, dan Rosjidah .

Laskar Sabil Muslimat tersebar di seluruh Sumatra Tengah, di front Padang luar kota, Bukittinggi, Payakumbuh, Lintau, Batu-sangkar, Teluk Bayur, Pariaman, Sei Liman, Sei Tiku Painan, Solok, Kerinci, Maninjau, Sulit Air, Jambi, Matur, dan Sawahlunto.

Aktivitas Laskar dibagi dua, ialah di garis depan dan garis belakang. Untuk garis depan (front) diambil mereka yang telah dilatih perang gerilya dan berasal dari daerahnya sendiri serta ditambah dari luar daerah.

Tugas mereka adalah mempertahankan difi, sebagai palang merah, menyelenggarakan dapur umum, tugas intel (masuk daerah musuh), memberi penerangan dan membina mental anggota.

Di garis belakang mereka melatih kader-kader, mencari dan mengumpulkan bahan makanan, menjaga keamanan selama orang-orang bersholat Jum'at (seluruh Sumatra Tengah setiap hari Jum'at mengerahkan semua orang untuk bersembahyang Jumat di mesjid-mesjid, sehingga pasar, toko-toko dan lain-lain tempat kosong), memberi penerangan dan membagi serta mengangkut makanan ke front Padang luar kota.

Kejadian-kejadian yang dapat dicatat antara lain:

1) Sewaktu pada tanggal 3 Maret 1947 terjadi clash antara Laskar dan TNI, Sabil Muslimat membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengadakan rapat antara pihak-pihak yang ber-sengketa, dipimpin oleh Komandan Sabil Muslimat Nn. Syam-siyah Sjam.

2) Ketika Komisi Tiga Negara (KTN) mengirimkan konsul-konsulnya meninjau keadaan Republik Indonesia di Bukittinggi, Sabil Muslimat mengumpulkan anggota-anggotanya di seluruh Suma-tera Tengah untuk berdemonstrasi di muka KTN bersama-sama Laskar lain.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Tujuan demonstrasi adalah ingin membuktikan pada KTN bahwa rakyat tidak ingin dijajah kembali. Pada waktu itu (September 1947) Sabil Muslimat dapat mengumpulkan masa 10.000 orang termasuk anggotanya lengkap dengan pakaian seragamnya (celana mompe dan kemeja serta tutup kepala abu-abu).

3) Pada bulan Desember 1948 Laskar Sabil Muslimat ikut membumihanguskan kota Bukittinggi (pada waktu itu tempat ke-dudukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia) dan ikut me-nyiapkan Pemerintahan Darurat ke Payakumbuh.

4) Pada tanggal 6 Januari 1949 Sdr. Syamsiah Syam ditangkap Belanda dan mendapat tanah rumah, sampai perletakan senjata.

5) Sabil Muslimat juga ikut membantu menggagalkan usaha membentuk Daerah Sumatera Barat terlepas dari RIS. Setelah peng-akuan kedaulatan, Sabil Muslimat dibubarkan.

F. Laskar Gabungan

Data-data tidak banyak didapatkan, tetapi yang jelas pemudi/ pelajar putri tidak sedikit yang menggabungkan diri dalam TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar) serta Corps Mahasiswa.

Tugas mereka pada umumnya sama dengan yang dilaksanakan perempuan-perempuan dalam badan-badan perjuangan atau kelaskaran.

Nama-nama yang diketahui antara lain: Nn. Sudijati (sekarang Ir. Kimia pada perindustrian Angkatan Darat dengan pangkat Letkol Kowad), Ny. M. Hamzah (Istri Laksamana Muda Hamzah), Nn. Supraptinah (Ny. Sunarso SH), Ny. Prakoso (istri Brigjen Dr. Prakoso).

Di samping badan-badan perjuangan tersebut di berbagai tempat kaum perempuan Indonesia juga banyak yang bekerja secara spontan

tidak di bawah satu badan perjuangan atau organisasi, melainkan secara perorangan atau bersama-sama, menyelenggarakan dapur umum, palang merah, menyiapkan dan mengirimkan makanan untuk garis depan.

G. Polisi Wanita

Pada tahun 1948 Jawatan Kepolisian Negara di Yogyakarta bermaksud menerima untuk pertama kali siswa Polisi Wanita. Gagasan ini mendapat dekungan penuh dari pimpinan KOWANI. Dalam rangka maksud ini Jawatan Kepolisian Negara di Sumatera Barat pada tanggal 1 September 1948 menerima 6 orang calon untuk dididik sebagai Inspektur Wanita di Bukittinggi, yaitu: Ny. Nelly Paung Sitomurang, Ny. Jasmaniar Husein, Ny. Rosmaliana Pramono, Ny. Maria Mufti, Ny. Rosalia Taher dan Ny. Dahniar Sukoco. Karena hubungan dengan Jawa putus tidak diketahui apakah Yogyakarta masih meneruskan penerimaan calon, namun penerimaan di Sumatera Barat diteruskan.

Penerimaan Polisi Wanita ini didukung oleh organisasi perempuan setempat, lebih-lebih karena daerah-daerah yang fanatik Islam tidak dapat menerima, adanya petugas-petugas pria melaksanakan pemeriksaan badan terhadap perempuan (pada umumnya pelarian-pelarian dari Singapur dan Riau dan lain-lain).

Dalam Clash ke-II (Perang Kemerdekaan-II) Polisi Wanita meninggalkan tugasnya sebagai petugas keamanan dan beralih menjadi alat perjuangan bangsa yang mempertahankan Kemerdekaan. Pada tahun 1950 Polisi Wanita dilatih kembali di Sukabumi. Tugas Polisi Wanita disamping tugasnya sebagai Angkatan Kepolisian, juga mempunyai tugas khusus untuk mencegah serta memberantas segala kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh atau terhadap anak-anak remaja dan perempuan.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Dalam perkembangan selanjutnya KOWANI ikut memperjuangkan berlangsungnya dan dibukanya pendidikan-pendidikan Polisi Wanita.

H. Wirawati Catur Panca

Setelah pengakuan kedaulatan RI dan pembubaran Laskar-Laskar, anggota-anggota Ex-Kelaskaran tidak pernah Baling bertemu lagi. Pada tanggal 6 Maret 1976 di Jakarta diadakan pertemuan kembali (Reuni) antara anggota Ex. Kelaskaran yang diprakarsai oleh Ex LAS WI, Ex LPI, Ex Barisan Putri dan Ex WPP.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut lahirlah pada tanggal 2 Juni 1977 di Jakarta Yayasan “Wirawati Catur Panca” sebagai satu wadah untuk melaksanakan keputusan-keputusan Reuni. Mungkin masih banyak yang belum disebut di sini, karena kurangnya data dari mereka yang setara perorangan ikut dalam perjuangan-perjuangan/kesatuan-kesatuan.

BAGIAN III

Pergerakan Perempuan pada Masa Revolusi Indonesia

SITUASI bahaya usai pemproklamasian kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah tampak beberapa jam sebelum sidang PPKI yang terakhir. Tepatnya, pada waktu Sukarno dan Hatta memenuhi panggilan Mayor Jenderal Nishimura, wakil komandan pasukan Jepang di seluruh Jawa dan Madura.

A. Kemerdekaan yang Terancam

Sidang PPKI yang akhirnya digelar pada hari Jum'at dini hari itu nyaris gagal tiga kali. *Pertama*, sidang yang direncanakan pada pukul 10:00 tanggal 16 itu gagal dilakukan lantaran Sukarno tidak dapat hadir. Sebab pada jam 10 itu Sukarno masih berada di Rengasdengklok dalam pengamanan Sukarno dan kawan-kawan. Ia baru sampai di Jakarta setelah dijemput oleh Ahmad Subarjo usai buka puasa Ramadhan. *Kedua*, tempat sidang yang direncanakan berada di Hotel Des Indies itu akhirnya ditolak oleh pihak hotel dengan suatu alasan yang dapat diterima oleh Sukarno dan lainnya. *Ketiga*, sidang yang sudah pasti bakal dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda itu, sempat didahului perdebatan dengan Mayor Jenderal Nishimura.

Mengetahui sidang PPKI hendak digelar di rumah Maeda atas izin pemiliknya, Nishimura langsung memanggil Sukarno dan Hatta

ke rumahnya. Keduanya pun memenuhi panggilan Nishimura dengan pendampingan Maeda. Sekira pukul 23:30, Sukarno dan Hatta mulai menyimak maksud dan tujuan Nishimura yang memanggil keduanya pada tengah malam itu.

Tidak lama kemudian, terjadilah perdebatan antara Sukarno dan Hatta di satu pihak dan Nishimura dipihak yang berbeda. Dalam perdebatan itu terdapat informasi bahwa Nishimura sekaligus pemerintah Jepang ingat dan sadar seputar janji-janji kemerdekaan yang hendak diberikan kepada Indonesia. Jepang juga masih minat untuk mempertahankan status *quo* sebagai penguasa di Indonesia. Namun semua itu sudah tidak dapat lagi dilanjutkan dan janji pemberian kemerdekaan tidak dapat direalisasikan.

Jepang sudah tidak punya kuasa lagi untuk “menghalang-halangi” keputusan para pejuang Indonesia. Status Jepang di Indonesia pada masa itu tidak lagi sebagai penjajah, namun sebagai semacam polisi yang diperbantukan kepada pada tentara Sekutu (Hendri F. Isnaeni, 2008:130-133). Artinya, melalui pernyataan Nishimura itu, Jepang memang dipertugaskan untuk menjaga Indonesia dari kemerdekaan dan tentu saja bermaksud menggagalkan berlangsungnya sidang PPKI di rumah Maeda. Namun demikian, Jepang juga ingat seputar janji kemerdekaan yang hendak diberikan kepada bangsa Indonesia tetapi sudah tidak bisa lagi direalisasikannya.

Posisi sulit yang ditanggung Jepang itulah yang hendak diselesaikan Nishimura dengan cara mendatangkan Sukarno dan Hatta. Namun usai memahami pernyataan itu, Sukarno dan Hatta langsung membuka solusi penyelesaian yang berbeda. Keduanya tetap menghendaki segera melangsungkan sidang PPKI yang selanjutnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada siang harinya. Nishimura sekaligus Jepang diharapkan tidak akan menghalangi-halangi berlangsungnya sidang dan proses

pemproklamasian kemerdekaan meski berstatus sebagai polisi yang diperbantukan pada tentara Sekutu. Urusan kemerdekaan Indonesia tidak lagi dengan Jepang, melainkan penjajahan dan calon penjajah.

Mengetahui keputusan Sukarno dan Hatta yang sempat melibatkan nilai-nilai ajaran Samurai dalam perdebatan itu, Nishimura sudah tampak cuci tangan dari tanggung-jawabnya sebagai polisi Sekutu. Nishimura lebih memilih diam, tidak mau tahu-menahu, dan membiarkan Sukarno dan Hatta meninggalkan rumah.

Sidang PPKI pun segera digelar di rumah Maeda hingga pukul 3 dini hari. Proses sidang berlangsung aman. Maeda yang sejak awal menyatakan jaminannya untuk mengamankan sidang selama berada dalam rumahnya itu telah menepatinya. Sedangkan Nishimura sekaligus tentara-tentara Jepang lainnya tidak membuat gangguan dan menyulut keributan hingga kemerdekaan Indonesia selesai diproklamirkan Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

B. Perjuangan belum Selesai

Sejak kemerdekaan Indonesia selesai diproklamirkan, sejak itu pula perjuangan bangsa Indonesia kembali berkobar. Hanya beberapa menit saja perjuangan itu mendapat ruang jeda untuk menyimak proklamasi kemerdekaan dan bersorak gembira atas berhasilnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, mereka harus segera kembali berjuang untuk mempertahankan status kemerdekaan.

Selama perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya didominasi peranan kaum laki-laki saja. Melainkan juga peranan kaum perempuan yang turut berjuang dengan cara angkat senjata sekaligus pemanfaatan organisasi. Jika pada masa Kebangkitan Nasional para perempuan lebih cenderung memanfaatkan media organisasi, kali ini tidak hanya organisasi saja yang

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

digunakannya. Mereka mensinergikan organisasi sekaligus angkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam konteks angkat senjata, tidak sedikit dari kaum perempuan yang bergabung dalam kesatuan-kesatuan laskar perjuangan yang mengharuskan mereka terlibat langsung dengan penggunaan senjata (*weapon*). Dalam konteks organisasi, tidak sedikit organisasi lokal maupun nasional yang mewadahi perjuangan kaum perempuan.

Organisasi-organisasi itu berasal dari organisasi-organisasi *under-ground* semasa pemerintahan Jepang yang baru berani bergerak secara terang-terangan setelah proklamasi kemerdekaan. Organisasi yang sempat beku atau mati aktifitasnya sejak adanya pelarangan dari pemerintah Jepang juga kembali diaktivasi ulang oleh para pimpinan atau anggotanya. Adapun organisasi-organisasi lainnya adalah organisasi-organisasi yang baru dibentuk sejak akhir pemerintahan Jepang hingga usai kemerdekaan Indonesia berhasil dinyatakan bangsa Indonesia.

Organisasi-organisasi yang dibentuk sejak Jepang kalah di perang pasifik hingga masa-masa awal Indonesia merdeka itu ada dua jenisnya. Satu jenisnya berupa organisasi-organisasi yang murni dibentuk untuk suatu kepentingan yang mengutamakan penjagaan kemerdekaan Indonesia. Satu jenis lainnya adalah organisasi-organisasi yang dibentuk dari konversi suatu organisasi yang telah ada sebelumnya.

Di antara organisasi yang bermula dari adanya suatu organisasi itu adalah *Persatuan Wanita Indonesia* (PERWANI). Organisasi PERWANI ini bermula dari pembubaran organisasi Fuzinkai atau Fujinkai bentukan Jepang, secara konseptual. Secara praksis, organisasi Fuzinkai itu dikonversi menjadi PERWANI. Sehingga bekas anggota Fujinkai yang tersebar di kota-kota hingga daerah-daerah itu otomatis menjadi anggota PERWANI jika memang

menghendaki dan menyetujui adanya konversi. Bagi yang tidak minat untuk menjadi anggota PERWANI, mereka memilih dan merelakan diri untuk turut berjuang melalui lain organisasi.

Walau sebagian besar anggota PERWANI berasal dari bekas anggota Fujinkai, namun tujuan PERWANI tidak sama dengan Fujinkai. Jika Fujinkai diperuntukkan sebagai strategi untuk menggalang kekuatan dalam rangka memenangkan perang fasifik di pihak Jepang, tidak demikian lagi dengan PERWANI. Sebab tujuan utama PERWANI pada masa itu adalah mengerahkan tenaga perempuan untuk membantu memerlihara dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun upaya-upaya awal yang dapat dilakukan angotanya meliputi: mengucapkan salam dan pekik merdeka, mengibarkan bendera merah-putih, memakai lencana merah-putih, dan membantu komite nasional Indonesia (badan perwakilan rakyat) di daerah-daerah (Suryochondro, 1984:114-115).

Berbeda dengan PERWANI, organisasi WANI lebih terkonsentrasikan di kawasan pusat pemerintahan dan sekitarnya. Organisasi yang dibentuk pada bulan Oktober 1945 ini mengarahkan perjuangannya pada pertolongan kepada mereka yang berjuang di *front* sekitar Jakarta, dengan cara memberi makanan dan pakaian serta lain-lain keperluan. Selain membantu para pejuang, organisasi ini juga memberi bantuan kepada penduduk Jakarta, khususnya para pegawai “Kiblik” (Republik), dengan bahan-bahan hidup yang esensial. Pemberian rupa-rupa bantuan itu diharapkan agar penduduk Jakarta dapat lebih menguatkan kekuatan dan pertahanan mereka. Hal ini mengingat pada masa itu masih banyak terjadinya pertempuran dan kebakaran akibat situasi dan kondisi perjuangan yang berlangsung di kota tersebut (Suryochondro, 1984: 15).

Gerakan organisasi WANI ini dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan perempuan pada masa itu. Di antaranya: Nyonya Suwarni Pringgodigdo (Isteri Sedar), Nyonya Sri Mangunsarkoro, Nyonya

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Suyatin Kartowiyono, dan Nyonya Susilowati (Pemuda Putri Indonesia/PPI). Mereka membangun dapur-dapur umum dan mengatur distribusi beras guna mendukung perjuangan (Wieringa, 2010:150).

Selain PERWANI dan WANI, masih banyak organisasi-organisasi lain yang digunakan para pejuang Indonesia dari kaum perempuan. Mulai dari organisasi-organisasi yang beranggotakan kaum perempuan dalam profesi tertentu hingga organisasi-organisasi yang mengarah ideologi politik tertentu. Barisan Buruh Wanita, misalnya, merupakan satu di antara organisasi yang beranggotakan perempuan-perempuan buruh dan atau mereka yang memiliki konstansi perhatian pada nasib buruh Indonesia.

Menurut Saskia E. Wieringa (2010:150), ada dua informasi terkait data terbentuknya organisasi ini. Yaitu data yang mengatakan bahwa organisasi ini berdiri di Jakarta pada tahun 1945 dan data yang mengatakan berdiri di Klaten pada tahun 1946. Jika merujuk kronik berita media massa yang disusun Pramoedya, dkk., organisasi Barisan Buruh Wanita telah berdiri di Bandung sejak tanggal 1 Maret 1946. Disusul di Jakarta pada tanggal 8 di bulan yang sama (Pramoedya, dkk., 1999:107 & 121).

Ada juga organisasi *Persatuan Pegawai Putri Indonesia* (PPPI) yang dipimpin oleh Nn. Widajati Soegarda (Ny. Soetardjo). Organisasi ini berdiri bebe-ropa bulan sebelum Jepang menyerah. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini menyatu dan menjadi bagian dari organisasi Barisan Buruh Indonesia (BBI). Nama PPPI lantas diubah menjadi Barisan Buruh Wanita (BBW).

BBW pun berkembang cepat. Dalam waktu singkat, organisasi ini sudah berhasil membetuk 17 cabangnya. Pada masa-masa selanjutnya, BBW menjadi semacam media persemaian kader-kader buruh perempuan dan menjadi satu di antara organisasi yang berafiliasi dengan BBI (Barisan Buruh Indonesia) atau Partai Buruh Indonesia (PBI).

Satu di antara organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang politik adalah Partai Wanita Rakyat yang didirikan oleh Ny. Sri Mangunsarkoro pada tahun 1945. Menurut Wieringa (2010:150), partai ini merupakan satu-satunya partai perempuan yang pernah ada. Ia bersifat militan dengan prinsip pokok nasionalisme dan monogami.

Organisasi-organisasi yang berbasis agama atau pendidikan dengan latar belakang ajaran dari suatu agama pun tak kalah banyaknya. Sebut saja misalnya, Aisyiah (Muhammadiyah), Muslimat (Nahdlatul Ulama'), Muslimat (Masyumi), Wanita Katolik, dan lainnya. Demikian pula dengan organisasi-organisasi spesifik lainnya, semisal Persaudaraan Istri Tentara (Persit) Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, Bhayangkari, dan lain-lainnya lagi.

Semua organisasi-organisasi itu membuktikan bahwa pada masa ini Indonesia mengalami masa Kebangkitan Nasional yang kedua. Masa ini berbeda dengan masa Kebangkitan Nasional periode 1908 hingga 1942 di zaman penjajahan. Selain organisasi-organisasi nasional bermunculan seiring munculnya organisasi-organisasi kedaerahan ataupun sektoral, kaum perempuan pada masa itu juga terlibat langsung dengan penggunaan peralatan senjata nyata.

Banyak dari mereka yang bergerak dalam organisasi sekaligus mensinergikan gerakannya dengan senjata. *Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia*, misalnya, merupakan satu di antara organisasi yang mengkoordinir gerakan perempuan yang mensinergikan gerakan berorganisasi dan memanggul senjata. Keanggotaan mereka terdiri dari laskar-laskar perempuan yang timbul di beberapa daerah pusat pertempuran, seperti di Bandung, Magelang, Sala, Yogyakarta, Madiun, Ujung Pandang, dan lainnya (Suryochondro, 1984:116).

Perbedaan lain dalam periode Kebangkitan Nasional pada masa revolusi Indonesia ini terletak pada kemunculan organisasi-

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

organisasi perempuan yang secara terang-terangan bersinggungan dengan dunia politik. Baik yang bersinggungan dengan politik secara langsung, semisal Partai Wanita Rakyat maupun yang persinggungannya melalui afiliasi pada ideologi politik dan partai politik tertentu, semisal Muslimat (Masyumi), Barisan Buruh Wanita, dan lainnya.

Pada zaman penjajahan, persinggungan organisasi perempuan dengan politik semacam ini hanya terjadi pada beberapa organisasi saja. Selebihnya, organisasi-organisasi perempuan pada masa itu mayoritas bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, kerumah-tanggaan, ekonomi kreatif, dan agama.

Baru menjelang akhir penjajahan yang dilakukan Belanda itulah beberapa suara politik perempuan dapat terdengar secara jelas, khususnya setelah kaum perempuan mendapat hak untuk dipilih dalam suatu jabatan di pemerintahan. Itupun kembali meredup sejak Jepang mengawali penjajahannya. Tepatnya setelah semua partai politik dan segala bentuk perkumpulan sebelum Jepang datang, diharuskan untuk bubar.

Gerakan melalui organisasi perempuan bukannya kembali pada status kedaerah ataupun sektoral, namun meloncat pada status nasional yang tekunci pada gerakan-gerakan yang bersifat militeristik ataupun pendukung militer Jepang. Walaupun, dalam rupa-rupanya, memang menampak dalam bidang tata-boga dapur umum, pertanian, peternakan, industri rumahan maupun pabrikan, kurir barang atau surat, siaran radio, dan lainnya. Bahkan, dalam catatan berbeda, tidak sedikit dari kaum perempuan Indonesia yang menjadi korban penipuan, penculikan, dan pemaksaan untuk menjadi perempuan-perempuan yang bertugas melayani kebutuhan seksual tentara-tentara Jepang yang menyepi dari istri. Perempuan-perempuan malang itulah yang kemudian dilabeli sebagai *jugun ianfu*.

Pergerakan kaum perempuan secara perorangan memang tidak sedikit jumlahnya. Di antara mereka ada yang bergerak sendiri-sendiri dengan cara membantu perjuangan suami, menyambung komunikasi antar organisasi atau perkumpulan, menjadi kurir surat ataupun barang, membocorkan informasi keberadaan musuh, dan lain-lain. Mereka bergerak dinamis, lintas perkumpulan, gender, agama, hingga kelas sosial. Status gerakannya pun tampak ganda. Mulai menjadi anggota perkumpulan lebih dari satu hingga seolah-olah menjadi ibu rumah-tangga yang tidak tahu-menahu dengan urusan perjuangan. Namun demikian, mereka tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat peranannya yang lebih banyak berada pada ruang-ruang yang samar dan tidak jarang menjadi andalan suatu gerakan perjuangan Indonesia.

Walaupun mereka tidak membawa identitas atau ciri-ciri khusus yang khas pada suatu perkumpulan perempuan atau lelaki, namun gerakan pejuang-pejuang semacam ini juga tidak jauh-jauh dari manajemen perjuangan suatu organisasi. Setidaknya, hal ini tampak pada gerakan mereka yang menyambung informasi antar perkumpulan ataupun gerilyawan. Sehingga antara perkumpulan dan gerilyawan itu dapat meminimalisir potensi tabrakan dalam merealisasikan strategi perjuangan mereka.

Banyaknya para pejuang dari kaum perempuan sekaligus organisasi yang digunakan mereka itu memang secara alami membentuk potensi tabrakan strategi perjuangan. Antara pejuang yang satu dengan lainnya atau organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya dapat saling menabrak. Ini sangat dapat dimaklumi mengingat posisi, keberadaan, dan konsentrasi praktik perjuangan mereka belum tentu sama. Kalaupun bergerak dalam bidang yang serupa, kenyataan posisi atau medan perjuangan mereka bersebaran.

Maka logis sekali jika kemudian organisasi-organisasi ataupun perjuangan perorangan kaum perempuan itu membutuhkan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

semacam wadah yang dapat mengkoordinir dan mengelola gerak perjuangan mereka. Memang, organisasi-organisasi nasional ataupun lokal itu sudah banyak bermunculan, namun wadah yang dapat dijadikan sebagai media penghubung yang aktif belum dapat dibentuk dan disepakati oleh mereka.

Adalah inisiatif sebagian tokoh gerakan perempuan yang berkumpul di Yogyakarta semester akhir tahun 1945, merupakan awal terbentuknya solusi permasalahan itu. Tokoh-tokoh yang dipimpin oleh Gusti Yodhonegoro (Istri Budpati Klaten) yang didukung oleh organisasi PERWANI mencoba penggalangan kekuatan gerakan perempuan melalui forum kongres. Forum yang kemudian dinamai mereka sebagai Kongres Wanita Indonesia itu digelar di Klaten, Jawa Tengah (sebelah timur dari arah Yogyakarta menuju Solo/Surakarta).

Kongres perempuan pertama sejak Indonesia merdeka itu dilangsungkan pada tanggal 15 hingga 17 Desember 1945. Dari sumber berbeda, gelaran kongres ini dilangsungkan pada tanggal 16 hingga 17 Desember 1945 (kowani.or.id/organisasi/31). Perbedaan dari kedua data ini terletak pada masa berlangsungnya kongres antara 2 hari dan 3 hari.

Kongres yang diharapkan dapat menyambung spirit dan manajemen gerakan perempuan sebagaimana *Kongres Perempuan Indonesia* pada masa pemerintahan Hindia-Belanda ini memang belum dapat dikatakan sukses sebagaimana namanya yang menggunakan kata Wanita Indonesia. Tidak semua organisasi perempuan yang hadir dalam kongres itu dapat menyatukan titik temu pendapat mereka. Masih ada ganjalan-ganjalan di antara mereka untuk bersatu melalui forum itu. Mereka masih membutuhkan masa-masa lanjutan hingga ditemukannya suatu persatuan.

Walaupun demikian, kabar baiknya berada pada kesadaran dan kerealaan organisasi PERWANI dan WANI untuk membubarkan

organisasi mereka yang selanjutnya membentuk organisasi baru bernama PERWARI. Organisasi PERWARI inilah yang kemudian berperan penting dalam kelanjutan upaya penyatuan gerakan perempuan pada masa itu.

Atas bantuan PERWARI pula, dalam bulan Februari 1946 diadakan Konferensi Wanita Indonesia di Solo. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari tindak lanjut hasil Kongres Wanita Indonesia yang berlangsung di Klaten pada bulan Desember 1945 itu. Melalui forum konferensi inilah yang kemudian dapat dihasilkan beberapa keputusan yang di antaranya adalah pembentukan badan *Kongres Wanita Indonesia*. Badan yang diberinama KOWANI ini hampir serupa dengan badan *Kongres Perempuan Indonesia* yang bernama PPI/PPII.

Usai pembentukan KOWANI itu, kongres lanjutan pun digelar pada tahun yang sama. Sejak kongres yang berlangsung di Madiun itulah nama KOWANI digunakan untuk menyebut *Kongres Wanita Indonesia* menjadi Kongres KOWANI. Namun demikian, penggunaan nama Kongres KOWANI ini akhir berhenti sejak tahun 1949 setelah adanya perpecahan dalam tubuh KOWANI.

Akibat dari perpecahan itu muncul forum baru yang melibatkan kata Wanita Indonesia. Forum yang berlangsung di Yogyakarta dan dimediasi oleh KOWANI itu mempertemukan para organisasi perempuan yang belum masuk KOWANI sekaligus mengajak rembugan lagi antara KOWANI dan mantan anggota mereka.

Melalui forum yang bernama *Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia* itu kemudian anggota KOWANI yang sempat berhenti itu dapat bergabung lagi. Dari sini, kemudian nama *Kongres Wanita Indonesia* disepakati untuk tidak lagi disingkat menjadi KOWANI. Nama kongres harus disebutkan dengan cara baru atau langsung disebutkan secara lengkap: Kongres Wanita Indonesia.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Sejak kongres dalam tahun 1950, keputusan itu direalisasikan keputusan kongres bahwa nama KOWANI tidak digunakan lagi. Sebagai gantinya kembali menggunakan nama Kongres Wanita Indonesia. Namun pada akhir kongres tahun 1961, nama KOWANI itu disepakati untuk dapat digunakan kembali. Maka pada kongres-kongres di tahun-tahun berikutnya, nama Kongres KOWANI dapat digunakan lagi. Hingga berlangsungnya Kongres Wanita Indonesia dalam tahun 2014, nama kongres masih menggunakan KOWANI. Tepatnya: Kongres Ke-XXIV KOWANI.

C. Kongres, Konferensi, dan Permusyawaratan

Walau sudah ada beberapa organisasi yang dapat menyatukan organisasi-organisasi kedaerahan atau kelompo, pada akhirnya, dibutuhkan lagi peranan organisasi yang lebih besar dari PERWANI dan WANI. Menyadari akan peran pentingnya organisasi yang benar-benar bersifat nasional itu muncullah gagasan dari sebagian tokoh perempuan di Yogyakarta untuk menyelenggarakan kongres perempuan lagi sebagaimana tahun 1928.

Gagasan ini lantas menyatu dalam pertemuan demi pertemuan yang dipimpin oleh Gusti Yodogoro (istri Bupati Klaten) dan diprakarsasi oleh organisasi PERWANI di bawah kepemimpinan Ny. D. Susanto. Pertemuan-pertemuan itu pun membahas rencana akan diadakannya kongres perempuan hingga berujung pada pembentukan panitia penyelenggaraan kongres. Adapun tempat penyelenggaraan kongres berada di Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan nama kongresnya tidak lagi menggunakan Kongres Perempuan Indonesia, melainkan *Kongres Wanita Indonesia* (Ai Rospirawati, 2013:2-3).

Digunakannya kata “Wanita” dalam nama kongres ini menandai bahwa kongres kali ini berbeda dengan *Kongres Perempuan Indonesia* pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Walau memiliki beberapa tujuan utama yang sedikit-banyak memiliki kesamaan

dengan *Kongres Perempuan Indonesia (KPI)*, *Kongres Wanita Indonesia (KWI)* ini berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.

KWI I itu pun benar-benar terealisasi selama tiga hari di Klaten. Mulai hari Sabtu hingga Senin atau tanggal 15 hingga 17 Desember 1945. Dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai organisasi perempuan. Mulai dari PERWANI, WANI, Muslimat, Aisyah, Pemuda Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa (kowani.or.id/organisasi/31), PB Aisyiyah, PB Persatuan Wanita Taman Siswa, (Ai Rospirawati, 2013:3), dan lainnya.

Walau KWI I berhasil terselenggara di Klaten, namun hasil umum dari diadakannya kongres pada masa itu masih dianggap kurang memuaskan. Utusan-utusan dari berbagai organisasi yang dulunya sempat menjalin persatuan itu belum dapat sepenuhnya untuk menjalin persatuan lagi. Satu-satunya hasil yang secara umum paling memuaskan adalah mempekuat munculnya kesadaran untuk bersatu dari para pengurus dan anggota organisasi PERWANI dan WANI.

Dua organisasi perempuan yang tergolong besar inilah yang kemudian bersatu dan melebur organasi keduanya menjadi satu dan baru. Adapun nama yang digunakan untuk menyebut organisasi ini adalah *Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI)*. Sedangkan pemimpin pertamanya adalah Ibu Sri Mangunsarkoro.

Atas bersatu dan meleburnya PERWANI dan WANI menjadi PERWARI ini tidak lepas dari manfaat diselenggarakannya KWI I yang dipimpin oleh S.Kartowiyono (Rospirawati, 2013:3, Brown, 2004:33). Sosok yang satu ini adalah penggagas utama terselenggaranya KPI I di Yogyakarta pada tahun 1928. Nama lain beliau sering tertulis S. Kartowiyono, Suyatin Kartowiyono, Sujatien Kartowijono, Suyatin, Sujatin, Soejatin, dan Soejatien. Pada masa KPI I, sosok inilah yang menjadi satu di antara penggagas kongres perempuan di organisasi Putri Indonesia cabang Yogyakarta.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Gagasan yang tersatu dari organisasi yang diketuainya saat masih belum menikah itu dibawa kepada Ny. Soekonto dan Ny. Hadjar Dewantara yang akhirnya berhasil menyelenggarakan KPI I yang dipimpin oleh Ny. Soekonto. Soejatien yang awalnya menawarkan diri untuk menjadi sekretaris itu didaulat menjadi *Peningmeesteres* II (bagian keuangan/bendahara), sedangkan Ny. Hadjar Dewantara menjadi *Lid. / Commissaresse* (Blackburn, 2007:14).

KPI I lantas berlanjut hingga KPI IV dan bubar setelah Pemerintah Militer Jepang mengeluarkan larangan terhadap semua jenis perkumpulan dan organisasi politik yang dibentuk sebelum kedatangan Jepang. KPI V yang rencanya akan diselenggarakan di Surabaya itu tidak pernah terlaksana. Namun demikian, kaum perempuan yang berjuang melalui pembentukan KPI I-IV itu masih tetap mempertahankan semangat mereka untuk mempersatukan gerakan perjuangan perempuan se-Indonesia. Adapun satu di antara mereka adalah Soejatien atau S. Kartowoyono yang pada KWI I di Klaten itu menjadi ketua kongres wanita nasional yang pertama sejak Indonesia merdeka.

KWI I yang berlangsung dalam situasi mencekam akibat peperangan mempertahankan kemerdekaan itu memang dianggap kurang memuaskan bagi sebagian orang dan pihak tertentu. Namun dampak dari kongres yang diurus oleh S. Kartowiyono dan perempuan-perempuan lainnya itu pantas diacungi jempol sebagaimana KPI I yang juga tidak secara langsung mempersatukan gerakan perempuan se-Indonesia. Melalui *Perikatan Perempuan Indonesia* (PPI) yang kemudian berganti menjadi *Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia* (PPII) dan kongres-kongres pada tahun-tahun berikutnya itulah peranan KPI menampakkan kesuksesannya. KPI I tidak secara langsung dalam upaya mempersatukan gerakan perjuangan perempuan se-Indonesia melalui organisasi atau

perkumpulan. KPI I dan kongres-kongres berikutnya membutuhkan berbagai tahapan dalam melakukan pendekatan dan pemahaman terhadap berbagai gerakan organisasi perempuan se-Indonesia. Seiring keberhasilan dan dinamika pendekatan sekaligus pemahaman itulah KPI I baru diakui kesuksesannya oleh bangsa Indonesia dan Internasional sekaligus para penyejarah gerakan perempuan secara nasional.

Tidak berbeda dengan KPI I, penyelenggaraan KWI I juga membutuhkan berbagai tahapan dalam melakukan pendekatan dan pemahaman seputar pentingnya mempersatukan gerakan perempuan Indonesia melalui organisasi nasional. Diadakannya KWI I itu bukan ditujukan untuk melebur organisasi-organisasi perempuan se-Indonesia menjadi satu organisasi yang tunggal dan adidaya. Namun hanya untuk mempersatukan gerakan perjuangan perempuan Indonesia melalui organisasi mereka dan organisasi yang bersifat nasional dan dapat digunakan untuk menyambung kebersamaan dan kekompakan dalam berjuang.

Fakta persatuan dan peleburan yang dilakukan organisasi PERWANI dan WANI itu adalah kehendak dari kedua organisasi yang menyadari arti pentingnya peleburan. Walau kehendak peleburan itu terjadi setelah mengikuti penyelenggaraan KWI I, namun putusan KWI I tidak mengharuskan kedua organisasi itu untuk melebur dan membentuk organisasi baru bernama PERWARI. Justru dengan berdirinya PERWARI itulah putusan KWI I semakin dapat dilaksanakan atas bantuan-bantuan yang diberikan PERWARI. Bantuan-bantuan PERWARI itupun tampak dalam berbagai rupa bantuan hingga menjadi satu di antara daya tarik organisasi-organisasi perempuan lainnya untuk bergabung dalam KWI.

Walaupun KWI I berhasil menginspirasi terbentuknya PERWARI, namun kongres ini tidak berhasil membentuk badan khusus yang memiliki fungsi utama mengurus kegiatan dan penyelenggaraan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

kongres. Sehingga pasca terselenggaranya KWI, tindak lanjut keputusan hanya terkonsentrasi pada pembentukan PERWARI.

Pada awal tahun 1946, tindak-lanjut KWI I itu pun mulai mendapat perhatian dari para anggota PERWARI dan penyelenggara kongres. Perhatian itu mengarah pada peran pentingnya keberadaan badan khusus untuk kongres wanita Indonesia sebagaimana PPI/PPII untuk Kongres Perempuan Indonesia (KPI). Sehingga badan yang diharapkan segera terbentuk itu dimaksudkan untuk mengurus kelanjutan kongres-kongres wanita pada tahun-tahun berikutnya.

Pada bulan Februari 1946, pembahasan badan itupun mencapai titik puncaknya. Sebuah Konferensi Wanita Indonesia lantas digelar untuk menindak-lanjuti kongres yang berlangsung pada 15-17 Desember 1945 itu. Melalui konferensi yang berlangsung sejak tanggal 24 hingga 26 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah, itulah yang kemudian terdapat keputusan untuk segera membentuk suatu badan yang diberi nama KOWANI. Anggota awal KOWANI ini terdiri dari organisasi PERWARI, PPI, Wanita Kristen Indonesia, dan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) Bagian Wanita. Adapun ketua KOWANI pertama dijabat oleh Ny. Supardjo. Selain itu, keputusan konferensi juga mengambil mosi menuntut kemerdekaan sepenuhnya dan berdiri seratus persen di belakang Pemerintah (Pramoedya, 1999:89-100).

Badan yang bernama KOWANI (sebuah nama yang dibentuk dari akronim atau penyingkatan lain dari *Kongres Wanita Indonesia*) ini hampir memiliki tugas yang sama sebagaimana PPI/PPII/BPKPI. Jika PPI/PPII/BPKPI memiliki tugas utama mengurus *Kongres Perempuan Indonesia* (KPI), maka KOWANI memiliki tugas utama untuk mengurus *Kongres Wanita Indonesia* (KWI) pada masa-masa berikutnya. Perbedaan antara KWI dan KOWANI ini berada pada nama kongres dan kepengurusan atau keorganisasian.

Kelak, antara KWI dan KOWANI ini sering dipersamakan oleh sebagian anggapan dan pernyataan dari seseorang atau pihak tertentu. Hingga pada tahun-tahun selanjutnya, seringkali KWI disebut juga dengan Kongres KOWANI. Hal ini merujuk acara kongres yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang menjadi anggota KOWANI.

Penggunaan nama Kongres KOWANI itu sendiri, digunakan oleh KOWANI sejak Kongres Wanita Indonesia ke-II yang berlangsung di Madiun pada bulan Juni 1946. Namun demikian, penamaan KOWANI itu terpaksa berhenti hingga kongres ke-IV yang berlangsung di Solo pada tahun 1948.

Sejak kongres yang mengeluarkan putusan penolakan mosi dari Muslimat, Aisyiah, dan GPII itulah nama kongres berubah. Hal ini lebih disebabkan adanya keputusan dari forum Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia yang berlangsung pada tahun 1949 di Yogyakarta. Di antara putusan permusyawaratan itu menghendaki agar nama Kongres Wanita Indonesia tidak boleh disingkat lagi menjadi KOWANI. Keputusan permusyawaratan itu lantas dikukuhkan dalam keputusan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1950.

Sejak keputusan kongres di tahun 1950 itulah nama KOWANI tidak lagi digunakan untuk menamai kongres. Adapun nama kongres akan disebutkan secara lengkap dengan nama Kongres Wanita Indonesia. Namun akhirnya, penamaan ini hanya berlangsung hingga tahun 1961. Sebab pada putusan kongres itu, nama KOWANI sudah dapat diterima dan digunakan lagi.

Penamaan kongres wanita Indonesia pun menggunakan nama KOWANI lagi sebagaimana kongres pada tahun 1946 hingga 1950. Hal ini berlanjut hingga kongres-kongres yang berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014, misalnya, penamaan KOWANI masih digunakan untuk menyebut Kongres Wanita Indonesia, Pada kongres yang berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, itu disebutkan sebagai Kongres ke-XXIV KOWANI.

Untuk mengetahui lebih jauh seputar kongres, konferensi, dan permusyawaratan itu, dalam sub-sub bab berikut ini akan dibahas secara singkat.

D. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1945

Sejak Indonesia merdeka, kongres perempuan Indonesia pertama kali diselenggarakan di Klaten, Jawa Tengah. Kongres yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Desember 1945 ini dapat disebut sebagai Kongres Perempuan Indonesia ke-V dan Kongres Wanita Indonesia ke-I.

Jika disebut sebagai kongres ke-5/V, maka hitungannya dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung pada tahun 1928 di Yogyakarta (tidak termasuk kongres PPI/PPII). Namun jika disebut sebagai kongres ke-1/I, hitungannya dimulai pada Kongres Wanita Indonesia yang berlangsung di Klaten ini.

1. Penyelenggaraan Kongres

Kongres ini diprakarsai oleh beberapa tokoh gerakan perempuan di Yogyakarta dan organisasi PERWANI Yogyakarta. Adapun kepengurusannya terdiri dari:

Ketua : Ny. M.D. Hadiprabowo

Wakil Ketua : Ny. Reksosiswo

Penulis : Ny. Sukono

Bendahari : Ny. Hertog

Pembantu-Pembantu : Ny. Hadikusumo Ny. D. Susanto Ny.
Hadiwinoto Ny. Mudjono

Dalam susunan kepanitian Kongres Wanita Indonesia I ini, diketuai oleh Suyatin Kartowiyo. Namun dalam suber yang berbeda, kongres diketuai oleh Ny. D. Susanto. Adapun para utusan-utusan

yang hadir dalam kongres berasal dari organisasi-organisasi berikut ini:

- a) PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia).
- b) WANI (Wanita Negara Indonesia).
- c) PPI (Pemuda Putri Indonesia).
- d) PB Aisyiyah.
- e) PB Persatuan Wanita Taman Siswa.

Kongres perempuan pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki tiga tujuan utama. Di antaranya;

- a) Mempersamakan ideologi.
- b) Membentuk Badan Persatuan.
- c) Merundingkan hal-hal yang perlu.

2. Keputusan Kongres

Hasil akhir atau keputusan Kongres Wanita Indonesia ini dapat disimpulkan dalam dua poin utama keputusan-keputusan yang ada. Yaitu, peleburan sekaligus pembentukan (fusi) organisasi baru dan perumusan program-program urgen.

a) Melebur PERWANI dan WANI menjadi satu dengan nama *Persatuan Wanita Republik Indonesia* (PERWARI) yang diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro.

Perkumpulan ini adalah perkumpulan sosial yang berazaskan Ketuhanan, Kebangsaan dan Kerakyatan, tetapi kepada para anggotanya diberikan pendidikan politik umum, agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai ibu bangsa.

b) Menetapkan urgensi program sebagai berikut:

(1) Program kerja jangka pendek yaitu: mengadakan latihan persenjataan, dapur umum dan lain-lain.

(2) Program kerja jangka panjang yaitu: bidang sosial, pendidikan dan lain-lain.

E. Konferensi Wanita Indonesia

Konferensi Wanita Indonesia ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Kongres Wanita Indonesia yang berlangsung pada 15-17 Desember 1945 yang berlangsung di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kongres tu belum terbentuk suatu badan khusus yang memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan dan mengelola kongres. Sehingga pada konferensi yang berlangsung pada tanggal 24-26 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah, inilah badan khusus itu akan dibicarakan.

1. Penyelenggaraan Konferensi

Konferensi Wanita Indonesia digelar pada tanggal 24 hingga 26 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah (Pramoedya, dkk., 1999:98-100). Konferensi ini diprakarsai oleh Ny. Suwarni Pringgodigdo dan Ny. Suyatin Kartowiyono. Selain itu, organisasi PERWARI yang pada masa itu dipimpin oleh Ny. Sri Mangunsarkoro, juga turut membantu pelaksanaan konferensi.

2. Keputusan Konferensi

1) Mendirikan badan gabungan yang diberi nama Badan Kong-res Wanita Indonesia (KOWANI) yang diketuai oleh Ny. Supardjo dan berkedudukan di Solo.

2) Cabang-cabang dapat dibentuk di tempat-tempat yang perlu.

3) Susunan Pengurus Badan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI):

Ketua : Ny. Soepardjo Wakil

Ketua-I : Ny. S. Kartowijono Wakil

Ketua-II : Ny. Sutarman Wakil

Ketua-III : Ny. S. Sukemi

Penulis : Ny. Sukarso

Bendahari: Ny. Purwoatmodjo

4) *Angota KOWANI*

— PERWARI

— Pemuda Putri Indonesia (PPI).

— Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI).

— Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) bagian wanita.

5) Menetapkan urgensi program di dalam bidang pembelaan sosial, pendidikan, ekonomi, penerangan dan lain-lain dengan membentuk badan-badan keakhlian antara lain:

* Sosial : dengan pengurus Dr. Ani Sosrohadi-kusumo dan Ny. Hadinoto.

* Pendidikan : dengan pengurus Ny. Sukartini

* Kesehatan : dengan pengurus dr. Mudinem

* Politik/ Ekonomi : dengan pengurus Ny. Suwarni Pringgodigdo

* Hukum/adat : dengan pengurus Ny. Maria Ulfah Santoso SH

* Kebudayaan/Kesenian : dengan pengurus Ny. Sri Mangunsarkoro

* Perhubungan : dengan pengurus Nn. Popy Saleh (Ny. St. Syahrir)

6) Mengadakan badan, Pusat Tenaga Perjuangan Wanita Indonesia (PTPWI) yang berkedudukan di Yogyakarta dan dipimpin oleh satu Komando dengan menunjuk Ny. Sri Mangunsarkoro sebagai pimpinannya.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

PTPWI bersifat sementara dan merupakan badan perjuangan semata-mata untuk menghimpun dan memusatkan tenaga dengan perjuangan yang membantu pemerintah untuk menegakkan Republik Indonesia, dan terdiri dari organisasi-organisasi perjuangan yang bersifat kelaskaran, keagamaan, perhubungan, sosial.

Mengenai PTPWI ini telah diuraikan pada bagian A. Bidang Pertahanan/Keamanan.

7) Kewajiban KOWANI yang penting:

- Menyelenggarakan Kongres.
- Mengadakan pertemuan-pertemuan antara pengurus-pengurus besar organisasi-organisasi yang tergabung dalam KOWANI dan antara badan-badan yang dibentuk oleh KOWANI.
- Mewakili pergerakan perempuan Indonesia keluar dan kedalam negeri.

8) Menetapkan mosi menuntut Kemerdekaan 100% dan berdiri di belakang, Pemerintah.

F. Kongres KOWANI Tahun 1946

Setelah Konferensi Wanita Indonesia mengeluarkan keputusan pembentukan badan Kongres Wanita Indonesia bernama KOWANI, maka sejak tahun ini kongres mulai menggunakan nama Kongres KOWANI.

1. Penyelenggaraan Kongres

- a. Kongres diadakan di Madiun pada tanggal 14 – 16 Juni 1946.
- b. Panitia Kongres diketuai oleh Ny. Susanto Tirtoprojo.
- c. Kongres di hadiri utusan-utusan dari 14 organisasi, yaitu:
 - 1) Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari)

- 2) Pemuda Putri Indonesia (PPI)
- 3) Pejuang Putri Republik Indonesia (PPRI)
- 4) Muslimat
- 5) Aisyiah
- 6) Gerakan Pemuda Islam Indonesia Putri (GPII Putri)
- 7) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PV(KI))
- 8) Barisan Buruh Wanita (BBW)
- 9) Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI) bagian Wanita
- 10) Pemuda Indonesia Maluku (PIM) bagian Wanita
- 11) Angkatan Muda Katholik Republik Indonesia (AMKRI) bagian Wanita
- 12) Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) bagian Wanita
- 13) Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) bagian Wanita
- 14) Laskar Wanita Indonesia (LASWI)

2. Keputusan-Keputusan Kongres

1) KOWANI menjadi badan federasi yang merupakan badan legislatif, dipimpin oleh Dewan Pimpinan yang terdiri dari wakil-wakil organisasi anggota.

2) Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari diadakan Badan Pekerja, yang berkedudukan di Yogyakarta.

3) Pimpinan KOWANI ditetapkan sebagai berikut:

a) *Dewan Pimpinan Pusat.*

Ketua Umum : Ny. Suyatin Kartowiyono

Wakil Ketua : Ny. Sutarman

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Anggota-anggota : Ny. Sugeng Winotosastro

Ny. Aisyah Hilal

Ny. Djuriah Ny. Sri Mentek Ny. Awibowo

Ny. Tuti Harahap SH

Ny. Kwari Sosroatmodjo

Ny. Brotowirdoyo

Ny. Sukarso Ny. Hariyati Ny. Hanah

Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo

Mangunpuspito

Ny. Sutiyah Suryohadi

b) *Pengurus Badan Pekerja.*

Ketua : Ny. Burdah Yusupadi

Penults : Ny. Sukirno

Bendahari : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

c) Pimpinan dilengkapi dengan pengurus bidang-bidang atau bagian-bagian sebagai berikut:

(1) Bagian Penerangan : Ny. Dr. Hurustiati Subandrio

Nn. Yetti Zain (Drg. Ny. Yetti Noor)

Ny. S. Suryohadi

Ny. Utami Suryadarma

(2) Bagian Perjuangan : Ny. S. Pudjobuntoro

Ny. Gusti Djohan

Ny. Hadinegoro

Ny. Hartijati dan lain-lain

(3) Bagian Sosial : Ny. Dr. Sulianto

Ny. Aisyah Hilal

Ny. Wachidal Sukidjo, dan lain-lain

(4) Bagian Pendidikan : Nn. Sukartini

Nn. Suritinah, dan lain-lain

Selain keputusan-keputusan di atas, KOWANI juga memutuskan untuk mengiri utusan ke All ASEAN Women Conference. Adapun utusan atau delegasi itu ter-diri dari Ny. Maria Ulfah Santoso SH, Nn. Yetti Zain (Ny. Yetti Noor) dan Nn. Sutijah (Ny. S. Suryohadi).

Pada tanggal 17 Desember 1946, organisasi cabang dari PERWANI berhasil dibentuk di Banjar-masin, Kalimantan. Organisasi yang diketuai oleh Ny. N. Djohansyah ini mengkoordinir organisasi-organisasi cabang di Banjarmasin dan Hulu Sungai.

G. Kongres KOWANI Tahun 1947

Kongres yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah, ini masih menggunakan nama Kongres KOWANI. Hal ini merujuk keputusan Konferensi Wanita Indonesia pada bulan Februari 1946 di Solo.

1. Penyelenggaraan Kongres

a. Untuk persiapan Kongres, diangkat Ny. Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito sebagai Ketua Harian. Ny. Padmomarwoto sebagai Sekretaris dan Ny. Aisyah Hilal sebagai Bendahara atau bagian keuangannya.

b. Panitia Kongres di Magelang diketuai oleh Ny. Sumantri. Anggotanya pengurusnya: Ny. Marjaban, Ny. Sukatini, Nn. Darsini, Ny. Yudodifiroto, Ny. Partolegowo, dan lain-lain.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

c. Tujuan Kongres adalah:

- 1) Meninjau bentuk KOWANI dengan cabang-cabang di daerah.
- 2) Meninjau kembali program kerja dan meneliti hasil pekerjaan selama setahun.

d. Keanggotaan KOWANI tidak berubah.

e. Susunan Pengurus KOWANI ke-I

Ketua : Ny. Sunaryo Mangunpuspito

Wakil Ketua : Ny. Maria Ulfah Santoso SH

Penulis I : Ny. Tahir

Penulis II : Ny. Brotowerdojo

Bendahari : Ny. Sugeng Winotgsastro

Pembantu-pembantu : Ny. Aisyah Hilal

Ny. Wachidal Sukidjo.

2. Keputusan-Keputusan Kongres

- 1) Badan Pekerja dihapuskan.
- 2) KOWANI dipimpin oleh Dewan Pimpinan.
- 3) Dalam Dewan Pimpinan dibentuk Sekretariat Umum, yang mencakup seksi-seksi untuk menampung bagian-bagian dari badan pekerja.
- 4) Sekali 3 bulan atau bila perlu diadakan Dewan Permusyawaratan yang dihadiri oleh DPP lengkap dan pimpinan-pimpinan dari organisasi-organisasi yang menjadi anggota.
- 5) Mengirimkan resolusi kepada “De Nederlandsche Vrouwen beweging” untuk menyatakan simpati Wanita Indonesia terhadap aksi kaum Wanita Belanda yang menentang pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia.

Selain keputusan-keputusan di atas, KOWANI juga memutuskan untuk mengirim utusan *ke All Indian Women Conference* di Madras, India, pada bulan Nopember 1947 yang terdiri dari: Ny. Siti Sukaptinah Sunarjo Mangunpuspito, Ny. Sulianti Saroso dan Ny. Utami Suryadarma.

Pada tanggal 16 – 18 Juni 1947 PERWANI mengambil prakarsa untuk mengadakan konferensi Wanita seluruh Kalimantan. Dalam konferensi itu berhasil membentuk beberapa keputusan, yang di antaranya:

- 1) Membentuk Panitia Kongres Wanita Kalimantan
- 2) Mengirim delegasi Wanita ke tanah merdeka
- 3) Mendesak pada anggota-anggota partai agar istri dan putri mereka dianjurkan menjadi anggota persatuan wanita.
- 4) Memberantas kawin paksa dan perkawinan di bawah umur.

H. Kongres KOWANI Tahun 1948

Kongres yang berlangsung di Solo ini juga masih menggunakan nama KOWANI yang merujuk keputusan Konferensi Wanita Indonesia pada bulan Februari 1946.

1. Penyelenggaraan Kongres

Kongres KOWNAI berlangsung di Solo. Panitia penyelenggaraan diketai oleh oleh Ny. Kusban. Dalam kongres tahun ini mengambil tujuan: Meninjau gerak dan usaha KOWANI untuk mengatasi perpecahan yang timbul sebagai akibat “Naskah Renville” yang terasa pengaruhnya pada KOWANI karena KOWANI mempunyai anggota dari pelbagai aliran.

2. Keputusan-Keputusan Kongres

- 1) Organisasi.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

a) KOWANI tetap dipimpin oleh Dewan Pimpinan dan sebagai Ketua dipilih Ny. Supeni Pudjobuntoro (sekarang Ny. S. Achmad Natakusumah), dan Wakil Ketua Ny. Maria Ulfah Santoso SH.

b) Sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretariat Umum.

c) Di samping Sekretariat Umum, dibentuk badan-badan otonom yang mengadakan perluasan secara vertikal bagi usaha-usaha jangka panjang, misalnya tentang urusan hukum waris dan perkawinan, urusan perburuhan perempuan, *hygiene* sosial dan urusan pemberantasan buta huruf.

d) Azas KOWANI adalah:

(1) Menebalkan persaudaraan antara organisasi-organisasi perempuan.

(2) Pancasila Negara Republik Indonesia.

e) Tujuan:

(1) Menegakkan Negara Republik Indonesia.

(2) Membawa perempuan Indonesia ke arah terlaksananya UUD pasal 27 (persamaan hak warga Negara).

(3) Menjelmakan dan melaksanakan keadilan sosial dan perdamaian dunia.

f) Usaha-usaha:

(1) Ke dalam:

– Mempersatukan tenaga perempuan Indonesia dalam ikut menyelesaikan revolusi Nasional.

– Mendidik perempuan Indonesia ke arah terwujudnya tujuan KOWANI.

(2) Ke luar:

– Selalu memelihara hubungan dengan Dunia Luar, terutama dengan Women Internasional Democratie Federation (WIDF).

d. Mengadakan seruan dan ajakan:

1) Ke dalam:

a) Menyerukan kepada rakyat se-Kalimantan dan Indonesia Timur umumnya, kaum perempuan khususnya untuk meneruskan perjuangan Nasional.

b) Mendukung dan memperkuat protes DPP KOWANI yang disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Delegasi Belanda, Delegasi Indonesia, WIDF tentang:

Penembakan anak-anak pandu oleh serdadu-serdadu Imperialis Belanda pada tanggal 16 – 17 Agustus 1948 di Pegangsaan Jakarta.

Blokade Belanda yang sangat kuat.

2) Terhadap Pemerintah:

a) Mendukung dan memperkuat protes Pemerintah RI kepada Dewan Keamanan PBB terhadap penembakan di Jakarta.

b) Membenarkan pendirian Pemerintah untuk tidak mulai berunding dengan Belanda sebelum immunitet (kekebalan) terjamin sebagai pelaksanaan perjanjian (*truceagreement*) dan hak demokrasi.

c) Supaya Pemerintah menindak pengacau-pengacau ekonomi.

3) Ke luar Negeri:

a) Melalui WIDF menyampaikan protes kepada Dewan Keamanan PBB tentang tindakan-tindakan imperialis Belanda.

b) Mengajak semua ibu dari segala Bangsa untuk selalu menjunjung tinggi dan mencintai perikemanusiaan sebagai sendi perdamaian dunia.

e. Lain-lain:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Aisyiyah, Muslimat dan GPII Putri mengusulkan: Agar KOWANI merupakan badan kontak (Contact lichaam) dan supaya semua keputusan diambil dengan suara bulat, Karena kongres tidak dapat menerima usul ini, Aisyiah, GPII Putri dan Muslimat ke luar dari keanggotaan KOWANI.

Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting setelah kongres KOWANI tahun 1948.

- a. Pemberontakan Madiun (tanggal 18 September tahun 1948).
- b. Serbuan tentara Belanda ke Ibu Kota Republik Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1948.
- c. Larangan bersidang dan berkumpul oleh tentara pendudukan Belanda.
- d. Dalam rapatnya yang diadakan pada bulan Mei 1949, KOWANI mengeluarkan pernyataan (*statement*) yang penting. Pernyataan tersebut merupakan suatu pemberitahuan adanya permusyawaratan organisasi-organisasi perempuan seluruh Indonesia, yang karena keadaan perang sukar berhubungan satu sama lain.

Pernyataan tersebut didasarkan pada pendapat bahwa:

- 1) Gerakan Wanita merupakan salah satu kekuatan dan alat perjuangan.
- 2) KOWANI adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Perempuan.

Adapun isi pernyataan antara lain adalah:

- 1) KOWANI harus mengambil prakarsa untuk membangun kembali dan mempersatukan organisasi-organisasi perempuan seluruh Indonesia untuk melanjutkan perjuangan.
- 2) Mengusahakan terselenggaranya kongres perempuan seluruh Indonesia.

3) KOWANI akan mengadakan persiapan di kalangan organisasi-organisasi anggota supaya menghubungi cabang-cabangnya di daerah-daerah.

4) Menyusun persiapan untuk permusyawaratan di Yogyakarta. Maksud permusyawaratan adalah:

a) Membawa perempuan Indonesia ikut serta dalam perjuangan Bangsa.

b) Meningkatkan perjuangan perempuan.

c) Mempererat hubungan antara pergerakan-pergerakan wani-ta seluruh Indonesia.

5) Permusyawaratan harus mencakup:

a) Pergerakan perempuan merupakan faktor yang penting dalam perjuangan Bangsa.

b) Emansipasi rakyat harus disertai emansipasi perempuan.

c) Satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan pergerakan wa-nita adalah Kemerdekaan Bangsa yang berdaulat.

Dalam masa 1945-1950 KOWANI mempunyai cabang-cabang antara lain di Bogor, Solo, dan Kediri. Demikianlah kegiatan-kegiatan Pergerakan Perempuan dalam masa Perang Kemerdekaan. Sesuai dengan, irama perjuangan dan panggilan waktu Perempuan Indonesia ikut berperan dalam pembelaan Negara Tanah Air. Meskipun demikian tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suatu kekuatan sosial dalam ikut membangun dan mengisi Negara Indonesia Merdeka.

Kongres Wanita se Kalimantan pertama diadakan pada tanggal 17 — 20 Februari 1948 di Kandangan dan dihadiri oleh utusan dari KOWANI Pusat.

Salah satu keputusan penting dalam Kongres ialah: tergabungnya semua organisasi Wanita se-Kalimantan dalam satu federasi:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (PERTIWI) dengan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Ny. Gusti Djohansyah Ketua Dewan Pimpinan
- b. Ny. GT. Hidajat Pembantu-pembantu.
- c. Ny. GT. Mastoto

PERTIWI hampir meliputi hampir seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dalam proses perkembangan PERWANI di Kalimantan, maka pada konperensi PERWANI tanggal 5 dan 6 Pebruari 1950, PERWANI dilebur dalam PERWARI.

I. Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia

Selain *Kongres Wanita Indonesia*, ada pula *Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia* (PWSI). PWSI ini pernah terselenggara di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus hingga 2 September 1949.

1. Penyelenggaraan Permusyawaratan

Forum PWSI ini dihadiri oleh 82 organisasi perempuan dari berbagai daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan PWSI ini diketuai oleh Ny. Burdah Yusupadi. Adapun anggotanya, meliputi: Ny. Siti Sukaptinah, Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. Supeni, Ny. S. Ahmad Natakusumah dan Ny. Th. Walandouw.

Dalam permusyawaratan ini membahas beberapa hal sebagaimana berikut ini:

* *Fungsi daripada pergerakan wanita di dalam perjuangan rakyat* oleh Ny. S. Pudjobuntoro (Ketua DPP KOWANI).

* *Hak dan kewajiban wanita sebagai Warga Negara* oleh Ny. Badilah Zuber dari Majelis Aisyiah.

* *Usul-usul kepada kongres KOWANI* oleh Ny. Lasmijah Tobing (Ny. Lasmijah Hardi) dari pekerja perempuan Indonesia Jakarta.

2. Keputusan-Keputusan Permusyawaratan

Hasil atau keputusan PWSI pada masa itu, diantaranya:

a. Merumuskan tujuan perjuangan perempuan.

Tujuan perjuangan perempuan adalah memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan yang penuh bagi seluruh Indonesia.

b. Membentuk Badan Kontak bemama "*Permusyawaratan Wanita Indonesia*".

Badan Kontak *Permusyawaratan Wanita Indonesia* (PWI) ini berkedudukan di Yogyakarta dan yang menjadi anggota Badan Kontak tersebut adalah:

(a) Organisasi Wanita yang berpusat.

(b) Bagian-bagian dari organisasi yang merupakan organisasi bagian wanita.

(c) Organisasi perempuan setempat (lokal).

Badan Kontak merupakan Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum yang dipilih oleh permusyawaratan, pembantu-pembantu di mana perlu ditunjuk oleh Sekretaris Umum (Sekum) dan wakilnya. Sekretaris bertugas dalam hal: Surat menyurat, Dokumentasi, Keuangan, dan Penerangan.

Mengingat bahwa Badan Kontak ini masih baru dan menjadi sekretariat yang masih bersifat administratif sekaligus menjadi merupakan biro infor-masi, maka KOWANI masih tetap dianggap perlu ada. Sebab KOWANI merupakan Badan Federasi yang bersifat legislatif dan eksekutif.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Adapun pengurus Badan Kontan ini terdiri dari:

Ketua	: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso
Wakil Ketua	: Ny. Artinah Samsudin (merangkap Sekretaris)
Sekretaris	: Ny. Artinah Samsudin
Bendahara	: Ny. Th. Walandouw
Pembantu	:
	* Ny. DM. Hadiprabowo
	* Nn. Hariyati
	* Ny. Burdah Yusupadi
	* Ny. Supeni Pujobuntoro
	* Ny. Aisyah Hilal
	* Ny. D. Susanto
	* Ny. Sunaryo Mangunpuspito
	* Ny. Brotowardoyo
	* Ny. Mr. Tuti Harahap

Organisasi Anggota :

- Perkiwa
- Muslimat
- Wanita Taman Siswa
- Budi Istri Bandung
- Persatuan Wanita Pekalongan
- Putri Norpowandowo
- PERWARI Pontianak, PERWARI Pangkal Pinang

- Partai Wanita Rakyat
- PSII Bagian Wanita
- Aisyiah
- Persatuan Wanita Katolik Indonesia
- Persatuan Wanita Kristen Indonesia
- Pemuda Putri Indonesia
- Gerakan Wanita Sedar
- Putri Budi Sejati
- dan organisasi-organisasi lainnya.

c. Mengakui dasar-dasar pergerakan wanita Indonesia ialah: Ketuhanan Yang Maha Esa: Perikemanusiaan, Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan, dan Kesejahteraan sosial.

d. Dalam Bidang Hukum, diperjuangkan:

(1) Agar dalam konstitusi RIS dicantumkan:

(a) Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi tiap warga Negara.

(b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga Negara.

(2) Adanya peraturan undang-undang kerja di RIS yang melindungi pekerja pada umumnya dan pekerja perempuan khususnya.

Keputusan ini dikirimkan kepada delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO (Byeenkomst Federal Overleg) untuk diperjuangkan di KMB (Konperensi Meja Bundar) dan salinannya kepada pers dan gerakan-gerakan perempuan seluruh dunia.

e. Dalam Bidang Sosial, diperjuangkan:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- * Mengurus keluarga tawanan, keluarga korban perjuangan.
 - * Membantu persiapan penerimaan dan lapangan kerja untuk tawanan yang sudah atau akan dibebaskan.
 - * Memberantas perbuatan yang merusak jiwa dan kesehatan rakyat.
 - * Memelihara kesehatan rakyat dengan biro konsultasi rakyat.
 - * Mengadakan tempat penitipan anak.
- f. Dalam Bidang Ekonomi, diperjuangkan:
- (1)Memperbanyak hasil produksi.
 - (2) Memperbanyak koperasi pemakai (*Verbruiks-Coope-ratie*) dan bank-bank koperasi.
- g. Dalam Bidang Pendidikan, diperjuangkan:
- (1)Mengadakan rencana 3 tahun untuk pendidikan perempuan termasuk pemberantasan buta huruf, kursus-kursus tentang pengetahuan umum, kenegaraan, kemasyarakatan dan lain-lain.
 - (2) Mengadakan bea siswa (*studie fonds*) untuk perempuan.
- h. Mengadakan Resolusi padatanggal 30 Agustus 1949, sebagai berikut:
- (1)Menuntut Kemerdekaan yang penuh dengan tidak bersyarat dalam tahun ini juga (1949).
 - (2) Memperkuat resolusi kongres Pemuda Indonesia tentang penarikan tentara Belanda sebelum pengakuan kedaulatan dan mengakui hanya satu Bendera Merah Putih dan satu lagu Indonesia Raya.
 - (3) Menuntut dibebaskannya tawanan-tawanan akibat perjuangan Kemerdekaan.

(4) Sanggup melanjutkan perjuangan rakyat Indonesia. Resolusi ini juga dikirim kepada delegasi-delegasi Republik Indonesia dan BFO diperjuangkan di KMB dan UNCI (United Nation Commision on Indonesia).

i. Mengadakan Protes.

Pengadaan protes seputar:

* Mendengarkan laporan-laporan dari utusan-utusan mengenai antara lain:

(1) Pembunuhan di Solo terhadap pegawai-pegawai PMI dan pengungsi-pengungsi.

(2) Pembunuhan 40.000 orang yang sampai sekarang belum diselesaikan di Sulawesi Selatan.

(3) Peristiwa Gunung Sumping tentang penembakan terhadap anak-anak dan perempuan di pasar Kembang (Solo).

* Memprotes sekeras-kerasnya perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh tentara Belanda yang sangat her-tentangan dengan perikemanusiaan dan

* Menuntut hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakuk-an keganasan itu.

* Protes ini disampaikan pula kepada delegasi-delegasi RI dan BFO untuk diteruskan kepada Pemerintah Belanda serta kepada UNCI, tembusan kepada pers dan gerakan-gerakan Perempuan seluruh Indonesia.

Dalam proses penyelenggaraan permusyawaratan yang diprakarsasi KOWANI itu para utusan dari berbagai organisasi perempuan sempat mendapat hambatan selama perjalanan. Dalam situasi yang masih mencekam akibat Agresi Militer Belanda II sejak 19 Desember 1948 itu para utusan yang berangkat ke Yogyakarta

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

sempat dicegat dan digeledah oleh tentara-tentara Belanda. Razia yang dilakukan tentara-tentara itu terjadi pada daerah-daerah di sepanjang jalur perjalanan menuju Yogyakarta yang sempat dikuasai kembali oleh Belanda.

Sebagai contohnya adalah peserta kongres atau permusyawaratan dari Jakarta yang dipimpinn Ny. Abu Hanifah. Mereka berangkat dari Jakarta dengan naik kereta api. Pada saat kereta api melewati daerah yang diduduki Belanda dan berhenti di stasiun, seluruh gerbong kereta api digeledah dan para penumpangnya diinterograsi oleh tentara Belanda. Hal semacam ini juga yang dialami para peserta yang berangkat dari luar pulau Jawa (Suhatno, 2006:73).

Pergerakan Perempuan pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin

GERAK juang kaum perempuan Indonesia pada masa ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pada tahun 1950 hingga awal 1959 dan Akhir 1959 hingga akhir pemerintahan Indonesia di bawah presiden Sukarno. Pada dua masa ini lebih terkenal dengan sebutan masa demokrasi parlementer atau liberal dan masa demokrasi terpusat atau terpimpin.

A. Republik Indonesia Serikat

Setelah selesai perang kemerdekaan dan berlakunya berbagai peristiwa bersenjata selama Republik Indonesia Serikat (RIS), akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai akibat perang yang berlangsung sekian lama, banyak prasarana yang hancur dan keadaan sosial ekonomi pada umumnya sangat buruk. Timbul pula gangguan keamanan di beberapa daerah oleh gerombolan-gerombolan bersenjata yang bekerja sama dengan subversi asing. Hal ini semua sangat menghambat perbaikan sosial ekonomi.

Dalam suasana tersebut di atas, pergerakan perempuan Indonesia yang selama tahun 1945 sampai dengan 1949 memusatkan perhatian dan tenaganya pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menganggap perlu mengadakan konsolidasi agar dapat dengan baik menghadapi tugas dalam bidang sosial

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

ekonomi maupun politik. Dirasakan perlu menciptakan suatu badan yang dapat menghubungkan organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk kerjasama yang baik dengan saling menghargai idiologi masing-masing.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Kontak yang berke-dudukan di Jakarta bersama-sama dengan pengurus KOWANI mengadakan Kongres Wanita Indonesia di Jakarta pada tanggal 24-28 Nopember 1950. Pada Kongres ini Badan Kontak dan KOWANI menggabungkan diri dengan nama *Kongres Wanita Indonesia* (nama kongres tidak lagi disingkat dengan nama KOWANI). Kongres dinilai sebagai kekuasaan tertinggi yang membawahi suatu Majelis Permusyawaratan. Majelis itu sendiri terdiri dari wakil-wakil Pusat Organisasi anggota.

Untuk melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Majelis Permusyawaratan dibentuk suatu kesekretariatan. Sedangkan di tempat-tempat yang dipandang perlu, diadakan seorang konsul yang dipilih oleh organisasi-organisasi di tempat itu dan disahkan oleh Sekretariat.

Tujuan dari Kongres Wanita Indonesia tahun 1950 adalah kesempur-naan kemerdekaan Indonesia, terlaksananya hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara, keamanan dan ketentraman dunia. Kongres antara lain menuntut kepada Pemerintah agar diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum perempuan dan menetapkan jumlah anggota perempuan dan pria yang seimbang dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan.

Menjelang akan diadakannya pemilihan pertama, Kongres Tahun 1952 yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 22-25 Nopember 1952. Dalam kongres ini terdapat permintaan perhatian dari Pemerintah tentang pengangkatan perempuan dalam kantor pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah. Kepada kaum

perempuan, Kongres menganjurkan untuk mempergunakan hak pilihnya. Selain itu, terlaksananya Undang-Undang Perkawinan juga tetap diperjuangkan oleh Kongres dan diusahakan agar diangkat pula tenaga perempuan dalam Pengadilan Agama.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, perempuan dan anak-anak khususnya, Kongres Wanita Indonesia mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak dan Yayasan Hari Ibu, selain juga menggiatkan kembali Yayasan Kemajuan Wanita "Seri Dharma". Yayasan-yayasan tersebut adalah suatu usaha dari Kongres Wanita Indonesia untuk mewujudkan kerjasama antara organisasi-organisasi anggota. Untuk memperingati seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, didirikan gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta.

Pergerakan wanita pada waktu itu menaruh perhatian pula terhadap perjuangan negara-negara sahabat. Dalam kongres tahun 1952, dikeluarkan pernyataan mendukung perjuangan rakyat Tunisia untuk mencapai kemerdekaan.

Sebagai negara baru, beban Pemerintah Indonesia pada masa ini sungguh berat. Selain keadaan sosial ekonomi yang masih jauh dari baik, gangguan keamanan dan persiapan untuk pemilihan umum, Indonesia masih harus pula memperjuangkan kembalinya Irian Barat. Belanda nampaknya tidak bermaksud mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sehingga perundingan-perundingan yang diadakan selalu gagal.

Pergerakan Wanita Indonesia membahas pula persoalan Irian Barat dalam Kongres yang diselenggarakan di Palembang dari tanggal 2-5 Maret 1955. Melalui kongres ini pula diputuskan untuk mengirimkan 'pernyataan' kepada Menteri Luar Negeri agar mendukung sepenuhnya usaha Pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Pada kongres tersebut terlaksananya Undang-Undang Perkawinan tetap merupakan perjuangan berat, sedangkan perhatian pergerakan perempuan di bidang sosial nampak sekali dengan dikirimkannya permintaan kepada Menteri Kehakiman agar diadakan Pengadilan Anak dan permintaan kepada Menteri Perburuhan supaya Peraturan tentang cuti haid tetap dipertahankan.

Setelah persiapan yang sekian lama dan berat, akhirnya, Pemilihan Umum (PEMILU) yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dalam PEMILU ini terdapat 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya.

Dengan selesainya PEMILU itu nampaknya masih belum juga tercapai kestabilan pemerintah. Di daerah-daerah timbul perasaan tidak senang karena merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang didapat dari Pusat. Mereka membentuk Dewan-Dewan Daerah seperti: Dewan Banteng di Sumatera Barat dengan pimpinan Letnan Kolonel Akhmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956. Dewan Gajah di Medan dengan pimpinan Kolonel M. Simbolon pada tanggal 22 Desember 1956. Dewan Manguni di Manado dengan pimpinan Kolonel Ventje Sumual pada tanggal 18 Februari 1957 dan lain-lain. Perundingan dengan Belanda mengenai Irian Burat dan mengenai Uni Indonesia — Belanda juga belum berhasil, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Februari 1956 Indonesia memutuskan Uni tersebut secara sepihak. Dengan keadaan yang demikian tegangnya, pada pertengahan tahun 1957 Pemerintah menyatakan berlakunya Keadaan Darurat Perang/SOB (Staat van Oorlog en Beleg).

Dalam suasana demikian Kongres Wanita Indonesia mengadakan kongresnya di Surabaya pada tanggal 28-30 Nopember 1957. Antara kongres tahun 1955 sampai dengan kongres di Surabaya tercapai beberapa hasil positif antara lain pada tahun 1955 oleh Kepala Jawatan Agama Jawa Barat bersama-sama organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat propinsi di Bandung

didirikan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Kemudian pada tahun 1956 bersama-sama dengan Kementerian Agama diselenggarakan kursus Pendidikan Calon Anggota Pengadilan Agama.

Pada kongres di Surabaya ini perjuangan untuk terlaksananya Undang-Undang Perkawinan telah meningkat sehingga pada pertengahan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Perdana Menteri agar membicarakan Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah masuk. Di dalam Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia, dibahas pula usul-usul kompromi antara Rancangan Undang-Undang Perkawinan dari Parlemen (Ny. Soemari) dan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (dari pemerintah). Kongres memperjuangkan pula agar Hari Ibu dijadikan Hari Nasional dalam arti seperti Hari Sumpah Pemuda.

Dengan memuncaknya perjuangan untuk Irian Barat, Kongres menyatakan bahwa perempuan akan ikut aktif dalam usaha pengembalian Irian Barat dan untuk itu pada tanggal 22 Desember 1957 ditandatangani Piagam Badan Kerjasama Wanita/Militer.

Pada tahun 1958 krisis nasional memuncak dengan diproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) oleh Akhmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958, disusul berdirinya Pergerakan Rakyat Semesta (PERMESTA) yang menguasai daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Keadaan yang demikian dipergunakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengadakan subversi.

Hal ini terasa pula dalam Pergerakan Wanita Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) dalam Kongres di Surabaya berhasil duduk pula dalam pimpinan Kongres Wanita Indonesia. Sebagai organisasi yang berafiliasi pada PKI, Gerwani mendirikan "Gerakan Masa" yang anggotanya terdiri dari organisasi perempuan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

maupun perorangan. Gerakan Masa tersebut, berusaha merongrong Kongres Wanita Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini Kongres Wanita Indonesia mengadakan rapat pada bulan Maret 1958. Pada rapat tersebut organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia yang juga duduk dalam Gerakan Masa dipersilakan memilih antara Kongres Wanita Indonesia dan Gerakan Masa. Ternyata tidak ada yang meninggalkan Kongres Wanita Indonesia dan kemudian Gerakan Masa tidak terdengar lagi.

Pada permulaan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia menyatakan perasaan cemas terhadap PRRI dan PERMESTA.

Tahun 1958 merupakan pula ulang tahun yang ke-30 bagi Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk memperingatinya antara lain diterbitkan buku "*Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*". Pada tanggal 21 Desember 1958 diselenggarakan rapat umum, di mana diadakan beberapa resolusi dan pernyataan antara lain supaya Hari Ibu dijadikan Hari Nasional seperti hari Sumpah Pemuda. Kongres Wanita Indonesia menyatakan pula mendukung berdirinya Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan Badan Kerjasamanya dan bertekad turut memperjuangkan pembebasan Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada Majelis Permusyawaratan tanggal 20 September 1959 Kolonel Dr. Soemarno memberi ceramah tentang gagasan *Pembentukan Kesatuan Wanita Angkatan Darat* yang kemudian menjadi KOWAD (*Korps Wanita Angkatan Darat*). Sebagai tindak lanjut Kongres Wanita Indonesia membentuk Panitia Delapan yang terdiri dari delapan organisasi yang bertugas menyusun usul-usul maupun pendapat tentang Kesatuan Wanita Angkatan Darat yang kemudian mendapat perhatian penuh dari Pimpinan Angkatan Darat. Dengan demikian Kongres Wanita Indonesia ikut menyumbangkan pemikiran bagi pembentukan KOWAD.

Pada tahun 1959 sebagai hasil perjuangan Kongres Wanita Indonesia dengan Surat Keputusan Presiden tertanggal 16 Desember 1959 Nomor 316 tahun 1959, Hari Ibu dijadikan Hari Nasional bukan hari libur.

Dalam masa tahun 1950 sampai dengan 1959 Kongres Wanita Indonesia secara aktif membina hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan luar negeri. Kongres Wanita Indonesia mengirimkan utusan-utusan ke berbagai konferensi internasional. Pada masa ini, perlu dicatat bahwa KOWANI setelah berfusi dengan Badan Kontak berhenti sebagai anggota WIDF (*Women's International Democratic Federation*) dan keanggotaan organisasi luar negeri diserahkan kepada masing-masing organisasi.

Tahun 1959 merupakan tahun terakhir dari masa Demokrasi Liberal. Setelah hampir 10 tahun mengalami ketidakstabilan Politik akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali.

Oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan Presiden Soekarno memperluas wewenang dan kekuasaannya, timbullah Demokrasi Terpimpin yang juga besar pengaruhnya terhadap Pergerakan Wanita Indonesia.

B. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1950

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 24 – 28 Nopember 1950, dengan Pimpinan KOWANI dan Badan Kontak. Dalam forum kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 63 organisasi perempuan di berbagai kawasan Indonesia.

1. Penyelenggaraan Kongres

Kongres ini tidak lagi menggunakan nama Kongres KOWANI sebagaimana kongres tahun 1946 hingga terselenggaranya *Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesi* di Yogyakarta pada

tahun 1949. Kongres ini menggunakan nama penuh *Kongres Wanita Indonesia*.

2. Keputusan-Keputusan Kongres

a. Pada Kongres di Jakarta, diambil keputusan untuk menggabungkan Badan Kontak dan KOWANI serta membentuk gabungan perkumpulan Wanita Indonesia yang diberi nama “Kongres Wanita Indonesia”. Nama ini tidak boleh disingkat menjadi KOWANI. Kongres Wanita Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 Nopember 1950 dan ber-kedudukan di Jakarta.

b. Struktur Organisasi

Kongres Wanita Indonesia yang pimpinannya dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak merupakan kekuasaan tertinggi dan dibawahnya terdapat:

1) Majelis Permusyawaratan terdiri dari, wakil-wakil organisasi pusat. Hal-hal di luar kongres diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan ini.

2) Sekretariat terdiri dari Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris III yang dipilih oleh Kongres dan merupakan kantor yang ber-kedudukan di Jakarta. Sekretariat berkewajiban:

a) Mewakili Majelis Permusyawaratan sehari-hari.

b) Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Majelis Permusyawaratan.

c) Mengadakan Seksi-seksi.

3) Konsul: Pada tempat-tempat yang dianggap perlu diadakan seorang konsul yang dipilih oleh organisasi setempat dan disahkan oleh Sekretariat.

4) Cabang dihapuskan. Kongres Wanita Indonesia hanya ada di tingkat pusat dan bersifat nasional. Hubungan dengan daerah

dilaksanakan melalui organisasi anggota yang mempunyai cabang-cabang di daerah.

c. Dasar dan Tujuan

Dasar dan Tujuan Kongres Wanita Indonesia adalah:

1) Dasar: Pancasila

2) Tujuan:

a) Kesempurnaan Kemerdekaan Indonesia.

b) Terlaksananya hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga negara.

c) Ketenteraman dan keamanan dunia.

d. Keanggotaan:

Keanggotaan dibagi dalam 2 bagian:

1) Anggota biasa yang terdiri dari:

a) Organisasi-organisasi perempuan yang berpusat dan bagian-bagian dari partai-partai yang mempunyai organisasi perempuan sendiri.

b) Organisasi-organisasi perempuan lokal (setempat) yang sedikit-sedikitnya mempunyai anggota 50 orang.

2) Anggota luar biasa, terdiri dari:

Seksi-seksi departemen urusan keperempuanan dari organisasi-organisasi atau partai-partai.

e. Hak Suara:

1) Organisasi lokal mempunyai 1 suara

2) Organisasi bercabang 2 – 5 mempunyai 2 suara

3) Organisasi bercabang 6 – 10 mempunyai 3 suara

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

4) Organisasi bercabang 13 – 15 mempunyai 4 suara, sedangkan untuk tiap kelebihan 5 cabang, ditambah 1 suara dengan jumlah maksimum 10 suara. Kelebihan 3 cabang dapat ditambah 1 suara, tetapi kurang dari 3 cabang dianggap tidak ada.

f. Waktu Kongres:

Kongres diadakan sedikit-sedikitnya dua tahun sekali atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

g. Pengambilan Keputusan:

1) Keputusan mengenai dasar dan tujuan hanya dapat dilakukan dengan suara bulat, lain-lain keputusan diambil dengan suara terbanyak.

2) Keputusan-keputusan Majelis Permusyawaratan harus diambil dengan suara bulat.

h. Pada Kongres tahun 1950 ini dipilih Pimpinan Sekretariat sebagai berikut:

Sekretaris I : Ny. Maria Ulfah Santoso SH

Sekretaris II : Ny. Soekaptinah Soenaryo Mangunpuspito

Sekretaris III : Ny. Soeyatin Kartowijono

Kemudian oleh Sekretariat dipilih sebagai:

Bendahari : Ny. Th. Walandouw.

i. Tentang Perkawinan:

Menuntut kepada Pemerintah supaya:

1) Diadakan Undang-Undang Perkawinan yang melindungi kaum perempuan.

2) Dalam Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama diadakan keseimbangan antara anggota-anggota perempuan dan laki-laki dari segala bidang/agama.

3) Kepada organisasi-organisasi perempuan dianjurkan supaya mempelajari dengan sungguh-sungguh kedudukan perempuan dalam perkawinan, baik menurut hukum adat maupun hukum agama.

j. Mengenal Pemilihan Umum:

1) Menuntut pada Pemerintah supaya Undang-Undang No. 7 tahun 1948, No. 12 tahun 1949 berlaku untuk seluruh Indonesia.

2) Dianjurkan supaya semua perempuan aktif menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum yang akan datang.

k. Perihal keanggotaan dari WIDF (*Women's International Democra-tic Federation*), Kongres Wanita Indonesia akan selalu memelihara hubungan dengan organisasi-organisasi di luar negeri, tetapi tidak menjadi anggota dari gabungan apapun juga. Hal itu diserahkan kepada organisasi masing-masing. Oleh sebab itu KOWANI akan keluar dari WIDF.

3. Hal-hal lain

Panitia Kongres terdiri dari:

Ketua : Ny. S. Kumpul

Wakil Ketua : Ny. S. Sukemi

Penulis I : Ny. Roeslan Abdulgani

Penulis II : Ny. Sujud

Bendahari : Ny. Kadiman

Pembantu : Ny. Sri Mangunsarkoro

NY. Lukman

Ny. Theodora Walandouw

Ny. Memet Tanumidjaja.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

4. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres.

a. Karena KOWANI telah berfusi dengan Badan Kontak menjadi “Kongres Wanita Indonesia” maka kepada WIDF dikawatkan bahwa KOWANI sudah bubar dan dengan demikian berhenti sebagai anggota.

b. Kongres Wanita Indonesia mengirimkan utusan ke “Pan Pacific Women’s Conference” yang diadakan di Christchurch, New Zealand pada permulaan tahun 1951. Delegasi Indonesia terdiri dari Nn. Susilowati (Ny. Riekerk) dan Nn. Tasti Kusumo Utoyo (Ny. Usodo).

c. Kongres Wanita Indonesia menganjurkan agar di tiap daerah di bentuk badan kerja sama organisasi perempuan yang merupakan gabungan organisasi lokal. Mengenai namanya diserahkan kepada masing-masing daerah dan tidak perlu diseragamkan.

C. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1952

Kongres Wanita Indonesia tahun 1952 ini diadakan di Bandung dari tanggal 22 hingga 25 Desember 1952. Kongres kali ini dihadiri oleh wakil semua organisasi perempuan yang berpusat dari seluruh Indonesia dan organisasi perempuan lokal. Dalam Kongres ini diadakan prasaran tentang “Vak onderwijs” oleh Nn. Erna Djajadiningrat (sekarang Ny. Sutoto) dan tentang “Penempatan tenaga perempuan” oleh Sdr. Sulaiman Suriatmadja.

1. Penyelenggaraan Kongres

Sebagaimana kongres sebelumnya, nama kongres ini juga menggunakan nama *Kongres Wanita Indonesia* (tidak lagi menggunakan nama Kongres KOWANI).

Susunan Panitia Kongres tahun 1952:

Ketua : Ny. Ios Wiriatmadja
Wakil Ketua I : Ny. Kamarga
Wakil Ketua II : Ny. Djuarsa
Penulis I : Ny. S.K. Marsono
Penulis II : Ny. Harun
Penulis III : Ny. Rohinah
Keuangan :
* Ny. Sanusi Hardjadinata
* Ny. Ipik Gandamana
* Ny. Male Wiranatakusumah
* Ny. Enoch
* Ny. Suryonegoro

2. Keputusan-keputusan Kongres

a. Struktur Organisasi :

1) Kongres:

Pimpinan dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak.

2) Majelis Permusyawaratan yang memutuskan hal-hal di luar Kongres.

3) Sekretariat, terdiri dari:

a) Pimpinan

b) Seksi Hukum, Seksi Pendidikan dan Seksi Ekonomi.

b. Dasar : Sama dengan Kongres tahun 1950.

c. Tujuan : Sama dengan Kongres tahun 1950.

d. Kongres Wanita Indonesia meminta perhatian Pemerintah tentang:

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

1) Pengangkatan perempuan dalam kantor Pemilihan baik di Pusat maupun di daerah.

2) Pengangkatan tenaga perempuan dalam pengadilan agama.

3) Segera terlaksananya Undang-Undang Perkawinan.

4) Pendidikan khusus untuk pejabat yang ditugaskan mengurus soal nikah, talak dan rujuk.

5) Pembentukan panitia Pendidikan Perempuan yang merancang sistem pendidikan perempuan menuju ke arah kemerdekaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kepribadian perempuan.

6) Penambahan anggota perempuan dalam Dewan Penasehat Jawatan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Perburuhan.

7) Memperkeras pengawasan terhadap majalah, poster, iklan dan lain-lain, yang bertentangan dengan kesusilaan.

e. Program Kerja:

1) Hukum:

a) Mengajukan kepada organisasi-organisasi perempuan agar aktif dalam pemilihan umum.

2) a) Mendesak kepada pemerintah agar Undang-Undang Perkawinan lekas diadakan.

b) Menghubungi Kementerian-Kementerian untuk membuat statistik tentang kedudukan pegawai-pegawai perempuan di tiap Kementerian/Jawatan.

3) Pendidikan:

a) Agar pendidikan rakyat, misalnya pemberantasan Buta Huruf dikerjakan di semua daerah.

b) Menyelidiki kemungkinan pembentukan kursus/sekolah vak untuk perempuan dan memberi penerangan tentang hal ini.

c) Mengajukan kepada organisasi, agar mengadakan kursus--kursus yang memberi penerangan tentang kesusilaan dan keagamaan.

d) Menyelenggarakan Panti Pengetahuan Wanita.

4) Sosial/Ekonomi:

a) Mengadakan pekan kesehatan sepekan sebelum 17 Agustus tiap tahun.

b) Menyelidiki gaji/upah pegawai/pekerja perempuan pada Peme-rintah maupun Swasta.

c) Mengadakan penitipan anak-anak.

d) Mengadakan biro konsultasi di daerah-daerah untuk hal-hal perburuhan, kesehatan, pendidikan dan peraturan perkawinan.

e) Mengajukan kepada daerah-daerah untuk mengadakan darma-wisata atau pertemuan-pertemuan pada hari-hari raya untuk memupuk persaudaraan.

f) Menyelidiki kemungkinan diadakannya Undang-Undang Pensiun dan Tunjangan bagi pekerja/pegawai Pemerintah/Swasta. Mengadakan pusat latihan kerja (*Work Centrale*) untuk mengurangi pengangguran.

f. Mengadakan usaha bersama dengan bentuk yayasan, yaitu: Yaya-san Kesejahteraan Anak-Anak, Yayasan Kemajuan Wanita "Seri Derma". Kedua yayasan tersebut didirikan atas inisiatif perorangan, kemudian diakui sebagai yayasan dari Kongres Wanita Indonesia, sedangkan Yayasan Hari Ibu benar-benar didirikan oleh Kongres Wanita Indonesia menjelang seperempat abad Pergerakan Wanita Indonesia, dengan modal iuran/sokongan setiap organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

g. Kongres Wanita Indonesia menyokong perjuangan. Kemerdekaan Rakyat Tunisia, dan mengirimkan pernyataannya kepada partai Neo Destour di Tunisia, kepada panitia Pembantu Tunisia di Jakarta, dan kepada pers dan Radio.

h. Diputuskan untuk mengadakan Peringatan Seperempat Abad Ke-satuan Pergerakan Wanita Indonesia, pada tanggal 22 Desember 1953, antara lain mendirikan suatu Gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta, sebagai Tugu Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia itu.

i. Pimpinan Sekretariat yang baru terdiri dari:

Sekretaris I : Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H.

Sekretaris II : Ny. Soeyatin Kartowiyono

Sekretaris III : Ny. Artinah Samsuddin

Bendahara : Ny. Theodora Walandouw

Seksi Hukum/ :

Seksi Sosial : Ny. Toeti Harahap, S.H.

Ekonomi : Ny. Tiff Memet Tanumidjaja

Seksi Pendidikan : Nn. Erne Djajadiningrat (sekarang Ny. Soetoto)

3. Hal-hal lain

a. Daftar nama-nama organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1952.

1) PB Parkiwa, Bandung (Partai Kebangsaan Indonesia Wanita)

2) Muslimat Masyumi, Jakarta

3) Persatuan Wanita, Pekalongan

4) Wanita Taman Siswa

- 5) Putri Narpo Wandowo
- 6) Budi Istri, Bandung
- 7) Persatuan Wanita Kristen Indonesia
- 8) PPNI, Medan
- 9) Perwani, Pangkalpinang
- 10) Pikat, Manado
- 11) Partai Wanita Rakyat
- 12) Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia Bag.
Putri
- 13) Partai Serikat Islam Indonesia
- 14) Perwani, Pontianak
- 15) Aisyiyah
- 16) Persatuan Wanita Katholik
- 17) Wanita Indonesia Muntok
- 18) Putri Budi Sejati
- 19) Rukun Wanita, Bandung
- 20) Ibu Setia, Manado
- 21) Muslimat, Cabang Sampang
- 22) Perwari, Jakarta
- 23) Geswani, Manado
- 24) PPI, Jakarta
- 25) Perwari, Indragiri – Rengat
- 26) Gerwis
- 27) Wanita Indonesia Maluku

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- 28) Pekerja Perempuan Indonesia
- 29) Persatuan Wanita Pamekasan
- 30) Konsulat Kongres Wanita Kabupaten Aceh Timur
- 31) Gabungan Wanita Indonesia Perdagangan
- 32) Pusat Kesatuan Wanita Indonesia Tanjung Pandan
- 33) Organisasi Ibu Setia Gorontalo
- 34) PNI Cabang Medan atau Front Wanita
- 35) Gabungan Wanita Indonesia Minahasa
- 36) Konsulat Kongres Wanita Indonesia Semarang
- 37) Gerakan Wanita Banyumas
- 38) Persatuan Tindakan Wanita Samarinda
- 39) Persatuan Tindakan Wanita Banjarmasin
- 40) Masyarakat Wanita Nganjuk
- 41) Ikatan Persatuan Wanita Indonesia Denpasar
- 42) Pemuda Puteri Indonesia Bandung
- 43) Persatuan Wanita Indonesia Palembang
- 44) Peng. Permufakatan Ibu, Sumatra Timur
- 45) Gowani Pare
- 46) Gabungan Wanita Asahan Tanjung Balai
- 47) Persatuan Wanita Sumbawa
- 48) Persatuan Wanita Dempo
- 49) Ikatan Wanita Bima
- 50) Badan Majelis Permusyawaratan Wanita Surakarta

- 51) Istri Sedar
- 52) Persatuan Istri Tentara
- 53) Konsulat Kongres Wanita Indonesia Wonosobo
- 54) Perwani Cabang Jakarta
- 55) Konsulat Kongres Wanita Indonesia, Blora
- 56) Cabang Pikat Manado
- 57) Gabungan Wanita Malang
- 58) Wanita Demokrat Indonesia.

4. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres

a. Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan ke Seminar UNESCO mengenai kedudukan wanita di Asia Selatan yang diadakan di New Delhi dari tanggal 29 Desember 1952 sampai dengan 7 Januari 1953.

Delegasi Indonesia terdiri dari:

- 1) Ny. S. Kartowijono, dari Kementerian PPK dan Kongres Wanita Indonesia, sebagai Ketua.
- 2) Ny. Emma Puradiredja dari PARKIWA
- 3) Ny. Titi Memet Tanumidjaja dari Bhayangkari
- 4) Nn. Mr. J.M. Tumbelaka, dari PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia)
- 5) Nn. Suitinah (sekarang Ny. Darmadji) dari PPI/PPK (Pemuda Putri Indonesia/Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

b. Pada bulan Pebruari 1953 utusan Kongres Wanita Indonesia ke Seminar UNESCO di New Delhi melaporkan bahwa kertas kerja

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

yang dibuat oleh Ny. Maria Ulfah Santoso, S.H., Ny. Suyatin Kartowijono dan Ny. Emma Puradiredja, yang berjudul “The Position of Indonesian women in the Republik of Indonesia” dan “Women’s position in Marriage Law” disebut dalam buku “The Status of Women in South Asia” yang ditulis oleh Dr. A.Appa-doroi dengan bantuan UNESCO dan Asia Relations Organisation.

c. Setelah Kongres di Bandung maka pada tanggal 22 Desember 1953, Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dilaksanakan. Maksud dan tujuan peringatan Seperempat Abad tersebut ialah:

1) Untuk membangkitkan semangat kaum ibu di kalangan kaum perempuan Indonesia.

2) Untuk menghormati dan menghibur kaum ibu.

3) Untuk mendirikan usaha-usaha bagi kesejahteraan kaum ibu yang bersifat tetap.

4) Maksud mendirikan “Gedung Persatuan Wanita” di Jogja-karta yang diselenggarakan oleh Yayasan Hari Ibu, ialah untuk mendapat tempat pusat latihan kerja bagi para perempuan menuju kepada kemerdekaan ekonomi sesuai kepribadian perempuan Indonesia; juga untuk menyediakan tempat penginapan bagi perempuan yang sedang bertugas sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh dan lain-lain.

Untuk Peringatan Seperempat Abad dibentuk Panitia Pusat di Yogyakarta sebagai berikut:

Ketua I : Ny. Sri Mangunsarkoro (Partai Wanita Rakyat)

Ketua II : Mr. Tuti Harahap (PWKI)

Ketua III : Ny. Aisyah Hilal (Muslimat)

Ketua IV : Ny. S.K. Trimurti (Gerwis)

Penulis I : Nn. Hariati (PPI)

Penulis II : Ny. Artinah Samsuddin (Muslimat)

Bendahari I : Ny. Sutarman (Perwari)

Bendahari II : Ny. Mariati Adnan (GPII Putri), dengan dibantu oleh BP semua organisasi Kongres Wanita Indonesia. Dibentuk pula Panitia Pusat Harian di Yogyakarta dan Perwakilan Panitia di Jakarta dan Bandung, sedangkan di Jakarta diadakan juga Badan Usaha Panitia Pusat.

Selanjutnya Kongres Wanita Indonesia menyerukan agar pe-ringatan ini diadakan di seluruh Indonesia. Demikian pula agar di setiap tempat diusahakan berdirinya Gedung Wanita.

Dalam peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 di Istana Negara Jakarta, diresmikan berdirinya Bank Koperasi Wanita. Bank Koperasi ini adalah suatu koperasi Simpan Pinjam untuk perempuan Jakarta yang diprakarsai oleh Ny. Said Suryodinoto, Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. S. Herman dan Ny. Titi Memet Tanumidjaja.

Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia berkumandang pula di luar negeri. Perayaan diadakan antara lain di (1). Penang diketuai Kepala Perwakilan RI, Ny. Ali Mursid, (2). Mesir diketuai Istri Duta Besar Indonesia Ny. Abdul-kadir, (3). Manila dengan Ketua Ny. Tjokroadisumanto istri Kuasa Usaha RI, (4). London diketuai Ny. dr. Hurustiati Soebandrio istri Duta Besar RI, (5). Paramaribo dengan diadakan pameran. Juga diterima dana dan bantuan berupa mesin tik dan lain-lain.

d. Pada tanggal 20 April 1964 di Jakarta didirikan Badan Penghubung Organisasi Wanita (BPOW) dalam rangka melancarkan aksi Pemberantasan Buta Huruf (PBH) di kalangan perempuan, yang diselenggarakan bersama-sama dengan Jawatan Pendidikan Masyarakat. Pembentukan BPOW tersebut segera diikuti oleh

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

pem-bentukan badan kerja sama organisasi perempuan di daerah tingkat II (Kabupaten) dengan berbagai nama, antara lain: Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKSOW), Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Gabungan organisasi di daerah tingkat I hanya terdapat di Jakarta.

D. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1955

Kongres Wanita Indonesia diadakan di Palembang pada tanggal 2-5 Maret 1955 dan dihadiri oleh organisasi-organisasi perempuan anggota Kongres Wanita Indonesia dan organisasi perempuan setempat.

1. Penyelenggaraan Kongres

Kongres yang berlangsung pada tahun 1955 di Palembang ini juga tidak menggunakan nama KOWANI dalam penamai kongres. Adapun nama yang digunakan adalah Kongres Wanita Indonesia.

2. Keputusan-keputusan Kongres.

a. Struktur Organisasi:

1) Kongres

2) Majelis Permusyawaratan

3) Sekretariat terdiri dari 5 orang, yaitu:

Ketua : Perorangan

Wakil Ketua :

Penulis I : merupakan wakil-wakil organisasi

Penulis II : anggota Kongres Wanita Indonesia

Bendahari :

4) Konsul dihapuskan

b. Dasar:

Pancasila Negara Republik Indonesia

c. Tujuan:

- 1) Kesempurnaan kemerdekaan negara Republik Indonesia
- 2) Terlaksananya hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara
- 3) Ketenteraman dan keamanan dunia

d. Keanggotaan:

- 1) Anggota biasa:
 - a) Organisasi perempuan yang berpusat
 - b) Bagian perempuan dari organisasi atau partai yang mempunyai organisasi perempuan yang berdiri sendiri
 - c) Organisasi perempuan lokal yang sedikitnya mempunyai anggota 50 orang.

- 2) Anggota luar biasa:

Seksi atau departemen perempuan atau Urusan Keperempuanan dari partai atau organisasi.

e. Hak Suara:

Organisasi lokal 1 suara; organisasi yang bercabang 2-5, 2 suara; organisasi yang bercabang 6-10, 3 suara; organisasi yang bercabang 15, 4 suara. Lebih dari 15 cabang, tiap 10 cabang mendapat satu suara dengan maksimum 15 suara.

f. Pengambilan Keputusan:

- 1) Keputusan-keputusan yang prinsipial (mengenai dasar dan tujuan) harus diambil dengan suara bulat.
- 2) Keputusan-keputusan lain diambil dengan suara terbanyak.
- 3) Pimpinan Kongres dipilih dengan suara terbanyak

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

4) Hal-hal di luar Kongres diputuskan oleh Majelis Permusyawaratan.

Mendesak kepada Pemerintah supaya memberikan instruksi kepada instansi-instansi daerahnya, agar mengadakan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi perempuan dalam lapangan sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

h. Setiap perempuan diwajibkan agar berusaha ke arah terlaksananya hak-hak perempuan. Usaha tersebut supaya dititikberatkan pada pem-bangunan masyarakat yang menumbuhkan “Self-help”, dengan cara gotong-royong di kalangan perempuan.

i. Organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia diwajibkan berusaha menambah pengetahuan dan memperbaiki ekonomi untuk perempuan pada umumnya, dengan mempergunakan hasil penyelidikan dari Pemerintah supaya dapat bekerja secara efisien. Usaha perbaikan sosial yang bersifat pencegahan (preventif) dan perbaikan (kuratif) agar diperluas ke desa-desa. Pelaksanaan dari pada usaha tersebut seperti dengan hal-hal lain diserahkan kepada organisasi anggota di daerah masing-masing.

j. Mendesak:

1) Supaya segera dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang pokok dan khusus.

2) Kepada Jawatan Kepolisian Negara supaya diadakan lagi Angkatan Polisi Wanita dan Polisi Susila diperkuat.

3) Kepada Menteri Kehakiman supaya diadakan pengadilan anak, dan mengirim ahli hukum Indonesia untuk mempelajari soal itu di luar negeri.

4) Kepada Menteri Perburuhan dan Menteri Negara Urusan Perencanaan disampaikan keputusan Kongres Wanita Indonesia untuk mempertahankan peraturan hadiah.

5) Kepada Menteri Luar Negeri dikirim pernyataan mendukung sepenuhnya usaha Pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

k. Agar ditentukan syarat-syarat bagi pegawai yang ditempatkan di luar Negeri, sebagai berikut:

1) Pegawai laki-laki yang ditempatkan di Luar Negeri, sedapat mungkin yang telah kawin dengan perempuan Indonesia dan men-junjung tinggi kebudayaan nasional.

2) Istri dari semua pegawai yang ditempatkan di luar negeri, perlu diberi pendidikan dalam bahasa asing, cara bergaul dan etiket, kebudayaan nasional dan pergerakan perempuan.

3. Pimpinan Sekretariat baru masa 1955-1957:

Ketua : Ny. Mr. Maria Ulfah Santoro (perorangan),

Wakil Ketua : Ny. Mr. Nani Soewondo (Perwari),

Penulis I : Ny. Artinah Samsuddin (Muslimat).

Penulis II : Ny. Theodora Walandouw (PWKI),

Bendahari : Nn. Muljati (PPI sekarang Kolonel Muljati),

Ketua Komisi Hukum : Ny. Mr. Tuti Harahap.

4. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres.

a. Tahun 1955/1956.

1) Pada bulan Oktober 1955 oleh Kepala Jawatan Agama Jawa Barat di Bandung bersama organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia tingkat propinsi, didirikan Badan Penasehat Perka-winan dan Penyelesaian Perceraian (BP 4). Dalam bulan Maret 1956 di Jakarta dibentuk oleh Kepala Jawatan Agama bersama organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia, Panitia Pena-sehat Perkawinan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

dan Penyelesaian Perceraian (P5). Kemudian menyusul pembentukan P 5/BP 4 di Kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa. Kongres Wanita Indonesia mendukung pembentukan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perce-raian (BP 4), karena BP 4 melanjutkan pekerjaan yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah dirintis, mula-mula oleh Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-Anak Indonesia (KPKPAI) dan kemudian menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPPI).

2) 20 Mei 1956 Peresmian Gedung Persatuan Wanita di Yogyakarta, yang dihadiri oleh Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, Ny. Maria Ulfah Santoso dan Nn. Muljati.

3) 17 Agustus — 17 Nopember 1956, Yayasan Hari Ibu menyelenggarakan kursus Pembangunan Masyarakat Desa yang diikuti oleh 20 orang perempuan.

4) September 1956, mengirim peninjau ke Seminar Status of Women Commission dari UN di Moskwa, yaitu ply. Mr. Tuti Harahap dan Nn. Muljati, sedangkan dari Kementerian Luar Negeri diutus Nn. Mr. Laili Rusad.

5) Mengirim 7 orang utusan ke USA atas undangan Pemerintah Amerika Serikat, yaitu: Ny. K. SOjono Prawirobismo (Bhayangkari), Ny. Sutedjo (PSII Wanita) Ny. Syamsuridjal (Yayasan Kesejahteraan Anak-Anak), Ny. Sh. Said (Partai Wanita Rakyat) Ny. Zaenal Abidin (GPII Putri), Ny. D. Soeharto'(Yayasan Hari Ibu dan Ny. S. Kartowijono (Perwari).

6) Oktober 1956, menerima undangan dari Sovyet Women's — Committee untuk mengadakan peninjauan dan 10 orang berangkat, yaitu: Ny. Maruto Nitimihardjo (Yayasan Seri Darma), Ny. Emma Sumanegara (Parkiwa), Ny. Abdulgani Surjoku-sumo (Wanita Demokrat), Nn. Siti Mudiyah (PPI), Ny. Kusnafsiah Slamet (Gerwani), Ny. Lutan Madjid (Perwamu), Ny. Abdurachman (Wanita

Indonesia), Ny. Wahid Sutan Radjo-lelo (Wanita Nasional), Ny. Djuarsa (Budi Istri), dan Ny. Mah-judin (Persit).

7) 11 Nopember 1956, pernyataan berhubung dengan keadaan internasional. Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk tindakan-tindakan kekerasan senjata :

a) Israel terhadap Mesir

b) Inggris dan Perancis terhadap Mesir dalam persengketaan mengenai terusan Suez.

c) Rusia terhadap Hongaria

8) Nopember 1956. Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama, menyelenggarakan kursus dan ujian Pendidikan Calon Anggota Wanita Pengadilan Agama. Dari 40 pengikut, 27 orang lulus, yang ijazahnya disahkan oleh Kementerian Agama.

9) 22 Desember 1956 bertepatan dengan peringatan Hari Ibu diresmikan Gedung Wanita Jakarta, di Jalan Diponegoro 26. b. Tahun 1957:

a. Maret 1957, Kongres Wanita Indonesia mengutus Ny. Rusiah Sardjono S.H. sebagai wakil Kongres Wanita Indonesia ke sidang Status of Women Commission U.N. di New York.

b. 9-11 Mei 1957, Ny. dr. Soebandrio dan Nn. Sunarin mewakili Kongres Wanita Indonesia dalam konperensi pendahuluan darf5 negara penyelenggara Konperensi Wanita Asia Afrika yang diadakan di Karachi, Pakistan.

c. Agustus 1957, mengirim 3 wakil Kongres Wanita Indonesia ke Seminar Wanita Asia di Bangkok, Thailand mengenai "Increased Participation of Asian Women in Publik Life" yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Utusan terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. Mr. Nani Soewondo dan drge Ny. Yetty Rizali Noor.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

4. Membentuk panitia yang bertugas untuk incinpelajari hal-hal yang bersangkutan dengan polisi perempuan dan peningkatannya.

5. Kementerian Agama mengangkat 12 (duabelas) orang lulusan Kursus Pendidikan Calon Anggota Wanita Pengadilan Agama menjadi anggota Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Ny. Samsuri di Lamongan,
- b. Ny. Abu Amar di Mojokerto,
- c. Ny. Murtinah Nur di Bondowoso,
- d. Ny. Prayitno di Temanggung,
- e. Ny. M. Titi Humam di Banjarnegara,
- f. Ny. Marnani di Pekalongan,
- g. Ny. Sunaryono di Sidorejo,
- h. Ny. Wasinah di Kendal,
- i. Ny. Arifiah Khaeri di Tegal,
- j. Ny. Surtati Saputro di Tegal.
- k. Ny. A.R.C. Salim Maemunah di Malang,
- l. Ny. Munatun Priyoatmojo di Purwodadi.

6. Mengadakan Majelis Permusyawaratan Kilat pada tanggal 10 Nopember 1957 untuk membicarakan rencana kerja sama Kongres Wanita Indonesia dengan BKSPM (Badan Kerjasama Pemuda Militer) mengenai persoalan Irian Barat serta undangan untuk menghadiri Musyawarah Nasional Pem-bangunan (Munap) yang akan diadakan pada tanggal 25 Nopember 1957.

E. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1957

Kongres-Kongres Wanita Indonesia tahun 1957 ini diadakan di Surabaya pada tanggal 28 -30 Nopember 1957.

1. Penyelenggaraan Kongres

Nama kongres masih tidak menggunakan KOWANI. Adapun nama yang digunakannya adalah Kongres Wanita Indonesia.

2. Keputusan-Keputusan Kongres

a. Struktur Organisasi:

1) Kongres (Pimpinan Kongres dipilih oleh Kongres dengan suara terbanyak).

2) Majelis Permusyawaratan (memutuskan hal-hal di luar Kong-res).

3) Sekretariat (terdiri dari 7 orang).

b. Dasar :

Pancasila Negara Republik Indonesia.

c. Tujuan :

1) Kesempurnaan kemerdekaan negara Republik Indonesia.

2) Terlaksananya hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai warga negara.

3) Ketentraman dan keamanan dunia.

d. Keanggotaan :

1) Anggota biasa :

Organisasi yang berpusat, sedikit-sedikitnya mempunyai 5 Cabang di lima daerah kabupaten dan mempunyai Anggaran Dasar yang bertujuan memperjuangkan nasib perempuan pada umumnya.

2) Anggota luar biasa:

a) Organisasi lokal yang mempunyai Anggaran Dasar yang bertujuan memperjuangkan nasib perempuan pada umumnya dan mempunyai anggota sedikit-sedikitnya 100 orang.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

b) Organisasi perempuan khusus yang berpusat dan mempunyai sedikit-sedikitnya 5 cabang di lima daerah kabupaten.

3) Penerimaan anggota:

Penerimaan keanggotaan dijalankan melalui surat komisi pe-nyaring yang terdiri atas 5 orang, yaitu:

a) Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia atad wakilnya dan 1 anggota Sekretariat dan 3 anggota Kongres Wanita Indonesia lain yang dipilih secara bergiliran oleh Majelis Permusyawaratan dan mempunyai masa kerja antara 2 Majelis Permusyawaratan.

b) Anggota disahkan oleh Majelis Permusyawaratan setelah melalui masa penyaringan 3 bulan.

4) Kewajiban anggota:

a) Membayar uang pangkal

b) Membayar uang iuran

c) Tiap anggota berkewajiban memupuk dan memelihara pet-satuan dalam Kongres Wanita Indonesia dan mencegah segala tindakan yang dapat memecahkan persatuan Kongres Wanita Indonesia.

d) Anggota Kongres Wanita Indonesia tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan masal dalam masyarakat, baik yang bersifat tetap maupun insidentil, yang dapat dikerjakan bersama oleh Kongres Wanita Indonesia.

e) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban ter-sebut dalam a, b, c, d, diberi peringatan 2 kali oleh Sekretariat Kongres Wanita Indonesia dan jika masih belum ber-hasil dimajukan pada Majelis Permusyawaratan.

e. Hak hadir:

1) Sekretariat Kongres Wanita Indonesia termasuk Komisi-komisi (Seksi-seksi).

- 2) Anggota biasa
- 3) Anggota luar biasa
- 4) Yayasan-yayasan yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.

5) Panitia-panitia.

f. Hak suara:

- 1) Organisasi yang bercabang 5 mendapat 2 suara
- 2) Organisasi yang bercabang 6 sampai 10 mendapat 3 suara
- 3) Organisasi yang bercabang 11 sampai 15 mendapat 4 suara. Lebih dari 15 cabang, tiap 10 cabang mendapat 1 suara dengan maksimum 15 suara.

4) Anggota luar biasa tidak mempunyai suara dan hanya dapat berbicara jika diijinkan oleh Pimpinan Sidang.

g. Pengambilan Keputusan:

1) Keputusan-keputusan yang prinsipil (mengenai dasar dan tujuan) harus diambil dengan suara bulat.

2) Keputusan-keputusan lain diambil dengan suara terbanyak.

h. Sebagai tindak lanjut dari prasarana Ny. S.K. Trimurti mengenai kesukaran-kesukaran psikologis pada perempuan yang bekerja, diadakan Seksi Perburuhan dalam Kongres Wanita Indonesia, yang akan mempelajari dan menyelidiki masalah perempuan yang bekerja, serta soal-soal lain yang berhubungan dengan itu.

i. Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai:

1) Perjuangan pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

2) Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).

j. Kongres Wanita Indonesia mendesak kepada Pemerintah supaya segera dikeluarkan Undang-Undang perkawinan.

k. Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia akan segera mengeluarkan suatu brosur mengenai kedudukan perempuan Indo-nesia dalam masyarakat.

l. Mendesak kepada Menteri Agama supaya tenaga-tenaga lulusan kursus Pendidikan Calon Anggota Pengadilan Agama segera ditempatkan, karena dan 27 orang perempuan yang lulus, baru 12 orang ditempatkan.

m. Didirikan suatu Panitia Khusus berhubung dengan perjuangan rakyat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam ilayah Republik Indonesia, Panitia itu terdiri dari:

1) Perwari, (Persatuan Wanita Republik Indonesia) sebagai Ketua

2) Wanita Demokrat

3) Muslimat Masyumi

4) Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia)

5) Perwamu (Persatuan Wanita Murba)

6) PPI (Pemuda Putri Indonesia)

7) GPII Putri (Gerakan Pemuda Islam Indonesia Putri)

8) Bhayangkari

9) Persit

n. Kongres memilih delegasi Indonesia ke Konperensi Wanita Asia Afrika di Colombo, yang terdiri dari sepuluh orang.

o. Kongres Wanita Indonesia membentuk Panitia yang akan meninjau masalah "Cross boys" dan penyelesaiannya. Pelaksanaannya

diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Anak-anak diketuai oleh Ny.Syamsuridjal.

p. Pimpinan Sekretariat baru masa tahun 1957-1961.

Ketua Mr. Maria Ulfah Santoso, (perorangan)

Wakil Ketua, Ny. Rohanah Zainal Abidin Achmad (GPII Putri),

Penulis I, Ny. Muharam Wiranatakusumah (Bhayangkari),

Penulis II, Ny. Tjitjih Sujud (perwari),

Bendahari I, Ny. Mudikdio (Gerwani),

Bendahari II, Ny. Artinah Samsudin (Muslimat),

Pembantu, Ny. Mien Wuwungan.

3. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan penting sesudah Kongres.

a. Tanggal 22 Desember 1957, ditandatangani Piagam Kerja sama Badan Kerja sama Pemuda Militer (BKSPM) dan Wanita/ Kong-res Wanita Indonesia yang diwakili oleh panitia khusus Irian Barat:

* Ny. S. Kartowijono (Perwari),

* Ny. Gani Suryokusumo (Wanita Demokrat),

* Ny. Lutan Madjid (Perwamu),

* Nn. Sarifah Lena (PPI),

* Ny. Djaka Semedi (Persit),

* Ny. Mariyati Adnan (Muslimat Masyumi),

* Ny. Zainal Hakam (GPII Putri),

* Ny. WWahyudi (Bhayangkari).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Piagani tersebut menegaskan bahwa perempuan Indonesia dan Pemuda/Militer bersama-sama dengan seluruh rakyat bertekad bulat untuk membebaskan rakyat Irian Barat dari cengkeraman penjajahan Belanda dengan segala konsekwensinya.

b. Tahun 1958

1) Membubarkan Panitia Khusus Irian Barat dan meminta supaya tiga puluh organisasi yang berpusat menjadi anggota *Front Nasional Pembebasan Irian Barat*.

2) Pada permulaan tahun 1958 Kongres Wanita Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk bertindak sebijaksana mungkin supaya tidak terjadi pengorbanan yang sia-sia, lebih-lebih pengorbanan jiwa berhubungan dengan pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta (Perjuangan Rakyat Sementara).

3) 3 Pebruari 1958, Kongres Wanita Indonesia mengirim delegasi ke Konperensi Asia Afrika di Colombo (Srilangka), dari tanggal 15 s/d 24 Pebruari 1958. Delegasi terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, (Ketua), Ny. dr. Hurustiati Subandrio, Ny. Mr. Nani Suwondo, Ny. Kartini K. Radjasa Nn. Soehartini, Ny. Suyono Prawirobismo, Ny. S.K. Trimurti, Ny. Iljas Sutan Pangeran (dari Badan Usaha).

4) Maret 1958, Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan ke-pada Jawatan Kepolisian Negara yang terdiri dari: Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso (Ketua), Ny. M. Muharam Wiranataku-sumah (Penulis I), Ny. Artinah Samsudin (Bendahara II) untuk menyampaikan kepiitisan Kongres Wanita Indonesia yang diambil pada Majelis Permusyawaratan tanggal 2 Maret 1958 mengenai Polisi Wanita, berupa:

a) Salinan laporan Panitia Peninjauan Polisi Wanita, yang dibentuk oleh Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1957.

b) Nota tentang status Polisi Wanita

c) Lampiran pada nota polisi Wanita serta Bagan Operasionilnya.

5) Maret 1958 Kongres Wanita Indonesia mengadakan latihan Kader Wanita Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang di-selenggarakan oleh Yayasan Hari Ibu di Gedung Persatuan Wanita Yogyakarta dengan bantuan tenaga dari Jawatan Pendidikan Masyarakat (Ny. Kartono Mangunkusumo) dan bantuan keuangan dari Biro Pembangunan Masyarakat Desu yang berada di bawah Perdana Menteri (Bapak Ir. H. Djuanda).

6) Maret 1958, diadakan rapat Kongres Wanita Indonesia untuk memecahkan soal Gerakan Masa yang anggotanya terdiri dari perorangan dan organisasi wanita. Gerakan massa tersebut dipelopori oleh Gerwani (berafiliasi dengan PKI) yang berusaha merongrong KOWANI. Diputuskan supaya mereka yang duduk dalam Gerakan Masa, memilih antara Kongres Wanita Indonesia dan Gerakan Masa. Ternyata tidak ada yang keluar dari Kongres Wanita Indonesia, kemudian Gerakan Masa tidak kedengaran lagi.

7) Tanggal 16 Agustus 1958 dibentuk BKS Wamil (Badan Kerja-sama Wanita/Militer).

8) Tanggal 24 Agustus 1958, mengadakan Seminar mengenai masalah perempuan yang bekerja dan mengenai peranan perempuan dalam rumah-tangga serta masyarakat.

9) Pertengahan tahun 1958, Sekretariat Kongres Wanita Indo-nesia mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Perdana Menteri untuk membicarakan tancangan Undang-Undang Perkawinan yang telah disampaikan. Diusulkan kompromi antara:

a) Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Peraturan Umum (usul Parlemen melalui Ny. Sumari).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

b) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam (usul Pemerintah).

Usul kompromi tersebut disampaikan oleh: Persit, Sahati, Wanita Universitas, Perwari, Wanita Demokrat, PWKI, Wanita Rakyat, Bhayangkari, Gerakan Wanita Sosialis, dan PPI.

10) Mengirim surat dan delegasi ke Kementerian Dalam Negeri agar IGO (Inlandse Gemeente Ordonantie) segera dicabut sesuai dengan persamaan hak antara pria dan perempuan dalam menduduki jabatan negeri.

11) Pada sidang pleno BKS Wamil tanggal 19 September 1958 disusun pokok-pokok tata tertib, program perjuangan dan pedoman kerja dari Pengurus Harian.

a) Tujuan BKS Wamil:

Menghimpun kekuatan-kekuatan Nasional, khusus perempuan dan militer secara riil dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat.

b) Bentuk BKS Wamil adalah Badan Kerjasama antara militer dan organisasi-organisasi fungsional perempuan yang tidak mengurangi kedaulatan organisasi masing-masing.

c) Anggota BKS Wamil di pusat terdiri dari organisasi-organisasi perempuan yang berpusat dan militer.

d) BKS Wamil bertugas mengerahkan tenaga perempuan untuk turut melaksanakan program Front Nasional Pembebasan Irian Barat Pusat.

e) Pengurus harian, sebagai berikut:

Ketua : Kolonel Sambas Atmadinata

Let. Kol. Soewardi Brototanoyo

Wakil Ketua I : Ny. Burdah Jusupadi
Ny. Gani Suryokusumo

Wakil Ketua II : Ny. S. Kartowiyono

Wakil Ketua III : Ny. S. Nurjanah
Ny. Raimah Raib

Penulis I : Nn. S. Lena

Penulis II : Ny. Waluyo Soegondo

Bendahari I : Ny. Rakena Thaher

Bendahari II : Ny. Wahid Hasyim

Pembantu I : Ny. Umi Sarjono

Bendahari II : Ny. Jakasemedi

Bendahari III : Nn. Mimi Soedarmo.

12) September 1958, Gedung dan Usaha Roemer — Visser Vereni-ging di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 67 Jakarta diambil alih oleh Kongres Wanita Indonesia dan dijadikan Yayasan Daya Wanita, dengan Ketuanya dari Kongres Wanita Indonesia yaitu Th. Walandouw. Selanjutnya penjualan bunga Kartini ditetapkan menjadi usaha Yayasan Daya Wanita.

13) Nopember 1958, mengadakan peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, untuk mana dibentuk Panitia yang diketuai oleh: Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito dari Yayasan Hari Ibu. Acara peringatan adalah sebagai berikut:

a) 16 — 18 Desember 1958, hari Kebaktian dengan pemeriksaan kebersihan umum oleh Badan Penghubung Organisasi Wanita Jakarta Raya.

b) 21 Desember 1958 siang, rapat umum di Gedung Olah Raga.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

c) 21 Desember 1958 malam, malam kesenian diselenggarakan bersama dengan Panitia Hari Sosial. .

d) 22 Desember 1958 pagi, pameran diselenggarakan oleh Badan Penghubung Organisasi Wanita di Gedung Wanita Jakarta. Juga Bank Koperasi Wanita menyelenggarakan pameran di Gedung Wisma Nusantara dari tanggal 19-22 Desember 1958.

e) Peresmian Gedung Wisma Mulia, di Jalan Bidaracina oleh: Yayasan Daya Wanita. Gedung tersebut dimaksudkan sebagai perumahan bagi perawatan wanita tua dan terlantar.

f) 22 Desember 1958 malam, diadakan resepsi di Gedung Wanita.

g) Dalam rapat umum di Gedung Olah Raga, diadakan empat resolusi dan dua pernyataan:

(1) resolusi mengenai ekonomi, kebutuhan bahan pokok sehari-hari.

(2) resolusi mendesak kepada Konstituante untuk mencantumkan hak-hak perempuan dalam Hukum Keluarga, selaras dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

(3) resolusi mengenai Undang-Undang Perkawinan supaya segera dibahas dan diundangkan.

(4) resolusi supaya Hari Ibu dijadikan Hari Nasional dalam arti seperti Hari Sumpah Pemuda.

(5) Pernyataan kesatu:

Menentang sekeras-kerasnya dilakukannya percobaan Bom A dan H oleh negara manapun juga. Menyetujui dan menganjurkan dipergunakannya tenaga atom untuk maksud damai, sebagai kekuatan untuk pembangunan. Meneruskan kepada seluruh dunia terutama perempuannya untuk terlaksananya prinsip tersebut.

(6) Pernyataan kedua:

Mendukung berdirinya Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan BKS-BKS-nya. Bertekad bulat turut memperjuangkan pembebasan Irian Barat dalam waktu sesingkat-singkatnya.

14) Dalam rangka Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita disusun buku “Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia” dengan bantuan Departemen Penerangan.

c. Tahun 1959:

1) Membentuk panitia sandang pangan untuk merencanakan distribusi sandang pangan.

2) Mengajukan calon untuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

3) Menentukan bahwa Kongres Wanita Indonesia tidak turut merayakan Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret, tetapi menyerahkan perayaan hari tersebut kepada masing-masing organisasi.

4) Membentuk Panitia Perumus Kebudayaan Nasional untuk membahas peranan perempuan dalam meningkatkan kebudayaan nasional.

5) Setelah mendengar ceramah Kolonel Dr. Soemarno mengenai Kesatuan Wanita Angkatan Darat pada Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia tanggal 20 September 1959, dibentuk Panitia Kesatuan Wanita Angkatan Darat oleh Kongres Wanita Indonesia, terdiri dari 8 (delapan) organisasi yang diketuai oleh Ny. M. Wahyudi (dari Bhayang-kari). Adapun delapan organisasi tersebut adalah Bhayang-kari, Persit Muslimat Masyumi, PWKI (persatuan Wanita Kristen Indonesia), PPI (Pemuda Putri Indonesia), Muslimat NU, Wanita Katholik dan Wanita Universitas. Panitia tersebut telah menyusun usul-usul/pendapat yang kemudian mendapat perhatian dari Pimpinan Angkatan Darat. Pada tahun 1960 oleh Pimpinan Angkatan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Darat dibentuk Panitia Penasehat Pembentukan Korps Wanita Angkatan Darat (What Bab. V).

6) Pada tahun 1959, setelah diperjuangkan diangkat lagi 2 (dua) orang perempuan di Pengadilan Agama.

7) Tanggal 13 Desember 1959, Kongres Wanita Indonesia mengadakan Seminar mengenai Kebudayaan Nasional dengan prasarana-prasarana dari: Persiti, Wanita Demokrat, dan Perwari.

F. Kongres Wanita Indonesia Tahun 1961

Perkembangan Pergerakan Wanita dalam masa ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik negara bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Masa Demokrasi Terpimpin diawali dengan Dekrit Presiden Soekarno tertanggal 5 Juli 1959. Dibentuk lembaga-lembaga baru MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DEPERNAS (Dewan Perancang Nasional) dan Front. Nasional dengan komposisi Gotong Royong/Nasakom (Nasionalis Agama Komunis), yang anggota-anggotanya ditunjuk/diangkat oleh Presiden. Ketua Mahkamah Agung, Ketua MPRS, Ketua DPRGR dan Jaksa Agung diangkat menjadi Menteri. Manipol (Manifesto Politik) Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Deklarasi Eko-nomi, Kepribadian Nasional) ditetapkan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada kenyataannya, Dekrit Presiden adalah pengambil-alih seluruh wewenang Pemerintah dan pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Pada tahun 1963, MPRS telah mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup pemimpin Besar Revolusi.

Sejak semula, PKI (Partai Komunis Indonesia) yang ingin memperkuat kedudukan politiknya, mendukung Presiden Soekarno. Dengan menggarapnya secara sistematis ditimbulkan keyakinan pada Presiden bahwa tanpa PKI ia akan menjadi lemah terhadap TNI

(Tentara Nasional Indonesia). PKI dan ormas-ormasnya dapat dengan aman melakukan intimidasi dan teror politik terhadap pihak dan tokoh yang dianggap lawan serta anti Nasakom, dengan tuduhan. Kontra Revolusi/Anti Bung Karno/Agen Nekolim (Neo Kolonialisme), dan lain-lain. Doktrin PKI: “Politik adalah Panglima”.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin, semua hal diatur Pemerintah sampai pada kreasi-kreasi seni dan selera hiburan. Jaminan dan perlindungan hukum tidak ada, banyak orang ditangkap tanpa diadili. Proyek-proyek mercu suar dibangun. Politik luar negeri menganut poros Jakarta - Peking, sehingga mempersempit ruang gerak RI di forum internasional dan memasukkan Indonesia dalam strategi politik RRC (Republik Rakyat China). Timbul gagasan “NEFOS” (New Emerging Forces) sebagai tandingan “OLDEFOS” (Old, Established Forces) yang mencapai puncaknya dengan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 1 Januari 1965.

Untuk membendung kekuasaan Komunis, maka di bawah pengaruh Angkatan Bersenjata (ABRI) pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuk “Sekretariat Bersama Golongan Karya” (SEKBER GOLKAR) yang menjadi anggota Front Nasional. Badan ini terdiri dari golongan fungsional dan profesi yang tidak tergabung dalam partai-partai politik; antara lain terdiri dari ABRI, Sarekat-Sarekat Sekerja, Organisasi Pemuda dan Organisasi Wanita.

Suasana “ketegangan” sudah mulai mempengaruhi pergerakan perempuan sejak Gerwani berhasil duduk dalam Pimpinan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1957. Pengaruh Gerwani menjadi tambah besar, sejak struktur Pimpinan Kongres Wanita Indonesia dirubah pada Kongres ke-XII tahun 1961 di Jakarta. Pimpinan Kongres Wanita Indonesia yang semula merupakan Sekretariat kini berubah menjadi Dewan Pimpinan yang terdiri dari 9 orang wakil organisasi yang akan memimpin secara bergilir dengan didampingi oleh seorang Ketua Kordinator. Intimidasi dan tekanan mulai

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

dijalankan terhadap pemimpin-pemimpin organisasi perempuan terutama yang anti komunis.

Selama masa 1961-1965, pergerakan perempuan lebih diarahkan menjadi “alat revolusi”. Kongres Wanita Indonesia ke-XII tahun 1961 mendukung adanya Front Nasional sebagai Badan Perjuangan Rakyat Indonesia serta minta diikutsertakan dalam Front Nasional sebagai karyawan perempuan. Pada awal tahun 1962, Kongres Wanita Indonesia menjadi anggota Front Nasional. Selanjutnya setiap pengerahan masa oleh Front Nasional selalu diserahkan kepada Kongres Wanita Indonesia. Usaha pembentukan barisan-barisan Sukarelawati (Sukwati), khususnya dalam cangka melaksanakan “DWIKORA” (Dwi Komando Rakyat) untuk mengganyang Malaysia sangat digiatkan.

Pada Kongres Wanita Indonesia tahun 1964 di Jakarta, KOWANI telah mengukuhkan pemberian gelar “Pembimbing Agung Gerakan Wanita Revolusioner Indonesia” kepada Presiden Soekarno. Selain itu juga mengeluarkan pernyataan yang mendukung perjuangan rakyat negara-negara NEFOS. Nama KOWANI yang sempat tidak boleh digunakan sejak putusan forum *Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia di Yogyakarta* itu akhirnya dapat dipergunakan lagi.

Kalau pada Kongres tahun 1961 masih dikeluarkan de-sakan dan tuntutan agar Pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan, tidak demikian pada kongres yang diselenggarakan pada tahun 1964. Pada kongres di tahun 1964 yang berlangsung di Jakarta ini masalah tersebut sudah tidak disinggung-singgung lagi. Dalam kenyataan, perjuangan pergerakan perempuan Indonesia untuk mempertinggi derajat perempuan justru menjadi kabur, karena merosotnya penghargaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemimpin negara. Seolah-olah perempuan dianggap merupakan barang pameran dan hiasan saja. Dalam penyambutan pembesar-

pembesar negara selalu ditampilkan “Barisan Bhinneka Tunggal Ika” yang terdiri dari gadis-gadis muda dan cantik. Krisis akhlak merajalela, terutama di lapisan atas.

Dalam masa ini banyak delegasi perempuan dikirim ke negara komunis. Di samping itu, Kongres Wanita Indonesia telah menyelenggarakan untuk pertama kalinya *Peringatan Hari Wanita Internasional* pada tanggal 8 Maret 1965 antara lain dengan acara-acara seperti rapat umum di Istana Negara, Seminar TAVIP (Tahun Vivere Pericoloso), pengiriman bantuan ke garis depan, dan lain-lain. Sedang peringatan *Hari Anak-Anak* yang biasanya dilangsungkan pada tanggal 1, 2, 3, Juli ditetapkan untuk dijatuhkan pada tanggal 6 Juni, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Soekarno.

Selanjutnya KOWANI telah mengikutsertakan anggota-anggotanya dalam Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora, Pendidikan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Negara) dan Pendidikan Kader Nasakom. KOWANI juga telah membentuk Badan Koordinasi Sukarelawati yang beranggotakan organisasi yang sudah mempunyai Sukarelawati dengan Sukwati ABRI sebagai intinya. Di samping itu KOWANI juga menyelenggarakan Resimen Wanita Task Force Front Nasional sesuai dengan penggarisan dari PB Front Nasional.

Pada masa ini terbentuk 2 (dua) organisasi yaitu *Ikatan Wanita Antar Departemen* (IKWANDEP) pada tanggal 25 Mei 1961 dan *Badan Kerjasama Dharma Pertiwi* pada tanggal 15 April 1964. IKWANDEP beranggotakan karyawan Departemen-Departemen, dan Lembaga-lembaga non Departemen, sedangkan *Badan Kerjasama Dharma Pertiwi* beranggotakan keempat organisasi istri ABRI. Kedua organisasi tersebut dibentuk karena ingin lebih menggalang kerjasama antara anggotanya. Bentuk organisasinya masih dalam taraf perkembangan dan belum tersusun secara vertikal. Ketika Koordinasi Wanita Sekber Golkar terbentuk, baik

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

IKWANDEP maupun DHARMA PERTIWI tercatat sebagai anggotanya.

Ketegangan memuncak ketika PKI menyulut kudeta pada tanggal 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September/PKI (G 30 S). Tujuh orang perwira tinggi ABRI dibunuh dengan kejam di Lubang Buaya. Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad segera mengambil langkah-langkah untuk pemulihan keamanan.

Setelah pecah G 30 S, aspirasi perempuan yang selama ini terpendam dan terkekang mencari salurannya di luar KOWANI. Karenanya timbul aksi dari Koordinasi Wanita KAP-GESTAPU (Komando Aksi Pengganyangan Gestapu) pada akhir tahun 1965, yang kemudian menemukan bentuknya pada tahun 1966 dalam KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia).

Sementara itu, Majelis Permusyawaratan KOWANI tanggal 29 Oktober 1965, telah memecat GERWANI sebagai anggota karena terlibat G 30 S, namun pembersihan ke dalam Dewan Pimpinan KOWANI baru diadakan pada tahun 1966. Selanjutnya dalam Mukernas Golkar pada bulan Desember 1965, telah diputuskan struktur Sekber Golkar terbagi dalam 10 (sepuluh) Koordinasi termasuk Koordinasi Wanita. Sejak itu Koordinasi Wanita Sekber Golkar mulai diaktifkan. Demikianlah suasana pada masa 1960 — 1965 yang mempengaruhi dan tercermin dalam perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia.

Antara tahun 1960-1965, telah dilangsungkan 2 (dua) Kongres Wanita Indonesia yaitu Kongres tahun 1961 dan Kongres tahun 1964 di Jakarta. Dalam Kongres tahun 1961 terjadi perubahan yang penting, yaitu perubahan Sekretariat Kongres menjadi Dewan Pimpinan Kongres.

Pada sistem Sekretariat, Sekretariat hanya merupakan Badan Pelaksana dari semua keputusan/anjuran Kongres dan Majelis Permusyawaratan serta tidak dapat menentukan kebijaksanaan sendiri. Sedangkan Dewan Pimpinan mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Selama masa 1961 – 1965, hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan gabungan organisasi perempuan daerah mulai diadakan dengan melalui saluran kepala daerah. Pada Kongres tahun 1964, wakil-wakil dari gabungan organisasi perempuan daerah juga diundang. Kemudian dengan bantuan para Gubernur daerah-daerah yang belum mempunyai gabungan organisasi perempuan di tingkat propinsi (dati I) segera membentuknya. Hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan gabungan-gabungan organisasi wanita di daerah merupakan hubungan administratif.

Peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan menjelang Kongres tahun 1961:

a. Mengusulkan 9 orang calon dari Kongres Wanita Indonesia untuk duduk dalam Dewan Kebudayaan Nasional.

b. Mengusulkan kepada pimpinan Angkatan Darat pembentukan “Panitia Penasehat Kesatuan Wanita Angkatan Darat” serta pengangkatan 2 orang calon dari Kongres Wanita untuk “Tenaga Inti Kesatuan Wanita Angkatan Darat” yaitu Ny. Kartimi Tam-bunan Maulani dan Nn. Mulyati (sekarang Kol. Mulyati). Sebagai hasil dari saran-saran KWI tersebut, maka:

1) Dengan Surat Keputusan KASAD, No.: Kpts-381/3/1960 tertanggal 23 Maret 1960 dibentuk suatu “Panitia Penasehat Pembentukan Corps Wanita Angkatan Darat” yang terdiri dari:

a) Nn. Rahyu Paramita Abdurachman dari PMI sebagai Ketua.

b) Ny. Soemarno dari PMI

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- c) Ny. Maria Ulfah S.H. dari pimpinan KOWANI
- d) Ny. K. Soewarno dari KOWANI/Persit
- e) Ny. Sunaryo Mangunpuspito dari KOWANI/Muslimat Masyumi.
- f) Ny. Kwari Sosrosumarto dari KOWANI/Wanita Katolik.
- g) Ny. S.M. Sudarman dari KOWANI/Wanita Demokrat Indonesia.

2) Ditetapkan “Tenaga Inti KOWAD” yang terdiri dari 5 orang anggota dan 2 orang di antaranya adalah merupakan calon yang diajukan oleh Kongres Wanita Indonesia.

c. Menetapkan penyelenggaraan Kongres Wanita Indonesia pada yatahun 1960 di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 24-26 Desember 1960. Namun akhirnya, rencana ini diundur hingga tahun 1961 dan bertempat di Jakarta.

d. Membentuk *Steering Committee* dengan tugas menyusun acara Kongres, rencana perubahan Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, tata tertib Kongres dan tata cara pemilihan.

e. Mengajukan usul-usul yang konkrit berdasarkan pengalaman mengenai penyaluran bahan sandang pangan kepada Pemerintah.

f. Mengadakan Majelis Permusyawaratan selama tahun 1960/1961 pada tanggal 24 Januari 1960, 21 Pebruari 1960, 19 Juni 1960, 28 Agustus 1960, 4 Desember 1960 dan 13 Januari 1961.

g. Catatan :

Muslimat Masyumi pada bulan Agustus 1960 membubarkan diri, sehingga keapggotaannya dalam Kongres Wanita Indonesia terhenti.

1. Penyelenggaraan Kongres

Dalam kongres tahun 1961 ini masih menggunakan nama Kongres Wanita Indonesia. Penamaan ini merupakan yang terakhir kalinya, sebab pada putusan kongres ini terdapat penerimaan atau pengesahan kembali penggunaan nama KOWANI untuk menamai kongres-kongres selanjutnya.

Kongres ini berlangsung di Jakarta sejak tanggal 6 hingga 9 Februari 1961. Tepatnya di Gedung Wanita, di Jalan Diponegoro No.26. Adapun susunan kepanitiaannya sebagai berikut:

Pimpinan : Ny. Maria Ulfah S.H.
Ny. Memet Tanumijaya
Ny. Burdah Yusupadi
Ny. Mahmudah Mawardi
Ny. Dr. Hurustiati Subandrio

Hadir : Wakil-wakil dari 40 organisasi perempuan.

2. Keputusan-Keputusan Kongres

a) Kongres Wanita Indonesia susunannya dirubah menjadi berikut:

- (1) Kongres
- (2) Majelis Permusyawaratan
- (3) Dewan Pimpinan.

b) Dewan Pimpinan KOWANI terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh Kongres sekaligus dan sedapat mungkin mencerminkan segala aliran dari Kongres Wanita Indonesia. Diangkat seorang Ketua Koordinator yang dipilih di antara 9 orang pimpinan tersebut dan disahkan oleh Kongres.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

c) Kongres Wanita Indonesia menerima dan menghargai setinggi tingginya amanah PJM Presiden Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia sebagai pedoman perjuangan perempuan, bahwa kaum perempuan Indonesia sesuai dengan kodratnya harus melaksanakan perjuangan bersama-sama kaum pria dalam menyelesaikan Revolusi Nasional, ialah menciptakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.

d) Kongres mendukung sepenuhnya Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap pertama, sebagai mana diputuskan oleh MPRS dalam Ketetapan No. II/MPRS/ 1960 serta menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan menghimpun tenaga perempuan dalam kesatuan gerak.

e) Kongres Wanita Indonesia mendukung adanya Front Nasional sebagai Badan Perjuangan Rakyat Indonesia. Kongres Wanita Indonesia minta diikutsertakan dalam Front Nasional sebagai Karyawan Wanita.

f) Kongres Wanita Indonesia mendukung sepenuhnya keputusan dan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pengembalian wilayah Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan RI dengan menanggung segala akibatnya.

g) Kongres Wanita Indonesia menganggap sudah tiba waktunya agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan yang demokratis yang dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan keluarga.

h) Kongres Wanita Indonesia mendukung sepenuhnya keputusan dan sikap Pemerintah Republik Indonesia untuk menyokong perjuangan kemerdekaan rakyat Kongo, Aljazair dan Laos sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung.

i) Memberi tugas kepada organisasi-organisasi wanita setempat untuk memelihara dengan baik peninggalan dan tempat-tempat bersejarah di daerahnya masing-masing terutama mengenai pah-lawan-pahlawan perempuan.

j) Berusaha mendirikan “Museum Perjuangan Wanita”.

k) Memberi kekuasaan kepada Pimpinan Baru Kongres Wanita In-donesia untuk meninjau kembali Peraturan/Anggaran Dasar dari Badan-Badan Usaha bersama Kongres Wanita Indonesia (Yayasan-Yayasan, Panitia-Panitia, Komisi-Komisi, dan lain-lain).

l) Kongres mengesahkan pembentukan Yayasan Daya Wanita yang merupakan usaha penampungan/penyempurnaan bekas perkumpulan “Roumer Visser”, dengan Ketua Ny. Theodora Walandouw dan Wakil Ketua Ny. Jo Chaerul Saleh.

m) Memberi tugas kepada Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita. Indonesia membuat program yang berisikan:

(1) Piagam Hak-hak Wanita yang telah diputuskan oleh Kongres Wanita Indonesia.

(2) Ketetapani MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) ke-I dan II mengenai Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama Tahun 1961-1969.

n) Pada Kongres ke-XII itu telah dipilih sebagai Dewan Pimpinan:

(1) Dr. Ny. Hurustiati Subandrio (ISWI) sebagai Ketua Koordinator.

(2) Ny. Burdah Yusupadi (Wanita Demokrat Indonesia)

(3) Ny. Maria Ulfah SH (PASI)

(4) Ny. Titi Memed Tanumidjaja (Bhayangkari)

(5) Ny. Mudikdio (Gerwani)

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

(6) Ny. Mahmudah Mawardi (Muslimat NU)

(7) Drg. Ny. Yetty Rizali Noor kemudip diganti oleh Ny. Hutasoit (Perwari)

(8) Ny. Widya Latief (Persit KCK)

o) Dalam Kongres ini pada tanggal 7 Pebruari 1961 diadakan Diskusi Panel mengenai “Wanita dan Kepribadian Nasional”, dengan pimpinan Ny. Wahyudi, Ny. S. Kartowijono dan Nn. Aisah.

Pokok-pokok pembahasan:

(1) Kepribadian dan Kepribadian Nasional oleh Prof. Dr. Slamet Imam Santoso.

(2) Kebudayaan dan Kepribadian Nasional oleh Dr. Ny. Hurustiati Subandrio.

(3) Etika Agama dalam pembinaan Kepribadian Nasional, oleh Dr. H. Mukti

(4) Peranan dan tugas wanita dalam Pembinaan Kepribadian Nasional oleh Bapak Mohammad Said.

(5) Peranan dan tugas ibu dalam Pembinaan Kepribadian Nasional, oleh Ny. Sumargono, dengan pembahas-pembahas oleh: Bapak Tartib Prawirodiharjo, Prof. Dr. Notohamijoyo, dan Ny. Emma Puradiredja.

p) Beberapa rumusan Diskusi Panel yang menjadi resolusi Kongres antara lain:

(1) Pelaksanaan tugas perempuan dalam pembinaan Kepribadian Nasional ialah dengan mengikutsertakan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan semesta berencana sebagai yang ditetapkan oleh MPRS, terutama di dalam bidang-bidang pendidikan dalam rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

(2) Mengajukan kepada pemerintah agar menyempurnakan Badan Permufakatan Nasional Kesejahteraan Keluarga untuk memikirkan dan memberikan bimbingan mengenai kesejahteraan keluarga dalam membina Kepribadian Nasional melalui sekolah rendah sampai sekolah menengah atas dan masyarakat sesuai dengan jiwa Pancasila.

(3) Untuk melindungi kebudayaan nasional terhadap pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan selera dan kepribadian Indonesia harus dikembangkan Kebudayaan Nasional yang menuju ke kebudayaan Masyarakat Sosialis Indonesia dengan memupuk serta mengadakan pertukaran kebudayaan daerah dan mendirikan Balai Budaya.

(4) Harus diakui, bahwa penyiaran agama kalau dibandingkan dengan pengajaran dan pendidikan pengetahuan-pengetahuan lainnya baik di sekolah maupun di masyarakat belum memuaskan karenanya maka dianjurkan kepada Pemerintah c.q. Departemen Agama supaya lebih menyempurnakan penyiaran dan pendidikan agama.

3. Peristiwa-peristiwa penting dan kegiatan setelah Kongres

a. Pada tanggal 27 Maret s/d 7 April 1961, Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan-utusan ke “Asian Regional Conference” dan Seminar dari Associated Country Women of the World di Universitas Malaya Kualalumpur, yaitu:

- 1) Ny. Muharam Wirangtakusurnah (Bhayangkari)
- 2) Nn. Malahayati Abdullah (Pemuda Putri Indonesia)

Seminar itu diselenggarakan oleh National Association of Women's Institutes, Federation of Malaya, yang diketuai oleh Raja Perempuan Perlis.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

b. Untuk memperingati usaha pemberantasan buta huruf, maka pada tanggal 21 April 1961 (Hari Kartini), diadakan perlombaan pemberantasan buta huruf antar organisasi-organisasi perempuan dengan bekerja lama dengan Jawatan Pendidikan Masyarakat.

c. Sehubungan dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) untuk membebaskan Irian Barat yang diucapkan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961, maka Kongres Wanita Indonesia menyatakan kesanggupannya ‘melaksanakan komando tersebut.

d. Pada bulan April 1962 dikirim Misi Muhibah dari Kongres Wanita Indonesia ke Malaya (sekarang Malaysia) diketuai oleh Dra. Ny. M. Wahyudi (Bhayangkari). Turut serta dalam Misi tersebut, ialah:

Ny. Tuti Subrata dari PASI

Ny. Astrawinata dari Wanita Demokrat/Marhaenis

Ny. Rochana Zainal Abidin Achmad dari GPII Putri

Ny. Abednego dari PWKI

Ny. Tan Hwie Kiat dari ISWI

Ny. Andreas Sastrohusodo dari Perwari

Ny. Kartono Mangunkusumo dari Yayasan Hari Ibu

Ny. K. Soewarno dari Persit KCK

Ny. Lies Said dari Majalah Wanita (Wartawan)

Ny. Asnawi dari Majalah Keluarga (Wartawan)

Setiap orang peserta diberi kesempatan mengadakan hubungan dengan organisasi yang sejenis.

e. Pada awal tahun 1962 Kongres Wanita Indonesia masuk Front Nasional.

f. Dalam memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 1962, Kongres Wanita Indonesia selain mengajak dan menyerukan kaum wanita, untuk mengenang perjuangan beliau, juga menganjurkan agar mempergiat pelaksanaan TRIKORA, menyempurnakan usaha-usaha pemberantasan Buta Huruf, menggerakkan pengumpulan beras dan/ atau bahan makanan lain secara gotong-royong untuk membantu yang kekurangan, menyederhanakan cara hidup sesuai dengan tujuan penyelesaian Revolusi Indonesia.

g. Dari tanggal 31 Agustus s/d 1 September 1962 diadakan “Musyawarah Front Nasional” di mana Kongres Wanita Indonesia hadir, dan membahas:

(1) Tindak lanjut perjuangan pembebasan Irian Barat,

(2) Tindak lanjut pemulihan keamanan, dan

(3) Masalah sandang pangan.

h. Dalam tahun 1963 Kongres Wanita Indonesia mengadakan seminar tentang “Wanita dan Landreform” dan “Musyawarah Ekonomi”.

BAGIAN IV

Konsolidasi Perempuan Pembangunan

SEJAK berakhirnya penyelenggaraan Kongres Wanita Indonesia pada tahun 1961, gerakan perempuan Indonesia terkonsentrasi pada konsolisi gerakan-gerakan mereka. Di antara latar belakangnya berasal dari semakin bersatunya gerakan kaum perempuan melalui organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia. Khususnya pada kongres di tahun 1961 yang di antara keputusannya memberlakukan lagi nama KOWANI untuk menyebut *Kongres Wanita Indonesia*.

Nama KOWANI ini pernah digunakan untuk menyebut kongres sejak tahun 1946 hingga kongres-kongres sebelum terbentuknya forum *Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia* yang berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1949. Sejak forum yang disponsori oleh KOWANI itu mengeluarkan keputusannya, nama KOWANI sempat tidak digunakan lagi hingga keluarnya keputusan kongres pada tahun 1961. Sejak kongres yang berlangsung di tahun 1964, nama Kongres KOWANI sudah dapat digunakan lagi secara resmi.

Kongres Wanita Indonesia terbaru (saat tulisan ini dibuat), nama KOWANI masih digunakan untuk menyebut Kongres ke-XXIV KOWANI yang berlangsung pada tahun 2014.

Selain pada masa ini anggota KOWANI mempererat persatuan mereka, organisasi-organisasi baik dalam KOWANI maupun di

luarnya, semakin berkembang dan bermunculan. Sehingga dalam bahasan ini akan dibahas juga organisasi-organisasi yang lain.

A. KOWANI

Tahun 1964 merupakan tahun kelahiran kembali bagi KOWANI. Yaitu, tahun dimana nama KOWANI dapat digunakan lagi untuk menyebut nama Kongres Wanita Indonesia. Nama KOWANI yang lahir di Solo pada tanggal 26 Februari 1946 itu sempat berhenti digunakan sejak tahun 1949 hingga menjelang kongres pada 1964. Sejak tahun '64 inilah KOWANI dapat digunakan lagi sebagaimana tahu '46.

Pada tahun 1964 ini jumlah organisasi-organisasi yang bergabung dalam KOWANI sebagaimana berikut ini:

- 1) Gerakan Wanita Marhaenis
- 2) Muslimat N.U.
- 3) Gerwani
- 4) Bhayangkari
- 5) Persit KCK
- 6) Persatuan Istri Angkatan Udara (PIA)
- 7) Yalasenastri
- 8) Pemuda Puteri Indonesia (PPI)
- 9) Wanita Katolik RI
- 10) PWKI
- 11) Perwamu
- 12) Perwari
- 13) Wanita Perti

- 14) PSII Wanita
- 15) Pertiwi
- 16) Sahati
- 17) Pikat
- 18) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- 19) Putri Narpowandowo
- 20) Budhi Istri
- 21) Pasundan Istri (PASI)
- 22) Gerakan Wanita Sosialis (GWS)
- 23) Aisyiyah
- 24) Wanita Rakyat
- 25) Wanita Taman Siswa
- 26) Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI)
- 27) Wanita Indonesia
- 28) Powasa
- 29) Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDID)
- 30) Wanita Gajah Mada
- 31) Rukun Wanita Indonesia
- 32) Putri Budi Sejati
- 33) Wanita Nasional
- 34) Wanita Baperki
- 35) Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI)
- 36) Persatuan Istri Tehnisi

1. Kongres KOWANI Tahun 1964

Kongres pada tahun 1964 ini merupakan Kongres Wanita Indonesia yang pertama dalam menggunakan nama KOWANI sejak dilarang pada tahun 1949. Kongres kembali menggunakan nama Kongres KOWANI, sebagaimana tahun-tahun sebelum 1949.

a. Penyelenggaraan Kongres

Kongres KOWANI tahun 1964 ini berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juli 1964 di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kongres yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia ini dihadiri oleh berbagai utusan dari organisasi-organisasi anggota kongres, utusan-utusan dari daerah-daerah di Indonesia, dan utusan-utusan dari beberapa negara lainnya.

* 200 orang utusan dari organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia.

* 200 orang utusan dari daerah-daerah, termasuk Irian Barat.

* 30 orang tamu-tamu dari Luar Negeri, yaitu:

§ Sovyet Uni

§ Philipina

§ RRT (sekarang RRC/Republik Rakyat Cina)

§ Korea

§ Vietnam

§ Cekoslowakia

§ Honggaria

§ Yugoslavia

§ Republik Demokrasi Jerman

b. Prasaran-prasaran

* *Revolusi Makanan Indonesia* oleh Menteri Kesehatan Dr. Satrio.

* *Memperhebat Ketahanan Revolusi Nasional dengan memper-hebat usaha Swa Sembada Pangan* oleh. Menteri Sosial Rusiah Sardjono SH.

* prasaran dari Menteri Pertanian dan Agraria Soejana SH.

c. Keputusan-Keputusan

1) Mengesahkan perubahan singkatan Kongres Wanita Indonesia menjadi KOWANI

2) Penyempurnaan Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia, antara lain:

a) Pedoman Kongres Wanita Indonesia ialah Manifesto Politik Republik Indonesia (pasal 2).

b) Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali (pasal 5).

c) Majelis Permusyawaratan bersidang sekurang-kurangnya 4 bulan sekali (pasal 6).

d) Keanggotaan (pasal 8):

Anggota biasa sekurang-kurangnya mempunyai 5 cabang dalam 5 Daswati I.

3) Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Kongres (tanggal 24 Juli 1964 di Istana Olah Raga) menjadi landasan pokok program perjuangan KOWANI selanjutnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

4) Mendukung pemberian gelar oleh Gerakan Wanita Marhaenis Indonesia kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita sebagai "*Pembimbing Agung Gerakan Wanita Revolusioner Indonesia*".

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

5) Membentuk suatu barisan sukarelawati yang bertekad bulat, ampuh serta siap siaga sewaktu-waktu melaksanakan setiap Komando Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno baik untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas homefront dalam rangka DWIKORA mengganyang Malaysia.

6) Mendukung sepenuhnya anjuran Presiden untuk menjadi pe-lopoh dan Sukarelawati Swa Sembada Pangan, terutama dalam menghadapi proyek neo-kolonialisme “Malaysia”.

7) Agar wanita diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan operasi-operasi ekonomi/Bidang Pangan, pada pemerintahan, lembaga-lembaga, badan-badan lainnya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

8) Memegang teguh Pancasila sebagai landasan Pendidikan Nasional serta menjadikan Pancasila sebagai batu ujian keju-juran revolusioner di lapangan pendidikan.

9) Menjadi pemrakarsa bagi penyelenggaraan konperensi wanita Asia Afrika ke-II berSama seluruh perempuan Asia Afrika lainnya secara gotong-royong.

10) Mendukung perjuangan rakyat negara-negara NEFO (New Emerging Forces).

11) Menjadikan hari lahir Presiden tanggal 6 Juni sebagai Hari Kanak-Kanak Nasional.

12) Susunan Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (KO-WANI) yang terpilih untuk jangka waktu tahun 1964-1967:

a) Dr. Ny. Hurustiati Subandrio (ISWI) sebagai Ketua Koordinator.

b) Ny. Yo Chaerul Saleh (PERWARI)

c) Ny. Bambang Supeno (PERSIT KCK), yang kemudian diganti oleh Ny. Latif Hendraningrat.

d) Ny. D. Sukahar (Bhayangkari) yang kemudian diganti Ny. Suyono Prawirobismo

e) Ny. Malftnudah Mawardi (Muslimat NU)

f) Ny. Mudikdio (Gerwani)

g) Ny. Kartini Radjasa BA (Gerakan Wanita Marhaenis)

h) Dra. Ny. B. Simorangkir (PKWI)

i) Ny. C. Suparni Muliono SH (Wanita Katolik RI).

2. Kongres KOWANI Tahun-Tahun Berikutnya

Pada tahun-tahun setelah kongres di tahun 1946 ini, kongres-kongres wanita Indonesia menggunakan nama Kongres KOWANI. Adapun untuk pembedaan antara nama kongres yang satu dengan kongres yang lainnya, digunakan sebagaimana urutan kongres yang ditulisa di antara kata Kongres dan KOWANI. Pada kongres ke-24, misalnya, nama kongres disebutkan sebagai Kongres ke-XXIV KOWANI.

Kongres ke-24 itu berlangsung selama tiga hari di Balai Kartini Jakarta, mulai tanggal 3 hingga tanggal 5 Desember 2014. Kongres mengangkat tema: Optimalisasi Potensi, Apresiasi, dan Kinerja Perjuangan Wanita Indonesia Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Selain sebagai forum sidang pertanggungjawaban Ketua Umum Dewi Motik Pramono, kongres juga melanjutkannya dengan pemilihan Ketua Umum KOWANI untuk periode 2014-2019.

Dalam pemilihan ketua umum itu terdapat tiga kandidat, yaitu DR. Dewi Motik Pramono (*incumbent*), DR. Giwo Wiyogo, dan DR. Charletty Choesyana Taulu. Setelah pemilihan dilakukan dan keputusan diambil, maka terdapat kesepakatan bahwa DR. Giwo Wiyogo didaulat sebagai Ketua Umum KOWANI periode 2014-2019.

B. Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen

Atas prakarsa dari wakil-wakil organisasi karyawan dari 7 Departemen yaitu Departemen Penerangan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Kejaksaan, Departemen Agama, Departemen PDK dan Departemen Perindustrian, pada tanggal 25 Mei 1961 dibentuk organisasi federasi “Ikatan Pegawai Wanita Antar Departemen” (IKWANDEP).

IKWANDEP adalah merupakan organisasi pegawai perempuan (kar-yawati di Departemen/Lembaga non Departemen/Perusahaan Ne-gara serta menitik beratkan aktifitasnya dalam peningkatan kesejahteraan pegawai perempuan. Tujuan mendirikan IKWANDEP ialah :

a) Ikut serta memperjuangkan perbaikan nasib kaum perempuan Indonesia pada umumnya dan para karyawan khususnya.

b) Membina dan memupuk persatuan serta persaudaraan sesama karyawan dan karyawan khususnya.

c) Memperjuangkan penghargaan serta pengembangan karier pada karyawan dalam bidang tugasnya masing-masing.

Latar belakang dari terbentuknya IKWANDEP adalah permasalahan “Kedudukan Perempuan sebagai pegawai”, antara lain:

a. Masih terdapatnya kebijaksanaan dalam Departemen/ Lembaga/ Perusahaan Negara yang kurang menguntungkan pegawai perempuan:

1) kurang memberikan kepercayaan kepada pegawai-pegawai perempuan untuk jabatan-jabatan penting dalam Departemen-Departemen/Lembaga-Lembaga/PN-PN.

2) pengiriman delegasi untuk kepentingan perempuan yang terdiri dari pria.

b. Perlunya penyempurnaan pelaksanaan peraturan kepegawaian bagi pegawai perempuan.

Susunan Pengurus IKWANDEP yang pertama adalah sebagai berikut:

Ketua : Ny. S. Koempoel (Departemen Penerangan)

Wakil Ketua : Nn. Aisah (Departemen Dalam Negeri)

Sekretaris Jenderal : Ny. Yoyoh Wartomo SH (Departemen Kesehatan).

Bendahari : Ny. Rustamadji (Departemen Penerangan)

Pembantu Umum : Ny. Djamari Amin (Departemen Agama)

Ny. Lena Karim (AURI)

Ny. Erni (GARUDA)

Pembina organisasi adalah Menteri Nakertranskop pada saat itu yaitu Dr. Awaludin dan kemudian diteruskan oleh Laksamana Laut Mursalim. Penasehat adalah Ny. Maria Ulfah Soebadio SH., Dra. Ny. S.K. Trimurti, Drg. Ny. Yetty Rizali Noor dan Ny. Suwarni Salyo SH.

Pada tahun 1964 IKWANDEP telah memberikan gelar “Ibu Agung” kepada Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Ketika Sekber Golkar terbentuk, IKWANDEP menggabungkan diri di dalamnya dan kemudian dikelompokkan sebagai anggota pada Koordinasi Wanita.

Sesuai dengan anjuran Dr. Awaludin dan Laksamana Mursalim, pada tahun 1971 nama IKWANDEP diganti menjadi PERSATWI (Persatuan Tenaga Kerja Wanita Indonesia) dengan maksud agar ruang lingkup keanggotaannya tidak hanya Departemen/non De-partemen/Lembaga Tinggi Negara dan PN, tetapi juga Swasta.

C. Badan Kerjasama Dharma Pertiwi

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, maka secara berturut-turut telah terbentuk organisasi istri Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a) Persit didirikan pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta.
- b) Bhayangkari didirikan pada tanggal 17 Agustus 1949 di Yogyakarta.
- c) PIA Ardhya Garini didirikan pada tanggal 25- Nopember 1956 di Bandung.
- d) Yalasenastri didirikan pada tanggal 27 Agustus 1957 di Surabaya.

Dengan telah terbentuknya organisasi istri TNI dari semua Angkatan dan Kepolisian RI, maka sekitar tahun 1959 telah dimulai adanya persatuan dan kerjasama yang berbentuk Pekan Olah Raga Istri Angkatan Bersenjata (PORISAB).

Setelah wilayah Irian Barat kembali ke pangkuan RI, maka kerja sama tersebut dilanjutkan dengan pengiriman-pengiriman anggota dari ke 4 organisasi istri ABRI ke Irian Barat sebanyak 2 tahap, untuk melancarkan suatu misi Pemerintah yang disebut “Operasi Pertiwi” dalam rangka membangun Irian Barat. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Oktober 1963, sebanyak 16 orang Ibu dan tahap kedua pada tahun 1964, sebanyak 4 orang Ibu. Sebagai hasil dari operasi Pertiwi ini, Pemerintah mengirimkan 20 orang perempuan asli Irian Barat ke Jakarta untuk mengikuti kursus pengetahuan rumah tangga dan keperempuanan yang diselenggarakan. oleh Pemerin-tah. Kursus tersebut diselenggarakan dua kali di Jakarta dengan tenaga pengajar dan pengasuh yang terdiri dari anggota-anggota or-ganisasi istri ABRI.

Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, maka pada tanggal 15 April 1964 pukul 12.00, bertempat di Gedung Panti Perwira

Jakarta, ditandatangani naskah Keputusan Bersama tentang berdirinya “Badan Kerja Sama Dharma Pertiwi” (BKS Dharma Pertiwi) oleh para Ketua Umum ke 4 organisasi istri ABRI yaitu oleh: Ny. S.R. Lasmindar (Persit Kartika Chandra Kirana), Ny. Susilo (Yalase-nastri), Ny. Budiardjo (PIA Ardhya Garini), dan Ny. B. Suwito (Bhayangkari). Perlu diketahui bahwa pada waktu itu Ketua thnum organisasi istri ABRI belum dijabat secara fungsional.

Sejak saat itu ke 4 organisasi tersebut telah menjalankan kegiatan yang sama sifat dan tujuannya serta mengadakan kerja sama di bidang sosial. Kejadian ini diikuti oleh daerah dengan terbentuknya BKS Dharma Pertiwi yang bersifat lokal dan tidak ada hubungannya satu sama lain.

3. Peranan Wanita dalam pengganyangan Gestapu/PKI

Setelah peristiwa G 30 S, pada 1 Oktober 1965 Mayor Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima KOSTRAD segera mengambil langkah-langkah untuk pemulihan ketertiban dan keamanan. Proses pemulihan keamanan dan ketertiban ternyata mengalami hambatan, terutama karena sikap Presiden Soekarno sendiri seolah-olah melindungi PKI.

Timbul KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), yang kemudian melancarkan demonstrasi-demonstrasi. Di samping itu timbul KAP GESTAPU (Komando Aksi Pengganyangan GESTAPU) yang terdiri dari Partai Politik dan Organisasi Masa, dengan Ketua Haji Subchan Z.E. dan Sekjen Harry Chan SH.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 Corps PII Wati (Eksponen KAPPI) menghubungi HMI Wati (Eksponen KAMI) untuk mengadakan pertemuan dengan ormas-ormas perempuan guna menjajagi kemungkinan menggalang aksi di kalangan perempuan. Pada tanggal 3 Nopember 1965, rapat KAP GESTAPU telah

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

memutuskan untuk menye-lenggarakan demonstrasi perempuan dan Corps PII Wati/HMI Wati diminta menyelenggarakan pelaksanaannya.

Selanjutnya atas usaha Corps PII Wati bersama HMI, maka pada tanggal 5 Nopember 1965 berhasil diadakan pertemuan dengan ormas-ormas perempuan bertempat di kantor PMKRI Jalan Samratulangi No. 1. Hadir wakil-wakil dari organisasi-organisasi: Wanita Katolik, Wanita Marhaenis (OSA-USEP), Wanita Islam, Aisyiyah, Muslimat NU. GERWAPSI, Wanita Perti, Corps PII Wati dan HMI Wati. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan demonstrasi wanita Ibu Kota, yang akan menyampaikan resolusi/ pernyataan kepada Menteri Pangad Jenderal Soeharto dan PB Front Nasional. Selanjutnya dibentuk panitia pelaksana yang terdiri dari antara lain Ketua Ny. H. Asmah Syahroni (Muslimat NU), Sekretaris Nn. Sri Syamsiar BA (sekarang Dra. Ny. Sri Syamsiar Issom) Corps PII Wati).

Dengan persiapan yang singkat pada tanggal 8 Nopember 1965 appel & demonstrasi wanita Ibu Kota dapat dilaksanakan. Demonstrasi diikuti oleh kurang lebih 25000 masa perempuan seperti: Muslimat NU, Gerwapsii, Wanita Perti, Fatayat NU, Wanita Mar-haenis, Wanita Islam, Wanita Al Irsyad, Wanita Katolik yang diikuti pula oleh masa pemudi/pelajar/mahasiswa antara lain HMI Wati (*Himpunan Mahasiswa Islam*), Corps PII Wati, PMMI (*Persatuan Mahasiswa Muslimin Indonesia*) Wati, PPSK (*Persatuan Pelajar Sekolah Kristen*) PMKRI (*Persatuan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia*) Putri, IMM (*Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah*). SEMMI (*Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia*) serta PARFI (*Persatuan Artis Film Indonesia*) dan lain-lain.

Appel diadakan di lapangan Banteng, di mana 3 orang pembicara telah memberikan sambutan, dari wakil golongan agama (Ny. Asmah Syahroni), wakil golongan nasional (Ny. Gani Suryo-kusumo) dan wakil pemudi/pelajar putri/mahasiswa (Nn. Aniswati sekarang Ny.

Aniswati Machnan). Kemudian masa wanita bergerak dengan tertib menuju markas KOSTRAD dengan didahului oleh Corps Genderang PII Jakarta Raya.

Masa diterima langsung oleh Menteri Pangad Mayor Jenderal Soeharto. Di depan Menteri Pangad Mayor Jenderal Soeharto, atas nama para demonstran perempuan Ibu Kota, Ny. S.Y. Arudji Kartawinata telah membacakan resolusi kepada Menteri Pangad yang isinya sebagai berikut:

a. Pernyataan setia kepada Bung Karno dan kesiap siagaan untuk menyelamatkan Pancasila dari rongrongan baik, dari Nekolim maupun Kontra Revolusi Gestapu/PKI beserta ormas-ormasnya dan antek-anteknya.

b. Mengetuk hati nurani Bung Karno untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia dari pengaruh moral yang negatip dengan segera membubarkan PKI/Gerwani dan ormas-ormasnya yang bernaung di bawahnya. Kepada Menteri PDK didesak untuk mengambil alih sekolah-sekolah Gerwani seluruh Indonesia karena sekolah tersebut mendidik generasi muda menjadi manusia tidak bermoral dan tidak ber-Tuhan.

Setelah itu masa perempuan menuju Front Nasional, dan disambut/diterima oleh Wakil Sekjen Front Nasional Brig. Jend. Djuhartono. Di depan Brig. Jend. Djuhartono, masa perempuan diwakili oleh Ny. C. Mustamiruddin (Wanita Katolik) membacakan resolusi yang sama isinya dengan yang disampaikan kepada menteri Pangad Mayor Jenderal Soeharto.

Selanjutnya pada pertengahan Nopember 1965 utusan Koordinasi Wanita KAP GESTAPU yang terdiri dari Ny. Asmah Syahroni, Nn. Sri Syamsiar BA, Ny. Abadi Ny. C. Mustamiruddin dan Nn. Wifra Ilyas BA, telah mendatangi kantor KOWANI di Merdeka Selatan untuk menyampaikan resolusi yang langsung

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

diserahkan kepada Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio selaku Ketua Koordinator DP KOWANI Koordinasi Wanita KAP GESTAPU telah menyerukan kepada organisasi-organisasi perempuan dan kaum perempuan Ibu Kota untuk menutup sekolah-sekolah Tanam Kanak-Kanak Gerwani serta membantu perjuangan KAMI dan KAPPI dengan menyelenggarakan dapur-dapur umum. Dapur umum yang tersebar di Ibu Kota tersebut menyiapkan nasi-nasi bungkus untuk para Mahasiswa, Pemuda dan pelajar yang berdemonstrasi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

KAP GESTAPU kemudian berubah menjadi Front Nasional yang keanggotaannya adalah Parpol-Parpol sehingga generasi muda yang tidak berafiliasi dengan Partai Politik seperti PIT dan HMI tidak tertampung aspirasinya. Karenanya praktis Koordinasi KAP GES-TAPU tidak berjalan lagi. Namun pada tahun 1966 terbentuk KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, untuk mendampingi secara aktif setiap aksi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa.

D. Wanita Sekber Golkar

Sebagai reaksi terhadap pertumbuhan demokrasi terpimpin yang tidak sehat, pada tanggal 20 Oktober 1964 dibentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya yang rnenghimpun organisasi-organisasi fungsional dan profesi yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Mula-mula anggota Sekber Golkar berjumlah 61 Organisasi, yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi termasuk organisasi perempuan.

Dalam Musyawarah Kerja Nasional ke I Sekber Golkar pada tanggal 9 s/d 11 Desember 1965 di Cibogo dalam bidang konsolidasi organisasi diputuskan penggolongan koordinator anggota Sekber Golkar dalam 10 koordinasi termasuk Koordinasi Wanita. Pimpinan Koordinasi Wanita Sekber Golkar yang pertama merupakan Presidium tersusun sebagai berikut:

Ny. Soedarsono SH : (Yalasenastri)

Ny. H. Rabs Syansyuridjal : (Wakil Islam)

Ny. Emma Puradiredja : (PAST) kemudian diganti oleh Ny. SR Tambunan

Ny. Ch. Pangemanan : (Wanita MKGR)

Ny. Ina Lokollo : (Wanita Satya Praja) kemudian diganti oleh Ny. Chamsinah Ali Dahlan.

Dan sebagai Sekretaris Jenderal Ny. Jusra Lubis (Putri Alwashliyah) yang kemudian diganti oleh Nn. Yohani Amien (Wanita GTP). Waktu itu telah terdaftar 23 organisasi wanita yang tergabung dalam Koordinasi Wanita Sekber GOLKAR:

1. Yalasenastri
2. Wanita Islam
3. Wanita MKGR (Wanita Musyawarah Keluarga Gotong Royong)
4. PASI (Pasundan Istri)
5. Wanita Satya Praja
6. Putri Alwashliyah
7. Wanita GTP (Wanita Gerakan Tenaga Pembangunan)
8. IKWANDEP (Ikatan Pegawai Wanita antar Departemen)
9. HMI Wati (Himpunan Mahasiswa Islam)
10. Corps PII Wati (Pelajar Islam Indonesia)
11. Nasjiatul Aisyah
12. Wanita IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah)
13. IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
14. Wanita Corps Tendean

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

15. Sabarati/Berunawati
16. Dharma Pertiwi
17. POWSA (Persatuan Organisasi Wanita Setanah Air)
18. Ikatan Perawat Indonesia
19. PIKAT (Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnnya)
20. Dharma Karini
21. Perwari
22. GWS (Gerakan Wanita Sosialis)
23. Putri Narpowandowo.

E. Era Orde Baru

Tahun 1966 menandakan berakhirnya era Soekarno dan Orde Lama serta permulaan Orde Baru dan era Pembangunan. Gerakan 30 September/PKI menimbulkan pergolakan hebat di dalam masyarakat disebabkan ketidakpuasan dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Presiden Soekarno/Pemimpin Besar Revolusi dalam menyelesaikan peristiwa tersebut.

Pergolakan dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965 oleh tujuh belas organisasi mahasiswa dari berbagai tempat. Bentuk kesatuan aksi tersebut merupakan wujud pergerakan baru yang maksudnya mengadakan aksi-aksi bersama untuk mengamankan dasar dan falsafah negara (Pancasila) dan membantu ABRI dalam menumpas G 30 S. Lahirnya KAMI segera disusul oleh terbentuknya Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan lain-lain.

Tiga hal yang diajukan sebagai tuntutan yang terkenal dengan nama TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat), yaitu:

1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia
2. Retooling Kabinet Dwikora
3. Penurunan harga-harga

Aksi-aksi tersebut demikian memuncaknya sehingga pada tanggal 11 Maret 1966 keluar Surat Perintah Presiden Soekarno yang kemudian terkenal dengan nama "SUPERSEMAR" (Surat Perintah Sebelas Maret) yang menugaskan kepada Jenderal TNI Soeharto untuk, mengembalikan keamanan dan ketertiban. Jenderal Soeharto segera mengambil langkah-langkah demi Keamanan Nasional berdasarkan garis yang adil dan benar daripada Tri Tuntutan Rakyat itu. Sebagai tindakan pertama pada tanggal 12 Maret 1966 PKI dinyatakan sebagai partai terlarang bersama dengan segenap organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan partai tersebut.

Dunia Pergerakan Wanita mengharapkan KOWANI mengambil prakarsa dan memberi bimbingan dalam keadaan tidak menentu itu. Sekalipun GERWANI telah dipecat dari keanggotaan KOWANI dalam Majelis Permusyawaratan tanggal 29 Oktober 1965, akan tetapi selama Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio masih menjabat Ketua Koordinator KOWANI sulit diharapkan perubahan-perubahan yang cepat dalam tubuh KOWANI. Bahkan KOWANI masih memperingati Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret 1966. Baru setelah keluarnya "SUPER SEMAR" dan dilakukan penahanan terhadap sejumlah Menteri-Menteri Kabinet Dwikora, antara lain juga Dr. Soebandrio, maka dr. Ny. Hurustiati Soebandrio tidak dapat aktif lagi. Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua KOWANI kepada Ny. Mahmudah Mawardi dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua Periodik pada tanggal 14 Maret 1966. Kebijakan tersebut disahkan dalam Majelis Permusyawaratan KOWANI tanggal 15 April

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

1966. Pada sidangnya itu Majelis juga memutuskan untuk selekasnya mengadakan Kongres Luar Biasa dengan maksud mengadakan konsolidasi ke dalam.

Selama memegang jabatan Ketua Koordinator sejak tahun 1961--1965, Dr. Ny. Hurustiati Soebandrio dinilai telah mengarahkan KOWANI ke suasana pengaruh blok sosialis/komunis yang antara lain dapat dibuktikan dengan banyaknya pengiriman delegasi-delegasi perempuan ke negara-negara komunis dan peringatan Hari Wanita Internasional. Kuatnya kedudukan sebagai Ketua Koordinator dianggap menjadi penyebab bahwa keputusan-keputusan dan sikap KOWANI didominasi oleh pendirian Ketua Koordinator. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa KOWANI yang berlangsung dari tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 1966 di Jakarta memutuskan untuk meniadakan jabatan Ketua Koordinator dan mengganti sistem pimpinan KOWANI dengan Ketua Periodik yang bergilir antara semua anggota Dewan Pimpinan. Dengan sistem ini hendak dicegah pengaruh yang berlebihan oleh satu orang Ketua (Koordinator) KOWANI.

Pada tahun-tahun berikutnya KOWANI terus mengadakan konsolidasi ke dalam dan meningkatkan kegiatan agar supaya dalam masa Orde Baru dapat menjadi wadah penghimpun aspirasi kaum perempuan Indonesia. Dengan organisasi-organisasi perempuan di luar KOWANI diletakkan dasar-dasar kerja sama. Terutama dengan Koordinasi Wanita Sekber Golkar dan KAWI diadakan Badan Musyawarah untuk melaksanakan peringatan-peringatan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional secara bersama-sama.

Atas anjuran Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah dirintis pembentukan Komisi Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) yang tugasnya adalah menunjang pergerakan perempuan dengan cara mengumpulkan data dan mengadakan penelitian tentang keadaan dan kedudukan perempuan

serta memberi rekomendasi-rekomendasi atas dasar penelitian dan data tersebut. Keanggotaan KNKWI terdiri dari unsur Pemerintah, pergerakan perempuan dan ahli-ahli perorangan. Dan unsur pergerakan perempuan yang pada waktu itu aktif dalam pembentukan KNKWI adalah KOWANI, Koordinasi Wanita Sekber Golkar dan KAWI. Untuk pertama kali KNKWI memilih pengurus yang sifatnya suatu presidium terdiri dari unsur pergerakan perempuan dan Pemerintah pada tanggal 16 Desember 1968.

Dengan masuknya kembali Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terbuka lagi kesempatan untuk menempatkan wakil Indonesia dalam United Nations Commission on the Status of Women. Melalui KNKWI diusulkan kepada Pemerintah agar wakil Indonesia dalam Komisi tersebut diambil dari unsur pergerakan perempuan. Hal ini berhasil dengan ditunjuknya Drg. Ny. Yetty Rizali Noor (tahun 1971-1974) dan Ny. Suwarni Saljo, S.H. (tahun 1974-1978) untuk mewakili Indonesia dalam United Nations Commission on the status of Women. Sebelumnya yang ditunjuk untuk mewakili Indonesia dalam Komisi tersebut adalah perempuan pejabat tinggi, antara lain Nn. Laili Rusad, S.H. dan Ny. Artati Marzuki, sedangkan Ny. Rusiah Sarjono, SH dan Nn. Endang Sulbi, S.H. (Ny. Suska) selain pejabat tinggi juga mendapat dukungan dari KOWANI.

Sebagai salah satu acara dalam memperingati “Empat Puluh tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia” oleh KOWANI diselenggarakan simposium “Reevaluasi Pergerakan Wanita Indonesia” pada tanggal 29 dan 30 Januari 1969 di Jakarta, dengan mengundang peserta dari kalangan luas.

Sistem Ketua Periodik dalam struktur pimpinan KOWANI tetap dipertahankan pada Kongres KOWANI ke-XV yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Pebruari 1970 di Jakarta. Sementara itu Pemerintah Orde Baru telah mulai melaksanakan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

REPELITA ke-I dan bertekad untuk mensukseskan pembangunan melalui akselerasi modernisasi dengan mengikutsertakan seluruh rakyat. Suasana pembangunan membawa perubahan-perubahan secara cepat dan menuntut pula partisipasi kaum perempuan secara lebih mantap dan terarah. Menjelang diselenggarakannya Kongres KOWANI ke-XVI timbul pemikiran di kalangan sejumlah organisasi-organisasi anggota KOWANI, agar KOWANI menyusun Program Kerja yang terarah. Untuk melaksanakan program kerja itu perlu pimpinan yang kesinambungannya tidak terputus dan oleh karena itu perlu ditetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemikiran tersebut diterima dalam Kongres KOWANI ke-XVI yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 1974 di Jakarta. Dalam Kongres itu dipilih 11 anggota Dewan Pimpinan, termasuk Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang juga mempunyai wewenang eksekutif. Dalam sistem ini tidak lagi diadakan Majelis Permusyawaratan setiap 4 atau 5 bulan untuk mengukuhkan Ketua Periodik, tetapi sidang Majelis Permusyawaratan diadakan jika dianggap perlu dalam menyusun kebijaksanaan yang prinsipal.

Suatu perkembangan yang menggembirakan adalah meningkatnya kegiatan di kalangan perempuan yang disalurkan melalui sarana organisasi perempuan dan yayasan. Peningkatan kegiatan itu dapat pula kita saksikan pada BKS DHARMA PERTIWI yang dibentuk pada tahun 1964 dan sejak tahun 1966 bernaung di bawah pembinaan HANKAM ABRI. Kemudian pada tahun 1972 berubah menjadi "DHARMA PERTIWI". Kegiatan kekaryaan DHARMA PERTIWI dilakukan melalui berbagai forum, seperti MPR, DPR, DPRD Tingkat I dan Tingkat II, GOLKAR, KOWANI, BPOW/BKOW, Musyawarah Perguruan Swasta, GOPTKI dan KNKWI.

Organisasi-organisasi perempuan Islam pada tanggal 2 Juli 1967 mendirikan "Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Perempuan Islam Indonesia" (BMOPII) yang kemudian pada tanggal 11 Mei 1969

diganti namanya menjadi “Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI). Di dalam wadah ini organisasi-organisasi wanita Islam mengadakan usaha-usaha bimbingan dan pembinaan bagi para anggotanya serta merintis hubungan dengan organisasi-organisasi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada tahun 1973 terbentuk Badan Kerjasama Wanita Kristen Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari organisasi Wanita Katolik, Kristen, Biarawati, dan Organisasi-organisasi Wanita Gereja.

Pada tanggal 5 Agustus 1974 dibentuk organisasi DHARMA WANITA, suatu organisasi persatuan yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi istri pegawai negeri sipil yang ada pada Departemen-departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen. Salah satu usaha DHARMA WANITA adalah membimbing dan membina Organisasi Istri Pegawai dalam rangka peningkatan partisipasinya guna mensukseskan pembangunan nasional. Ada beberapa organisasi istri pegawai negeri sipil yang sebelum DHARMA WANITA didirikan telah masuk menjadi anggota KOWANI dan setelah DHARMA WANITA terbentuk, tetap menjadi anggota KOWANI.

Sejak memasuki Orde Baru, Pemerintah Indonesia menganut lagi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pembangunan dilakukan dalam hubungan dengan dunia luar yang terbuka dan terutama menggalang kerjasama regional yang terwujud dalam ASEAN. Dalam iklim ini KOWANI meningkatkan hubungan internasionalnya dengan menjadi anggota International Council of Women (ICW) sejak tahun 1973. Di samping itu juga merintis hubungan dengan organisasi-organisasi perempuan di lingkungan negara-negara ASEAN.

Tahun Wanita Internasional 1975 harus dicatat sebagai peristiwa penting yang berhasil meningkatkan perhatian Pemerintah dan masyarakat terhadap pergerakan perempuan dan menumbuhkan

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

keyakinan bahwa kaum perempuan merupakan potensi untuk pembangunan. Indonesia mengirim delegasi ke World Conference of the International Women's Year di Mexico City (19 Juni s/d 2 Juli 1975) yang mengikutsertakan unsur-unsur KOWANI, DHARMA WANITA, DHARMA PERTIWI dan KNKWI, di samping utusan-utusan dari unsur Pemerintah. World Conference of the International Women's Year antara lain menghasilkan suatu "World Plan of Action", suatu program kegiatan untuk jangka waktu sepuluh tahun, yang sarasannya adalah agar dalam waktu itu perempuan dapat mencapai kemajuan sehingga dapat berpartisipasi penuh dalam segala kegiatan kemasyarakatan. Kepada negara-negara anggota PBB diserukan untuk membentuk suatu "National Plan of Action" berdasarkan program sedunia tersebut.

Pada tanggal 13 sampai dengan 18 Desember 1976 atas prakarsa Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua Tyanas Twani (Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional 1975) di Jakarta diselenggarakan lokakarya yang diikuti oleh semua unsur pergerakan perempuan Indonesia, wakil-wakil Pemerintah dan lain-lain organisasi kemasyarakan, yang berhasil menyusun "Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indoensia" (RKNWI). Diharapkan RKNWI akan menjadi rencana induk untuk kegiatan-kegiatan keperempuanan, terutama untuk memper-siapkan laporan pada Konperensi Wanita Sedunia kedua yang oleh PBB direncanakan akan diselenggarakan pada pertengahan tahun 1980 di Teheran. Berhubung dengan situasi politik di Iran, yang tidak menguntungkan itu, Iran dengan resmi sudah menarik kembali kesediaannya untuk menjadi penerima konperensi. Maksud Konperensi Wanita Sedunia kedua itu adalah untuk mengadakan penilaian terhadap apa yang telah dicapai di masing-masing negara dalam bidang keperempuanan Selama lima tahun pertama sejak tahun 1975.

Sebagai acara-acara penutup dalam rangka kegiatan selama International Women's Year 1975 pada tanggal 15 s/d 19 Desember 1975 diadakan "Seminar on the Integration of Women in Development", disusul dengan "Meeting of Asean Women Leaders and International Women's Year Post Conference" pada tanggal 19 s/d 22 Desember 1975. Baik seminar maupun konferensi dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara ASEAN. Dalam konferensi tersebut dilahirkan gagasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama antara perempuan-perempuan ASEAN yang akan diberi nama ASEAN Confederation of Women's Organizations atau disingkat ACWO.

Bahwa kerajinan dan industri rumah tangga yang merupakan salah satu lapangan usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan membentuk suatu badan yang bertujuan mengembangkan usaha kerajinan dan industri rumah tangga yang bersifat nasional.

Badan ini dimaksud adalah berstatus non pemerintah dengan dukungan penuh pemerintah dan beranggotakan unsur-unsur KOWANI, organisasi-organisasi pengusaha kerajinan, seniman, tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak/cinta terhadap usaha-usaha kerajinan dan lain-lain, sedangkan instansi pemerintah yang bersangkutan merupakan pembina-pembina. Badan ini bertugas membantu pemerintah untuk mengembangkan usaha-usaha kerajinan dan industri rumah tangga serta memelihara kelestarian seni budaya. Badan ini akan mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi lainnya yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Untuk menunjang usaha meningkatkan dan pengembangan kerajinan dan industri rumah tangga diserahkan kepada pemerintah untuk memberikan perhatian pada masalah-masalah seperti:

a. PERKREDITAN; hendaknya kredit-kredit yang diberikan kepada pengusaha lemah benar-benar dapat diterima kepada yang berhak dengan persyaratan dan prosedur yang mudah dijangkau.

b. BAHAN BAKU; bahan baku merupakan unsur yang sangat penting dalam produksi yang kelestariannya perlu dipertahankan dengan harga yang layak dan mudah didapat.

c. PRODUKSI; produksi kerajinan perlu diarahkan sesuai dengan bahan-bahan yang tersedia, serta diperhatikan mutu dan disainnya.

d. TEHNOLOGI; dalam produksi diperlukan teknologi (*appropriate technology*) yang diarahkan pada padat karya tanpa mengabaikan efisiensi.

e. PEMASARAN; pemerintah perlu menciptakan pasar dalam negeri kebijaksanaan keharusan memakai produksi dalam negeri untuk barang-barang yang dibeli oleh pemerintah khusus hasil kerajinan dan industri rumah tangga.

f. TATA NIAGA; perlu diciptakan saluran tata niaga yang efisien dan sehat.

g. PROMOSI; pemerintah perlu menggalakkan usaha promosi ke luar negeri dan dalam negeri seperti mendirikan pusat-pusat promosi mem-berikan ruang di pasar-pasar dan pusat pariwisata, menciptakan sa-luran tata niaga yang efisien dan sehat.

h. PERLINDUNGAN; agar usaha kerajinan dan industri rumah tangga dapat berkembang dengan pesat, pemerintah perlu memberikan perlindungan baik secara langsung maupun tidak

langsung yang berupa larangan atau kebijaksanaan impor dan perpajakan.

i. PENDIDIKAN DAN LATIHAN; di sektor kerajinan dan industri rumah tangga untuk masyarakat pedesaan supaya mendapat prioritas yang segera diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan.

j. KOPERASI; bentuk usaha koperasi ini agar dibantu dan dibina se-baik-baiknya untuk mempertahankan sifat usaha gotong royong pada masyarakat pedesaan menjadi unit ekonomi yang kuat.

Gerakan Perempuan Sosial Keagamaan

SELAIN organisasi-organisasi yang sejak Indonesia Merdeka melibatkan peranannya dalam bidang politik, tidak sedikit perkumpulan atau organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang-bidang yang lain. Di antara bidang-bidang itu adalah organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang Sosial-keagamaan.

Dalam bahasan di bagian ini akan dibahas beberapa organisasi yang berjuang dalam bidang sosial-keagamaan tersebut.

A. Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita

1. Latar belakang lahirnya BMOIWI

Badan musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dinyatakan berdiri secara resmi pada tanggal 2 Juli 1967 di Jakarta dengan nama “BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI-ORGANISASI PEREMPUAN ISLAM INDONESIA” yang disingkat menjadi BMPII. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1969 nama tersebut dirubah menjadi “BADAN MUSYAWARAH ORGANISASI-ORGANISASI ISLAM WANITA INDONESIA” yang disingkat BMOIWI. Pembentukan Badan Musyawarah tersebut didasarkan atas surat izin rapat/ pertemuan dari DAN DIM JAYA PUSAT No. SID/306/4/1967.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Ditinjau dari segi latar belakang dan motivasinya, maka berdirinya Badan Musyawarah tersebut jelas tidak dapat dipisahkan daripada proses lahirnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Secara idial, BMOIWI melanjutkan peranan dan “Badan Permusyawaratan Wanita Islam Indonesia” yang didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 1958.

Adapun para pemrakarsa adalah Ny. H. RABS Syamsuridjal, Ny. Mahmudah Mawardi, dan Ny. S. Gitoatmodjo. Gagasan para pemrakarsa tersebut didukung tokoh-tokoh dari organisasi-organisasi perempuan Islam seperti Muslimat NU, Wanita Syarikat Islam, Wanita Islam, Wanita Perti, Wihdatul Muslimat, dan Wanita Gasbiindo.

2. Dasar, Tujuan, dan Usaha

Organisasi ini berdasarkan Islam dan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Mahaesa, serta terbinanya Uchuwah Islamiyah. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan kesadaran beragama dan bernegara.
2. Mengadakan kerja lama yang bermanfaat untuk kepentingan' bersama.
3. Mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, tentang keagamaan, keperempuanan, dan kemasyarakatan.
4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan.

3. Struktur Organisasi

1. BMOIWI adalah berbentuk federasi organisasi yang beranggota-kan organisasi-organisasi Islam perempuan yang bersifat nasional/ yang mempunyai cabang-cabang di daerah.

2. Hubungan BMOIWI dengan badan kerja lama musyawarah organisasi Islam perempuan di daerah adalah bersifat informatif, konsultatif, dan koordinatif.

3. Pimpinan BMOIWI merupakan Presidium yang beranggotakan 7 (tujuh) anggota, yang merupakan pimpinan kolektif yang memimpin secara periodik. Masa kerja Presidium adalah 3 tahun dan dipilih oleh Musyawarah Anggota.

4. Kegiatan

Sesuai dengan sifat dan bentuk organisasi ini, yaitu sebagai wadah untuk mempersatukan pendapat dengan musyawarah, maka Badan Musyawarah hanya menggariskan kebijaksanaan umum, sedangkan kegiatan operasionalnya diserahkan kepada masing-masing organisasi anggota. Oleh sebab itu tidak banyak kegiatan operasional yang ditangani.

Melanjutkan perjuangan dari kaum perempuan Islam yang telah dirintis sejak tahun 1954 untuk diadakannya Undang-Undang Perkawinan. Semenjak Badan ini berdiri, maka perjuangan terhadap tuntutan Undang-undang Perkawinan adalah merupakan suatu kegiatan yang paling menonjol. Semenjak dibicarakannya Rancangan Undang-Undang sampai dimasukkannya RUU Perkawinan Nasional oleh Pemerintah ke DPR pada tahun 1973, maka Badan Musyawarah ini ikut pula secara aktif membahasnya di mana hasilnya disalurkan kepada fraksi-fraksi Islam di DPR dan pemerintah.

Ikut memperjuangkan adanya Hakim-Hakim Wanita di Pengadilan-pengadilan Agama, dengan maksud agar keputusan yang diambil oleh Pengadilan tersebut selalu adil untuk kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pihak istri dan suami. Dengan dianyakannya Keluarga Berencana sebagai Program Nasional, maka Badan Musyawarah ini telah menyelenggarakan Kursus-kursus Orientasi Keluarga Berencana yang ditekankan pada bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap Keluarga Berencana.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Mengenai beredarnya film-film porno di Ibu Kota, BMOIWI menemui Menteri Penerangan untuk meminta perhatiannya agar film-film semacam itu dan bacaan yang cabul dilarang, karena berpengaruh negatip terhadap pembinaan generasi muda. Suatu simPosium tentang “Peningkatan Pelayanan Perjalanan Haji Wanita” telah pmla diselenggarakan dalam rangka mempertinggi Hari Kartini pada tahun 1976. Sebagai tindak lanjut pula dibentuk suatu Lembaga Penyuluhan Jemaah Haji Wanita. Usaha ini men-dapat tanggapan yang positip dari Pemerintah, khususnya Peme-rintah DKI Jakarta Raya di mana Badan ini diikutsertakan dalam Majelis Bimbingan Haji. Lembaga Penyuluhan Haji Wanita ini pada tiap-tiap musim Haji giat memberikan penyuluhan khusus kepada calon jemaah perempuan. Sebelumnya tidak ada penyuluhan semacam itu yang khusus dari penyuluhan perempuan untuk jemaah haji.

Menghadiri Seminar *On the Role of Women in Handicraft* yang diselenggarakan di Bangkok pada 1976. Pada 1976 Badan ini telah menerima undangan melalui Menteri Kesra, untuk mengikuti Seminar *on the Role of Women and Employment* yang diselenggarakan di Kualalumpur (Malaysia).

Mengikuti Seminar Penyusunan Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia (RKNWI) pada bulan Desember tahun 1976 yang diselenggarakan di Jakarta oleh Menteri Kesra di Jakarta selaku Ketua Umum Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional di Jakarta. Pada tahun 1976 telah menerima tamu dari Malaysia yaitu Menteri Kebajikan Malaysia.

Badan Musyawarah ini telah mengajukan usul kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesia agar di dalam Majelis tersebut diduduk-kan wakil-wakil dari Ulama wanita. Pada akhir 1976 berhasil mengumpulkan dana untuk para korban bencana alam di Jawa Timur. Pada bulan Januari 1977 Badan ini telah menerima tamu wakil dari International Business and Profesional Women Association

(IBPWA). Mereka banyak menanyakan tentang kedudukan perempuan Muslim di dalam rumah tangga dan masyarakat.

Badan musyawarah telah mengajukan pula beberapa usul kepada Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, Ny. L. Soetanto, S.H., agar Pemerintah menempatkan lebih banyak perempuan pada jabatan yang menentukan (decision Maker). Pada tanggal 26 dan 27 Juli 1978, menyelenggarakan Lokakarya mengenai “Metode Dakwah Pembangunan” bertempat di Gedung Kiblat Center, Jalan Agus Salim, Jakarta.

5. Keanggotaan

Organisasi-organisasi yang menjadi anggota BMOIWI adalah :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Wanita Islam | 10) KOHATI (Korps HMI Wati) |
| 2) Muslimat NU | 11) Wanita KBIM |
| 3) Wanita Syarekat Islam | 12) POWSA |
| 4) Aisyiyah | 13) Wanita Al Irsyad |
| 5) Wanita Perti | 14) Fatayat NU |
| 6) Wihdatul Muslimat | 15) Wanita Al Wasliyah |
| 7) Gasbiindo Putri | 16) Putri Al Irsyad |
| 8) Korps PII Wati | 17) Nasyiyatul Aisyiyah |
| 9) Persistri | 18) Pelajar Putri Al Irsyad |

6. Susunan Presidium BMOIWI Periode 1977-1980

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| Dra. Ny. H. Zubaidah Muchtar | (Wanita Sarekat Islam) |
| Ny. H. Farida Afif | (Wanita Al Irsyad) |
| Dra. Ny. Maftuchah Yusuf | (Aisyiyah) |
| Ny. H. Asmah Sjahroni | (Muslimat NU) |

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Ny. Norma Aminuddin (Wanita Perti)
Ny. H. Chadidjah Razak (Wanita Islam)
Nn. Nurhayati Jamas (KOHATI/HMI)
Dewan Penasehat : Ny. H. RABS-Syarnsuridjal
Ny. H. Mahmudah Mawardi
Ny. Yati Arudji Kartawinata.

B. Komisi Nasional Kedudukan Wanita

Pada tahun 1966 setelah Indonesia mempunyai Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Salah satu Badan Pelengkap PBB adalah ECOSOC (Economic and Social Council), yang antara lain membawahi beberapa komisi di antaranya Commission on the Status of Women. Masing--masing negara anggota PBB dianjurkan membentuk suatu Komisi Nasional Kedudukan Wanita (National Commission on the Status of Women). UN Commission on the Status of Women setiap 2 tahun sekali mengadakan sidang yang diatur oleh PBB. Dalam sidang-sidang itu dilaporkan hasil-hasil penelitian tentang status dan kemajuan perempuan di negara-negara anggota PBB khususnya dan perempuan sedunia pada tanumnya. Sedangkan tugas Komisi Nasional ialah meneliti kedudukan (tan keadaan perempuan di negara-negara yang bersangkutan, mengadakan inventarisasi dalam segala bidang guna mengetahui dan menentukan apa yang dibutuhkan untuk memajukan kaum perempuan yang diharapkan dapat memegang peranannya sebagai tenaga pembangunan masyarakat dan bangsa. Berdasarkan hasil-hasil tersebut disampaikan rekomendasi--rekomendasi kepada Pemerintah maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan.

PBB lewat Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York menganjurkan agar selekas mungkin didirikan "Komisi Nasional

Kedudukan Wanita Indonesia” tersebut, dan mengusahakan duduknya kembali Indonesia dalam Commission on the Status of Women di PBB. Pada akhir tahun 1967 anjuran PTRI itu disampaikan kepada KOWANI, yang segera menghubungi Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, Ny. Rusiah Sardjono, S.H. yang menyambut anjuran PTRI dengan baik.

1. Proses Pembentukan KNKWI

Atas prakarsa Departemen Sosial dan KOWANI, diadakan rapat pada tanggal 15 Desember 1967 di Departemen Luar Negeri yang dihadiri oleh 3 federasi organisasi perempuan yaitu KOWANI, KAWI dan Koordinasi Wanita Sekber Golkar, juga beberapa tokoh perorangan perempuan dan wakil Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, untuk membicarakan usaha pembentukan KNKWI.

Sebagai tindak lanjut, maka dibentuk Panitia Ad Hoc yang terdiri dari Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (KOWANI), Ny. Aisyah Aminy, S.H. (KAWI) dan Ny. Soedarsono, S.H. (Koordinasi Wanita Sekber Golkar) yang bertugas menyusun konsep Peraturan Dasar KNKWI.

Selanjutnya 3 federasi tersebut telah mengirim delegasi yang terdiri dari: Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (KOWANI), Ny. Aisyah Aminy, S.H. (KAWI) dan Ny. Maria Ulfah Subadio, S.H. (Koordinasi Wanita Sekber Golkar) untuk menghubungi pemerintah yaitu Menteri Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 27 Juni 1968. Sebagai hasil keluarlah Surat Keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat No. 34/Kpts/Kesra/VII/1968 tertanggal 31 Juli 1968, mengenai pembentukan KNKWI sebagai badan semi pemerintah.

Setelah keluar Surat Keputusan Menteri Kesra tersebut, baru pada tanggal 29 Nopember 1968 diadakan pertemuan antara 3 federasi perempuan atas undangan KOWANI sebagai Ketua Periodik Panitia Musyawarah 3 federasi, untuk membicarakan langkah-

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

langkah selanjutnya dalam pembentukan KNKWI. Pertemuan tersebut menentukan “Dasar-dasar dan Prosedur Pemilihan Anggota KNKWI” dan dari unsur pergerakan perempuan ditetapkan jumlahnya 21 orang.

Pelaksanaan pemilihan/penyelesaian anggota KNKWI dari unsur pergerakan perempuan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1968, oleh Panitia 9 yang mewakili 3 federasi berlandaskan keputusan-keputusan di atas. Anggota Panitia 9 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dra. Ny. B. Simorangkir (KOWANI)
2. Ny. Andras S. (KOWANI)
3. Dra. Ny. Maftuchah Jusuf (KOWANI)
4. Ny. Syamsinur Adnus (KAWI)
5. Ny. Latjuba (KAWI)
6. Nn.Mien Yubhar (KAWI)
7. Ny. Rubiono Kertopati, S.H. SEKBER GOLKAR)
8. Ny. Gadis Rasyid (SEKBER GOLKAR)
9. Nn. Sri Syamsiar, B.A. sekarang Dra. Ny. Sri Syamsiar Issom (SEKBER GOLKAR).

Pada tanggal 16 Desember 1968 diadakan rapat pertama KNKWI antar 21 anggota dari unsur pergerakan perempuan. Diadakan pemilihan 3 pimpinan KNKWI dari unsur pergerakan perempuan, yaitu: Dra. Ny. Muaftuchah Jusuf, Nn. Endang Sulbi, S.H. (sekarang Ny. Suska), dan Ny. Syamsinur Adnus serta Sekretaris Jenderal Dra. Ny. M. Wahyudi.

2. Struktur Organisasi

- 1) Keanggotaan

Pada saat didirikan KNKWI, jumlah anggotanya adalah 30 orang yang terdiri dari:

- 21 orang yang mewakili organisasi perempuan yang tergabung pada federasi yang ada.

- 7 orang wakil dari Pemerintah/Departemen (Sosial, Pendi-dikan dan Kebudayaan, Luar Negeri, Kehakiman, Agama, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dan Kesehatan).

- 2 orang ahli.

Makin luasnya masalah yang dihadapi KNKWI, sejak tahun 1975 diputuskan untuk menambah anggota dari unsur Pemerintah/Departemen yang banyak menangani soal-soal keperempuanan, dan yang telah menunjuk wakilnya adalah: Departemen Penerangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian.

2) Pimpinan

Pimpinan bersifat kolektif, merupakan Presidium dengan Ketua Periodik yang bergilir.

3) Seksi-seksi

Seksi Moril dan Agama, Seksi Pendidikan dan Kebudayaan, Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Tenaga Kerja dan Politik, Seksi Hukum dan Keluarga.

3. Kegiatan-Kegiatan dan Usaha

1) Diselesaikan suatu survey yang dianjurkan oleh PBB tentang "Family Responsibilities of Working Mothers", yang dilaksanakan bersama oleh KNKWI dan Departemen Sosial (cq. BPPS Yogya-karta) dalam tahun 1971.

2) Diikutsertakan oleh Pemerintah (Departemen Luar Negeri dan Departemen Sosial) dalam hal-hal yang menyangkut "Status of Womesn" yang merupakan program PBB (ECOSOC).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

3) Survey on the Status of Women and Family Planning yang diminta oleh PBB dengan bekerja sama dengan FIS-UI, Departemen Sosial, BKKBN, KOWANI, dan KESRA.

4) Memberikan bekal materi kepada wakil Indonesia dalam UN Commission on the Status of Women dalam Sidang ke XXIV UNCSW di Geneva.

5) Membantu Pemerintah (Departemen Luar Negeri dan Departemen Sosial) mengolah dan menanggapi resolusi-resolusi hasil Sidang ke XXIV UNCSW, bagaimana dan apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya:

a) agar ASEAN diikutsertakan dalam sidang-sidang PBB

b) agar dibentuk ASEAN Council on the Status of Women dan mengadakan kerja sama antar negara-negara ASEAN di bidang usaha-usaha peningkatan kedudukan perempuan di negara-negara ASEAN.

6) Mengumpulkan data-data tentang perempuan dalam pendidikan formal di Indonesia (1971 dan 1972).

7) Mengumpulkan data tentang perempuan dalam pendidikan di Indonesia (1972).

8) Mengadakan Seminar tentang “Kedudukan Wanita dan Keluarga Berencana” bersama KOWANI dan Kosi Wanita Golkar, tanggal 1-2 Juni 1973, di Jakarta.

9) Menanggapi RUU tentang Perkawinan dan memberikan usul-usul.

10) Dalam rangka peringatan 25 tahun “Universal Declaration of Human Rights” diperingati pada tanggal 10 Desember 1973, dan sesuai pula dengan anjuran Sekretaris Jenderal PBB agar negara-negara anggota PBB mengadakan peringatan sesuai dengan keadaan setempat, serta agar Declaration on the Elimination against Women dapat diterjemahkan ke dalam bahasa setempat, maka KKNKWI telah:

a) menterjemahkan deklarasi tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan mencetaknya.

b) menyusun buku “Pelaksanaan pernyataan tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia”.

11) Mengadakan statistik perempuan dalam Badan Legislatif (1974).

12) Mengumpulkan peraturan-peraturan tentang perlindungan te-naga kerja perempuan Indonesia (1975).

13) Menterjemahkan “World Plan of Action” ke dalam bahasa Indonesia dan mencetaknya.

14) Menyampaikan usul-usul kepada Pemerintah tentang World Population Year dan International Women’s Year.

15) Meningkatkan usaha pembentukan kerja sama perempuan ASEAN. Mendukung usul yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dalam “4th meeting of ASEAN Permanent Committee on Socio-Cultural Activities” mengenai kerja sama perempuan ASEAN.

16) Mengusulkan kepada Pemerintah agar perempuan diikutsertakan dalam delegasi RI ke Sidang Majelis Umum PBB ke XXX.

17) Menyampaikan usul-usul penyempurnaan Pelita II bersama KOWANI.

18) Bekerja sama dengan YTKI – FES menyelenggarakan Seminar tentang “Integrasi perempuan dalam Pembangunan”, di Jakarta pada tanggal 19-22 Maret 1975.

19) Mengadakan penelitian mengenai Studi Pendidikan Bekal Hidup bagi perempuan Jakarta, 1976, dengan mengambil daerah sample Palmerah, Jakarta Barat.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

20) Diikutsertakan oleh Dir. Jen. Transmigrasi dalam peninjauan ke proyek-proyek transmigrasi Lampung tahun 1976.

21) Bersama-sama dengan KOWANI menyusun tanggapan mengenai “Draft Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women” tahun 1976.

22) Diikutsertakan dalam: Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi Status dan Kegiatan Wanita Indonesia, tahun 1976.

23) Bekerja sama dengan Departemen Agama, mengadakan Penelitian tentang “Peranan kaum ibu dalam Pendidikan Agama di dalam rumah tangga dan pengaruh peranan itu terhadap usaha pembangunan Bangsa dan Negara”. Pelaksanaan langkah pertama di desa Belendung dan Cisereh Kabupaten Tangerang Jawa Barat.

24) Diikutsertakan dalam team Survey Peranan Perempuan dalam usaha perbaikan gizi yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan/Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

25) Memberikan usul-usul terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara.

26) Bekerja sama dengan Departemen Sosial (cq Ditjen Bina Sosial) UNICEF – KNKWI melaksanakan:

a) pengumpulan base line data di daerah Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pamekasan Jawa Timur dalam rangka kegiatan Pilot Proyek Peningkatan Peranan/Fungsi Wanita dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.

b) Lokakarya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pilot Proyek Peningkatan Peranan/Fungsi Wanita dalam Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.

27) Menjadi pimpinan Panitia Tahun Internasional Anak-Anak, tahun 1979.

28) Seminar/Lokakarya, Konperensi Nasional, Regional maupun Internasional yang diikuti oleh utusan/wakil dari KNKWI:

a) Regional Seminar on the Status of Women and Family Planning 20-30 Juni 1973 di Yogyakarta.

b) UN Forum on the participation of Women and Development di New York.

c) Consultation Conference on Women and Development di Bangkok (1974).

d) World Population Conference di Bukarest (1974).

e) Preliminary meeting of the International Women's Year di Manila (1975).

f) International Women's Year Conference di Mexico City (1975).

g) Asean Seminar on Participation of Women and integration in Development di Jakarta (1975).

h) Asean Women Leaders and International Women's Year Post Conference meeting di Jakarta (1975).

i) First Meeting of the Sub-Committee on Women (Asean) di Manila (1976).

j) Lokakarya Rencana Kegiatan Nasional Wanita Indonesia (13-18 Desember 1976).

k) Seminar tentang: "Penyusunan Kebijakan ke arah Peningkatan Partisipasi Wanita dalam Pekerjaan yang berupah (Jakarta, 3-6- Nopember 1976).

l) Lokakarya Peranan Wanita Desa sebagai Tenaga Produktif dalam Pembangunan pedesaan (11 s/d 14 Desember 1976).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

m) Lokakarya Pengembangan Sosial Masyarakat Pedesaan (14 Nopember 1977).

n) Mengikuti sebagai delegasi Indonesia ke Sidang UNCSW ke-27 di New York (1978).

o) Training Course on Techniques of Participation for Women yang diselenggarakan oleh Asia and Pacific Center for Women and Development di Bangkok (1978).

p) Regional Training Seminar on Development Planning for Women yang diselenggarakan oleh Asia and Pacific Center for Women and Development di Bangkok (1978).

C. Dharma Wanita

1. Latar belakang kelahiran organisasi

Sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suatu perikehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, adil dan damai.

Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pem-bangunan yang direncanakan dengan baik dan realistis dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan terus-menerus. Untuk dapat melaksanakan pembangunan itu secara berdayaguna dan berhasil dapat diperlukan adanya Pemerintah yang stabil, berwibawa, dan berkelanjutan, sehingga dengan demikian dapat terjamin penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara teratur dan berkelanjutan.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, antara lain tergantung dari kesempurnaan aparatur Pemerintah, sedang kesempurnaan aparatur Pemerintah itu pada pokoknya tergantung pada kesempurnaan Pegawai Republik Indonesia. Pegawai Republik Indonesia yang sempurna adalah pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya, sebagai unsur utama Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Dan uraian ringkas sebagaimana tersebut di atas kiranya jelaslah bahwa betapa luasnya pembangunan yang harus kita laksanakan dan betapa beratnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Republik Indonesia yang untuk melaksanakannya memerlukan pemusatan segala perhatian dan pikiran dan memerlukan penge- rahan segala dana dan daya.

Untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan SAPTA KRIDA Kabinet Pembangunan II, maka seluruh rakyat termasuk istri Pegawai Republik Indonesia berkewajiban untuk turut serta secara aktif menurut bidangnya masing-masing. Dalam hubungan ini, maka salah satu usaha yang dapat dan harus dilakukan oleh istri Pegawai Republik Indonesia adalah mendukung perjuangan dan mensukseskan suaminya dalam mengemban tugasnya sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat. Agar dukungan istri Pegawai tersebut dapat lebih terarah dan lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menghimpun dan membimbing usaha dan kegiatan para istri sehaluan dengan usaha dan kegiatan Pegawai Republik Indonesia. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka dibentuklah organisasi DHARMA WANITA pada tanggal 5 Agustus 1974.

2. Asas dan Tujuan

1. Dharma Wanita berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara.

2. Tujuan Dharma Wanita adalah masyarakat adil dan makmur yang berkeeseimbangan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Organisasi Dharma Wanita menganut asas teritorial yang dibagi dalam 3 tingkat yaitu:

1) Tingkat Pusat, yang dipimpin oleh Presidium Dharma Wanita dan Pengurus Harian Dharma Wanita Pusat, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Negara Republik Indonesia.

2) Tingkat Daerah, yang dipimpin oleh Pengurus Daerah Dharma Wanita yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Propinsi.

3) Tingkat Cabang, yang dipimpin oleh Pengurus Cabang Dharma Wanita, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten/ Kotamadya.

4) Pada Tingkat Pusat, di samping adanya Presidium Dharma Wanita dan Pengurus Harian Dharma Wanita Pusat, maka ada pula:

- Pembina Utama, yaitu Bapak Presiden.
- Penasehat Utama, yaitu Ibu Tien Soeharto.
- Penasehat, yaitu Ibu Nelly Adam Malik.
- Dewan Pimpinan Pusat, yaitu Dewan Pembina KORPRI Pusat.

4. Kegiatan/Usaha/Program

Untuk mencapai tujuan Dharma Wanita yaitu Masyarakat adil

dan makmur yang berkeimbangan antara material dan spiritual, maka Dharma Wanita berusaha antara lain:

1. Membimbing dan membina organisasi istri pegawai dalam rangka pemupukan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa senasib dan sepejuangan.

2. Membimbing dan membina organisasi istri pegawai dalam rangka peningkatan partisipasinya guna mensukseskan pembangunan Nasional sesuai dengan kodrat dan kedudukan perempuan Indonesia sebagai istri dan ibu rumah tangga.

3. Menyelenggarakan pendidikan terhadap istri pegawai untuk me-ningkatkan kesadaran dan tanggung jawab ber-Negara sesuai denganm kebijaksanaan Pemerintah.

5. Hubungan dengan dunia internasional

Untuk menjalin hubungan kerja sama dengan dunia internasional, Dharma Wanita bersama-sama dengan organisasi perempuan yang lain seperti KOWANI dan DHARMA PERTIWI telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

1. Menghadiri First Meeting of the Asean Sub Committee on Women di Manila, yang diadakan pada tanggal 7 s/d 10 Juni 1976.

2. Pada tanggal 21 Juli 1976 mengikuti kompetisi bowling yang diadakan oleh Asean Women Circle.

3. Menghadiri pertemuan dengan Menteri Kebajikan, Malaysia yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 4 Oktober 1976.

4. Menghadiri pertemuan dengan Dr. Hendriks yang diadakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 7 Maret 1977.

5. Mengikuti peninjauan tentang emansipasi perempuan di Negeri Belanda pada tanggal 15 Oktober s/d 5 Nopember 1977.

6. Lain-lain

Organisasi Dharma Wanita adalah suatu organisasi yang bersifat persatuan, yang anggota-anggotanya terdiri dari organisasi-organisasi istri pegawai yang ada pada masing-masing Departemen dan Lembaga, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Dengan terbentuknya Dharma Wanita identitas organisasi pegawai yang ada pada masing-masing Departemen dan Lembaga tidak hilang. Organisasi istri pegawai yang ada pada tingkat Pusat, tetap mempunyai hubungan dengan organisasi istri pegawai dengan instansi vertikalnya di daerah, sepanjang mengenai urusan rumah tangganya sendiri.

Organisasi-organisasi istri pegawai yang menjadi anggota Dharma Wanita terdiri dari 19 organisasi:

- a) Tat Twam Asi : Departemen Sosial
- b) Dian Artharini : Gabungan Organisasi Wanita Bank-Bank Pemerintah
- c) Pertiwi : Departemen Dalam Negeri
- d) Periska Tani : Departemen Pertanian
- e) Yustikarini : Departemen Kehakiman
- f) Perwanida : Departemen Agama
- g) Idhata : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- h) OWD Dutika Handayani : Departemen Luar Negeri
- i) Rian : Departemen Perindustrian
- j) Riwpu : Departemen Pekerjaan Umum
- k) Bhakti Wanita : Sekretariat Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah non De-partemen dan Kesekretariatan Lembaga-lembaga Tinggi Ne-gara.
- l) Dharma Bhakti : Departemen Kesehatan

- m) Ardhyaksa Dharma Karini : Kejaksaan Agung
- n) Eka Dharma Santi : Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- o) Sandya Kara Murti : Departemen Perhubungan
- p) Niaga Ekasari : Dep. Perdagangan dan Koperasi.
- q) Dian Ekawati : Departemen Penerangan
- r) Ikatan Wanita Pertambangan: Departemen Pertambangan dan Energi.

Anggota-anggota Dharma Wanita Pusat yang duduk dalam lembaga legislatif yaitu:

Anggota MPR :

- 1) Ibu E.N. Soedharmono
- 2) Ibu L. Radius Prawiro

Anggota DPR : Ibu Gandhi, S.H.

D. Women's International Club

WIC didirikan pada tanggal 11 Maret 1950 di Jakarta atas prakarsa Ny. Soewarni Pringgodigdo dan Ny. Martha Galbraith serta merupakan suatu organisasi yang tidak berdasarkan agama dan politik.

Tujuan dari WIC adalah:

- 1. Memupuk persahabatan dan saling pengertian antara perempuan berbagai bangsa.
- 2. Membantu perkembangan budaya dari perempuan pada umumnya.
- 3. Meningkatkan pendidikan dan perbaikan sosial bagi perempuan dan anak-anak.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Untuk mencapai tujuan ini WIC:

1. Mengadakan pertemuan-pertemuan pada waktu-waktu tertentu bagi anggotanya.
2. Menyelenggarakan pertunjukan kesenian.
3. Mengadakan suatu perpustakaan.
4. Menerbitkan suatu majalah.
5. Membina hubungan dengan organisasi yang mempunyai tujuan serupa di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengadakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

Anggota WIC terdiri dari 50% perempuan Indonesia dan 50% perempuan berbagai bangsa yang sebagian besar adalah istri anggota Corps Diplomatik. Ibu Negara menjadi pelindung Nasional WIC, istri Gubernur DKI Jakarta juga menjadi pelindung, sedangkan anggota kehormatan adalah: istri Wakil Presiden, istri Ketua MPR, istri Menteri Luar Negeri, istri Kepala Missi Diplomatik.

Pada waktu ini WIC Jakarta mempunyai kira-kira 700 orang anggota. Pengurus WIC juga 50% terdiri dari perempuan Indonesia dan 50% perempuan berbagai bangsa dan selalu seorang perempuan Indonesia sebagai Ketua.

Women International Club bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan dan secara teratur mengadakan perternuan untuk saling memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan berbagai bangsa. Kegiatan yang menonjol adalah Bazaar Natal (Christmas Bazaar) yang diselenggarakan bersama dengan perwakilan-perwakilan asing dan selalu mendapat hasil yang besar. Hasil tersebut dibagi-bagikan kepada badan-badan sosial.

E. Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak

GOPTKI pada mulanya bernama GTKI (Gabungan Taman Kanak-Kanak Indonesia) didirikan pada tanggal 5 April 1957 di Jakarta. Keanggotaannya terdiri dari perorangan, tetapi pada Kongres GTKI tahun 1965 anggotanya terdiri dari organisasi/yayasan/lembaga/badan pendidikan yang menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak. Pada tahun 1970, nama GTKI dirubah menjadi GOPTKI.

Tujuan GOPTKI ialah dengan bekerja sama dengan Pemerintah berusaha dalam mengembangkan, meningkatkan serta menyempurnakan Pendidikan Prasekolah, agar dapat membina kanak-kanak kelak menjadi warga negara RI yang berjiwa Pancasila. GOPTKI berbentuk badan kerja sama antar organisasi-organisasi termasuk Yayasan, lembaga-lembaga dan badan pendidikan yang bergerak dalam lapangan pendidikan prasekolah.

GOPTKI mempunyai struktur organisasi dari tingkat Pusat, tingkat Daerah di Propinsi, tingkat Cabang di Kabupaten dan tingkat Ranting di Kecamatan. Pada tahun 1978 ini GOPTKI di tingkat Pusat didukung oleh 16 organisasi anggota yaitu: 1). Bhayangkari, 2). Persit Kartika Chandra Kirana, 3). Airyiyah, 4). Pertiwi, 5). Jalasenastri, 6). Wanita Katolik, 7). Perwari, 8). Perwanas, 9). Wanita Taman Siswa, 10). PIA Ardhya Garini, 11). PWKI, 12). PASI, 13). Tat Twam Asi, 14). Periska Postel, 15). Muslimat NU, 16). IWKA, dengan Ketua Koordinator Ny. Marzaman dari Bhayangkari.

Mengingat jumlah Taman Kanak-Kanak di-seluruh Indonesia yang masih sangat terbatas, maka kegiatan GOPT.,KI diarahkan untuk mengembangkan jumlah Taman Kanak-Kanak dan sekaligus meningkatkan mutunya. Di saniping itu GOPTKI berusaha memperingati Hari Kanak-Kanak Indonesia. Di kalangan pendidikan prasekolah dikenal tiga komponen pendidikan prasekolah (tiga Komponen Penpras) yaitu Pimpinan P & K bagian Penpras, GOPTKI

dan IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) yang secara periodik menyelenggarakan Rakerdik Penpras (Rapat Kerja Pendidikan Prasekolah).

F. Badan Pembina Kegiatan Sosial

Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial disingkat BPKKS merupakan perluasan dari Badan Kerjasama Panti-Panti Asuhan/BKSPA yang didirikan pada tahun 1963 dengan restu Gubernur DKI Jakarta Brigjen Dr. Soemarno. BKSPA ini dirintis dan dikelola oleh para Ibu yang bekerja secara sukarela terpanggil oleh kewajiban untuk menolong sesama manusia, dan terdorong oleh rasa tanggungjawab sosial untuk menjalankan peranannya yang hakiki yakni memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Hal ini merupakan bagian dari kebudayaan dan pandangan hidup berdasarkan Pancasila. Para tenaga sukarela (Volunteer) ikut serta membantu Pemerintah menanggulangi masalah-masalah sosial.

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari cara bekerja dalam BKSPA, oleh Gubernur Kepala Daerah DKI Ibukota Jakarta Raya Letjen KKO Ali Sadikin dengan Surat Keputusan Gubernur No. A/10/N/16 tertanggal 20 April 1966 usaha tersebut diperluas sehingga mencakup semua kegiatan sosial di seluruh wilayah Jakarta Raya dengan nama BPKKS, singkatan dari Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial DKI Jaya dengan Ketua Ny. A.H. Nasution.

Jakarta Raya adalah pelopor dalam peningkatan organisasi BKSPA menjadi BPKKS, sebagai suatu badan yang merupakan wadah kerja sama antara usaha Pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan aktifitasnya di bidang kesejahteraan sosial untuk segala macam kegiatan.

Pola kerja BPKKS meliputi:

- 1) Bimbingan dan Pembinaan
- 2) Penyantunan
- 3) Pelayanan
- 4) Koordinasi dan Pengawasan

Pengorganisasi BPKKS adalah sebagai berikut: Untuk tiap jenis kegiatan dibentuk badan kerjasama ataupun koordinasi tersendiri dengan pengawasannya sendiri. Semua badan kerjasama/koordinasi itu dikoordinasi lagi oleh satu badan yang merupakan peugurus dari semuanya.

Pengurusan: terdiri dari Pengurus inti dan Pengurus Pleno. Pengurus inti meliputi: bidang dana, bidang kebendaharaan, hubungan masyarakat, bidang pengelolaan, perencanaan dan pendidikan, bidang kesehatan, pelayanan tenaga sukarela (voluntcor service) dan adminis-trasi, sedangkan untuk Pleno ditambah dengan Ketua-Ketua BKS-BKS, seperti BKSPA, BKUTN (Badan Koordinasi Urusan Tuna Netra), BKPW (Badan Koordinasi Panti-panti Werdha) dan lain-lain.

Semenjak tahun 1970 telah dibentuk pula BPKKS di daerah Jawa Barat, pada tahun 1975 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tahun 1976 di Kalimantan Barat, kemudian menyusul Jawa Timur, Bali, Bengkulu, Sumatra Barat dan Maluku.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan BPKKS dan organisasi sosial lainnya di seluruh Indonesia, mulai dirasakan perlu adanya wadah tingkat Nasional yang mempunyai tugas menampung permasalahan dalam ruang lingkup (scope) nasional pula. Maka pada Musyawarah Nasional kesatu pada tahun 1970 di Jakarta, yang dihadiri oleh organi-sasi-organisasi sosial tingkat nasional termasuk BPKKS Jakarta (yang sedang menemui bentuk peningkatan ke tingkat nasional) dibentuklah Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Tujuan DNIKS adalah:

- 1) Mengusahakan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atas dasar tanggung jawab sosial bersama.
- 2) Melakukan kerjasama internasional untuk perwujudan kesejahteraan sosial dalam rangka masyarakat dunia damai dan sejahtera. Hubungan kerja DNIKS dengan daerah dilakukan melalui BPKKS yang telah terbentuk. Diharapkan dalam waktu dekat ini di tiap daerah dapat terbentuk suatu BPKKS sehingga memudahkan hubungan.

Pada tahun 1961 Pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang tentang barang” yang secara umum mengatur barang sebagai produk yang diperdagangkan. Dalam pasal-pasal nya diatur secara umum tentang standarisasi pengasan mutu, labeling, pengamatan dan lain-lain. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum ada, sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya. Diadakan dalam berbagai usaha berupa pameran dan lain-lain, baik oleh Pemerintah maupun Swasta untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pemakaian barang-barang produksi dalam negeri. Hal itu membawa pengaruh yang positif terhadap produsen dalam negeri. Mereka harus meningkatkan mutu produksinya untuk dapat menarik perhatian konsumen yang telah bertambah kritis dan untuk dapat bersaing dengan barang import. Dengan adanya peningkatan pemakaian produksi dalam negeri di satu pihak dan perlunya perlindungan masyarakat konsumen di lain pihak, di samping perlunya pembatasan barang-barang import oleh Pemerintah, timbul gagasan untuk mendirikan suatu organisasi konsumen.

Pencetus gagasan adalah Ny. Lasmidjah Hardi. Kemudian tanggal 11 Mei 1973 didirikan Yayasan Lembaga Konsumen di Jakarta. Pengurus Harian yang pertama adalah: Ny. Lasmidjah Hardi (Ketua), Ny. Sunarso SH (Wakil Ketua), Dra. Ny. Kartina Suyono

Prawirabisma (Sekretaris), Permadi SH (Wakil Sekretaris), Ny. H. Soemarno (Bendahara), Ny. D. Sumiskum (anggota).

Pendirian Yayasan Lembaga Konsumen dikukuhkan dengan akte notaris dan surat Keputusan Gubernur DKI JAYA. Maksud dan tujuan Yayasan Lembaga Konsumen adalah: memberi bimbingan dan perlindungan kepada konsumen menuju kepada kesejahteraan keluarga. Dalam menuju tercapainya tujuan tersebut, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen memberi penerangan-penerangan kepada masyarakat. Mula-mula melalui organisasi perempuan kemudian meluas melalui RT, Kelurahan, Kecamatan, Kantor dan sebagainya. Jalan yang ditempuh ialah dengan memberikan ceramah-ceramah penerangan dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi. Usaha-usaha Yayasan Lembaga Konsumen ialah menyadarkan masyarakat konsumen di Indonesia akan haknya sebagai konsumen, yaitu hak informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar pendapatnya dan terjamin keselamatan dirinya dalam penggunaan barang yang dibelinya.

Untuk menjamin hak-hak tersebut Yayasan Lembaga Konsumen mengusulkan kepada Pemerintah agar dikeluarkan peraturan-peraturan mengenai standarisasi, pengawasan mutu, labeling, pengemasan, dan lain-lain untuk melindungi konsumen.

G. Asean Women Circle

Asean Women Circle (AWC) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1975 Jakarta. Tujuan dari AWC adalah:

1. Meningkatkan saling pengertian dan kerjasama antara perempuan Asean.
2. Memperkenalkan kepada anggotanya dan masyarakat umumnya tentang aspirasi dan tujuan-tujuan dari ikatan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas:

1. Diselenggarakan pertemuan-pertemuan pada waktu-waktu tertentu bagi anggotanya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial budaya dan bidang lain-lainnya yang mempunyai ciri-ciri Asean.

2. Ditingkatkan penerangan mengenai segi-segi sosial budaya negara-negara Asean.

Keanggotaan:

Anggota Asean Women Circle terdiri dari:

1. Istri Pejabat pegawai Departemen Luar Negeri RI
2. Perempuan berbangsa Asean yang bertempat tinggal di Jakarta.

3. Istri bekas Pejabat/Pegawai Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas Asean Women Circle membantu melancarkan hubungan baik antar bangsa Asean.

Walaupun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dianggap bertitik tolak pada Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1928 namun seperti diuraikan dalam bab pertama nampak kaitan yang erat dengan organisasi-organisasi perempuan Indonesia se-belum tahun tersebut, bahkan nampak pula inspirasi yang didapat dari perjuangan para perempuan pahlawan nasional Indonesia yang memberi tauladan dan dorongan kepada perempuan Indonesia untuk turut berjuang merebut kemerdekaan tanah air dan kemudian membangunnya menjadi negara dan bangsa yang makmur dan sejahtera.

Dari masa ke masa seperti dibahas dalam enam bab dari Buku ini, sejarah menunjukkan bahwa Pergerakan Wanita Indonesia merupakan bagian essensial yang tidak dapat dipisahkan dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1928, dijiwai oleh

Sumpah Pemuda, disadari pula bahwa perempuan pun harus bersatu untuk dapat menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi Pergerakan Kebangsaan Indonesia pada umumnya dan perbaikan kedudukan perempuan Indonesia pada khususnya. Sebagai langkah permulaan diselenggarakanlah Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 dengan motto “Merdeka melaksanakan Dharma”.

Walaupun melalui berbagai hambatan dan tantangan selama masa penjajahan Belanda, dan dalam suasana yang sangat terkekang pada masa pendudukan Jepang namun perempuan Indonesia secara diam-diam berhasil mempersiapkan diri untuk ikut serta mewujudkan Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu perempuan Indonesia serempak bersatu kembali dengan optilhoyan “100% merdeka, 100% berdiri di belakang Pemerintah RI”.

Semboyan tersebut tidak merupakan kata-kata hampa, tetapi langsung dilaksanakan dengan terjunnya laskar-laskar perempuan dalam perjuangan fisik di samping berjuang di garis belakang, yaitu dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam masa pembangunan, Kongres Wanita Indonesia sebagai wadah dari Kesatuan Pergerakan Wanita selalu berusaha membantu Pemerintah dalam berbagai bidang. Ketika Gerakan 30 September 1965 PKI berusaha menumbangkan Pemerintah Indonesia, Kongres Wanita Indonesia pun tidak luput dari rongrongan dan pengkhianatan melalui Gerwani sebagai kaki-tangannya PKI. Namun demikian Kongres Wanita Indonesia berhasil berbenah diri dan segera bersatu kembali.

Bertubi-tubi tantangan telah dihadapi, berbagai cobaan telah di-alami, namun Kongres Wanita Indonesia terbukti dapat mengatasi itu semua. Adalah merupakan tantangan masa depan baik bagi Pergerakan Wanita khususnya, maupun bagi perempuan Indonesia

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

umumnya untuk bersama-sama Pemerintah menjadikan kenyataan segala sesuatu yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana tercantum persamaan hak dan kewajiban bagi perempuan dan pria.

Perempuan Indonesia merasa bersyukur bahwa kedudukannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menjelang Pelita III peranannya lebih dipertegas dalam GBHN (Garin-garis Besar Haluan Negara) yang diputuskan oleh Sidang Umum MPR 1978.

Persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan bagi perempuan dan pria untuk berpartisipasi dalam Pembangunan memang mutlak diperlukan untuk terlaksananya Pembangunan yang cepat dan menyeluruh.

Akhirnya, semoga buku ini menjadi sarana untuk meningkatkan semangat joang masyarakat pada umumnya dan perempuan Indonesia serta generasi muda pada khususnya.[]

KEPUSTAKAAN

- A. Nunuk P. Murniati. 2004. *Getar Gender: Buku Pertama*. Magelang: IndonesiaTera.
- Ahmadamin. 1983. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ai Rospirawati, *Peranan Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta*. Skripsi. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.
- Ali Yafie. 1997. *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta : Tiara Anisa.
- Amin Wadud Muhsin. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Pustaka, Bandung.
- Anand Krishna. 1999. *Wedhatama Karya Sri Paduka Mangkunagoro IV Bagi Orang Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Bernard H.M. Vlekke. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. terj. Samsudin Berlian. cet. Ketiga. Jakarta: KPG.
- Bertens. 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Colin Brown. 2004. *Soekarno, Perempuan, dan Pergerakan Nasional*. terj. Tubagus Arie Rukmantara. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- Damardjati Supadjar. 1993 *Nawang Sari*. Yogyakarta: MW Mandala.
- Damardjati Supadjar. 2001. *Mawas Diri*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Darto Harnoko, dkk., 2014. *Rumah Kebangsaan; Dalem Jayadipuran Periode 1900-2014*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.
- Deddy Armand. 1993. *Cut Nyak Meutia*. cet. Kedua. Jakarta: Pustaka Kartini
- Effendi Zarkasi. 1977. *Nilai Islam dalam Pewayangan*. Jakarta: Departemen Agama.
- Franz Magnis Suseno. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Fudyartanta, 1974. *Etika Intisari Filsafat Kesusilaan dan Moral*. Yogyakarta: Warawidyani.
- G.A. Ohorella, Sri Surjiatingsih, Muchtaruddin Ibrahim. 1992. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Gandarsih. 1984. *Wanita Jawa dan Kemajuan Zaman*. Jakarta: Depdikbud.
- Hadiyah Salim. 1995. *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*. Remadja Karya, Bandung.
- Harun Hadiwiyono. 1980. *Seri Sejarah Filsafat Barat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Haryanto. 1992. *Bayang-bayang Adiluhung: Filsafat Symbolisme dan Mistik dalam Wayang*. Semarang: Dahara Prize.
- Hazim Amir. 1994. *Nilai-Nilai Etis dalam Pewayangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hendri F. Isnaeni, *Kontroversi Sang Kolaborator*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008.

- Hildred Geerts. 1986. *Perkawinan Orang Jawa*. Yogyakarta: Pembangunan.
- Jajat Burhanuddin dan Oman Fathurahman (ed). 2004. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Kamajaya. 1981. *Lima Putera-Puteri Aceh Pahlawan Nasional: Buku III*. Yogyakarta: U.P. Indonesia.
- Keith Foulcher. 2008. *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. terj. Daniel Situmorang dan Iskandar P. Nugraha. cet. Kedua. Depok: Komunitas Bambu.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- KOWANI, *Perwari*. Online: <http://www.kowani.or.id/organisasi/> 31. Akses: 2017-01-19, 00:19 WIB.
- M. Mansyur Amin (ed.). 1992. *Wanita dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasi dalam Pembangunan*. Yogyakarta: LKPSM NU DIY.
- Marbangun Hardjowirogo. 1994. *Manusia Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Martosoedono. 1992. *Wayang dan Sejarahnya*. Jakarta: Tiga Aksara.
- Meutia Hatta Swasono. *Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia*. Online: <http://www.setneg.go.id>. Akses: 2007-01-01, 01:35 WIB.
- Moh. Ardani. 1995. *Al Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV: Studi Serat-serat Piwulang*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Mohammad As'ad. 1987. *Nilai Tradisional pada Wanita Jawa Perlu Penafsiran baru*. Jakarta: Mingguan Buana Minggu.
- Muchtaruddin Ibrahim. 1996. *Cut Nyak Din*. edisi Ketiga. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Munarsih, 2004. *Serat Centhini Warisan Budaya Dunia*. Yogyakarta: GP.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

- Niels Mulder. 1983. *Kebatinan dan Hidup Seharian-harian Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Notonagoro. 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Nunus Supardi. 2007. *Kongres Kebudayaan (1918-2003): Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ong Hok Ham. 2002. *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong*. Jakarta: Kompas.
- Ong Hokham. 1983. *Rakyat dan Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan
- Otto Sukatno, 2000. *Seks Para Pangeran*. Yogyakarta : Bentang.
- Paryana Suryadipura. 1994. *Manusia dengan Atommya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paul Stange. 1998. *Politik Perhatian, Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Poedjawijatna. 1968. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Obor.
- Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pramoedya Ananta Toer, 2010. *Panggil Aku Kartini Saja*, Cet. Ke-5. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil. 1999, *Kronik Revolusi Indonesia: Bagian II (1946)*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Quraish Shihab. 1993. *Membumikan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Saparinah Sadli. 2010. *Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sartono Kartodirdjo dkk. 1986. *Segi-segi Etika dan Etiket Jawa*. Yogyakarta: UP Karyono.
- Saskia E. Wieringa. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan : Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

- Soemarsaid Moertono. 1984. *Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesenjangan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Soerjanto Poespowardojo dan K. Bertens, 1983. *Sekitar Manusia, Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: UI Press.
- Soeryanto Puspowardojo. 1993. *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Solichin Salam. 1995. *Malahayati: Srikandi dari Aceh*. Jakarta: Gema Salam.
- Steven Grosby. 2011. *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. terj. Teguh Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharti dan Pujiati Sunyata. 1982. *Pribadi Wanita Jawa Menurut Konsep Pendidikan Yang Terkandung dalam Naskah-naskah Jawa*. Jakarta: Depdikbud.
- Suhatno, *Sumbangan Wanita Yogyakarta pada Masa Revolusi*. Jurnal. Yogyakarta: Jantra, Vol. I, No. 2, Desember 2006.
- Sukanti Suryochondro, 1984. *Potret Pergerekan Wanita di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, Yayasan Ilmu Ilmu Sosial (YIIS).
- Susan Blackburn. 2007. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. terj. Koesalah Soebagyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta
- Tengku Luckman Sinar, dkk. 1982. *Seminar Sejarah Nasional III: Seksi Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- William Barret. 1962. *Irrational Man*. Anekor Books, Garden.

Perempuan dalam Gerakan Kebangsaan

Zaitunnah Subhan. 1999. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Quran*. LKIS, Yogyakarta.

Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, dan Nasruddin Sulaiman. 1993. *Cut Nyak Meutia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.